BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1288, 2021 BPS. Standar Data Statistik Nasional.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data Statistik Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

www.peraturan.go.id

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
2. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
3. Standar Data Statistik Nasional adalah basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
4. Kode Standar Data Statistik Nasional adalah kode identitas Standar Data Statistik yang bersifat unik yang memiliki arti.
5. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
6. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

www.peraturan.go.id

7. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
8. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
9. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar,peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan.
13. Variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada Kegiatan Statistik.
14. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
15. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

Pasal 2

Standar Data Statistik Nasional digunakan sebagai salah satu rujukan dan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Standar Data Statistik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

BAB I
KODE STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

Arti dan Makna Kode Standar Data Statistik Nasional (SDSN)

1. Setiap Kode Standar Data Statistik menunjukkan Jenis Indikator, Konsep, Definisi, dan Klasifikasi yang Unik dari Standar Data Statistik yang ada di dalamnya.
2. Setiap Kode Standar Data Statistik terdiri dari 10-11 karakter yang tersusun atas 1-2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indikator, diikuti 5 digit numerik yang menunjukkan nomor urut Konsep, kemudian 2 digit numerik berikutnya yang menunjukkan nomor urut Definisi pada konsep yang sama, dan 2 digit numerik terakhir yang menunjukkan nomor urut Klasifikasi pada Konsep dan Definisi yang sama.
3. Untuk format penulisan Kode Standar Data Statistik, sebagai berikut:

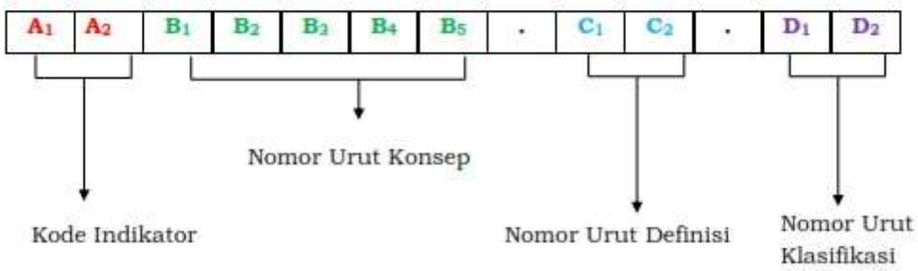

Kode Indikator	Keterangan Indikator
SD	Indikator SDGs
SP	Indikator Statistik Sosial dan Kependudukan

www.peraturan.go.id

Kode Indikator	Keterangan Indikator
ST	Indikator Statistik Pertanian (Berkaitan dengan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan)
SE	Indikator Statistik Ekonomi
UL	Indikator Umum/Lainnya (tidak diketahui/tidak mempunyai Indikator/Indikator Tertentu yang tidak dicakup di Kode Indikator SD, SP, ST, dan SE)

Catatan: Kode Indikator sebisa mungkin merupakan singkatan/akronim dari Kegiatan/Sektor Statistik yang dimaksud

Contoh:

SD00001.00.00

SP00055.00.00

SE00392.00.00

ST01246.00.00

UL17645.00.00

4. Jika Standar Data Statistik digunakan di beberapa Indikator, maka Kode SDS merujuk Standar Data Statistik dengan kode yang lebih dahulu ditetapkan/telah memiliki nomor kode.
   Contoh:
   Konsep Jenis Kelamin terdapat di Indikator SDGs (SD) dan Indikator Statistik Kependudukan (SP), karena Konsep Jenis Kelamin telah ditetapkan pertama kali menggunakan Kode SD00290.00.00, maka Konsep Jenis Kelamin pada indikator SP tetap menggunakan Kode SD00290.00.00 dengan catatan Standar Data Statistik yang digunakan untuk Konsep Jenis Kelamin tersebut sama.

5. Jika Suatu Konsep hanya memiliki satu (1) definisi maka Nomor Urut Definisinya adalah 00, tetapi jika suatu Konsep memiliki lebih dari satu (1) definisi maka Nomor Urut Definisinya diurut mulai dari 01, 02, dst.
   Contoh:

Kode SDSN	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
SD00877.01.00	Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
SD00877.02.00	Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau	Jumlah	Keluarga

www.peraturan.go.id

		mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009.	sesuai kebutuhan		

6. Jika suatu Konsep dengan Definisi tertentu hanya memiliki satu (1) klasifikasi maka Nomor Urut Klasifikasinya adalah 00, tetapi jika suatu Konsep dengan Definisi tertentu memiliki lebih dari satu (1) klasifikasi maka Nomor Urut Klasifikasinya diurut mulai dari 01, 02, dst.

   Contoh:

Kode SDSN	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
SD00282.01.01	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-Laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
SD00282.01.02	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi Berdasarkan Usia: 1. Usia 0-14 tahun 2. Usia 15-64 tahun 3. Usia 65 tahun ke atas	Jumlah; persentase	Orang; persen

7. Untuk Konsep yang memiliki lebih dari satu (1) Ukuran dan Satuan, penulisan Ukuran dan Satuan dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;). Jika satu (1) Ukuran memiliki memiliki lebih dari satu (1) Satuan, maka penulisan Satuan dipisahkan dengan tanda baca koma (,).

   Contoh:

Kode SDSN	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
SP00300.00.00	Suku	Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Suku, Orang; Persen

8. Perubahan/Pemutakhiran/Revisi pada komponen Standar Data Statistik (Konsep, Definisi, Klasifikasi, Satuan, Ukuran) yang

www.peraturan.go.id

ditetapkan sebelumnya, tidak merubah Kode Standar Data Statistik Nasional.

9. Standar Data Statistik yang dihapus/dihilangkan karena sudah tidak relevan dan/atau alasan lainnya, maka Kode Standar Data Statistik Nasionalnya tidak dapat digunakan untuk Kode Standar Data Statistik Nasional yang baru.

10. Pemberian kode Standar Data Statistik Nasional untuk Standar Data Statistik Baru melanjutkan Kode Standar Data Statistik terakhir sebelumnya dengan memperhatikan kelompok indikator (SD, SE, SP, ST, atau UL) yg bersesuaian.

A. Kaidah dan Aturan dalam Penulisan Standar Data Statistik pada Standar Data Statistik Nasional:

1. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
2. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau Variabel yang lain.
3. Yang dimaksud dengan "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" memiliki makna, sebagai berikut:
   - Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;
   - Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya digunakan/belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit untuk menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data Statistik; dan
   - Kedepannya secara bertahap istilah "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" tidak digunakan lagi sehingga klasifikasi yang ada sudah terstandardisasi untuk kebutuhan SDS.

www.peraturan.go.id

BAB II

STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	SD00562.02.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Garis kemiskinan nasional	Sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemikinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dari komoditas dalam keranjang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan Susenas modul konsumsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
2	SD00893.01.02	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Kemiskinan	Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach)	1. Head Count Index (HCI-P0) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
3	SD01490.00.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional	Jumlah pekerja dengan konsumsi perkapita < 1 PPP(Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali seratus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4	SD01525.00.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Persentase penduduk yang hidup	Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita < 1 PPP (Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dikali	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dibawah garis kemiskinan internasional	seratus.			
5	SD01738.00.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional	Persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,90 dollar AS pada PPP (Purchasing Power Parity) 2011	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
6	SD01198.00.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Tingkat kemiskinan ekstrim	Tingkat kemiskinan ekstrim pada metadata ini mengukur 2 hal, yaitu: 1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan) 2. Persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
7	SD00560.00.00	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Garis kemiskinan	Representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
8	SD00680.00.00	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
9	SD00893.02.02	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	1. Head Count Index (HCI-P0) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
10	SD00282.01.04	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
11	SD01475.00.00	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Pengeluaran	Perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.	1. Produksi Sendiri 2. Pemberian dari Pihak Lain	Nilai	Rupiah
12	SD01524.00.00	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
13	SD01254.01.02	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
14	SD00813.00.00	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Indikator Kemiskinan Multidimensi (IKM)	Indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
15	SD00895.00.00	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Kemiskinan pelbagai dimensi	Kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan asset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator.	1. Kesehatan dan Gizi 2. Pendidikan 3. Standar Hidup	Persentase	Persen
16	SD01480.00.00	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam	Persentase laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang	Banyaknya penduduk laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dalam berbagai dimensi dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional				
17	SD00298.00.00	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Penerima Program Perlindungan Sosial	Program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan tunai terkait, Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), kredit usaha, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan. Rumah tangga penerima program perlindungan sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
18	SD01507.00.00	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang	Persentase penduduk miskin dan rentan penerima manfaat	Rasio dari penerima program perlindungan sosial PBI terhadap total penduduk miskin dan rentan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan					
19	SD01667.00.00	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Program jaminan sosial	Program jaminan sosial mencakup program jaminan kesehatan, hari tua, pensiun, penganggaran, kematian dan perawatan jangka panjang, sedangkan program bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat, misalnya program PKH dan bantuan non – tunai, misalnya program bantuan sembako.	1. Jaminan kesehatan 2. Jaminan hari tua 3. Jaminan pensiun 4. Jaminan penganggaran 5. Jaminan kematian 6. Jaminan perawatan jangka panjang	Jumlah	Peserta
20	SD01746.00.00	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, penganggaran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan,	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, penganggaran,	Persentase penduduk miskin dan rentan penerima manfaat adalah rasio dari penerima program perlindungan sosial PBI terhadap total penduduk miskin dan rentan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan				
21	SD01110.00.00	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, penganggur an, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Sistem perlindungan sosial	Terdiri atas program jaminan sosial dan program bantuan sosial yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu berdasarkan pendekatan siklus hidup. Sistem perlindungan sosial mencakup dua skema pembiayaan, yaitu pembiyaaan yang bersumber dari kontribusi masyarakat, misalnya pada program - program asuransi sosial dan pembiayaan yang bersumber dari pajak, misalnya PBI dan programprogram bantuan sosial.	1. Program Jaminan Sosial 2. Program Bantuan Sosial	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
22	SD00548.00.00	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencahariandan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencahariantetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Orang; persen
23	SD00662.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta	Jaminan	Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara	1. JAMKESMAS/	Jumlah;	Kegiatan/pro

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesehatan	nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan meliputi JAMKESMAS/ JAMKESDA, Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan BPJS kesehatan.	JAMKESDA 2. Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), 3. BPJS kesehatan	Persentase	gram; Persen
24	SD00297.00.00	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
25	SD01429.00.00	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Perlindungan sosial	Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.	1. Bantuan sosial 2. Jaminan sosial	Jumlah; Persentase	Orang; persen
26	SD01767.00.00	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
27	SD01107.00.00	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakan Kerja	Jumlah; Persentase	Kegiatan/Program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Bidang Kesehatan	(SJSN)		3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiunan 5. Jaminan Kematian		
28	SD00659.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Hari Tua (JHT)	Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.	1. Saat usia pensiun 2. Saat meninggal dunia 3. Saat mengalami cacat total tetap	Jumlah; Persentase	Kepesertaan; Persen
29	SD00660.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.	1. Uang Tunai 2. Pelayanan Kesehatan	Jumlah; Persentase	Kepesertaan; Persen
30	SD00661.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Kematian (JKm)	Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.	1. Meninggal karena sakit 2. Meninggal bukan akibat kecelakaan kerja	Jumlah; Persentase	Kepesertaan; Persen
31	SD00664.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Pensiun (JP)	Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia	1. Saat usia pensiun 2. Saat meninggal dunia 3. Saat mengalami cacat total tetap	Jumlah; Persentase	Kepesertaan; Persen
32	SD00665.01.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial	Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelaka Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen
33	SD00666.01.02	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan	1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun 4. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.			
34	SD01680.00.00	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
35	SD00439.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	Merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat defisi pada SDG 6.2.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
36	SD00440.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Akses pada layanan air minum	Merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat defisi pada SDG indikator 6.1.	1. PAM 2. Mata air 3. Sumur bor 4. Sumur galian yang terlindung 5. Penampungan air hujan 6. Air kemasan	Persentase	Persen
37	SD00441.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Akses pada layanan dasar	Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu Akses pada layanan air minum,Akses pada Layanan Sanitasi Dasar, Akses pada Mobilitas Dasar, Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	1. Akses pada layanan air minum 2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar 3. Akses pada Mobilitas Dasar	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar		
38	SD00444.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Akses pada Layanan Sanitasi Dasar	Merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain. Lihat defiisi pada SDG 6.2.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
39	SD00450.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Akses pada Mobilitas Dasar	Merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan (lihat SDG 9.1.1) atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan (lihat SDG 11.2.1). Penghitungan "Akses pada Mobilitas Dasar" karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
40	SD00831.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Indikator pelayanan dasar	Merujuk pada system penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air mnium, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.	1. Air minum sanitasi dan penyehatan 2. Energi 3. Mobilitas 4. Pembuangan sampah 5. Pelayanan kesehatan 6. Pendidikan 7. Teknologi informasi.	Jumlah	Rumah tangga
41	SD00687.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	JFPD (Penduduk dengan akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar)	Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di satuan wilayah (desa) yang mempunyai fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Rumah tangga
42	SD00688.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	JPAM (Penduduk dengan akses pada layanan air minum)	Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada air minum yang bersumber dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan yang dialirkan dengan pipa. Mata air dan sumur bor/galian tersebut harus berjarak	1. PAM 2. Mata air 3. Sumur bor 4. Sumur galian yang terlindung	Jumlah	Rumah tangga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lebih > 10 meter dari tempat pembuangan limbah dan tangki septik.	5. Penampungan air hujan 6. Air kemasan		
43	SD00689.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	JPMD (Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar) di pedesaan dan perkotaan	JPMD (Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar) di Pedesaan: Jumlah penduduk yang tinggal di satuan wilayah (desa) pedesaan yang mempunyai jalan beraspal atau sirtu yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4 sepanjang tahun. JPMD (Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar) Perkotaan: Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah (desa) perkotaaan dimana terdapat jaminan pelayanan angkutan umum berbayar dengan waktu pelayanannya diketahui.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Rumah tangga
44	SD00690.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	JPSD (Penduduk dengan akses pada Layanan Sanitasi Dasar)	Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada jamban leher angsa yang berfungsi dengan pembuangan limbah tangki septik. Jamban yang digunakan merupakan jamban yang hanya digunakan oleh rumahtangga sendiri.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Rumah tangga
45	SD00282.01.04	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
46	SD01506.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persentase penduduk dengan akses pada layanan dasar	Jumlah penduduk dengan akses pada semua layanan dasar dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dikalikan seratus, dimana akses pada layanan dasar diperoleh dari JPAM (Penduduk dengan akses pada layanan air minum), JPSD (Penduduk dengan akses pada Layanan Sanitasi Dasar), JPMD (Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar) di	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pedesaan dan perkotaan, dan JFPD (Penduduk dengan akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar).			
47	SD01050.02.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
48	SD01052.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
49	SD01053.00.00	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
50	SD00406.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Bebas sewa milik orang lain (Status Penguasaan Tempat Tinggal)	Jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
51	SD00407.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa	Bebas sewa milik orang	Jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan tidak	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	tua/sanak/saudara (Status Penguasaan Tempat Tinggal)	mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk menempati tempat tinggal tersebut			Persen
52	SD00570.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Hak atas hunian terjamin	Meliputi dua subkomponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana kehadiran perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin.	1. hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah 2. persepsi sebagai hunian terjamin	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
53	SD00991.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Kontrak (Status Penguasaan Tempat Tinggal)	Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
54	SD00013.00.00	1.4.2*	Proporsi dari	Lainnya	Jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan	1. Perkotaan	Jumlah;	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	(Status Penguasaan Tempat Tinggal)	ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.	2. Perdesaan	Persentase	Tangga; Persen
55	SD60114.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Milik sendiri (Status Penguasaan Tempat Tinggal	Jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik ket atau salah satu seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
56	SD60284.02.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Penduduk dewasa	Penduduk yang bernumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang bernumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
57	SD01695.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terliti dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa, (e) lainnya.	1. Milik sendiri 2. Kontrak 3. Sewa 4. Bebas sewa milik orang lain 5. Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara 6. Rumah dinas 7. Lainnya	Persentase	Persen
58	SD01046.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Rumah dinas (Status Penguasaan Tempat Tinggal)	Jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
59	SD01098.00.00	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki	Sewa (Status Penguasaan Tempat Tinggal)	Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.					
60	SDG0415.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian bencana
61	SDG0416.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	Jumlah	Kejadian
62	SDG0418.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
63	SDG0724.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban hilang	Jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
64	SDG0725.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	Jumlah Korban hilang per 100.000	Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bencana per 100.000 orang.	orang				
65	SD00726.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
66	SD00727.00.01	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal	Jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
67	SD00728.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban meninggal per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
68	SD00729.02.01	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
69	SD00729.02.02	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	1. Korban Meninggal 2. Korban Hilang 3. Korban Terdampak	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
70	SD00731.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi)	Jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
71	SD00732.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban terkena dampak bencana (korban terluka dan korban mengungsi) dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
72	SD00733.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
73	SD00996.01.01	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Bencana	Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	1. Meninggal dan hilang 2. Luka – luka 3. Menderita dan mengungsi.	Jumlah	Orang
74	SD00997.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
75	SD01003.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per	Korban luka/sakit	Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			100.000 orang.					
76	SD00063.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Lokasi penguatan penguranga n risiko bencana daerah	Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah/lokasi
77	SD01350.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Pengungsi	Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
78	SD01036.00.00	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; Persentase	Kerugian;Persen
79	SD00415.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Bencana	peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian bencana
80	SD00722.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Jumlah Kerugian langsung bidang pertanian akibat bencana ditambah Jumlah Kerugian ekonomis langsung pada semua kerusakan dan kehancuran asset produktif akibat bencana ditambah Jumlah Kerugian ekonomis di sector perumahan akibat bencana ditambah Jumlah Kerugian ekonomis langsung diakibatkan rusak dan hancurnya infrastruktur vital akibat bencana ditambah jumlah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Kerugian ekonomis langsung akibat rusak dan hancurnya warisan budaya akibat bencana dibagi dengan PDB.			
81	SD00924.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen
82	SD00924.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
83	SD00926.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Kerugian ekonomis	Total dampak ekonomis terdiri dari kerugian ekonomis langsung dan kerugian ekonomis tak langsung.	1. Kerugian Ekonomis Langsung 2. Kerugian Ekonomis Tidak Langsung	Nilai	Rupiah
84	SD00928.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Kerugian ekonomis langsung	Nilai keuangan dari kerusakan total dan sebagian dari asset fisik di daerah terdampak. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi. Kerugian ekonomis langsung setara dengan kerusakan fisik.	1. Pemukiman 2. Infrastruktur 3. Ekonomi produktif 4. Sosial 5. Lintas sektor	Nilai	Rupiah
85	SD00929.00.00	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Kerugian ekonomis tidak langsung	Penurunan nilai tambah ekonomis sebagai akibat kerugian ekonomi langsung dan/atau dampak pada penduduk dan lingkungan.	1. Pemukiman 2. Infrastruktur 3. Ekonomi produktif 4. Sosial 5. Lintas sektor	Nilai	Rupiah
86	SD00525.00.02	1.5.3*	Rencana dan implementasi	Dokumen strategi	Dokumen yang berisi strategi dan/ atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan	1. Jakstra PB: 5 tahun 2. Renas PB dan RPBD:	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030	pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	5 tahun 3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun 4. RAN dan RAD API: 5 tahun.		
87	SD00525.00.01	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen yang berisi strategi dan / atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
88	SD00947.01.00	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bencana yang selaras dengan Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030		dapat berjalan dengan baik.	pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas		
89	SD00924.00.00	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
90	SD00213.00.00	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan Sendai Framework for Disaster	Pelayanan Dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Reduction 2015-2030					
91	SD00524.00.02	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API)	1. RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaian 2. RAD PRB: 3 tahun dan laporan pencapaian 3. RAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian	Jumlah	Dokumen
92	SD01494.00.00	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	Jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.	1. Kabupaten 2. Kota	Persentase	Persen
93	SD00879.00.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara	Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai	Keluarga miskin dan rentan (40% berpendapatan terendah) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah	Keluarga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	bersyarat/Program Keluarga Harapan				
94	SD00880.00.00	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	Keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; keluarga
95	SD00881.00.00	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Keluarga Pengguna Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; keluarga
96	SD01661.00.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial pada periode tertentu dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
97	SD01669.01.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/Keluarga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin.			
98	SD01669.02.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/Keluarga
99	SD01673.00.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
100	SD01789.00.00	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor dibagi dengan total APBN dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
101	SD01055.00.00	1.a.1*	Proporsi sumber	Rumah tangga	Keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Keluarga/Ru

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	mah Tangga; Persen
102	SD01588.00.00	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran oleh sektor pemerintah termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang berada di bawah judul pembelian pemerintah dan termasuk pengeluaran yang tidak untuk barang dan jasa, yang disebut pembayaran transfer.	Classification of the Functions of Government (COFOG)	Nilai	Rupiah
103	SD01594.00.00	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	1. APBN 2. APBD	Nilai	Rupiah
104	SD01596.00.00	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945)	1. APBN 2. APBD	Nilai	Rupiah
105	SD01601.00.00	1.a.2*	Pengeluaran untuk	Pengeluaran	meliputi:	1. Program Jaminan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	pemerintah untuk perlindungan sosial	1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN. 2. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN	Sosial 2. Program Bantuan Sosial		
106	SD01754.00.00	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
107	SD00622.01.00	10.1.1*	Rasio Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar	1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. 2. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara	Rasio	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.	orang-orang lainnya tidak memiliki apapa. Dengan kata lain, Koefisien Gini dupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.		
108	SD0062202.00	10.1.1*	Rasio Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini	Rasio Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. 2. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apapa. Dengan kata lain, Koefisien Gini dupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi	Rasio	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pendapatan antar penduduk.		
109	SD00560.00.00	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Garis kemiskinan	Representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
110	SD00893.02.02	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).	1. Head Count Index (HCI-P0) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
111	SD00285.00.00	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/ pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
112	SD01524.00.00	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			jenis kelamin dan kelompok umur.	nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
113	SD01526.00.00	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
114	SD00496.02.00	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
115	SD00498.00.00	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Desa Tertinggal	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
116	SD00703.00.00	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
117	SD00497.00.00	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa Mandiri	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Desa; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.	kebutuhan		
118	SD00697.00.00	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.	1. Indeks > 75 (Mandiri) 2. Indeks 50–75 (Berkembang) 3. Indeks < 50 (Tertinggal) (BRS ID1 2017)	Indeks	Indeks
119	SD00702.00.00	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
120	SD00464.00.01	10.1.1.(d)	Jumlah Daerah Tertinggal	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
121	SD00696.00.00	10.1.1.(d)	Jumlah Daerah Tertinggal	Jumlah Daerah Tertinggal	Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
122	SD00511.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata	Aksesibilitas	Terdiri dari indikator:	1. Sangat mudah	Jarak;	Km; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		- Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi; - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km; dan - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar	dijangkau 2. Cukup mudah dijangkau 3. Sulit dijangkau 4. Sangat sulit dijangkau	Persentase	
123	SD00519.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
124	SD00464.00.01	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
125	SD00789.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Karakteristik Daerah	Terdiri dari indikator: - Persentase Desa Gempa Bumi: Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% -Persentase Desa Tanah Longsor: Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% -Persentase Desa Banjir: Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. - Persentase Desa Bencana Lainnya: Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% - Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung: Jumlah desa yang memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100% - Persentase Desa Berlahan Kritis: Jumlah desa yang memiliki lahan kritis di bagi dengan 100%. - Persentase Desa Konflik satu tahun terakhir: Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100%			
126	SDG07990.00.00	10.1.1.je)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Karakteristik Daerah Tertinggal	Kriteria karakteristik daerah tertinggal meliputi: - jumlah desa tertinggal -daerah rawan pangan -daerah perbatasan -daerah rawan bencana -daerah pasca konflik -daerah pulau kecil dan terluar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
127	SDG09960.00.00	10.1.1.je)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melaksakan pembangunan di daerahnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
128	SDG02986.00.00	10.1.1.je)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
129	SDG15237.00.00	10.1.1.je)	Rata-rata pertumbuhan	Pengeluaran konsumsi per	Jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ekonomi di daerah tertinggal.	kapita	salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.	kebutuhan		
130	SD01396.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Perekonomian Masyarakat	Terdiri dari indikator Persentase penduduk miskin dan Pengeluaran konsumsi per kapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
131	SD01397.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Perekonomian Masyarakat Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Persentase Penduduk Miskin - Pengeluaran konsumsi per kapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
132	SD01595.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
133	SD01595.02.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pertumbuhan Ekonomi	Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
134	SD01204.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian antara penjumlahan pertumbuhan ekonomi dari n daerah tertinggal dengan banyaknya daerah tertinggal.	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Persentase	Persen
135	SD01072.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					- Persentase rumah tangga pengguna telepon - Persentase rumah tangga pengguna listrik -Persentase rumah tangga pengguna air bersih -Persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen -Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk - Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk -Jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk			
136	SD01150.00.00	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Angka Harapan Hidup - Rata-Rata Lama Sekolah - Angka Melek Huruf.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
137	SD00464.00.01	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
138	SD00893.02.02	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	1. Head Count Index (HCI-P0) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)		
139	SD00286.00.00	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
140	SD01508.00.00	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Persentase	Persen
141	SD00513.01.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Disabilitas	Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (reading difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects).	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari	Jumlah	Kasus
142	SD00088.00.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	Median pengeluaran per kapita	Nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran per kapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.					
143	SD00271.01.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Pendapatan/Penghasilan	Meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1.untuk jam kerja biasa atau untuk pekrjaan yang telah diselesaikan, dan 2.untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
144	SD00287.00.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
145	SD01742.00.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran perkapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			difabilitas.	menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari		
146	SD01743.00.00	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran perkapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
147	SD00814.00.01	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, penguranganan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun koletif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Asasi Manusia					
148	SD01745.00.00	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasik an atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
149	SD00425.00.00	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.	Berkumpul	Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang.	1. Rapat 2. Rapat Umum 3. Mogok 4. Konser Musik 5. Rapat Akbar (di lapangan) 6. Kegiatan Peribadatan	Jumlah	Aktivitas
150	SD00426.02.00	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.	Berserikat	Mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
151	SD00621.02.00	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	(BRS IDI 2017)		
152	SD00875.00.02	10.3.1.ja)	Indeks Kebebasan.	Indeks Kebebasan.	Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial	1. Kebebasan berkeyakinan 2. Kebebasan berkumpul 3. Kebebasan berpendapat 4. Kebebasan berserikat 5. Kebebasan dari diskriminasi	Indeks	Indeks
153	SD00829.00.00	10.3.1.ja)	Indeks Kebebasan	Kebebasan Berkeyakinan	Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
154	SD00830.00.00	10.3.1.ja)	Indeks Kebebasan	Kebebasan Berkumpul	hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
155	SD00832.01.00	10.3.1.ja)	Indeks Kebebasan.	Kebebasan Berpendapat	Kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
156	SD00833.00.00	10.3.1.ja)	Indeks Kebebasan.	Kebebasan Berserikat	Hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					secara sukarela.	kebutuhan		
157	SD008334.00.00	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan,	Kebebasan dan Diskriminasi	Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
158	SD003568.00.00	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Hak Asasi Manusia (HAM)	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri 4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak	Persentase	Persen
159	SD006694.00.00	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Berkas; Kasus
160	SD006752.00.00	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Manusia (HAM)				
161	SD00212.00.00	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
162	SD01799.00.00	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia	Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran HAM meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.	1. Terselesaikan 2. Tidak terselesaikan	Jumlah	Kasus
163	SD00569.00.00	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Hak Asasi Perempuan	Hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
164	SD00751.00.00	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	1. Terselesaikan 2. Tidak terselesaikan	Jumlah	Kasus
165	SD00865.00.01	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.	1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga 2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas 3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara	Jumlah	Kasus
166	SD00250.00.00	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan	Semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	1. Terselesaikan 2. Tidak terselesaikan	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
167	SD00514.00.02	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya	1. Agama 2. Suku 3. Ras/etnik 4. Kelompok/golongan 5. Status sosial/ekonomi 6. Jenis kelamin 7. Bahasa 8. Keyakinan politik	Jumlah	Kasus
168	SD00720.02.02	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah Kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir	1. Agama 2. Suku 3. Ras/etnik 4. Kelompok/golongan 5. Status sosial/ekonomi 6. Jenis kelamin 7. Bahasa 8. Keyakinan politik	Jumlah	Kebijakan
169	SD00840.00.01	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan yang Diskriminatif	Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif	1. Agama 2. Suku 3. Ras/etnik 4. Kelompok/golongan 5. Status sosial/ekonomi 6. Jenis kelamin 7. Bahasa 8. Keyakinan politik	Jumlah	Kebijakan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.			
170	SD01796.00.00	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
171	SD01140.00.00	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	Subsidi	Semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
172	SD01264.00.00	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	Upah	Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
173	SD00665.02.00	10.4.1.jii)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial	Jaminan Sosial	Bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian.	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pemerintah pusat.			4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian		
174	SD01429.00.00	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Perlindungan Sosial	Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.	1. Bantuan sosial 2. Jaminan sosial	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen
175	SD01541.00.00	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja emerintah pusat dan dikalikan 100 persen.	1. Bantuan sosial 2. Jaminan sosial	Persentase	Persen
176	SD01663.00.00	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Program Bantuan Sosial	Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
177	SD00666.01.01	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Hari Tua (JHT) 3. Jaminan Pensiun (JP) 4. Jaminan Kematian (JKm)	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.			
178	SD01769.00.00	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Hari Tua (JHT) 3. Jaminan Pensiun (JP) 4. Jaminan Kematian (JKm)	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen
179	SD00557.01.00	10.5.1	Financial Soundness Indicator (FSI)	Financial Soundness Indicator (FSI)	Indikator kesehatan keuangan (FSI) memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan dan kesehatan lembaga keuangan suatu negara serta sektor perusahaan dan rumah tangga. FSI mendukung analisis stabilitas ekonomi dan keuangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
180	SD00557.02.00	10.5.1	Financial Soundness Indicator (FSI)	Financial Soundness Indicator (FSI)	Indikator terkini tingkat kesehatan sektor keuangan suatu negara yang disajikan secara komprehensif, sekaligus menggambarkan kondisi Perusahaan dan Rumah Tangga selaku counterpart-nya. Indikator FSI mencakup indikator utama yang menggambarkan tingkat kesehatan sektor perbankan, dan indikator pendukung yang menyajikan indikator kesehatan sektor perbankan lainnya serta indikator lainnya yang berdampak terhadap kesehatan sektor keuangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
181	SD00371.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Asset	Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu.	1. Aset lancar 2. Aset tetap	Persentase	Persen
182	SD00823.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan	Indikator	Indikator yang mengukur tingkat kesehatan sektor	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Perbankan	Kesehatan Perbankan	perbankan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
183	SD00151.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Nonperforming loans	Kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancer, diragukan atau macet, sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
184	SD00153.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Nonperforming loans to total gross loans	Indikator proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
185	SD01288.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Regulatory Tier 1 capital to risk- weighted assets	Indikator yang mengukur tingkat ketahanan perbankan dalam neraca.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
186	SD01346.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Return on assets	Indikator profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya.	1. Aset lancar 2. Aset tetap	Persentase	Persen
187	SD01038.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Risk- weighted assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang termasuk aktiva berisiko (risk assets) adalah semua aktiva/aset bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah. ATMR yang digunakan dalam perhitungan kewajiban penyediaan moda minimum (KPMM) sesuai ketentuan Bank Indonesia, terdiri dari ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
188	SD01225.00.00	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Total gross loans	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
189	SD00125.00.00	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara	Negara Berpenghasilan	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/ tahun perkapita	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Menengah (Middle Income Countries)				
190	SD00126.00.00	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$/ tahun perkapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
191	SD00133.00.00	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
192	SD00170.00.00	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Organisasi Internasional	Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
193	SD01689.00.00	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
194	SD00433.00.00	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang	Biaya Rekruitment	Biaya yang terjadi dalam proses rekrutmen agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara ujuan.		terlepas dari cara, waktu atau lokasi. Ini sama dengan jumlah yang harus dibayar pekerja migran dan / atau keluarga mereka untuk menemukan, memenuhi syarat untuk, dan mendapatkan tawaran kerja nyata dari majikan asing dan untuk mencapai tempat pekerjaan untuk pekerjaan pertama di luar negeri.	kebutuhan		
195	SD00271.02.00	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara ujuan.	Pendapatan/Penghasilan	Pendapatan aktual yang diterima untuk bulan terakhir di pekerjaan pertama di negara tujuan, termasuk bonus dan penghasilan lainnya (misalnya untuk kerja lembur). Penyesuaian harus dilakukan untuk setiap pengurangan pajak negara tujuan dan sosial kontribusi keamanan, serta untuk setiap pengurangan upah yang dilakukan untuk memulihkan biaya rekrutmen awalnya dibayar oleh majikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
196	SD01691.00.00	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
197	SD00838.00.00	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Kebijakan Migran	Sejauh mana migran memiliki kesamaan dalam akses kelayanan, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial dan manfaat kesejahteraan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
198	SD00132.00.00	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				baik				
199	SD060705.00.00	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara Indonesia dengan negara tujuan penempatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
200	SD060943.00.00	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Ketenagakerjaan	Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
201	SD060200.01.00	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Pekerja Migran Indonesia	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	1. Pekerja migran internal 2. Pekerja migran internasional.	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
202	SD011173.00.00	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan					
203	SD00708.00.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Fasilitas
204	SD00200.01.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Pekerja Migran Indonesia	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah	1. Pekerja migran internal 2. Pekerja migran internasional.	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
205	SD00292.00.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Penempatan pekerja migran Indonesia	Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.	1. Pekerja migran internal 2. Pekerja migran internasional.	Jumlah	Lokasi penempatan
206	SD00293.00.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Penempatan TKI	Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lokasi; Persen
207	SD01172.00.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi	Tenaga kerja	Warga negara asing pemegang visa dengan maksud	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	asing	bekerja di wilayah Indonesia.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
208	SD01173.00.00	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
209	SD00431.00.00	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD/kg
210	SD01163.00.00	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. $ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
211	SD00225.00.00	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan,	Pembangunan Nasional	Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terpilah berdasarkan negara negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).		sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
212	SD01217.00.00	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
213	SD01692.00.00	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dikirimkan.	dikirimkan				
214	SD01327.00.00	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Remitansi	Bagian dari gaji/penghasilan yang dikirimkan kepada keluarganya di luar negeri (home country).	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
215	SD01327.03.00	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Remitansi	Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
216	SD00457.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Daerah kumuh	Daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Daerah/Kawasan
217	SD00460.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
218	SD01431.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Permukiman Kumuh	Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Permukiman; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).			
219	SD01432.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Permukiman Liar	Permukiman yang dibangun secara tidak resmi (liar) pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Permukiman; Persen
220	SD01771.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
221	SD01057.00.00	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Rumah tidak layak huni	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber	Tidak layak huni: 3 indikator atau lebih	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu: 1. Sufficient living area Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m2 karena tidak memenuhi sufficient living area atau kecukupan luas lantai hunian. 2. Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya. 3. Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah bambu atau lainnya. 4. Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya. 5. Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak. 7. Sumber utama penerangan Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber			

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					utama penerangan rumah tangga adalah non listrik. Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.			
222	SDG0596.00.00	11.1.1.a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Hunian Terjangkau	Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
223	SD01550.00.00	11.1.1.a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
224	SDG1047.01.01	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Rumah layak huni	Rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasar 7 (tujuh) indikator pembentuk berikut: 1. Luas lantai per kapita 2. Air minum layak 3. Santasi Layak 4. Jenis atap terluas 5. Jenis lantai terluas 6. Jenis dinding terluas 7. Sumber penerangan listrik	1. Layak huni (maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik) 2. Rawan layak huni (ada tiga indikator pembentuk yang kurang baik)	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen
225	SDG1048.00.00	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan	Rumah layak huni dan terjangkau	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terjangkau			15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						94. Papua		
226	SD000680.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
227	SD000898.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; persentase	Kendaraan; Persen
228	SD000945.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Keterbatasan Fisik	Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
229	SD000946.00.00	11.2.1	Proporsi populasi	Keterbatasan	Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan	1. Perkotaan;	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Intelektual	di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.	2. Perdesaan		
230	SD00948.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Keterbatasan Mental	Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
231	SD00949.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Keterbatasan Sensorik	Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
232	SD01811.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman	Pengguna Jasa	Setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Pengguna; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas					
233	SD01365.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/Penyandang; Persen
234	SD01529.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
235	SD01533.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan	Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitasi sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas				
236	SD01775.00.00	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
237	SD01243.00.02	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	1. Darat 2. Laut 3. Udara	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen
238	SD01244.00.03	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi	Transportasi Publik/Umum	Jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang dibaruskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.	1. Bus. 2. Transportasi berbasis rel kereta 3. Ojek	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas			4 Becak dan becak otomatis. 5. Taksi. 6. Kapal penumpang		
239	SD00363.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Angkutan Umum	Jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan	Jumlah; Persentase	Jenis Angkutan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
240	SD060814.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Kawasan Perkotaan Besar	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
241	SD060898.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; Persentase	Kendaraan; Persen
242	SD031420.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Perkeretapian	Kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Sistem; Persen
243	SD031421.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Perkeretapian Perkotaan	Penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau	Jumlah; persentase	Sistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						94. Papua		
244	SD01774.00.00	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
245	SD01245.00.04	11.2.1.jpj	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Transportasi Umum	Moda angkutan umum massal dan moda perkeretapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
246	SDG0363.00.00	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Angkutan Umum	Jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali	Jumlah; Persentase	Jenis Angkutan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
247	SD00814.00.00	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Kawasan Perkotaan Besar	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
248	SD00898.00.00	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; Persentase	Kendaraan; Persen
249	SD01420.00.00	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Perkeretaapian	Kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Sistem; Persen
250	SD01421.00.00	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Perkeretaapian Perkotaan	Penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara	Jumlah; persentase	Sistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					administrasi maupun lebih.	13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
251	SD01510.00.01	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Perbandingan jumlah penduduk yang menggunaan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
252	SD01245.00.04	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Transportasi Umum	Moda angkutan umum massal dan moda perkeretapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
253	SD00986.00.00	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	Konsumsi Lahan	Perluasan area yang dibangun yang dapat diukur secara langsung, Luasan absolut dari tanah yang dapat dieksproitasi di bidang pertanian, kehutanan atau kegiatan ekonomi lainnya, dan eskploitasi tanah yang terlalu intensif yang digunakan untuk pertanian dan kehutanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; persentase	Hektar; persen
254	SD00020.00.00	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
255	SD01830.00.00	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk				
256	SD090311.00.00	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Lahan Terbangun	Area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen.	1. Permukiman 2. Jaringan Jalan 3. Jaringan Jalan Kereta Api 4. Bandar Udara 5. Pelabuhan laut	Luas	Hektar (Ha)
257	SD090014.00.00	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Laju Perluasan Lahan Terbangun	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air.	1. Permukiman 2. Jaringan Jalan 3. Jaringan Jalan Kereta Api 4. Bandar Udara 5. Pelabuhan laut	Persentase	Persen
258	SD090022.00.00	11.3.1.(a)	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini diyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
259	SD01831.00.00	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
260	SD00082.00.00	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung	Manajemen Perkotaan	Para pejabat, termasuk pejabat terpilih dan pegawai negri, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kota, lintas semua sektor, seperti jalan, air, sanitasi, energi,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis		ruang publik, sertifikat tanah, dll.			
261	SD00096.00.00	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Masyarakat Sipil	Kombinasi organisasi pemerintah, non pemerintah, kelompok masyarakat, berbasis organisasi masyarakat, organisasi perwakilan regional, serikat pekerja, lembaga penelitian, badan profesional, dan kelompok lain yang mewakili minat dan keinginan anggota dan komunitas yang lebih luas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Organisasi; Kelompok; Persen
262	SD01491.00.00	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Perencanaan Kota	Proses teknis dan politik yang menyangkut pengembangan dan penggunaan tanah, bagaimana lingkungan alami digunakan, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
263	SD01712.00.00	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis				
264	SD01604.00.00	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang dperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	Pengeluaran per Kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
265	SD01234.00.00	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang dperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan	**Indikator global yang memiliki prokal dan akan dikembangkan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Purchase Power Parity, PPP)				
266	SD00980.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Konservasi Warisan Alam	Langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Konservasi; Persen
267	SD00981.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Konservasi Warisan Budaya	Langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Konservasi; Persen
268	SD01423.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Perlindungan	Proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Perlindungan ; Persen
269	SD01634.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang	Preservasi	Upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Preservasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)		sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya.	kebutuhan		
270	SD01218.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Total anggaran untuk preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam perkapita	Jumlah semua anggaran yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi warisan budaya termasuk (warisan budaya benda dan tak benda) dan warisan alam dibandingkan jumlah total penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Pesentase	Rupiah; Persen
271	SD01235.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Jumlah anggaran terkait preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya dan alam yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama, dinyatakan dalam satuan Rupiah perkapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai, Pesentase	Rupiah, Persen
272	SD01299.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi,	Warisan Alam	Bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Warisan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)					
273	SD01300.01.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Warisan Budaya	Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang.	1. Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) 2. Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah; Persentase	Warisan; Persen
274	SD01301.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya)	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang berlokasi di darat maupun perairan serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Warisan; Persen
275	SD01303.00.00	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Warisan Budaya Tak Benda	Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keahlian maupun alat, objek, artifak dan ruang budaya milik komunitas, kelompok maupun individu yang merupakan bagian dari budaya mereka.	1. Tradisi Lisan dan Ekspresi (bahasa, puisi, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat, peribahasa, teka-teki rakyat, pertunjukan dramatik, dll) 2. Seni Pertunjukan 3. Adat Istiadat	Jumlah; Persentase	Warisan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Masyarakat 4. Ritual 5. Perayaan-perayaan 6. Pengetahuan dan kKebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta 7. Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional		
276	SD01304.00.00	11.4.1.ja)	Total pengeluaran per kapita yang dipergunakan untuk pre servasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Warisan Campuran	Suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu kesatuan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Warisan; Persen
277	SD00415.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
278	SD00416.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan	Jumlah	Kejadian

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. Tanah Longsor		
279	SD00417.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bencana Nonalam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	1. gagal teknologi 2. gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah penyakit	Jumlah	Kejadian
280	SD00418.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
281	SD00729.01.01	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
282	SD00729.01.02	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.	1. Korban Meninggal 2. Korban Hilang 3. Korban Terdampak	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
283	SD00996.01.02	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Bencana	Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
284	SD00996.02.01	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Bencana	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	1. Meninggal dan hilang 2. Luka – luka 3. Menderita dan mengungsi.	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen
285	SD00996.02.02	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Bencana	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen
286	SD00997.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
287	SD01003.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban luka/sakit	Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
288	SD01004.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Meninggal	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	1. Meninggal di tempat 2. Meninggal setelah dirawat	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
289	SD01008.00.00	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban Terdampak	Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi.	1. Korban Terluka/Sakit 2. Korban Mengungsi	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
290	SD01350.00.00	11.5.1*	Jumlah korban	Pengungsi	Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Orang/pengu

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.	analisis atau sesuai kebutuhan	persentase	ngsi; persen
291	SD00415.00.00	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
292	SD00958.00.00	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Infrastruktur Kritis	Aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan diantaranya.	1. Pertahanan keamanan 2. Energi 3. Transportasi 4. Sistem keuangan 5.Berbagai layanan publik lainnya.	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen
293	SD00924.00.00	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terhadap pelayanan dasar					
294	SD00925.00.00	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
295	SD00213.00.00	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Pelayanan Dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
296	SD01654.00.01	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana	Produk Domestik Bruto (PDB)	Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB)Atas Dasar	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar		yang diterima oleh factor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Harga Konstan (ADHK)		
297	SD00415.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
298	SD00416.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	Jumlah	Kejadian
299	SD00417.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Bencana Nonalam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	1. gagal teknologi 2. gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah penyakit	Jumlah	Kejadian
300	SD00418.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
301	SD00924.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
302	SD00263.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Pendapatan Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
303	SD01709.00.00	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi PDB tahun yang sama dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan persen (%).	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
304	SD00357.00.00	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Limbah Padat Perkotaan	Sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
305	SD00248.00.00	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat	Penanganan Limbah Padat Perkotaan	Upaya penanganan limbah padat domestik di rumah sakit yang memenuhi standar untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, kenyamanan dan kelestarian yang ditimbulkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota					
306	SD01721.00.00	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
307	SD00251.02.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Penanganan Sampah	Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
308	SD01461.01.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah	Pengelolaan	Perlakuan terhadap sampah yang biasa dilakukan,	1. Pengurangan	Jumlah;	Kegiatan,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	sampah	perilaku pemilahan sampah, perlakuan terhadap barang bekas layak pakai, serta kebiasaan membeli produk isi ulang.	Sampah 2. Penanganan Sampah	Persentase	Tonase; Persen
309	SD01461.02.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Pengelolaan Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Jumlah; Persentase	Kegiatan, Tonase; Persen
310	SD01353.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Pengurangan Sampah	Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah, pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah	1. Pembatasan timbunan sampah 2. Pendauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah	Jumlah; persentase	Metrik Ton; Persen
311	SD01353.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Pengurangan Sampah	Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah	1. Pembatasan timbunan sampah 2. Pendauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah	Jumlah; persentase	Metrik Ton; Persen
312	SD01543.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Jumlah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
313	SD01063.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
314	SD01063.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
315	SD01066.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Sampah Rumah Tangga	Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
316	SD01066.00.00	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Sampah Rumah Tangga	Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
317	SD00251.02.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Penanganan Sampah	Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
318	SD01461.02.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Pengelolaan Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Jumlah; Persentase	Kegiatan, Tonase; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
319	SD01353.00.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Penguranga n Sampah	Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah	1. Pembatasan timbuan sampah 2. Pendauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah	Jumlah; persentase	Metrik Ton; Persen
320	SD01574.00.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persentase sampah nasional yang terkelola	Banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan.	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Persentase	Persen
321	SD01063.00.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
322	SD01066.00.00	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Sampah Rumah Tangga	Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
323	SD00460.00.00	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
324	SD00182.00.00	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Partikulat	Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	µgram/m3
325	SD01215.00.00	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan	Rata-rata tahunan materi partikular	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	1. Sehat (NAB PM10 ≤ 150 ugram/m3) 2. Tidak Sehat (NAB PM10 > 150 ugram/m3)	Nilai	µgram/m3

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(dibobotkan jumlah penduduk)	bahan (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)				
326	SD00183.00.00	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat bahan PM 10	Partikulat Bahan PM 10	Partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron. Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara. NAB PM10 sebesar 150 µgram/m3. Jika nilai PM10 melewati ambang batas tersebut, maka kualitas udara tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sehat.	1. Sehat (NAB PM10 ≤ 150 µgram/m3) 2. Tidak Sehat (NAB PM10 > 150 µgram/m3)	Nilai	µgram/m3
327	SD01219.00.00	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat bahan PM 10	Rata-rata tahunan materi partikulat bahan PM 10	Rata-rata tahunan PM 10 di perkotaan per jumlah penduduk.	1. Sehat (NAB PM10 ≤ 150 ugram/m3) 2. Tidak Sehat (NAB PM10 > 150 ugram/m3)	Nilai	µgram/m3
328	SD00674.01.01	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
329	SDG0674.01.02	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota.	1. Sangat Baik (100 > I > 90) 2. Baik (90 > I > 70) 3. Cukup (70 > I > 50) 4. Kurang (50 > I > 30) 5. Sangat Kurang (30 > I > 0)	Indeks	Indeks
330	SDG0674.02.02	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai tanpa satuan yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas	1. Sangat Baik (100 > I > 90)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					udara, berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) polusi udara yang berhubungan menjadi satu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.	2. Baik (90 > I > 70) 3. Cukup (70 > I > 50) 4. Kurang (50 > I > 30) 5. Sangat Kurang (30 > I > 0)		
331	SD01365.00.00	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/Penyandang; Persen
332	SD01778.00.00	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
333	SD01040.00.00	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok	Ruang Terbuka Hijau	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Area; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas					
334	SD00653.00.01	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	1. Jalan Arteri 2. Jalan Kolektor 3. Jalan Lokal, 4. Jalan Lingkungan 5. Jalur Sepeda 6. Pedestrian	Jumlah; Persentase	Jalan; Persen
335	SD00800.00.00	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Kawasan Budi Daya	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.	1. Kawasan Hutan Produksi 2.Kawasan Hutan Rakyat 3. Kawasan Pertanian, 4. Kawasan Pertambangan 5. Kawasan Peruntukan Industri 6. Kawasan Peruntukan Pariwisata 7. Kawasan Peruntukan Permukiman	Jumlah; Persentase	Kawasan; Persen
336	SD00812.00.00	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Kawasan Perkotaan	Kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.	1. Kawasan Lindung (Lahan Tidak Terbangun) 2. Kawasan Budi Daya (Lahan Terbangun)	Jumlah; Persentase	Kawasan; Persen
337	SD01779.00.00	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Perbandingan luasan ruang terbuka perkotaan (RTH, RTNH dan jalan) dibandingkan dengan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
338	SD01039.00.00	11.7.1.ja)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Ruang Publik	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka	1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)	Jumlah; Persentase	Area; Persen
339	SD01041.00.00	11.7.1.jb)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH yang dimaksudkan dalam perhitungan adalah RTH publik dan RTH privat dengan pertimbangan beberapa RTH privat juga dapat diakses semua orang, walaupun aksesnya lebih terbatas daripada RTH publik.	1. Taman 2. Taman Hutan Raya (Tahura) 3. Jalur Sempadan Sungai 4. Lainnya	Jumlah; Persentase	Area; Persen
340	SD01043.00.00	11.7.1.jc)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)	Ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTNH memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, hingga kedaruratan.	1. Lahan Parkir 2. Alun-Alun 3. Jalan 4. Plasa 5. Lapangan Olahraga 6. Lainnya	Jumlah; Persentase	Area; Persen
341	SD01044.00.00	11.7.1.jd)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Ruang Terbuka Perkotaan	Lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Area; Persen
342	SD00680.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
343	SD00858.01.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Kejahatan Kekerasan	Tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; persentase	Kasus; persen
344	SD01002.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
345	SD00219.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
346	SD00258.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti	1. Perampokan 2. Penodongan 3. Pemalakan 4. Penjambretan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)		dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (tergopki) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu tempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.			
347	SD01375.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	1. Pemukulan 2. Penamparan 3. Pengeroyokan	Jumlah; persentase	Orang; persen
348	SD01365.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penih dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/Penya ndang; Persen
349	SD01732.00.00	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)				
350	SD00858.02.00	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Kejahatan Kekerasan	Semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
351	SD01001.00.02	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Korban Kejahatan Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan.	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
352	SD00219.00.00	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Pelecehan Seksual	Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.			
353	SD00258.00.00	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya.	1. Perampokan 2. Penodongan 3. Pemalakan 4. Penjambretan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
354	SD01375.00.00	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	1. Pemukulan 2. Penamparan 3. Pengeroyokan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
355	SD01748.00.00	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
356	SD00741.00.00	11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.				
357	SDG0776.00.00	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga setiap program pembangunan harus memiliki kajian yang mendalam terkait aspek lingkungan. KLHS juga dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan program perencanaan di masa depan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
358	SD01731.00.00	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang dilengkapi KLHS dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk di kotakota yang telah memiliki RTRW yang terintegrasi KLHS terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Satuan yang digunakan adalah persentase (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				KLHS				
359	SD01340.00.00	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
360	SD00522.00.01	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API).	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
361	SD01335.00.00	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi penanggulangan bencana tingkat nasional (RPB, Renas PB, dan/atau RAN API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi penanggulangan bencana di tingkat nasional pada tahun berjalan.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
362	SD00521.00.01	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana (PB) Tingkat Daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
363	SDG02.39.02.00	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana					
364	SID1493.00.00	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penguranganan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
365	SD01449.00.00	11.c.1.4a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Persentase daerah yang memiliki perda bangunan Gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal dinyatakan dalam perbandingan jumlah daerah yang telah memiliki peraturan terkait bangunan Gedung hijau terhadap jumlah seluruh daerah. Satuan yang digunakan adalah persentase (%).	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
366	SD09518.00.00	12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP).	Dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait.	1. ecolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and green public procurement 2. industry hijau (green industry) 3. bangunan ramah lingkungan (green building) dan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction) 4. pariwisata ramah lingkungan (sustainable tourism dan sustainable	Jumlah; persentase	Dokumen; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tourism awards / ISTA) 5. pengelolaan limbah dan sampah (waste management) 6. energi baru terbarukan, efisiensi energi 7. pelabuhan berkelanjutan (sustainable port / green port) 8. komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT) 9. inovasi dan teknologi hijau (green technology) 10. keuangan berwawasan lingkungan (sustainability finance) 11. pertanian dan ISPO 12. perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) 13. kehutanan dengan jasa lingkungan, SVLK, SILIN, HHK, HHBK, hutan tanaman energi.		
367	SDG1336.00.00	12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen hukum (peraturan/keputusan) terkait dengan pengembangan instrumen/kolaborasi program yang disusun, telah disiskan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya usaha-usaha	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	pengoordinasian dalam mengembangkan, mengadopsi, atau mengimplementasi instrument-instrumen kebijakan yang bertujuan kepada pelaksanaan produksi dan konsumsi berkelanjutan.			
368	SD00675.00.00	12.2.1	Jejak material (material footprint)	Jejak Material (material footprint)	Jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	MF per kapita; Persen
369	SD00988.00.00	12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)	Jumlah sebenarnya bahan dalam perekonomian. Jumlah bahan yang digunakan dalam perekonomian nasional, menyajikan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi, yang baik ditambahkan ke saham bahan bangunan dan infrastruktur transportasi atau digunakan untuk bahan bakar ekonomi sebagai throughput yang materia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Material; Persen
370	SD00003.00.00	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
371	SD01015.00.00	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	Indeks Kehilangan Makanan Global	Ukuran totalitas kerugian yang terjadi dari waktu pencatatan produksi pertanian hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Dihitung secara kuantitas, kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan (dalam kkal) per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian diindeks.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
372	SD00056.00.00	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Limbah padat kota	Limbah yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, dan perdagangan, usaha kecil, gedung perkantoran dan lembaga (sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah). Ini juga termasuk limbah besar (mis. Perabot lama, kasur) dan limbah dari layanan kota tertentu, mis., Limbah dari wadah, limbah pembersih pasar), jika dikelola sebagai sampah/limbah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
373	SD00080.00.00	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Makanan	Segala zat, apakah diproses, setengah diproses, atau mentah - yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia; termasuk minuman dan zat apa pun yang telah digunakan dalam pembuatan. Makanan juga termasuk bahan yang telah rusak dan karenanya tidak lagi layak untuk dikonsumsi manusia, tetapi, TIDAK termasuk kosmetik, tembakau, atau zat yang hanya digunakan sebagai obat. Itu tidak termasuk agen pengolahan yang digunakan sepanjang rantai pasokan makanan, misalnya, air untuk membersihkan atau memasak bahan baku di pabrik atau di rumah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Berat	Kg
374	SD01578.00.00	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Persentase sisa makanan	Persentase sisa makanan adalah jumlah sisa makanan dibagi dengan total sampah dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
375	SD01380.00.00	12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Indikator ini tercapai melalui peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya yang ditunjukan dengan adanya peraturan atau kebijakan yang sah saat dilakukan pengumpulan data. Hal tersebut menjadi indikasi adanya usahausaha pengoordinasian dalam mengembangkan, mengadopsi, atau mengimplementasi kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kesepakatan
376	SD01840.00.00	12.4.1.(a)	Persentase	Penghapusan	Upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Merkuri	Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.	analisis atau sesuai kebutuhan		
377	SD01352.00.00	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Pengurangan Merkuri	Upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
378	SD01530.00.00	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri dihitung dari jumlah pengurangan dan penghapusan Merkuri tahun berjalan dibagi dengan jumlah baseline Merkuri yang telah ditetapkan dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
379	SD01351.00.00	12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Pengurangan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO)	Berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
380	SD01532.00.00	12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Jumlah penurunan konsumsi perusak ozon tahun berjalan dibagi dengan baseline yang ditetapkan dikali dengan seratus yang dinyatakan dengan satuan persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
381	SD00004.00.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita;	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	(b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.			
382	SD00004.00.01	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
383	SD00380.00.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
384	SD00050.00.01	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	1. Limbah B3 dari Sumber Spesifik 2. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik 3. Limbah B3 dari B3 yang Sudah Kadaluwarsa, Tumpah dan Bekas Kemasan B3	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
385	SD00050.00.02	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
386	SD00054.01.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
387	SD00054.02.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani /	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Terkelola Sesuai	Jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Peraturan Perundangan				
388	SD01194.00.00	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
389	SD00486.00.00	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Daur Ulang	Proses pengolahan sampah menghasilkan produk baru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Ton; persen
390	SD00770.00.01	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
391	SD007700.00.02	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
392	SD011890.01.00	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Timbunan Sampah	Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari atau perluas bangunan atau perpanjangan jalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
393	SD000250.00.00	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan	Laporan Berkelanjutan Perusahaan	Laporan yang tidak terbatas pada keberlanjutan laporan perusahaan itu sendiri tetapi juga informasi berkelanjutan seperti, keberlanjutan penerbitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Laporan/Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			keberlanjutannya		informasi sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan atau melaporkan informasi kepada pemerintah nasional.			
394	SD00026.00.00	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)	Laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan, atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Laporan/Dokumen
395	SD01603.00.00	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Indikator ini terpenuhi jika perusahaan telah melaporkan laporan keberlanjutannya kepada pihak yang berwenang atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan informasi tersebut. Informasi keberlanjutan perusahaan diterbitkan dengan memenuhi aspek-aspek yang diwajibkan (persyaratan minimum).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahan
396	SD01605.00.00	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Perusahaan; Persen
397	SD01095.00.00	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Sertifikasi SNI ISO 14001	Standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sertifikat; Persen
398	SD01333.00.00	12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	Rencana Aksi Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP)	Dokumen kebijakan yang mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diambil otoritas publik untuk mendukung implementasi SPP. Rencana biasanya / harus diatasi dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi SPP, dan mengenali potensi SPP untuk direalisasikan SDGs. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan	1. Rencana Jangka Pendek 2. Rencana Jangka Panjang	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklusi penggunaannya.			
399	SD01660.00.00	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Register
400	SD00706.00.00	12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan ekoLabel Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen penerapan ecolabel dihitung dari banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-A ditambah dengan banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-B ditambah dengan banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-n, yang dinyatakan dengan satuan dokumen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
401	SD00143.00.00	12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.	1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 2. Kurikulum pendidikan tinggi	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pendidikan nasional, (b) kurikulum, © pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.					
402	SD00277.00.00	12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, © pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Pendidikan Nasional	Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
403	SD00766.01.00	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-A ditambah dengan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup Provinsi-B ditambah dengan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup Provinsi-n.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah;Persentase	Satuan Pendidikan; Persen
404	SD00970.00.00	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas	Komunitas	Suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai	1. Kedalaman perhatian bersama (a community of interest) 2. Tingkat interaksi	Jumlah; persentase	Komunitas; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		territorial. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (kukuh atau kampung), desa, kota, suku atau bangsa.	yang tinggi (an attachment community)		
405	SD00274.00.01	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Pendidikan Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi	Jumlah; persentase	Unit; persen
406	SD00274.00.02	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Pendidikan Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	1. Tidak tamat SD 2. SD / sederajat 3. SMP / sederajat 4. SMA / sederajat 5. DI/DII/DIII 6. DIV/S1 7. S2/S3	Jumlah; persentase	Unit; persen
407	SD00275.00.00	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Pendidikan Informal	Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.	1. Pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga, seperti pembentukkan watak, kebiasaan, dan perilaku anak oleh orang tua; sekolah rumah (homeschooling). 2. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, seperti Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).	Jumlah; persentase	Unit; persen
408	SD00523.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang	Dokumen Strategi	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	kebutuhan		
409	SD00553.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Fasilitas Publik	Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Fasilitas Publik yang dimaksud adalah Pasar Tradisional, Pasar Modern / Supermarket, Taman Kota, Tempat Ibadah, Rest Area, Sekolah, Rumah sakit, dan lainnya yang tercantum dalam Permen LHK yang tertulis di atas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Fasilitas Publik; Persen
410	SD00554.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Fasilitas Publik yang Menerapkan SPM dan Teregister	Fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Fasilitas Publik; Persen
411	SD01280.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Registrasi	Rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proses; Persen
412	SD01116.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
413	SD01117.00.00	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang	Standar Pelayanan	Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Masyarakat (SPM)	yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.	kebutuhan		
414	SD00546.00.03	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Energi terbarukan	Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.	1. Panas Bumi 2, Angin 3. Matahari 4. Angin 5. Biomassa (Biofuel padat, cair, dan gas) 6. Lainnya (gelombang laut, pasang surut)	Jumlah; persentase	Joule; persen
415	SD00788.00.00	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Kapasitas pembangkit energi Terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan (dalam watt per kapita) diperoleh dengan cara membagi total daya listrik maksimum yang mampu diproduksi seluruh pembangkit energi terbarukan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Watt/Kapita
416	SD00785.00.02	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Kapasitas Terpasang listrik	Daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik.	1. Tegangan Rendah : tegangan sistem antara 100 VAC sampai 1 kVAC. 2. Tegangan menengah tegangan sistem di atas 1 kVAC sampai 35 kVAC. 3. Tegangan tinggi : tegangan sistem diatas 35 kVAC sampai dengan 245 kVAC. 4. Tegangan ekstra	Jumlah; persentase	V atau kV; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tinggi tegangan sistem di atas 245 kVAC.		
417	SD00785.00.03	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Kapasitas Terpasang Listrik	Daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik.	1. Tegangan ekstra rendah tegangan sistem setinggi-tingginya 50 VAC atau 120 VDC. 2. Tegangan rendah : tegangan sistem yang telah melebihi batas nilai tegangan ekstra rendah, tetapi besar tegangannya setinggi-tingginya 1000 VAC atau 1500 VDC. 3. Tegangan menengah tegangan sistem diatas 1 kVAC sampai dengan 35 kVAC. 4. Tegangan tinggi : 35 kVAC.	Jumlah; persentase	V atau kV; persen
418	SD00282.01.04	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
419	SD00101.00.00	12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata	Mengimplementasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Implementasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			keberlanjutan	dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan				
420	SD00736.00.00	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development dihitung dari banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Provinsi A ditambah dengan banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Provinsi B ditambah banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Provinsi N, yang dinyatakan dengan satuan lokasi wisata.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	lokasi
421	SD00180.00.00	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Pariwisata berkelanjutan	Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	lokasi; persen
422	SD01142.00.00	12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB	Subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB	Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil dalam satu tahun dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
423	SD01143.00.00	12.c.1*	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran	Subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total	Proporsi jumlah subsidi bahan bakar fosil dilihat dari jumlah subsidi bahan bakar fosil dibagi dengan total pengeluaran nasional untuk Bahan Bakar Fosil di kali dengan seratus dan dinyatakan dengan satuan persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			nasional untuk bahan bakar fosil.	pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.				
424	SD01232.00.00	12.c.1*	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	Total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil	Alokasi anggaran pemerintah untuk Bahan Bakar Fosil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
425	SD00415.00.00	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
426	SD00724.00.00	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Hilang	Jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
427	SD00727.00.02	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	1. Meninggal di tempat 2. Meninggal setelah dirawat	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
428	SD00730.00.00	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per	Jumlah Korban Terdampak	Jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang	Korban Terdampak Langsung: - Korban Terluka/Sakit: orang yang mengalami	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			100.000 orang.		dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi.	luka-luka atau sakit, dalam kesdaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap - Pengungsi: orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana		
429	SD01005.00.00	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi, Jumlah	Proporsi per 100.000 penduduk; Orang
430	SD00522.00.02	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework	Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen (jika ada)	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			for Disaster Risk Reduction 2015–2030					
431	SD00522.00.03	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
432	SD01338.00.00	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
433	SD00521.00.02	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan	Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen (jika ada)	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana					
434	SD01587.00.00	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penguranganrisiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
435	SD00315.00.00	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR)	Dokumen Biennial Update Report (BUR)	Dokumen yang berisi tentang penutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan National Communications					
436	SD00516.00.00	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
437	SD01187.00.00	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) dan NatCom Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Report (BUR) dan National Communications				
438	SD00485.01.00	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Data aktifitas	Besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya, penanaman pohon 1 juta hektar per tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (ha)
439	SD00520.00.00	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
440	SD00549.02.00	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Faktor emisi	Rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya, faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132 ton C/ ha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton Karbon/hektar
441	SD00563.00.00	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
442	SD00707.00.00	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi GRK tahunan	Jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton Karbon (ton C);
443	SD00563.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
444	SD00027.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan	Laporan	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Laporan/Dok

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			emisi GRK.	Penurunan Emisi GRK Tahunan	melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.	analisis atau sesuai kebutuhan		umen
445	SD01357.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Penurunan emisi GRK tahunan	Penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kegiatan untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton Karbon (ton C);
446	SD01628.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Potensi penurunan emisi GRK.	Penurunan emisi GRK dihitung dari emisi GRK baseline dikurangi dengan emisi proyek.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
447	SD01331.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK)	Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
448	SD01332.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK)	Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
449	SD01269.00.00	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi GRK.	Upaya penurunan emisi GRK	Pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
450	SD00563.00.00	13.2.2.(b)	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
451	SD01021.00.00	13.2.2.(b)	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Intensitas Emisi GRK	Jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi (PDB) pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton Karbon (ton C)/PDB; Persen
452	SD01627.00.00	13.2.2.(b)	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Intensitas Emisi GRK dihitung dari total emisi GRK di tahun berjalan dibagi dengan GDP di tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
453	SD01222.00.00	13.2.2.(b)	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Total Emisi	Emisi pada tahun berkalan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wailayah/negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton Karbon (ton C);
454	SD01270.00.00	13.2.2.(b)	Potensi intensitas penurunan emisi GRK.	Upaya penurunan intensitas emisi GRK	Pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
455	SD01208.00.00	13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum), (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa	Tingkat pengarusutamaan pendidikan	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum), (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
456	SD00766.02.00	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/kom	Banyaknya satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga Pendidikan/Lembaga/Komunitas

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	unitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				Masyarakat; Persen
457	SD00766.02.00	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Banyaknya satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga Pendidikan/Lembaga/Komunitas Masyarakat; Persen
458	SD00699.00.00	13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
459	SD00698.00.00	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik	Jumlah dana	Banyaknya dana publik (budget tagging) untuk	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	pendanaan perubahan iklim.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
460	SD00839.00.00	13.a.1.ja)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	Kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim	Suatu terobosan pemerintah dalam rangka memantau, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
461	SD00247.00.00	13.a.1.ja)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	Penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging)	Proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
462	SD00744.00.00	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan nationally determined contributions, strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan nationally determined contributions, strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications				
463	SD00797.00.00	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung	Indeks eutrofikasi pesisir dan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
464	SD00960.00.00	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung	kepadatan sampah plastik terapung	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per mil (1000)
465	SD01632.00.00	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Persentase penurunan sampah terbuang dan Jumlah sampah yang terbuang ke laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampah secara keseluruhan pada tahun yang sama dikali dengan seratus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
466	SD01064.00.00	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Sampah laut	Material padat yang dibasilkan atau diproses yang hilang atau terbuang dan berakhir di lingkungan pesisir dan laut.	1. Sampah laut yang berada di pantai 2. Sampah plastik di kolom perairan laut 3. Sampah plastik di dasar laut 4. Sampah plastik yang dimakan hewan laut (seperti burung laut, penyu dan lainnya).	Jumlah; Persentase	Ton atau Kg; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
467	SD01065.00.00	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Sampah laut	Material padat yang dihasilkan atau diproses yang hilang atau terbuang dan berakhir di lingkungan pesisir dan laut.	1. Sampah laut yang berada di pantai 2. Sampah plastik di kolom perairan laut 3. Sampah plastik di dasar laut 4. Sampah plastik yang dimakan hewan laut (seperti burung laut, penyu dan lainnya).	Jumlah; Persentase	Ton atau Kg; Persen
468	SD01019.00.00	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Integrated Coastal Zone Management (ICZM/Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu)	Pengelolaan terpadu dari wilayah pesisir dan laut melalui koordinasi lintas institusi dan Lembaga baik laut dan daratan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
469	SD00295.00.00	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Berdasarkan perspektif ekologi, pendekatan berbasis ekosistem mempertimbangkan hubungan antara organisme hidup, habitat, kondisi fisika dan kimia dari ekosistem, yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan ekologi, keanekaragaman hayati dan Kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan perspektif pengelolaan, pendekatan berbasis ekosistem juga mengacu pada strategi pengelolaan yang terpadu dari sistem sosial-ekologi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi serta menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
470	SD00029.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah	Laut Teritorial	Jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jarak	Mil

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan			kebutuhan		
471	SD01378.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Perairan Kepulauan	Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
472	SD01379.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Perairan Pedalaman	Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semuabagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
473	SD01177.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-1 ditambah dengan wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-2 hingga wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-n yang dinyatakan dengan satuan wilayah pengelolaan perikanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Wilayah; Persen
474	SD01307.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembanganperikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekskhusif Indonesia.	1. WPPNRI 571 2. WPPNRI 572 3. WPPNRI 573 4. WPPNRI 711 5. WPPNRI 712 6. WPPNRI 713 7. WPPNRI 714	Jumlah; Persentase	Wilayah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						8. WPPNRI 715 9. WPPNRI 716 10. WPPNRI 717 11. WPPNRI 718		
475	SD01316.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Zona	Ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.	1. Zona Tambahan 2. Zona Ekonomi Ekskhusif Indonesia	Jarak	Mil
476	SD01317.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Zona Ekonomi Ekskhusif Indonesia	Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
477	SD01319.00.00	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Zona Tambahan	Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
478	SD01042.00.00	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Keasaman

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep disetujui dan memadai	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
479	SD00399.00.00	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Batasan Biologis Aman	Proporsi tangkapan ikan < 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
480	SD00679.00.01	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jenis Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan pelagis kecil; 2. Ikan pelagis besar; 3. Ikan demersal; 4. Ikan karang; 5. Udang; 6. lobster; 7. kepiting; 8. rajungan; 9. cumi-cumi 10. lainnya;	Volume; Persentase	Ton; Persen
481	SD00679.00.02	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jenis Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan bersirip (pisces) 2. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea) 3. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (molhusca) 4. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata) 5. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata) 5. kodok dan sebangsanya (amphibia)	Volume; Persentase	Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia) 8. paus, lumba-lumba, peut, duyung, dan sebangsanya (mammalia) 9. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae) 10. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas		
482	SD00768.00.00	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	Jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; nilai	Kg; rupiah
483	SD01791.00.00	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun (THTT) terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
484	SD01226.00.00	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam	Total Hasil Tangkapan Ikan dari Laut	Penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Nilai	Kg; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			batasan biologis yang aman.					
485	SD00609.00.01	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan 2. Mollusca 3. Crustacea 4. Algae 5. Mamalia Air 6. Lainnya	Volume; Nilai	Kg; Rupiah
486	SD00737.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar (ha).	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Hektar (Ha)
487	SD00799.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Kawasan	Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentuyang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.	1. Kawasan lindung 2. Kawasan budi daya 3. Kawasan perdesaan 4. Kawasan agropolitan 5. Kawasan perkotaan 6. Kawasan metropolitan 7. Kawasan megapolitan 8. Kawasan strategis nasional 9. Kawasan strategis provinsi 10. Kawasan strategis kabupaten/kota	Luas	Km2
488	SD00806.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Kawasan konservasi perairan	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Km2
489	SD00807.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi	Kawasan konservasi	Kawasan konservasi perairan laut meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Km2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perairan laut.	perairan laut				
490	SD01148.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Sumber Daya Ikan	Potensi semua jenis ikan.	1. Ikan Perairan Laut 2. Ikan Perairan Darat 3. Ikan Perairan Payau	Persentase	Persen
491	SD01162.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Taman nasional laut	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Km2
492	SD01320.00.00	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Zonasi Ekosistem Pesisir	Suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
493	SD00609.00.01	14.6.1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujkuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan 2. Molluska 3. Crustacea 4. Algae 5. Mamalia Air 6. Lainnya	Volume; Nilai	Kg; Rupiah
494	SD00610.00.00	14.6.1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujkuan untuk memerangi penangkapan ikan	Ilegal	Bertentangan dengan atau dilarang oleh hukum, terutama hukum pidana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)					
495	SDG02S3.01.00	14.6.1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujukan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Penangkapan ikan	Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya	1. Penangkapan ikan di laut 2. Penangkapan ikan di perairan daratan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
496	SDG1216.00.00	14.6.1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujukan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujukan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujukan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
497	SD00375.02.00	14.6.1.ja)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Badan Usaha	Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hokum asing, atau koperasi.	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas 4. Badan hokum asing, atau koperasi	Jumlah; persentase	Orang; persen
498	SD00420.01.00	14.6.1.ja)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Bentuk Badan Hukum	Suatu status badan hukum yang telah dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi/usaha berdasarkan akte pendirianya yang dikeluarkan oleh akte notaris, berupa akte notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.	1. PT (persero) 2. PT 3. Koperasi 4. CV 5. Firma 6. Yayasan Izin khusus dari instansi terkait 7. Perorangan	Persentase	Persen
499	SD00853.00.00	14.6.1.ja)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Kegiatan yang dianggap melakukan Ilegal Fishing	1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut. 3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.			
500	SD00870.00.00	14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Kelautan	Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
501	SD00211.00.00	14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha	orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia	KBLI	Jumlah; persentase	Orang; persen
502	SD01405.00.00	14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Perikanan	Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
503	SD01469.00.00	14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
504	SD01278.01.02	14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Usaha Perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
505	SD01406.00.00	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase	Perikanan berkelanjutan sebagai	**Indikator global yang akan dikembangkan**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dari Produk Domestik Bruto (PDB)	presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)				
506	SD01696.00.00	14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
507	SD00400.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Akses	Hak atau kesempatan untuk menggunakan atau melihat sesuatu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
508	SD00837.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala	Kebijakan	Serangkaian ide atau rencana apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang telah disetujui secara resmi oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau partai politik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kecil					
509	SD00910.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
510	SD00953.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Ketersediaan kerangka hukum/regula si/kebijakan/k elembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
511	SD00135.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk	Nelayan Kecil	Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perikanan skala kecil		dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal			
512	SD00136.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Nelayan Tradisional	nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
513	SD00187.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Pasar Rakyat	Suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pasar; Persen
514	SD00233.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
515	SD01386.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/	Peraturan Perundangan-undangan	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.			
516	SD01149.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Sumber Daya Kelautan	Sumber daya Laut, baik yangdapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sertadapat dipertahankan dalam jangka panjang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
517	SD01203.00.00	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Tersedianya kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya penerapan pengakuan dan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
518	SD00609.00.01	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan 2. Mollusca 3. Crustacea 4. Algae	Volume; Nilai	Kg; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Mamalia Air 6. Lainnya		
519	SD00762.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Provinsi
520	SD00872.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Pokdakan	Badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
521	SD00873.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB)	Badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
522	SD00134.01.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan atau orang yang melakukan usaha penangkapan ikan	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
523	SD00228.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
524	SD01354.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi	Peningkatan	Peningkatan bantuan pembiayaan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	akses pendanaan usaha nelayan.	dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Poklakan).	analisis atau sesuai kebutuhan		
525	SD01148.00.00	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Sumber Daya Ikan	Potensi semua jenis ikan.	1. Ikan Perairan Laut 2. Ikan Perairan Darat 3. Ikan Perairan Payau	Persentase	Persen
526	SD00745.00.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
527	SD00134.01.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan atau orang yang melakukan usaha penangkapan ikan	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
528	SD00137.00.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan yang Terlindungi	Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
529	SD00232.01.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Pembudi Daya Ikan	Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.	1. Pembesaran 2. Pembenihan 3. Ikan Hias	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
530	SD00232.02.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Pembudi Daya Ikan	Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan atau orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan	1. Pembesaran 2. Pembenihan 3. Ikan Hias	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
531	SD01427.00.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
532	SD01428.00.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kegiatan; persen
533	SD01609.00.00	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Petambak Garam	Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.	1. Tambak 2. Non Tambak	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
534	SD01277.00.01	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Usaha Pergaraman	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
535	SD01278.01.02	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Usaha Perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	Usaha; persentase	Orang; persen
536	SD00028.00.00	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Laut	Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
537	SD01149.00.00	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen	Sumber Daya Kelautan	Sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)		dipertahankan dalam jangka panjang.			
538	SD01185.00.00	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Tersedianya perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
539	SD01258.00.00	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	United Nations Convention on the Law of the Sea(UNCLOS)	Perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
540	SD00471.04.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Danau	Wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, emburig dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan ; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
541	SD00477.00.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Daratan	Permukaan bumi yang tidak tertutup air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
542	SD00597.01.01	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan Alam 2. Hutan tanaman	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
543	SD00597.02.01	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan Alam 2. Hutan tanaman	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
544	SD00597.02.02	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan Pantai 2. Hutan Payau 3. Hutan Rawa 4. Hutan Dataran rendah 5. Hutan Dataran Tinggi 6. Hutan Pegunungan	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
545	SD00597.02.03	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan hujan 2. Hutan musim 3. Hutan gambut	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
546	SD00597.02.04	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan Jati 2. Hutan pinus 3. Hutan bakau 4. Hutan ramin 5. Hutan meranti 6. Hutan kamper 7. Hutan mahoni 8. Hutan sonokeling 9. Hutan jeunjing/sengon	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						10. Hutan Bambu 11. Hutan agatis 12. Hutan ekaliptus 13. Hutan kayu putih 14. Hutan cendana 15. Hutan lainnya;		
547	SD005997.02.05	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan tetap 2. Hutan cadangan 3. Hutan lainnya;	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
548	SD005997.02.06	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	1. Hutan negara 2. Hutan milik	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
549	SD005997.03.01	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	1. Hutan Alam 2. Hutan tanaman	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
550	SD005997.03.02	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	1. Hutan Pantai 2. Hutan Payau 3. Hutan Rawa 4. Hutan Dataran rendah 5. Hutan Dataran Tinggi 6. Hutan Pegunungan	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
551	SD005997.03.03	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	1. Hutan hujan 2. Hutan musim 3. Hutan gambut	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
552	SD005997.03.04	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan	1. Hutan Jati 2. Hutan pinus 3. Hutan bakau	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	4. Hutan ramin 5. Hutan meranti 6. Hutan kamper 7. Hutan mahoni 8. Hutan sonokeling 9. Hutan jeunjing/sengon 10. Hutan Bambu 11. Hutan agatis 12. Hutan ekaliptus 13. Hutan kayu putih 14. Hutan cendana 15. Hutan lainnya;		
553	SD005970 3.05	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	1. Hutan tetap 2. Hutan cadangan 3. Hutan lainnya;	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
554	SD005970 3.06	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Suatu lapangan bertumbuh pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.	1. Hutan negara 2. Hutan milik	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
555	SD005970 1.02	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan Pantai 2. Hutan Payau 3. Hutan Rawa 4. Hutan Dataran rendah 5. Hutan Dataran Tinggi 6. Hutan Pegunungan	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
556	SD005970 1.03	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan hujan 2. Hutan musim 3. Hutan gambut	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
557	SD000597.01.04	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan Jati 2. Hutan pinus 3. Hutan bakau 4. Hutan ramin 5. Hutan meranti 6. Hutan kamper 7. Hutan mahoni 8. Hutan sonokeling 9. Hutan jeunjing/sengon 10. Hutan Bambu 11. Hutan agatis 12. Hutan ekalitus 13. Hutan kayu putih 14. Hutan cendana 15. Hutan lainnya;	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
558	SD000597.01.05	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan tetap 2. Hutan cadangan 3. Hutan lainnya;	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
559	SD000597.01.06	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Hutan	Tanah yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%. Ini tidak termasuk tanah yang sebagian besar di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.	1. Hutan negara 2. Hutan milik	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
560	SD000801.00.01	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Kawasan Hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudahditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	1. Hutan Negara 2. Hutan Adat 3. Hutan Hak 4. Hutan Produksi 5. Hutan Lindung 6. Hutan Konservasi	Luas	Km2
561	SD000801.00.03	15.1.1*	Proporsi kawasan	Kawasan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh	Klasifikasi berdasarkan	Luas	Km2; Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			hutan terhadap total luas lahan	Hutan	pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudahditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	analisis atau sesuai kebutuhan		
562	SD01359.01.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Penutupan Hutan	Penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Ha; Persen
563	SD01377.00.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Perairan Indonesia	Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
564	SD01705.00.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Luas tutupan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
565	SD01310.00.00	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Wilayah Sungai	Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
566	SD01786.00.00	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ekosistemnya				
567	SD00064.00.00	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	Luas Kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
568	SD00734.00.00	15.2.1.(a)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Banyaknya KPHK, KPHL dan KPHP yang telah diverifikasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria tersebut secara umum mencakup aspek legal (kelembagaan KPH, dokumen perencanaan), aspek produksi (hasil hutan dan jasa), dan aspek ekonomi (investasi pada KPH dan operasionalisasi KPH).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KPH
569	SD00930.00.00	15.2.1.(a)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari	1. Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Jumlah	KPH
570	SD00931.00.00	15.2.1.(a)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan (KPHK)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen
571	SD00933.00.00	15.2.1.(a)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lahan (KPHL)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen
572	SD00935.00.00	15.2.1.(a)	Indikator nasional sebagai proksi	Kesatuan Pengelolaan	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Luas;	Kesatuan; Km2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			indikator global	Hutan Produksi (KPHP)		kebutuhan	Persentase	
573	SD01843.01.00	15.2.1.ja)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global	Pengolahan Hasil Hutan	Pengolahan hulu hasil hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
574	SD00494.00.00	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Degradasi lahan	Pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan, padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar; Persen
575	SD00313.00.00	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.	1. Sangat sesuai 2. Cukup sesuai 3. Sesuai marginal 4. Tidak sesuai	Luas	Hektar (Ha)
576	SD00067.00.00	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan keseluruhan	Luas permukaan daratan suatu negara tidak termasuk wilayah yang dicakup oleh perairan pedalaman, seperti: sungai dan danau besar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar; Persen
577	SD01718.00.00	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan yang terdegradasi yang dilakukan rehabilitasi di dalam hutan dan lahan dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
578	SD01292.00.01	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Rehabilitasi hutan dan lahan	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kehidupan			
579	SD01292.00.02	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan	1. Lahan kritis 2. Lahan terbuka, dan/atau 3. Lahan bekas kebakaran hutan dan lahan	Luas	Hektar
580	SD00805.01.02	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi	Kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi perairan yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta taman buru.	1. Cagar Alam 2. Suaka Margasatwa 3. Taman Nasional 4. Taman Wisata Alam 5. Taman Hutan Raya 6. Taman Buru	Jumlah; Luas	Kawasan; Hektar (Ha)
581	SD00805.02.01	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Kawasan konservasi	Ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Situs
582	SD00805.02.02	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi	Ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya.	1. Cagar Alam 2. Suaka Margasatwa 3. Taman Nasional 4. Taman Wisata Alam 5. Taman Hutan Raya 6. Taman Buru	Jumlah; Luas	Kawasan; Hektar (Ha)
583	SD00826.02.00	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
584	SD00826.03.00	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan	Keanekaragaman Hayati	Semua mahluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dalam kawasan konservasi			hayati perairan		
585	SD01112.00.00	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Indikator ini mencakup area terlindung dari situs situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung (misal situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global) yang dicakup oleh kawasan lindung yang ditunjuk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Situs
586	SD00778.00.00	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, permukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. Mountain Green Cover Index adalah alat yang efektif untuk menunjukkan bagaimana ekosistem gunung berevolusi dan untuk menilai kondisi konservasi dan kesehatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
587	SD00191.00.00	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	Pegunungan	Pegunungan didefinisikan sesuai dengan klasifikasi UNEP-WCMC yang mengidentifikasi berdasarkan ketinggian, kemiringan dan rentang ketinggian lokal seperti yang dijelaskan oleh Kapos et al. (2000)	1. Kelas 1: ketinggian> 4.500 meter 2. Kelas 2: ketinggian 3.500–4.500 meter 3. Kelas 3: ketinggian 2.500–3.500 meter 4. Kelas 4: ketinggian 1.500–2.500 meter dan kemiringan> 2	Tinggi	Meter

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Kelas 5: ketinggian 1.000–1.500 meter dan kemiringan> 5 atau rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer LER)> 300 meter 6. Kelas 6: ketinggian 300-1.000 meter dan rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer)> 300 meter.		
588	SD006802.00.00	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red -list index)	Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas	Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya saat ini terdiri dari 25 jenis satwa, yaitu: 1) Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae); 2) Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus); 3) Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); 4) Owa Jawa (Hylobates moloch); 5) Banteng (Bos javanicus); 6) Elang Jawa (Spizaetus bartelsi); 7) Jalak Bali (Leucopsar rothschildi); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea); 9) Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus); 10) Komodo (Varanus komodoensis); 11) Bekantan (Nasalis larvatus); 12) Anoa (Bubalus depressicornis and Bubalus quarlesi); 13) Babirusa (Babyrousa babyrussa); 14) Maleo (Macrocephalon maleo); 15) Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas); 16) Rusa Bawean (Axis kuhlii); 17) Cendrawasih (Maegregoria pukhra, Paradisaea raggiana, Paradisaea apoda, Cicinnurus regius, Seleucidis melanoleuca, Paradisaea rubra); 18) Surili (Presbytis frederickae, Presbytis comata); 19) Tarsius (Tarsius fuscus); 20) Monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra, Macaca maura); 21) Julang sumba	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(Rhyticeros everetti); 22) Nuri kepala hitam (Lorius domicella, Lorius lory); 23) Penyu (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata); 24) Kanguru pohon (Dendrolagus mbaiso); 25) Celepuk Rinjani (Otus jolandae). satwa laut dan perairan darat, LIPI memberikan rekomendasi terkait 308 spesies (7 taksa) terancam punah prioritas perlindungan ditambah 35 spesies mamalia laut.			
589	SD006802.00.00	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red -list index)	Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas	Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya saat ini terdiri dari 25 jenis satwa, yaitu: 1) Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae); 2) Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus); 3) Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); 4) Owa Jawa (Hylobates moloch); 5) Banteng (Bos javanicus); 6) Elang Jawa (Spizaetus bartelsi); 7) Jalak Bali (Leucopsar rothschildi); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea); 9) Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus); 10) Komodo (Varanus komodoensis); 11) Bekantan (Nasalis larvatus); 12) Anoa (Bubalus depressicornis and Bubalus quarlesi); 13) Babirusa (Babyrousa babyrussa); 14) Maleo (Macrocephalon maleo); 15) Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas); 16) Rusa Bawean (Axis kuhlii); 17) Cenderawasih (Macgregoria pulchra, Paradisaea raggiana, Paradisaea apoda, Cicinnurus regius, Seleucidis melanoleuca, Paradisaea rubra); 18) Siamang (Presbytis frederickae, Presbytis comata); 19) Tarsius (Tarsius fuscus); 20) Monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra, Macaca maura); 21) Julang sumba (Rhyticeros	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					everetii); 22) Nuri kepala hitam (Lorius domicella, Lorius lory); 23) Penyu (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata); 24) Kanguru pohon (Dendrolagus mbaiso); 25) Celepuk Rinjani (Otus jolanodea). Satwa laut dan perairan darat, LIPI memberikan rekomendasi terkait 308 spesies (7 taksa) terancam punah prioritas perlindungan ditambah 35 spesies mamalia laut.			
590	SD01539.00.00	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-1 baseline data tahun 2013 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
591	SD00913.00.00	15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
592	SD01783.00.00	15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
593	SD00583.00.00	15.7.1.ja)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal	Hasil buruan	Hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).					
594	SD00588.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Hidupan Liar	Hewan dan tumbuhan yang tumbuh secara independen dari manusia, biasanya dalam kondisi alami.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
595	SD00717.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Banyaknya kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL). Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
596	SD00717.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Banyaknya kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL). Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
597	SD00043.01.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Lembaga Konservasi (LK)	Lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.	1. LK Umum 2. LK Khusus	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
598	SD00043.02.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan	Lembaga Konservasi (LK)	Lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (exsitu) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan	1. LK Umum 2. LK Khusus	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Satwa Liar (TSL).		tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya.			
599	SD00058.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Lingkungan Hidup	Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
600	SD00245.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi	Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam melalui pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya dari baseline data tahun 2013.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Satwa
601	SD01694.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar	Kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
602	SD01388.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Perburuan	Segala sesuatu yang berangkut paut dengan kegiatan berburu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
603	SD01390.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Perdagangan	Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
604	SD01075.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau	Satwa Liar	Satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Satwa

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).		yang dipelihara oleh manusia.	kebutuhan		
605	SD01090.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Sengketa lingkungan hidup (LH)	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa; Persen
606	SD01192.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Tindak pidana lingkungan	Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
607	SD01248.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Tumbuhan	Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tumbuhan
608	SD01248.00.00	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).	Tumbuhan	Semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tumbuhan
609	SD00677.00.00	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	Jenis Asing Invasif (JAI)	Jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Spesies/jenis (JAI)
610	SD00912.00.00	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang	Kerangka legislasi	Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) di Indonesia. JAI	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	dapat berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragam hayati. Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	kebutuhan		
611	SD00005.00.00	15.9.1	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi	******Indikator yang akan dikembangkan******	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
612	SD00824.00.00	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Keanekaragaman Ekosistem	Keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana mahluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
613	SD00825.00.00	15.9.1.(a)	Rencana	Keanekaragam	Keanekaragaman individu di dalam suatu jenis.	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Genetika;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	an Genetika		analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
614	SD00827.00.00	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Keaneragaman Jenis	Keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Spesies; Persen
615	SD01342.00.00	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Indikator ini mengukur kemajuan menuju target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 dari Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
616	SD00391.00.00	15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	**Indikator global yang akan dikembangkan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
617	SD00396.00.00	15.a.1.(a)	Bantuan	Bantuan	Indikator bantuan pembangunan resmi untuk	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragam an hayati secara berkelanjutan	konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan didefinisikan sebagai bantuan dari negara/lembaga donor (ODA) dan dukungan NGO/LSM untuk kearekaragaman hayati. Jumlah pendonor yang memberikan bantuan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati.	analisis atau sesuai kebutuhan		
618	SD060001.00.00	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragam an hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragam an hayati	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
619	SD060396.00.00	15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk	Bantuan pembangunan resmi untuk	Indikator bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan didefinisikan sebagai bantuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	dari negara/lembaga donor (ODA) dan dukungan NGO/LSM untuk keanekaragaman hayati. Jumlah pendonor yang memberikan bantuan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati.			
620	SD01698.00.00	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
621	SD00717.00.00	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Banyaknya kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL). Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
622	SD00717.00.00	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Banyaknya kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL). Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
623	SD00319.00.00	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berdasarkan umur dan jenis kelamin.	penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin				
624	SD00680.00.00	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2.Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
625	SD00857.00.00	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Kejahatan	Suatu tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum, atau aktivitas ilegal pada umumnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
626	SD00995.00.00	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Korban	Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
627	SD00234.00.00	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Pembunuhan	Kejahatan dengan sengaja membunuh seseorang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
628	SD00282.01.04	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berdasarkan umur dan jenis kelamin.					
629	SD01254.01.02	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
630	SD00794.00.00	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus Kejahatan Pembunuhan	Kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
631	SD00795.00.00	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
632	SD00884.00.00	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
633	SD00886.00.00	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah	Kematian akibat konflik	Kematian akibat tindakan agresif antara beberapa pihak yang langsung terkait dengan pertempuran, seperti pertikaian antar suku; Kematian akibat kejahatan perang seperti menargetkan pada penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.		sipil; Kematian akibat segala bentuk ranjau termasuk dari lokasi bekas ranjau yang masih aktif maupun dianggap tidak aktif.			
634	SD00888.00.00	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
635	SD00975.00.00	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Konflik Sosial/ Konflik	Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
636	SD00282.01.04	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
637	SD00884.00.00	16.1.2.ja)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
638	SD00884.00.00	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
639	SD00891.00.01	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/kota	Persentase	Persen
640	SD00891.00.02	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah Korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
641	SD00891.00.03	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.	1. Anak-anak 2. Dewasa	Persentase	Persen
642	SD00891.00.04	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.	1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya 2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis 3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat		
643	SDG0890.00.01	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di UndangUndang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya 2. Persetenan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan atlaretnis 3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi 4. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						masyarakat		
644	SD00890.00.02	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di UndangUndang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	1. laki-laki 2. perempuan	Persentase	Persen
645	SD00890.00.03	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di UndangUndang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/kota	Persentase	Persen
646	SD00890.00.04	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di UndangUndang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	1. Anak-anak 2. Dewasa	Persentase	Persen
647	SD00890.00.05	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di UndangUndang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
648	SD00890.00.01	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian yang disebabkan konflik	kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.	1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya 2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis 3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi 4. Sengketa sumber daya alam	Proporsional	Proporsi per 100.000 penduduk

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat		
649	SD00974.00.00	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Konflik	Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menggangsu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya 2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis 3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi 4. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat	Persentase	Persen
650	SD00282.01.04	16.1.2.(a)	Kematian	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	analisis atau sesuai kebutuhan	persentase	persen
651	SD00282.01.04	16.1.2.ja)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
652	SD00859.02.01	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
653	SD00859.02.02	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
654	SD00860.01.00	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
655	SD00861.01.00	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak	1. Membunuh 2. Menonjok	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.		atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain		
656	SD00862.00.00	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.			
657	SD00282.01.04	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
658	SD01747.00.00	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
659	SD00858.02.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Kejahatan kekerasan	Semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya.	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; persentase	Kasus; Persen
660	SD01000.00.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk	Korban	Seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Jiwa; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	kejahatan	terkena tindak kejahatan atau usaha / percobaan tindak kejahatan.	analisis atau sesuai kebutuhan	persentase	
661	SD01001.00.01	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Korban kejahatan kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
662	SD00219.00.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
663	SD00258.00.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.	1. Perampokan 2. Penodongan 3. Pemalakan 4. Penjambretan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
664	SD00282.01.04	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
665	SD01375.00.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	1. Pemukulan 2. Penamparan 3. Pengeroyokan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
666	SD01422.00.00	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Perkosaan	Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
667	SD00288.00.00	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari	Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
668	SD01749.00.00	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
669	SD00718.00.00	16.10.1	Jumlah kasus	Jumlah kasus	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir	dikembangkan.**	analisis atau sesuai kebutuhan		
670	SD00772.00.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Jurnalis	Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya; wartawan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
671	SD00227.00.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi	Pembela HAM	Orang dan/atau sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Pembela; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.		korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja penajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai.	kebutuhan		
672	SD0025700.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Penculikan	Membawa seseorang pergi secara ilegal dengan paksa, biasanya untuk meminta uang dengan imbalan membebaskan mereka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
673	SD0184200.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan	Penghilangan Secara Paksa	Penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.		orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.			
674	SD01371.00.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Penyiksaan	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
675	SD01094.00.00	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Serikat Pekerja	Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Organisasi; Persen
676	SD00718.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan	Jumlah kasus	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	tervenfikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir	dikembangkan.**	analisis atau sesuai kebutuhan		
677	SD00772.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Jurnalis	Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya; wartawan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
678	SD00227.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Pembela HAM	Orang dan/atau sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pembela; Persen
679	SD00257.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Penculikan	Membawa seseorang pergi secara ilegal dengan paksa, biasanya untuk meminta uang dengan imbalan membebaskan mereka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
680	SD01842.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan	Penghilangan	Penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Secara Paksa	lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
681	SD01371.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Penyiksaan	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
682	SD01094.00.00	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Serikat Pekerja	Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Organisasi; Persen
683	SD00423.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran	Berkas penanganan pengaduan	berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Hak Asasi Manusia (HAM).	pelanggaran HAM	dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi.			
684	SD00424.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Berkas Pengaduan	Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Berkas; Kasus
685	SD00568.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Hak Asasi Manusia	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri 4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak	Persentase	Persen
686	SD00212.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
687	SD00249.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
688	SD01839.00.00	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Laporan; Persen
689	SD00569.00.00	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Hak Asasi Perempuan	Hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dan lain-lain, terutama berbasis gender.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
690	SD00751.00.00	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
691	SD00865.00.02	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.		atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut: a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.	1. Terselesaikan 2. Tidak terselesaikan		
692	SDG902.50.00.00	16.10.1.kj	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM	Semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan		Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Perempuan	oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.			
693	SD00927.01.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
694	SD00927.02.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
695	SD00123.01.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara	Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
696	SD00123.02.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori	Negara	Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.					
697	SD00123.03.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara	Persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur.	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
698	SD00130.00.00	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/ atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
699	SD00374.00.00	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Badan Publik	Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Informatif (skor 90-100) 2. Menuju Informatif (skor 80-89,9) 3. Cukup Informatif (skor 60-79,9) 4. Kurang Informatif (skor 40-59,9)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.	5. Tidak Informatif (skor <39,9)		
700	SD00927.01.00	16.10.2.ja)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
701	SD00927.02.00	16.10.2.ja)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
702	SD00938.00.00	16.10.2.ja)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Informasi publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	1. Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2. Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3. Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4. Peningkatan kewajiban layanan informasi publik	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
703	SD01179.00.00	16.10.2.ja)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan	Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Badan Publik

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria: 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.			
704	SD00392.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ajudikasi	Proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
705	SD00927.01.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
706	SD00927.02.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
707	SD00938.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian	Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang	1. Peningkatan kewajiban	Jenis; Persentase	Informasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.		berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	mengumumkan informasi publik; 2. Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3. Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik; dan 4. Peningkatan kewajiban layanan informasi publik		
708	SD00964.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi	Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
709	SD00990.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Mediasi	Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
710	SD01800.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau	Pengguna Informasi Publik	Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ajudikasi non litigasi.					
711	SD01534.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh jumlah register sengketa per tahun berjalan dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
712	SD01089.00.00	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Sengketa Informasi Publik	Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa; Persen
713	SD00552.00.00	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Agresi Psikologis	Meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.	1. Ya, pernah 2. Tidak pernah	Persentase	Persen
714	SD00630.01.02	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.	1. Anak Kandung 2. Anak Asuh 3. Anak Angkat 4. Anak Terlantar	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pengasuh dalam sebulan terakhir					
715	SD00594.00.00	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Hukuman fisik/ badan	Tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
716	SD01403.00.00	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Pengasuh	Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ruta; Persen
717	SD01681.00.00	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
718	SD00552.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Agresi Psikologis	Meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.	1. Ya, pernah 2. Tidak pernah	Persentase	Persen
719	SD006330.01.01	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.	1. Anak kanding 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi	Jumlah; persentase	rata; persen
720	SD000594.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Hukuman fisik/ badan	Tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak dimaksudkan untuk membuat anak cedera. Hukuman fisik meliputi mendorong/menggoncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/menggoncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
721	SD00877.01.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah	Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Keluarga;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
722	SD00169.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Orang tua	Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
723	SD01403.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Pengasuh	Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rata; Persen
724	SD01780.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur	Proporsi rumah tangga yang memiliki	Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan /atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.			
725	SD012960.00.00	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Wali	Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
726	SD008659.02.02	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
727	SD008660.01.00	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan.			
728	SD00861.01.00	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen
729	SD00862.00.00	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.			
730	SD01638.00.00	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
731	SD01641.00.00	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah anak yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
732	SD00862.00.00	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.			
733	SD01756.00.00	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi; persentase	Orang; persen
734	SD00862.00.00	16.2.3.[a]	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			sebelum umur 18 tahun.		Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, baik maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.			
735	SD00859.02.02	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
736	SD00995.00.00	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada	Korban	Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.					
737	SD01611.00.00	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Pihak Berwajib	Seseorang dengan tanggung jawab resmi untuk bidang kegiatan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
738	SD01710.00.00	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
739	SD01344.00.00	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12	Resolusi Konflik	Cara bagi dua atau lebih pihak untuk menemukan solusi damai untuk perselisihan di antara mereka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Resolusi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.		Ketidaksepakatan itu bisa bersifat pribadi, finansial, politis, atau emosional.	kebutuhan		
740	SD01002.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
741	SD00219.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
742	SD00258.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di	1. Perampokan 2. Penodongan 3. Pemalakan 4. Penjambretan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.			
743	SD01375.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	1. Pemukulan 2. Penamparan 3. Pengeroyokan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
744	SD01417.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
745	SD01711.00.00	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
746	SD00387.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Bantuan hukum	Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jasa
747	SD00571.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima	Hak dasar	meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi		perumahan.			
748	SD00062.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Litigasi	penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
749	SD00149.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Non litigasi	Penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
750	SD00166.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	1. Ligitasi 2. Non Litigasi	Persentase; jumlah	Persen; orang
751	SD00168.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Orang miskin	orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
752	SD00229.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin	Pemberi bantuan	lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	hukum	memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.	kebutuhan		
753	SD00242.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Pemohon bantuan hukum	orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemohon; Persen
754	SD00296.00.00	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Penerima Bantuan Hukum	orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
755	SD00385.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Advis Hukum	Memberikan saran atau menyiapkan dokumen untuk pihak lain, yang menanggung hak atau kewajiban hukum.	1. Memperoleh advis hukum 2. Tidak memperoleh advis hukum 3. Tidak mengetahui advis hukum	Persentase	Persen
756	SD00517.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos	Dokumen Hukum	Dokumen tentang masalah hukum; sebuah dokumen yang disusun oleh seorang pengacara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara					
757	SD00927.02.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi; Persen
758	SD00866.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Kekuasaan Kehakiman	Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
759	SD00983.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Konsultasi	Pertemuan untuk membahas sesuatu atau untuk mendapatkan saran atau proses mendiskusikan sesuatu dengan seseorang untuk mendapatkan saran atau pendapat mereka tentang hal itu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
760	SD00031.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Layanan Hukum	Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
761	SD00033.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.	1. Perkara perdata permohonan 2. Gugatan 3. Eksekusi	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
762	SD00216.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
763	SD01693.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang	Pengadilan Negeri	Pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Pengadilan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara			kebutuhan		
764	SD01373.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Peradilan Umum	Salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peradilan; Persen
765	SD01487.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara dibagi seluruh pemohon layanan pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
766	SD01488.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan,	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dibagi seluruh pemohon layanan pos bantuan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan pembebasan biaya perkara	hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara				
767	SD01489.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan dibagi seluruh pemohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
768	SD01621.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar	Pos Bantuan Hukum atau Posbakum	Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pos; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara					
769	SD01100.00.00	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Sidang di luar gedung pengadilan	Sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaatz.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sidang; Persen
770	SD00121.00.00	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana	Narapidana	Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
771	SD01160.02.00	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana	Tahanan	Seseorang tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan dan ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
772	SD01160.02.00	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana	Tahanan	Tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
773	SD00633.00.00	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Anak yang berkonflik dengan hukum	anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
774	SD00244.00.00	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan	Penahanan	terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Tersangka;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan		tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal sesuai Pasal 21 ayat 4 (a) dan (b) KUHAP yang berada pada Rumah Tahanan	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
775	SD01790.00.00	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
776	SD01049.00.00	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Rumah tahanan negara (Rutan)	tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rutan; Persen
777	SD01160.01.00	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Tahanan	seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
778	SD00624.00.00	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).	Aliran Dana Gelap/Illegal	Penilaian terhadap aliran dana gelap/illegal dinilai dari dua sumbernya yaitu: 1) Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar secara sengaja 2) Kebocoran dalam neraca pembayaran. Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar, merupakan penyebab utama dari aliran dana gelap/illegal dari negara-negara berkembang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
779	SD01091.00.00	16.4.2	Indikator global ini tidak relevan untuk	Senjata Api	Perakitan barel dan aksi dari mana proyektil dilepaskan dengan menggunakan propelan yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Senjata

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Indonesia.		terbakar dengan cepat. Juga disebut senjata, pistol, pistol, pistol panjang, pistol, revolver, dll.	kebutuhan		
780	SD01092.00.00	16.4.2	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.	Senjata Ringan	Senjata yang dirancang untuk penggunaan individu. Termasuk, antara lain, revolver dan pistol yang bisa diisi sendiri, senapan dan karabin, senjata sub-mesin, senapan serbu dan senapan mesin ringan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Senjata
781	SD01115.00.00	16.4.2	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.	Standar Internasional	Standar yang diadopsi oleh organisasi standar internasional dan tersedia untuk umum. Definisi yang diberikan dalam semua standar IEC berbunyi: "Dokumen normatif, dikembangkan sesuai dengan prosedur konsensus, yang telah disetujui oleh anggota Komite Nasional IEC dari komite yang bertanggung jawab sesuai dengan Bagian 1 dari Arahan ISO / IEC.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Standar; Persen
782	SD00989.00.00	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Kontak	Komunikasi dengan seseorang, terutama dengan berbicara atau menulis kepada mereka secara teratur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
783	SD00282.01.04	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.					
784	SD01610.00.00	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Petugas	Seseorang yang memiliki posisi otoritas dalam suatu organisasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
785	SD01138.00.00	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Suap	Tindakan mencoba membuat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi mereka uang, hadiah, atau sesuatu yang mereka inginkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teman; Persen
786	SD01010.00.01	16.5.1.jk)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Korupsi	Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka.	1: Sangat wajar 2: Wajar 3: Kurang wajar 4: Tidak wajar	Persentase	Persen
787	SD00138.00.00	16.5.1.jn)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Nepotisme	perangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase;	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan	Indeks	
788	SD002237.00.00	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Pemerasan (extortion)	memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik Permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
789	SD01372.00.00	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Penyuapan (bribery)	apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud memperngaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
790	SD01407.00.00	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Perilaku anti korupsi	"tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yansecara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masayarang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik".	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
791	SD01408.00.00	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Perilaku korupsi	"tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi keluarga dekat, kawan dekat)".	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
792	SD00989.00.00	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah	Kontak	Komunikasi dengan seseorang, terutama dengan berbicara atau memilis kepada mereka secara teratur:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.					
793	SD00211.00.00	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Pelaku Usaha	Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.	KBLI	Jumlah; persentase	Orang; persen
794	SD01610.00.00	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas,	Petugas	Seseorang yang memiliki posisi otoritas dalam suatu organisasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			selama 12 bulan terakhir.					
795	SD01138.00.00	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Suap	Tindakan mencoba membuat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi mereka uang, hadiah, atau sesuatu yang mereka inginkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Temuan; Persen
796	SD00636.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Jumlah	Rupiah
797	SD00637.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
798	SD00410.02.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja Negara	kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pusat menurut program.		
799	SD00410.01.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja Negara	Semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.	1. Belanja Langsung 2. Belanja Tak Langsung	Nilai	Rupiah
800	SD00411.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut fungsi	belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
801	SD00413.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut organisasi	belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
802	SD00414.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut program	belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
803	SD00239.01.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Pemerintah Daerah	Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
804	SD00240.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah	Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menterinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemerintah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terhadap anggaran yang disetujui.					
805	SD01666.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Pengeluaran Utama Pemerintah	Realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.	Kode anggaran dan sejenisnya	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
806	SD01755.00.00	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibandin dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
807	SD00162.00.00	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Opini	Hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2. Opini Wajar dengan Pengecualian 3. Opini Tidak Wajar 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini	Jumlah; Persentase	Opini; Persen
808	SD00163.00.00	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Opini; Persen
809	SD00164.00.00	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang	Opini Wajar Tanpa	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Opini; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Pengecualian (WTP)	dari salah saji material.	kebutuhan		
810	SD00238.00.00	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
811	SD01460.00.00	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
812	SD01458.00.00	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Instansi Pemerintah; Persen
813	SD01101.00.00	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(SAKIP) ≥ B		instansi pemerintah			
814	SD01113.00.00	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Skor B atas SAKIP	Tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Instansi Peraih Skor B; Persen
815	SD00968.00.00	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Komponen Hasil	Pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan	1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
816	SD00969.00.00	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Komponen Pengungkit	Pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangundangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
817	SD01457.00.00	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan	Persentase instansi	Jumlah instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan		
818	SD01279.00.00	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Reformasi Birokrasi (RB)	Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
819	SD01252.00.00	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi	Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran/sanksi; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
820	SD00759.00.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran dan Indikator : 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN - Indeks Persepektif Korupsi (IPK) = 5.0 - Opini BPK (WTP) : a) Pusat 100% b) Daerah 60% 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			/Kota).		masyarakat - Integritas Pelayanan Publik a) Pusat 8,0 b) Daerah 8,0 - Peningkat Kemudahan Berusaha = 75 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi - Efektivitas Pemerintahan = 0,5 - Instansi Pemerintah Yang Akuntabel 80%			
821	SD01016.00.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Instansi Daerah	Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
822	SD01017.00.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Instansi Pemerintah	Instansi pusat dan instansi daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
823	SD01018.00.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks	Instansi Pusat	Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
824	SDG0892.00.00	16.6.1.jkl)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kementerian; Persen
825	SDG0239.02.00	16.6.1.jkl)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
826	SDG1439.00.00	16.6.1.jkl)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks	Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen penguangkit dan hasil. Komponen Penguangkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan penggunna layanan.			
827	SD01279.01.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Reformasi Birokrasi	Transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
828	SD01279.02.00	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Reformasi Birokrasi	Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
829	SD00217.00.00	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir	Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			atas layanan publik.		negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.			
830	SD00282.01.04	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
831	SD00901.00.02	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Kepatuhan	Perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Zona merah (kepatuhan rendah) 2. Zona kuning (kepatuhan sedang) 3. Zona hijau (kepatuhan tinggi)	Jumlah	Instansi
832	SD00217.00.00	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
833	SD01121.00.00	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik sekurang-kurang mencakup: a) dasar hukum b) persyaratan c) sistem, mekanisme, dan prosedur d) jangka waktu penyelesaian e) biaya/tarif f) produk pelayanan g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas h) kompetensi pelaksana i) pengawasan internal j) penanganan pengaduan, saran dan masukan k) jumlah pelaksana l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan m) jaminan kesamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,bebas dari bahaya , dan risiko keragu-raguan n) evaluasi kinerja pelaksana.			
834	SD00504.00.00	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah., meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
835	SD00505.00.00	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah., meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur,	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.					
836	SD006840.00.00	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2.Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
837	SD01254.03.01	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini diganakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelompok masyarakat.					
838	SD01254.01.02	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
839	SD00504.00.00	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
840	SD00773.01.00	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(DPRD).					
841	SD00773.02.00	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
842	SD01011.00.00	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
843	SD01473.00.00	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi / DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
844	SD00773.01.00	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
845	SD00773.02.00	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
846	SD01011.00.00	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
847	SD01474.00.00	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
848	SD00680.00.00	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.					
849	SD00282.01.04	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
850	SD01715.00.00	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
851	SD01254.03.01	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dihitung kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.		tahun terakhir dari si responden.			
852	SD01254.01.02	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
853	SD00621.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); Focus Group Discussion (FGD); Wawancara Mendalam (indepth interview);	1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. 2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. 3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. 4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. 5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak	indeks	indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lingkungan. 6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. 7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi.		
854	SDG0625.00.02	16.7.2.laj	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin kebebasan sipil, proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan menentukan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara 62 TUJUAN 16 PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.	1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksi-transaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis. 2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifikansi dari indikator ini adalah	indeks	indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim. 3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. Signifikansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan asas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kualitas pemilu yang demokratis. 4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifikansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan. 5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifikansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						terjadi satu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi masalah peran negara melahui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan. 6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. 7. Tindakan dan		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.		
855	SD000337.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Lembaga Demokrasi	Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara memperoleh kekuasaan dan jabatan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
856	SD000241.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Pemilu yang Bebas dan Adil	Pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang ditentukan oleh, antara lain: adanya kesempatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Pemilu; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.	kebutuhan		
857	SD01374.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Peradilan yang Independen	Pelaksanaan rule of law yang bebas intervensi, penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peradilan; Persen
858	SD01381.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah	Peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
859	SD01383.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/ DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
860	SD01384.00.00	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Peran Partai Politik	Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
861	SD00425.00.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Berkumpul	Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain rapat, rapat umum, mogok, konser musik, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan.	1. Rapat 2. Rapat Umum 3. Mogok 4. Konser Musik 5. Rapat Akbar (di lapangan) 6. Kegiatan Peribadatan	Jumlah	Kegiatan
862	SD00426.01.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Berserikat	Mendirikan atau membentuk organisasi baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar di Depdagri) maupun tidak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
863	SD00620.02.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan merekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh waga negara, yang dapat mengarah pada	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme. 2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat. 3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas dizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						terbentuk. 4. Penerimaan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan penerimaan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih 66 TUJUAN 16 PILAR		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. 5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis. 6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan.		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
864	SD00621.01.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek	Indeks	alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk	Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk. 7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 1. Baik (indeks > 80)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Kebebasan	Demokrasi Indonesia (IDI)	mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)		
865	SD0083 29.00.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kebebasan berkeyakinan	Kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
866	SD0083 2.02.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kebebasan Berpendapat	Kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
867	SD0083 4.00.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kebebasan dari Diskriminasi	Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
868	SD0083 5.00.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kebebasan Menjalankan Aturan Agama	Kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
869	SD0083 6.00.00	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kebebasan Sipil	Diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut: 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan 4. Kebebasan dari Diskriminasi	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4. Kebebasan dari Diskriminasi		
870	SD00572.00.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Hak dipilih	Hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
871	SD00575.01.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Hak memilih	Hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
872	SD00579.00.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Hak Politik	Hak politik mencakup antara lain partisipasi responden dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terakhir, adanya money politics saat pelaksanaan pemilu/pilpres/pemilukada, kepercayaan pada kinerja Presiden, DPR, Polisi, dan lembaga peradilan. Termasuk partisipasi responden pada partai politik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
873	SD00581.00.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Hak-Hak Politik	Hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
874	SD00621.01.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60–80) 3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)	Indeks	Indeks
875	SD01030.00.02	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks Kesetaraan	merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil	1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifikansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi.	Jumlah, persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya kesempatan untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu.	Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan. 2. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik. 3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok. 4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat meringankan kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi. 5. Kesetaraan ekonomi (derajat keseriangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						wilayah, khususnya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujud dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan pedesaan. 6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT. 7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dengan mempertimbangkan juga etidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.		
876	SD00185.00.00	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan	Secara harfiah partistipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui press statement, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
877	SD00125.00.00	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara	Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/ tahun perkapita.	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berkembang di Organisasi Internasional					
878	SD00126.00.00	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional	Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$/ tahun perkapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
879	SD00133.00.00	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
880	SD00170.00.00	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional	Organisasi Internasional	Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
881	SD01706.00.00	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berkembang di Organisasi Internasional	negara-negara berkembang di Organisasi Internasional				
882	SD00535.00.00	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
883	SD00630.04.01	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
884	SD00903.00.00	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 3. Tidak memiliki 4. Tidak tahu	Persentase	Persen
885	SD00046.00.00	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Lembaga pencatatan sipil	Instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
886	SD01682.00.00	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya	Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pencatatan sipil, menurut umur.	dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur				
887	SD01254.03.01	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
888	SD01254.01.02	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
889	SD00535.00.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
890	SD00903.00.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tahun pada 40% berpendapatan bawah.			3. Tidak memiliki 4. Tidak tahu		
891	SD00261.00.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan	Imbalan yang diterima baik berbentuk uang maupun barang, yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
892	SD00270.01.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan Rumah Tangga	Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
893	SD00271.01.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan/Penghasilan	Meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1. untuk jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dan 2. untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
894	SD00282.01.04	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tahun pada 40% berpendapatan bawah.					
895	SD01470.00.00	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Jumlah penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
896	SD00535.00.00	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kehumahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
897	SD00630.04.01	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
898	SD00903.00.00	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 3. Tidak memiliki 4. Tidak tahu	Persentase	Persen
899	SD01444.00.00	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada	Persentase anak yang memiliki akta	Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penduduk 0-17 tahun	kelahiran				
900	SD01254.03.01	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini diganakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
901	SD01254.01.02	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
902	SD00967.00.00	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komnas HAM	Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan untuk: a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
903	SD00038.00.00	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional	Lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakakkan dan melindungi hak asasi manusia, lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur negara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
904	SD00039.00.00	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang Independen	Institusi dengan status akreditasi "level A" sesuai United Nations Paris Principles, yang diadopsi oleh UN General Assembly tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui peer review oleh SubCommittee on Accreditation (SCA) dari ICC.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
905	SD00040.00.00	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga HAM Nasional yang Compliance dengan Paris Principles	Apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judisial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
906	SD01184.00.00	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris	Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A. Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang diinyatakan sebagai Komnas HAM berdasar UU No. 39 tahun 1999. Komnas HAM telah terakreditasi pada level "A".	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Principles				
907	SD00514.00.01	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik	Jumlah	Kasus
908	SD00592.00.00	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Hukum HAM Internasional	Seperangkat aturan internasional yang memperkuat hak dan martabat semua manusia (wanita, pria dan anak-anak) tanpa diskriminasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
909	SD00218.00.00	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi	Pelecehan	Setiap perilaku yang tidak pantas dan tidak diinginkan yang mungkin secara wajar diharapkan atau dianggap menyebabkan pelanggaran atau penghinaan bagi orang lain. Pelecehan dapat berupa kata-kata, isyarat, atau tindakan yang cenderung menganggu, mengkhawatirkan, melecehkan, merendahkan, mengintimidasi, meremehkan, menghina atau mempermalukan orang lain atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, permusuhan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					atau menyinggung.			
910	SD002822.01.04	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
911	SD01744.00.00	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
912	SD00514.00.01	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung atupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.	4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik		
913	SD00592.00.00	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Hukum HAM Internasional	Seperangkat aturan internasional yang memperkuat hak dan martabat semua manusia (wanita, pria dan anak-anak) tanpa diskriminasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
914	SD00720.01.01	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kebijakan
915	SD00840.00.02	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	Kebijakan yang Diskriminatif	Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.			
916	SD00587.00.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Hibah	Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.	1. hibah uang 2. hibah barang/jasa 3. hibah surat berharga	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
917	SD00262.00.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah 4. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
918	SD00268.00.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan pajak perdagangan internasional	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
919	SD00269.00.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Pemerintah (Negara)	Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah	1. Penerimaan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Hibah	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
920	SD00299.01.00	17.1.1*	Total pendapatan	Penerimaan	Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan	1. SDA Migas	Nilai;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Negara Bukan Pajak (PNBP)	dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara	2. SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi) 3. Bagian laba BUMN 4. PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L) 5. Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	Persentase	Persen
921	SD002999.02.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. SDA Migas 2. SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi) 3. Bagian laba BUMN 4. PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L) 5. Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
922	SD003002.01.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah digregasikan kedalam penerimaan dari pajak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
923	SD003002.02.00	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Perpajakan	Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
924	SD91231.00.00	17.1.1*	Total pendapatan	Total	Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100% .	analisis atau sesuai kebutuhan		
925	SD00266.00.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
926	SD00268.00.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Pendapatan pajak perdagangan internasional	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
927	SD00300.01.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah digregasikan kedalam penerimaan dari pajak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
928	SD00300.02.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
929	SD00303.00.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Penerimaan perpajakan pemerintah daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Pajak Rokok		
930	SD01659.00.01	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
931	SD01659.00.02	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB)Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
932	SD01837.00.00	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.	1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat 2. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah	Persentase	Persen
933	SD00637.00.00	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
934	SD00410.02.00	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Belanja Negara (sebagai proksi untuk Anggaran Domestik)	Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah pusat menurut program.	Nilai	Rupiah
935	SD00470.00.00	17.1.2*	Proporsi anggaran	Dana Desa	Dana yang berasal dari APBN diperuntukkan bagi desa	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			domestik yang didanai oleh pajak domestik.		yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
936	SD00267.00.00	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
937	SD01686.00.00	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
938	SD00559.00.00	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA)	Free Trade Agreement	Perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
939	SD01236.00.00	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA)	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA)	Indikator yang menyediakan nilai custom duties levied oleh 6 negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
940	SD01163.00.00	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA)	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. $ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.			
941	SD01164.00.00	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA)	Tarif Terbobot	Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
942	SD00559.00.00	17.10.1.(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati	Free Trade Agreement	Perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
943	SD00764.00.00	17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Jumlah Dokumen Kesepakatan Perundingan yang ditandatangani di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional, dalam lingkup PTA, FTA, maupun CEPA, termasuk tahapan kesepakatan Joint Feasibility Studies, dan kesepakatan melakukan review suatu perjanjian, namun tidak termasuk perundingan yang dalam tahap pengusulan, maupun initial discussion.	1. PTA 2. FTA 3. CEPA	Jumlah	Dokumen
944	SD01630.00.00	17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Prefential Trade Agreement (PTA)	Perjanjian internasional dengan keanggotaan terbatas dan bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar masing-masing negara yang berpartisipasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
945	SD01631.00.00	17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Prefential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement	Indikator yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, menyediakan jumlah dari kesepakatan di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional yang dilaksanakan Indonesia dan mitra baik untuk perdagangan barang, perdagangan barang dan jasa,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang disepakati	maupun perdagangan dan sektor lain dalam perekonomian (Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dll) yang secara strategis mencerminkan kepentingan Indonesia terhadap mitra.			
946	SD00376.00.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
947	SD00533.01.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
948	SD00533.02.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
949	SD00125.00.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/ tahun perkapita.	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
950	SD00126.00.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$ / tahun perkapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
951	SD00127.00.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
952	SD00133.00.00	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
953	SD00533.01.00	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
954	SD00533.02.00	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
955	SD00536.00.00	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor nonmigas	Agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
956	SD00150.00.00	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Non migas	Dihuar gas dan minyak bumi (tentang barang produksi, dan sebagainya) yang tidak tergolong gas dan minyak bumi.	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Pertambangan dan lainnya	Massa bersih; volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; USD
957	SD01597.00.00	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor nonmigas pada tahun ke - t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan Harmonized System (HS)/Buku Tarif Kepabeanan Indonesia	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(BTKI)		
958	SD01246.00.00	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
959	SD01163.00.00	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. $ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
960	SD00483.00.00	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Dashboard Makroekonomi	Merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks; Proporsi;Persentase	Indeks; Persen
961	SD01180.00.00	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut: 1. Alert: Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi; 2. Global: Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel ekonomi dunia; 3. Forecast: Memproyeksi perkembangan ekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks; Proporsi;Persentase	Indeks; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan; 4. Perkembangan Pasar: Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.			
962	SD00743.00.00	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
963	SD00224.00.00	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
964	SD00667.00.00	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Jangkauan Penggunaan Kerangka Kerja	Indikator ini mengukur sejauh mana dan cara yang digunakan dalam kerangka kerja hasil-hasil yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang, yang digunakan oleh mitra pembangunan terkait untuk merencanakan upaya kerjasama pembangunan dan menilai kinerjanya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
965	SD00668.00.00	17.15.1	Jangkauan penggunaan	Jangkauan penggunaan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			keterangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan		kebutuhan		
966	SD00911.00.00	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Kerangka Kerja Monitoring Efektifitas Pembangunan Multi-Stakeholder	Indikator ini mengukur kualitas dan efektivitas hubungan antara mitra pembangunan. Semakin baik hubungan antara semua mitra terkait, semakin baik kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
967	SD00128.00.00	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
968	SDG00897.00.00	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership (PPP))	Suatu perjanjian atau kontrak, antara entitas publik dan pihak swasta, di mana: (a) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung, (c)) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul, dan (d) fasilitas publik, tanah atau sumber daya lainnya dapat ditransfer atau disediakan untuk pihak swasta. An agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly; (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
969	SDG0965.00.00	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Komitmen	Perjanjian (kontraktual) untuk melakukan sesuatu; kontrak; tanggung jawab.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
970	SDG0966.00.00	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				masyarakat sipil (dalam US dollars)				
971	SD00086.00.00	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Masyarakat Sipil	Kombinasi organisasi pemerintah, non pemerintah, kelompok masyarakat, berbasis organisasi masyarakat, organisasi perwakilan regional, serikat pekerja, lembaga penelitian, badan profesional, dan kelompok lain yang mewakili minat dan keinginan anggota dan komunitas yang lebih luas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Organisasi, Kelompok; Persen
972	SD00704.00.00	17.17.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Jumlah dokumen proyek yang siap ditawarkan ditambah dengan jumlah dokumen proyek yang sedang dalam proses penyiapan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
973	SD00920.00.01	17.17.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
974	SD00174.00.00	17.17.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Output tahap perencanaan	Daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
975	SD01161.00.00	17.17.1.(a)	Pertumbuhan	Tahap	Tahapan dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Tahapan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ekspor produk non migas	perencanaan skema KPBU	Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU (DRK)	analisis atau sesuai kebutuhan		
976	SD00629.00.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah alokasi penyiapan KPBU ditambah dengan jumlah alokasi untuk transaksi KPBU ditambah dengan jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
977	SD00375.01.01	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Badan Usaha	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas 4. Badan hokum asing, atau koperasi	Jumlah; persentase	Orang; persen
978	SD00375.02.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan	Badan Usaha	Perusahaan perseorangan atau persekutuan perseroan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hokum asing, atau	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Badan Usaha (KPBU).		koperasi.	Perseroan Terbatas 4. Badan hokum asing, atau koperasi		
979	SD00529.00.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dukungan Pemerintah	Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
980	SD00763.00.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Proyek
981	SD00920.00.01	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
982	SD00920.00.01	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk	Kerjasama Pemerintah	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	dan Badan Usaha (KPBU)	dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.	kebutuhan		
983	SD00174.00.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Output tahap perencanaan	Daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
984	SD01366.00.02	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Penyediaan Infrastruktur	Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
985	SD01161.00.00	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tahap perencanaan skema KPBU	Tahapan dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD meyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU (DRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tahapan
986	SD00375.01.02	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek	Badan Usaha	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.		Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.	2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.		
987	SD060529.00.00	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Dukungan Pemerintah	Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
988	SD007746.00.00	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Jumlah nilai investasi dalam penyiapan KPBU ditambah dengan Jumlah nilai investasi transaksi KPBU ditambah dengan Jumlah nilai investasi yang sudah beroperasi	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.	Jumlah	Rupiah
989	SD009210.00.02	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing,	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pihak	atau kerjasama		
990	SD01366.00.01	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Penyediaan Infrastruktur	Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau kerjasama.	Persentase	Persen
991	SD01653.00.00	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi	Prinsip 1. Statistik resmi memberikan elemen yang sangat diperlukan dalam sistem informasi masyarakat yang demokratis, melayani pemerintah, ekonomi dan publik dengan data tentang situasi ekonomi, demografis, sosial dan lingkungan. Untuk tujuan ini, statistik resmi yang memenuhi uji utilitas praktis harus disusun dan tersedia secara tidak memihak oleh lembaga statistik resmi untuk menghormati hak warga negara atas informasi publik. Prinsip 2. Untuk mempertahankan kepercayaan pada statistik resmi, lembaga statistik perlu memutuskan secara profesional pertimbangan, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesional, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data statistik. Prinsip 3. Untuk memfasilitasi interpretasi data yang benar, lembaga statistik harus menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur statistik. Prinsip 4. Badan statistik berhak mengomentari interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik. Prinsip 5. Data untuk keperluan statistik dapat diambil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik atau catatan administratif. Badan statistik harus memilih sumber sehubungan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban responden. Prinsip 6. Data individu dikumpulkan oleh lembaga statistik untuk kompilasi statistik, apakah itu menjuk pada yang orang atau hukum, harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik. Prinsip 7. Undang-undang, peraturan, dan tindakan yang digunakan sistem statistik untuk diumumkan kepada publik. Prinsip 8. Koordinasi di antara lembaga statistik di dalam negara adalah penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik. Prinsip 9. Penggunaan oleh lembaga statistik di setiap negara konsep internasional, klasifikasi dan metode mempromosikan konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkatan resmi. Prinsip 10. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara.			
992	SD01699.00.00	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi				
993	SD01159.00.00	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Goals; Persen
994	SD01589.00.00	17.18.1.(a)	Persentase penggunaan data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persentase penggunaan data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.	1. Instansi Pemerintah 2. Instansi Swasta 3. Akademisi 4. Lainnya	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
995	SD01591.00.00	17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.	1. Instansi Pemerintah 2. Instansi Swasta 3. Akademisi 4. Lainnya	Persentase	Persen
996	SD00742.00.00	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Ada/tidaknya undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
997	SD01653.00.00	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik	Prinsip 1. Statistik resmi memberikan elemen yang sangat diperlukan dalam sistem informasi masyarakat yang demokratis, melayani pemerintah, ekonomi dan publik dengan data tentang situasi ekonomi, demografis, sosial dan lingkungan. Untuk tujuan ini, statistik resmi yang memenuhi uji utilitas praktis harus disusun dan tersedia secara tidak membuat oleh lembaga statistik resmi untuk menghormati hak warga negara atas informasi publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Prinsip 2. Untuk mempertahankan kepercayaan pada statistik resmi, lembaga statistik perlu menuruskan secara profesional pertimbangan, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesional, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data statistik. Prinsip 3. Untuk memfasilitasi interpretasi data yang benar, lembaga statistik harus menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur statistik. Prinsip 4. Badan statistik berhak mengementari interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik. Prinsip 5. Data untuk keperluan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik atau catatan administratif. Badan statistik harus memilih sumber sehubungan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban responden. Prinsip 6. Data individu dikumpulkan oleh lembaga statistik untuk kompilasi statistik, apakah itu merujuk pada yang orang atau hukum, harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik. Prinsip 7. Undang-undang, peraturan, dan tindakan yang digunakan sistem statistik untuk diumumkan kepada publik. Prinsip 8. Koordinasi di antara lembaga statistik di dalam negara adalah penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik. Prinsip 9. Penggunaan oleh lembaga statistik di setiap negara konsep internasional, klasifikasi dan metode mempromosikan konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkatan resmi.			

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Prinsip 10. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara.			
998	SD013447.00.00	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	Kemampuan lembaga statistik dalam memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional dengan review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen
999	SD01255.01.00	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Undang-Undang Statistik Nasional	Mendefinisikan aturan, regulasi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan pengawasan kegiatan statistik secara sistematis, efektif, dan efisien untuk menjamin ketercakupan, akurasi, dan konsistensi dengan fakta, guna memberikan referensi/acuan dalam penetapan arah kebijakan, perencanaan sosial-ekonomi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan kesetaraan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1000	SD01255.02.00	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Undang-Undang Statistik Nasional	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1001	SD007740.00.00	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional	Jumlah negara dengan Perencanaan	Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), yang mencakup: pelaksanaan strategi,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara.			
1002	SD00883.00.00	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1003	SD00122.00.00	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem statistik. Strategi Nasional Pengembangan Statistik menetapkan prioritas statistik dalam jangka menengah dan panjang untuk memenuhi peningkatan permintaan akan informasi dari pemerintah dan pengguna data lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1004	SD01111.00.00	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan	Sistem Statistik Nasional	Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			rencananya berdasar sumber pendanaan.					
1005	SD01186.00.00	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS), yaitu strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1006	SD00784.00.00	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negaranegara berkembang	Kapasitas Statistik	Kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan diseminasi terhadap data berkualitas tinggi mengenai populasi dan ekonominya (a nation's ability to collect, analyze, and disseminate high-quality data about its population and economy).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1007	SD00125.00.00	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negaranegara berkembang	Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/ tahun perkapita.	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1008	SD00126.00.00	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negaranegara berkembang	Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$ / tahun perkapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1009	SD00133.00.00	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negaranegara berkembang	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1010	SD00139.00.00	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
1011	SD01464.00.00	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik dikalikan dengan 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1012	SD01325.00.00	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Rekomendasi kegiatan statistik	Suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rekomendasi
1013	SD00105.00.00	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Metadata	Informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola.	1. Metadata Sektoral 2. Metadata Khusus	Jumlah	Metadata
1014	SD00106.00.00	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I	Metadata	Metadata	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Metadata

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	khusus	kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelanggaran riset atau penelitian.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1015	SD00107.00.00	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Metadata sektoral	Metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Metadata
1016	SD01584.00.00	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar dibagi dengan jumlah K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral dan khusus dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1017	SD00868.00.00	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
1018	SD00884.00.00	17.19.2	Proporsi negara	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) Mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.		jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1019	SD01724.00.00	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian	""Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.""	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1020	SD01093.00.00	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan	Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.					
1021	SD01093.00.00	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen
1022	SD01178.00.00	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen
1023	SD00868.00.00	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan aborsi/keguguran.	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
1024	SD00884.00.00	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1025	SD01280.00.00	17.19.2.(b)	Tersedianya data	Registrasi	Rangkaian proses pendaftaran dan penilaian	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Proses;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).		pemenuhan persyaratan.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1026	SD01181.00.00	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen Administrasi; Persen
1027	SD00389.00.00	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD / Komite Bantuan Pembangunan.	Bantuan Pembangunan (Official Development Assistance)	Bantuan pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang (government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1028	SD00390.00.00	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada	**Indikator global yang akan dikembangkan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.	negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan				
1029	SD|0127.00.00	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap ancaman ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1030	SD|0172.00.00	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada	Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The	Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi yang beranggotakan 36 negara Eropa dan Amerika Utara ditambah Jepang dan Korea Selatan. Indonesia, bersama dengan Brazil, India, dan China, atau BRIC menjadi key partners dari OECD yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD / Komite Bantuan Pembangunan.	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))	didirikan pada tahun 1961 dan berpusat di Paris.			
1031	SDG0264.02.01	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD / Komite Bantuan Pembangunan.	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	1. PNB Pengeluaran 2. PNB Lapangan Usaha	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1032	SDG0264.02.02	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negaranegara kurang	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	1. PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2. PNB Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD / Komite Bantuan Pembangunan.					
1033	SD00265.00.00	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara kesehariahan dan kepada negaranegara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD / Komite Bantuan Pembangunan.	Pendapatan Neto	Pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1034	SD00161.05.00	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Official Development Assistance (ODA)	Statistik jumlah bantuan dari negara maju secara bilateral secara langsung kepada negara berkembang dan/ataupun melalui organisasi internasional seperti lembaga pembangunan multilateral dan institusi keuangan internasional dengan tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang meliputi perhitungan disbursement untuk ODA yang masuk dan ODA yang keluar atau yang bersifat hibah dan pinjaman lunak termasuk technical assistance.	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah 3. Kerjasama Teknik	Jumlah;Nilai	Negara; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1035	SD00264.01.01	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri.	1. PNB Pengeluaran 2. PNB Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1036	SD00264.01.02	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri.	1. PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2. PNB Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai	Rupiah
1037	SD01730.00.00	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Proporsi ODA terhadap PDB	Jumlah disbursement Official Development Assistance (ODA) masuk dikurangi keluar dibagi Produk Domestik Bruto dikalikan dengan 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1038	SD01731.00.00	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Proporsi ODA terhadap PNB	Jumlah disbursement Official Development Assistance (ODA) masuk dikurangi keluar dibagi Produk Nasional Bruto dikalikan dengan 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1039	SD01026.01.00	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.	Investasi Asing Langsung	Investasi penduduk Indonesia pada suatu perusahaan di luar negeri, yang ditandai dengan kepemilikan modal saham (equity capital) minimal 10%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1040	SD01026.02.00	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari	Investasi Asing Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pendapatan nasional bruto.					
1041	SDG1027.00.00	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1042	SDG0921.01.00	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1043	SDG0921.02.00	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, non-kondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta mengantikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto		solidaritas antarnegara berkembang.			
1044	SD00264.02.01	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	1. PNB Pengeluaran 2. PNB Lapangan Usaha	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1045	SD00264.02.02	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP)	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	1. PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2. PNB Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1046	SD00265.00.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Pendapatan Neto	Pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1047	SD01327.01.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Remitansi	Bagian dari transfer dana yang umumnya dilakukan tanpa dasar /underlying pemenuhan suatu kewajiban ekonomi, bernilai kecil/low value dan dilakukan antar perorangan.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1048	SD01327.02.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Remitansi	Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1049	SD01327.03.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi	Remitansi	Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB			berharga		
1050	SD01329.00.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Remitansi Pribadi	Arus masuk pengiriman uang pribadi dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). The inflow of personal remittances expressed as a percentage of Gross Domestic Product (GDP).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1051	SD01173.00.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1052	SD01291.00.00	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1053	SD00112.01.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Migran	Seseorang yang datang ke suatu ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih.	1. Migran 2. Non Migran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1054	SD00200.02.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Pekerja Migran Indonesia	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	1. Pekerja migran internal 2. Pekerja migran internasional.	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1055	SD01797.00.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars)	Proporsi volume remitansi PMI	Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terhadap PDB	(dalam US dollars) terhadap PDB				
1056	SD01327.01.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Remitansi	Bagian dari transfer dana yang umumnya dilakukan tanpa dasar /underlying pemenuhan suatu kewajiban ekonomi, bernilai kecil/low value dan dilakukan antar perorangan.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1057	SD01327.02.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Remitansi	Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1058	SD01328.00.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Transfer dari PMI yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1059	SD01330.00.00	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	Remitansi Tenaga Kerja	Transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah/USD; Persen
1060	SD00458.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Daerah Pabean	Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
1061	SD00490.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Debt Service Ratio	Rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1062	SD00533.01.00	17.4.1*	Proporsi	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	1. Migas	Berat	Ton; kg;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.			2. Non migas	bersih/volume; nilai	Rupiah; US$
1063	SD00533.02.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
1064	SD00534.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Ekspor Barang dan Jasa	Pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US$
1065	SD00611.01.01	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Impor	Kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.	1. Migas 2. Non migas	Berat Bersih; Volume; Nilai	Ton; m3; Rupiah; USD
1066	SD00611.02.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Impor	Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.	1. Migas 2. Non migas	Berat Bersih; Volume; Nilai	Ton; m3; Rupiah; USD
1067	SD00158.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt	Obligasi Negara (ON)	SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon.	1. Obligasi Negara dengan kupon 2. Obligasi Negara tanpa	Jumlah	Obligasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Service) terhadap ekspor barang dan jasa.			kupon		
1068	SD00159.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Obligasi Negara dengan Kupon	Memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Obligasi
1069	SD00160.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Obligasi Negara Tanpa Kupon	Tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Obligasi
1070	SD00282.01.04	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1071	SD01349.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Penerimaan Transaksi Berjalan	Penerimaan dari transaksi ekspor barang dan jasa dan penerimaan pendapatan primer dan sekunder.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1072	SD01802.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service)	Jumlah (nilai) pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri dibagi dengan jumlah (nilai) penerimaan transaksi berjalan dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			jasa.	terhadap ekspor barang dan jasa.				
1073	SD01156.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
1074	SD01157.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
1075	SD01158.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.	1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 2. Obligasi Negara (ON)	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
1076	SD01238.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transaksi barang ekspor	Mencakup barang dagangan umum emas non moneter dan net ekspor barang merchanting	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
1077	SD01239.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan	Transaksi Berjalan	Mencakup ekspor dan impor barang, jasa, pendapatan, serta transfer berjalan. Transaksi finansial meliputi investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya di luar cadangan devisa dan kredit/pinjaman IMF yang disajikan sebagai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			jasa.		komponen tersendiri.			
1078	SD01240.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transaksi jasa ekspor	Mencakup jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan , jasa kontruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kebudayaan, dan rekreasi, dan jasa pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
1079	SD01241.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transfer Berjalan	Mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah (government) dan sektor lainnya (other sectors). Transfer berjalan sektor lainnya mencakup pula transfer dari tenaga kerja (workers' remittances)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transfer; Persen
1080	SD01285.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri	Posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang mewajibkan pembayaran kembali bunga dan/ atau pokok pada waktu yang akan datang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
1081	SD01286.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri Pemerintah	Utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.	1. Utang Bilateral 2. Utang Multilateral 3. Utang Komersial 4. Utang Supplier 5. Surat Berharga Negara (SBN)	Nilai	USD
1082	SD01287.00.00	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat	Utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan leasing, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN)	1. Surat Utang Negara 2. Surat Berharga Syariah Negara	Nilai	USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk.			
1083	SD01025.01.01	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Investasi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.	1. Dalam Negeri 2.Luar Negeri	Nilai	Rupiah; USD
1084	SD01025.01.02	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Investasi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.	1. Langsung 2. Tidak Langsung.	Nilai	Rupiah; USD
1085	SD01025.01.03	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang	Investasi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.	1. PMA 2. PMDN	Nilai	Rupiah; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			termasuk negaranegara kurang berkembang					
1086	SD01025.01.04	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Investasi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.	1. Rencana 2. Realisasi	Nilai	Rupiah; USD
1087	SD01026.01.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Investasi Asing Langsung	Investasi penduduk Indonesia pada suatu perusahaan di luar negeri, yang ditandai dengan kepemilikan modal saham (equity capital) minimal 10%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1088	SD01026.02.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara	Investasi Asing Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kurang berkembang					
1089	SD01028.00.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara negara berkembang termasuk negara negara kurang berkembang	Investasi Dalam Negeri / Penanaman Investasi Dalam Negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1090	SD01029.00.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Investasi Langsung	Menyajikan total aset dan total kewajiban, yang masing-masing dirinci menjadi modal saham (equity capital), laba ditanam kembali (reinvested earnings), dan modal lainnya (other capital).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
1091	SD00127.00.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1092	SD00131.00.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1093	SD00246.00.00	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negaranegara berkembang termasuk negaranegara kurang berkembang	Penanaman Modal Asing (PMA)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.	1. Warga Negara Asing (WNA) 2. Badan Usaha Asing 3. Pemerintah Asing	Nilai	Rupiah/ USD
1094	SD00474.00.00	17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.	1. 256 kbit/s hingga kurang dari 2 Mbit/s 2. 2 Mbit/s hingga kurang dari 10 Mbit/s 3. Sama dengan atau lebih dari 10 Mbit/s	Kecepatan	Mbps
1095	SD01024.03.00	17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.			
1096	SD00023.00.00	17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelanggan
1097	SD01613.00.00	17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1098	SD00456.00.00	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Akses pitalebar (broadband access)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed).	1. 256 kbit/s hingga kurang dari 2 Mbit/s 2. 2 Mbit/s hingga kurang dari 10 Mbit/s 3. Sama dengan atau lebih dari 10 Mbit/s	Kecepatan	Mbps
1099	SD01586.00.00	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total	Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) dibagi dengan jumlah total rumah tangga di Indonesia dikali dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				rumah tangga				
1100	SD01613.02.00	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Pitalebar (broadband)	Teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1101	SD00422.02.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Akses Bergerak Pitalebar (Mobile Broadband)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps.	1. Modem portabel 2. Modem nirkabel USB 3. Tablet / smartphone 4. Perangkat seluler lainnya	Kecepatan	Mbps
1102	SD00474.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.	1. 256 kbit/s hingga kurang dari 2 Mbit/s 2. 2 Mbit/s hingga kurang dari 10 Mbit/s 3. Sama dengan atau lebih dari 10 Mbit/s	Kecepatan	Mbps
1103	SD00459.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Daerah Perdesaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
1104	SD00460.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1105	SD00607.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Ibukota Kabupaten/Kota (IKK)	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
1106	SD00671.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Jaringan serat optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kebel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	jaringan
1107	SD00672.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi berbasis serat optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya sehingga terbentuk konfigurasi ring.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan; Persentase	Gbps (Gigabytes per second); Persen
1108	SD00673.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan; Persentase	Gbps (Gigabytes per second); Persen
1109	SD00773.01.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1110	SD00773.02.00	17.6.1.(b)	Persentase	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Kabupaten;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)		bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1111	SD00841.02.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Kecamatan	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh camat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kecamatan
1112	SD01011.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
1113	SD00165.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Optic Distribution Point (ODP)	Tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tempat ODP
1114	SD00282.01.04	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1115	SD01462.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau	Persentase jaringan tulang punggung	Jumlah IKK terkoneksi dibagi dengan jumlah total IKK dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK)				
1116	SD01585.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) dibagi dengan jumlah total kecamatan di Indonesia dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1117	SD01613.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1118	SD01613.01.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1119	SD01740.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Jumlah rumah terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1120	SD01050.02.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makanannya dari satu dapur. Yang dimakand dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1121	SD01052.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1122	SD01053.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1123	SD01205.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Jumlah rumah terkoneksi fixed broadband dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1124	SD01312.00.00	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Wireless Broadband	Layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Kbps
1125	SD00125.00.00	17.7.1	Total jumlah dana	Negara	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/	1. Lower middle	Jumlah;	Negara;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, menddiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	tahun perkapita.	2. Upper middle	persentase	Persen
1126	SD00126.00.00	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, menddiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$/ tahun perkapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1127	SD00133.00.00	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, menddiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1128	SD01168.00.00	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Teknologi Ramah Lingkungan	Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi Ramah Lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi - Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, pengunaan bahan kimia)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
1129	SD01228.00.00	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
1130	SD00462.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Daerah Terbelakang/Terpencil	Daerah di mana akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Pada daerah itu juga harga-harga tinggi dan sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau penamaan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.			
1131	SD00463.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Daerah Tertinggal	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (i) Perekonomian masyarakat; (ii) Sumberdaya manusia; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Kemampuan keuangan daerah; (v) Aksesibilitas; (vi) Karakteristik daerah.	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
1132	SD00452.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Daerah Tertinggal, Terdepan dan Tertukar (3T)	Daerah yang termasuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan).	1. Tertinggal 2. Terdepan 3. Terluar (Perbatasan)	Jumlah; persentase	Daerah; Persen
1133	SD01024.03.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak dianjurkan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon sehler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1134	SD01024.03.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Internet	jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1135	SD00773.01.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1136	SD00773.02.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1137	SD00774.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dimaksud meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut: 1. Wilayah terluar yang terdapat di 9 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 20. 2. Wilayah terdepan yang terdapat di 8 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 23. 3. Wilayah tertinggal yang terdapat di 22 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 99.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1138	SD00098.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Mengakses Internet	Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membukan dan menutup (log in dan log out) internet dan hanya melanjutkan permainan saja termasuk dalam mengakses internet. Contoh: seorang anak yang bermain games online tetapi log in (membuka internet) dibukakan oleh orang tuanya/orang lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1139	SD00100.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Menggunakan Internet	Apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, media sosial, online games, dan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1140	SD01807.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Pengguna internet	Individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan. Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas terhadap seluruh jumlah populasi penduduk berdasarkan Survei National Penetrasi Pengguna Internet.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pengguna Internet
1141	SD01590.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Persentase pengguna internet	Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1142	SD01809.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1143	SD01810.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menhubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1144	SD01169.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Telekomunikasi	Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teekomunikasi; Persen
1145	SD01169.00.00	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teekomunikasi; Persen
1146	SD00921.01.00	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan	Kerjasama Selatan-	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara negara berkembang	Selatan (KSS)	pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	kebutuhan		
1147	SDG0921.02.00	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara negara berkembang	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta mengartikan solidaritas antarnegara berkembang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1148	SDG0923.00.00	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara negara berkembang	Kerjasama Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1149	SDG0140.00.00	17.9.1	Nilai dolar atas	Nilai dolar atas	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan	Klasifikasi berdasarkan	Nilai	USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bantuan teknis dan Pembiayaan (termasuk melalui kerjasama UtaraSelatan, SelatanSelatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negaranegara berkembang	bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara Selatan Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negaranegara berkembang	dikembangkan.**	analisis atau sesuai kebutuhan		
1150	SD00753.00.00	17.9.1.(p)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1151	SD00916.00.00	17.9.1.(q)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)	Kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1152	SD00918.00.00	17.9.1.(r)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional	Kerja Sama Triangular	Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			termasuk KSST		Pemerintah Indonesia.			
1153	SD00921.02.00	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antarnegara berkembang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1154	SD00922.00.00	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1155	SD00761.00.00	17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1156	SD00916.00.00	17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)	Kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1157	SD00917.00.00	17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(KSST				
1158	SD00918.00.00	17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerja Sama Triangular	Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1159	SD00565.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of Undernourishment).	Gizi Buruk	Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <-3SD tabel baku WHO-NCHS. Gizi buruk ini meliputi marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.	1. Marasmus 2. Kwashiorkor 3. Marasmus-kwashiorkor	Persentase	Persen
1160	SD00867.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of Undernourishment).	Kekurangan gizi (underweight)	Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/ atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweiieght adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).	1. Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO 2. Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO	Baku WHO	SD
1161	SD00959.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of Undernourishment).	Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment)	Kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1162	SD00959.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of	Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (undernourish	Kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Undernourishment berbeda	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Undernourishment).	ment)	dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi.			
1163	SD01635.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi	Proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1164	SD01643.00.00	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ((Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana jumlah anak balita mengalami kekurangan gizi (underweight) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak balita, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1165	SD00777.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Kalori	Energi yang diperoleh dari makanan dan minuman serta penggunaan energi dalam aktivitas fisik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kkal; persen
1166	SD00914.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Kerawanan Pangan	kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumahtangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertemubuhan dan kesehatan sebagian masyarakat	Rawan pangan kronis, rawan pangan sementara	Persentase	Persen
1167	SD00942.01.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan	Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: Kecukupan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.		ketersediaan pangan, Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta Kualitas/keamanan pangan.			
1168	SD00942.02.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Ketahanan pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyaraikat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1169	SD01646.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) berdasarkan skala referensi global.	1. Tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan 2. Rawan pangan sedang atau parah 3. Rawan pangan parah	Persentase	Persen
1170	SD01735.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1171	SD01272.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan	Rawan pangan akut atau	Mencangkup rawan pangan musiman. Rawan pangan ini terjadi karena adanya kejutan yang sangat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Skala	Poin

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	transitory	membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga, terutama mereka yang berada di pedesaan. Bagi rumah tangga diperkotaan rawan pangan tersebut disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan pengangguran.	kebutuhan		
1172	SD01274.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Rawan pangan kronis	Kondisi kurang pangan (untuk tingkat rumah tangga berarti kepemilikan pangan lebih sedikit dari pada kebutuhan dan untuk tingkat individu konsumsi pangan lebih rendah dari pada kebutuhan biologis) yang terjadi sepanjang waktu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Skala	Poin
1173	SD01199.00.00	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala berat, Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tingkat Konsumsi Minimum	Tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1174	SD01650.00.00	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Jumlah anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥-3,0 s/d Zscore < -2,0	Persentase	Persen
1175	SD01651.00.00	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥-3,0 s/d Zscore < -2,0	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tahun/balita.				
1176	SD01136.01.00	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Stunting	Kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.	1. Sangat pendek: Z-score <-3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD	Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005	Nilai terstandar (Z-score)
1177	SD01136.02.00	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Stunting	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	1. Sangat pendek: Z-score <-3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD	Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005	Nilai terstandar (Z-score)
1178	SD01137.00.00	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Stunting (pendek/sangat pendek)	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥-3,0 s/d Zscore < -2,0	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1179	SD00157.00.00	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Obesitas (gemuk/sangat gemuk)	Penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebih (eksesif), biasanya menggunakan ukuran berat badan menurut tinggi badan dibandingkan tinggi badan >2 standar WHO 2005.	1. Gemuk : Zscore >2, 0 s/d Zscore ≤3,0 2. Obesitas : Zscore >3,0	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1180	SD01636.00.00	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan	Prevalensi anak balita yang menderita obesitas	Jumlah anak balita yang menderita gemuk/sangat gemuk pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. Gemuk : Zscore >2, 0 s/d Zscore ≤3,0 2. Obesitas : Zscore >3,0	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tipe.					
1181	SD01637.00.00	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi anak balita yang menderita wasting	Jumlah anak balita yang menderita kurus/sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. Sangat Kurus : Zscore <-3,0 2. Kurus : Zscore ≥-3,0 s/d Zscore < -2,0	Persentase	Persen
1182	SD01305.00.00	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Wasting (kurus)	Kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Penyebab langsung dari wasting adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit.	1. Sangat Kurus : Zscore <-3,0 2. Kurus : Zscore ≥-3,0 s/d Zscore < -2,0	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1183	SD00635.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Anemia	Suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis.	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Persentase	Persen
1184	SD00369.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	ASI (Air Susu Ibu)	Makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Memberikan ASI atau menyusui dengan rasa kasih sayang juga dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.	1. Ya 2. Tidak	Persentase	Persen
1185	SD00402.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Bayi	Anak berusia/berumur kurang dari 1 (satu) tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1186	SD00606.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi	Ibu hamil	Ibu hamil dengan kadar Hb <11,0 g/dl yang diperiksa	1. Anemia Ringan	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	anemia	pada saat kunjungan pertama (K1).	2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Persentase	Persen
1187	SD00118.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu ketersediaan dan konsumsi pangan.	1. Sangat rendah (< 55) 2. Rendah (55-70) 3. Cukup (71-84) 4. Tinggi (>85).	Skor PPH	Indeks
1188	SD00119.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersedaiaan dan atau konsumsi pangan. Menurut FAO -RA-PA, PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1189	SD01448.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekskusif	Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh bayi usia 0-5 bulan 29 hari di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1190	SD01616.01.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Pola Pangan Harapan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.	1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/Biji Berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayur dan Buah	Skor PPH	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1191	SD01616.02.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Skor PPH
1192	SD01114.00.00	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Skor PPH; Persen
1193	SD00635.00.00	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Anemia	Suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fiologis	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Persentase	Persen
1194	SD00606.00.00	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Ibu hamil anemia	Ibu hamil dengan kadar Hb <11,0 g/dl yang diperiksa pada saat kunjungan pertama (K1). Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang bisa bertahan sepanjang usia awal anak dan menghambat pertumbuhan sel-sel otak anak serta sel-sel tubuh lainnya, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1195	SD01639.00.00	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1196	SD01662.00.00	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani	Produsen pangan skala kecil berdasarkan	(1) Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare)	1. Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	Food and Agriculture Organization (FAO)	(2) Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU) (3) Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi) pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$.	pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)		
1197	SD01294.00.00	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan	Rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Variasi dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi pertanian dari produsen pangan skala kecil yang mengusahakan tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	1. Tanaman 2. Peternakan 3. Perikanan 4. Kehutanan	Persentase	Persen
1198	SD00144.01.00	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	Nilai Tambah	Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya intermediate input (biaya antara).	1. Nilai output 2. Nilai input	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1199	SD00147.00.00	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas	Nilai tambah pertanian dibagi dengan total tenaga kerja di sektor pertanian dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja. Yang dimaksud Nilai Tambah adalah Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan	Nilai	Rupiah/Tenaga Kerja

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	intermediate input (biaya antara).	5. Perikanan 6. Kehutanan		
1200	SD01087.00.01	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	Sektor Pertanian	Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian.	KBLI	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1201	SD01087.00.02	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	Sektor Pertanian	Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian.	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1202	SD01171.02.01	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	Tenaga Kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.	1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1203	SD01615.00.00	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	Produsen pangan dan pertanian skala kecil (FAO)	a. petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas perusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare); b. peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40%terbawah) dari distribusi kumulatif	1. Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40%	Rata-rata	Pendapatan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU); c. rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$.	terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)		
1204	SD01088.00.00	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	Rata-rata pendapatan produsen pangan skala kecil sama dengan skala kecil dibagi jumlah produsen pangan skala kecil.	1. Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1205	SD00818.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	1. Kawasan budidaya tanaman pangan 2. Kawasan budidaya hortikultura 3. Kawasan budidaya perkebunan 4. Kawasan budidaya	Luas; Persentase	Ha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kehutanan 5. Kawasan budidaya peternakan		
1206	SD00222.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang	1. Lahan beririgasi 2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak) 3. Lahan tidak beririgasi.	Luas; Persentase	Km, Ha; Persen
1207	SD00306.02.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Lahan pertanian (agricultural land)	Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak.	1. Lahan garapan 2. Lahan tanaman permanen 3. Lahan penggembalaan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
1208	SD00307.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan	Bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	1. Lahan beririgasi 2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak) 3. Lahan tidak beririgasi.	Luas; Persentase	Ha; Persen
1209	SD00308.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional	1. Lahan beririgasi 2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak) 3. Lahan tidak beririgasi.	Luas; Persentase	Ha, km2; Persen
1210	SD01419.02.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang	Penetapan kawasan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Kawasan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	pertanian pangan berkelanjutan		kebutuhan		
1211	SD01426.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan	1. Lahan garapan 2. Lahan tanaman permanen 3. Lahan penggembalaan	Luas; Persentase	Ha; Persen
1212	SD01593.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Pertanian Berkelanjutan	Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan berkelanjutan kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan semacam itu (di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dll.) Melestarikan sumber daya tanah, air, tanaman dan gen hewan, tidak merusak lingkungan, layak secara teknis, layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1213	SD01723.00.00	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Luas lahan dan cadangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen.	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						94. PAPUA		
1214	SD060502.00.00	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Akesi	Suatu contoh yang unik dari benih, materi tanaman, atau tanaman yang dipelihara dalam sebuah bank genetik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Akesi; Persen
1215	SD060435.00.00	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Bibit unggul	Bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot dan kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Varietas
1216	SD060767.00.00	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka	1. SDGPP tanaman dihitung sebagai jumlah total akesi unik dari sumber daya tanaman yang disimpan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang. Jumlah aksesi tersebut harus mencakup akesi yang ada di fasilitas koleksi dasar (base collections) dan akesi unik yang disimpan di fasilitas konservasi jangka menengah (sebagai koleksi aktif) hanya apabila akesi tersebut dipertimbangkan/dirancang menjadi bagian dari koleksi dasar nasional. Koleksi dasar dapat mencakup dalam bentuk benih, dipelihara di lapangan/kebun	1. SDGPP Tanaman 2. SDGPP Hewan	Jumlah; Persentase	Sumber daya; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menengah ataupun jangka panjang	(fild), cryo-preserved atau koleksi in vitro, tergantung pada spesies yang dikonservasi dan ketersediaan fasilitas konservasi di setiap lokasi. 2. SDGPP hewan dihitung dari jumlah ras-ras lokal yang disimpan dalam suatu koleksi bank genetik dengan volume material genetik yang disimpan dalam jumlah yang cukup untuk merekonstitusi (menghadirkan kembali) ras hewan jika terjadi (ancaman) mengalami kepunahan.			
1217	SD00978.00.02	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP)	Berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling terpercaya untuk mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia	1. Tanaman 2. Hewan	Jumlah; Persentase	Konservasi; Persen
1218	SD01290.00.00	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Varietas unggul	Varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Varietas
1219	SD00906.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kepunahan dengan Risiko yang tidak	Status risiko yang tidak diketahui jika data terkait jumlah jantan produktif (breeding males) dan betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diketahui	tidak diketahui			
1220	SD00907.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kepunahan Kritis (Critical)	Suatu jenis hewan dikategorikan sebagai kritis jika jumlah total betina kurang dari atau sama dengan 100 atau jumlah total pejantan kurang dari atau sama dengan lima; atau ukuran populasi keseluruhan kurang dari atau sama dengan 120 dan memiliki persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari jenis yang sama di bawah 80 persen, dan tidak diklasifikasikan sebagai punah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1221	SD00908.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kepunahan Tidak Berisiko	Status aman atau tidak berisiko jika jantan dan betina produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50 (kambing, domba dan babi), 20:200 (ayam, itik, angsa).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1222	SD00984.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kritis Dipertahankan (Critical-maintained)	Populasi kritis yang menjadi sasaran program konservasi aktif atau populasi yang dikelola oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1223	SD01776.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Mengklasifikasikan jumlah absolut berdasarkan kategori terbaru yang terdapat dalam Global Databank for Animal Genetic Resources-FAO/Domestic Animal Information System (DAD-IS)	1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Unggas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1224	SD01037.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Risiko kepunahan	1. Punah: tidak ada lagi pejantan dan betina produktif. 2. Kritis: jumlah ternak betina produktif ≤100 ekor, atau jantan produktif ≤5 ekor; atau jumlah total populasi ≤120 dan tren menurun, dan persentase betina yang dikawinkan dengan jantan dari rumpun yang sama < 80%. 3. Kritis-dirawat: ternak yang dikategorikan kritis ditangani/dirawat melalui program konservasi atau dipelihara oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian. 4. Terancam punah: jumlah betina produktif >100 ekor sampai ≤1,000 ekor; atau jumlah jantan produktif > 5	1. Kritis (critical) 2. Kritis dipertahankan (critical maintained) 3. Terancam punah (endangered) 4. Hampir punah yang dipelihara (endangered maintened)	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ekor sampai ≤ 20 ekor atau total populasi ≥ 80 ekor sampai ≤ 100 ekor dan tren meningkat, dan persentase betina yang dikawinkan dengan jantan dari rumpun yang sama < 80%. 5. Terancam punah-dirawat: ternak yang dikategorikan terancam punah dirawat melalui program konservasi atau dipelihara oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian. 6. Berisiko: adalah ternak yang termasuk ke dalam empat klasifiasi risiko kepunahan di atas. Catat			
1225	SD01058.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Rumpun asli	Ternak sebagai hasil domestikasi di Indonesia (ancestor)	1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Unggas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1226	SD01060.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Rumpun lokal	Diintroduksi dan berkembang biak baik secara murni atau hasil silangan (≥ 5 generasi)	1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Unggas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1227	SD01128.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Status aman atau tidak berisiko punah	Jika jantan dan betina produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50 (kambing, domba dan babi), 20:200 (ayam, itik, angsa)	1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Unggas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1228	SD01176.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Terancam Punah (Endangered)	Suatu jenis dikategorikan sebagai terancam punah jika jumlah total betina pemijahan lebih besar dari 100 dan kurang dari atau sama dengan 1.000 atau jumlah total pejantan jantan kurang dari atau sama dengan 20 dan lebih besar dari lima; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 80 dan kurang dari 100 dan meningkat dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di atas 80 persen; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 1.000 dan kurang dari atau sama dengan 1.200 dan menurun dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di bawah 80 persen.	Klasifikasi berdasarkan jenis varietas	Jumlah; Persentase	Spesies; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1229	SD01212.00.00	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya	Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya diklasifikasikan menjadi berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	1. Kepunahan Berisiko 2. Kepunahan Tidak berisiko 3. Kepunahan dengan Risiko yang tidak diketahui	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
1230	SD00686.00.00	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Indeks orientasi pertanian (IOP)	Pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan. 1. Nilai IOP > 1 merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi nasional; 2. Nilai IOP < 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; dan 3. Nilai IOP =1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian.	1. IOP>1 2. IOP<1 3. IOP=1	Nilai	Satuan
1231	SD01602.00.00	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian	Meliputi pengeluaran untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup; dan juga pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan kementerian Pekerjaan Umum, serta pengeluaran subsidi untuk pertanian (antara lain pupuk dan benih)	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian	Nilai	Rupiah
1232	SD00161.01.00	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA)	Official Development	Penyaluran bantuan kepada negara berkembang yang termasuk dalam daftar Development Assistance	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Assistance (ODA)	Committee (DAC) penerima ODA dan kepada lembaga multilateral, dimana: a. diberikan oleh lembaga pemerintah, termasuk negara bagian dan pemerintahan lokal atau oleh lembaga eksekutifnya, b. setiap transaksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memajukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	3. Kerjasama Teknik		
1233	SD00173.00.00	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Other Official Flows (OOF)	Bantuan lainnya (tidak termasuk kredit ekspor dari pemerintah) didefinisikan sebagai transaksi oleh sektor pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai penerima ODA.	1. Hibah untuk negara berkembang 2. Transaksi bilateral resmi 3. Perpanjangan Kredit Ekspor 4. Akuisisi oleh pemerintah dan lembaga moneter pusat sekuritas 5. Subsidi (hibah) untuk sektor swasta 6. Dana untuk mendukung investasi swasta	Nilai	Rupiah
1234	SD01220.00.00	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Jumlah penyaluran bantuan Official Development Assistance (ODA) dan Other Official Flows (OOF) dari semua donor untuk sektor pertanian dalam arti luas.	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1235	SD00528.00.00	2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.	Dukungan Kebijakan Kepada Produsen	Kebijakan transfer kepada produsen pertanian yang diukurkan pada petani dan menyatakan kontribusi pendapatan bersih petani	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
1236	SD01141.00.00	2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.	Subsidi ekspor pertanian	Jenis pengeluaran dan kuantitas anggaran subsidi ekspor seperti yang dinotifiasi oleh para anggota World Trade Organization (WTO). Kuantitas dan pengeluaran anggaran dinyatakan dalam mata uang dan jumlah unit tertentu, seperti yang biasa disampaikan oleh para anggota WTO.	1. Pembayaran langsung 2. Pinjaman berbiaya rendah 3. Keringanan pajak untuk eksportir 4. Iklan internasional yang dibiayai oleh pemerintah 5. Bantuan biaya modal atau biaya pelatihan	Nilai	Rupiah
1237	SD00367.00.00	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Anomali Harga	Catatan dari tingkat pertumbuhan majemuk yang lebih tinggi dari rata-ratanya pada bulan tertentu oleh satu standar deviasi atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
1238	SD00804.00.00	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Indikator anomali harga pangan	IAHP adalah the normalize difference of the coumpound growth rate dari harga-harga pangan dari historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan nilai IAHP karakteristik pergerakan harga dikelompokkan menurut penyimpangan standar deviasi terhadap historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu: ▪ normal, bila -0,5 ≤ IAHP < 0,5; ▪ moderat tinggi, bila 0,5 ≤ IAHP ≥1; dan ▪ abnormal tinggi, bila IAHP ≥ 1.	1. Normal, bila -0,5 ≤ IAHP < 0,5 2. Moderat tinggi, bila 0,5 ≤ IAHP ≥1 3. Abnormal tinggi, bila IAHP ≥ 1	Nilai	Skor
1239	SD00316.01.00	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 100.000 kelahiran hidup

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.			
1240	SD00316.02.00	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)	banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 100.000 kelahiran hidup
1241	SD00889.00.00	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian Ibu	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1242	SD00550.00.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Poindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Lapangan KB, TKBK, Pos KB.	1. RS Pemerintah/RS Swasta/RSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
1243	SD00936.00.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.	1. Lahir 2. Batin/Mental/Spriritual	Jumlah; Persentase	Orang. Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.					
1244	SD01399.00.00	3.12*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Perempuan Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	1. Kawin 2. Cerai Hidup 3. Cerai Mati	Jumlah; persentase; proporsi	Orang; persen
1245	SD01536.02.00	3.12*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/polindes.	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
1246	SDG1761.00.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar	16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
1247	SD01804.00.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Proses Melahirkan/Kelahiran	Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir),hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.	1. Lahir hidup 2. Lahir mati	Jumlah; persentase	Kelahiran; persen
1248	SD01174.01.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	1. Tenaga medis 2. Tenaga psikologi klinis 3. Tenaga keperawatan 4. Tenaga kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga kesehatan masyarakat 7. Tenaga kesehatan lingkungan 8. Tenaga gizi 9. Tenaga keterapian fisik 10. Tenaga keteknisian medis	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						11. Tenaga teknik biomedika 12. Tenaga kesehatan tradisional 13. Tenaga kesehatan lain		
1249	SD01175.00.00	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Tenaga Kesehatan Terlatih	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.	1. Dokter kandungan 2. Dokter umum 3. Bidan 4. Perawat 5. Tenaga medis lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1250	SD00648.00.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi).	Nilai normatif AKBa adalah ; 1. ≥140 = sangat tinggi 2. 71<AKBa <140 = tinggi, 3. 20<AKBa <70 = sedang, 4. ≤20= rendah.	Jumlah	Orang/1000
1251	SD00648.00.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi).	1. ≥140 = sangat tinggi, 2. 71<AKBa <140 = tinggi, 3. 20<AKBa <70 = sedang, 4. ≤20= rendah.	Rasio	Orang/1000
1252	SD00649.01.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian	Angka Kematian Bayi	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai	Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat tinggi,	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).	2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah.		
1253	SD00649.02.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.	1. 70 sangat tinggi, 2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah	Rasio	Orang/1000
1254	SD00315.00.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.	Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat tinggi, 2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah.	Proporsi	Per 1000 kelahiran
1255	SD00618.00.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Wajib	Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu	1. Imunisasi rutin 2. Imunisasi tambahan 3. Imunisasi khusus.	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1256	SD00869.00.00	3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kelahiran Hidup	Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
1257	SD00317.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Rasio	Orang/1000
1258	SD00318.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000	Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1.000	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Rasio	Orang/1000

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kelahiran hidup.				
1259	SD00612.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi	Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.	1. Imunisasi Dasar 2. Imunisasi Lanjutan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1260	SD00613.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Dasar	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1261	SD00614.01.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Dasar Lengkap	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: – 1 (satu) kali imunisasi BCG; – 3 (tiga) kali imunisasi DPT; – 3 (tiga) kali imunisasi HB; – 3 (tiga) kali imunisasi Polio; dan – 1 (satu) kali imunisasi Campak.	1. Bacillus Calmette Guerin (BCG), 2. Diphteria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPTHB-Hib), 3. Hepatitis B pada bayi baru lahir, 4. Polio, dan 5. Campak	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1262	SD00615.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Khusus	Dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.	1. Rabies 2. Demam Kuning 3. Pneumonia 4. Meningitis	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1263	SD00616.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran	Imunisasi Lanjutan	Ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan	1. DPT 2. Hepatitis B 3. HiB	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			hidup.		imunisasi dasar. Imunisasi ini diberikan pada: a. anak usia bawah dua tahun (Baduta); b. anak usia sekolah dasar; dan c. wanita usia subur (WUS)	4. Campak/MR 5. DT 6. Td		
1264	SD00617.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Tambahan	Jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.	1. HPV 2. Influenza 3. PCV 4. Rotavirus 5. Varicela 6. Japanese Encephalitis 7. Dengue 8. Tifoid 9. Hepatitis A	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1265	SD00618.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Wajib	Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu	1. Imunisasi rutin 2. Imunisasi tambahan 3. Imunisasi khusus.	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
1266	SD01467.00.00	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dan dikali 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1267	SD00006.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
1268	SD00006.00.01	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000	Acquired Immuno	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus	1. Kategori A 2. Kategori B	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penduduk tidak terinfeksi	Deficiency Syndrome (AIDS)	HIV dalam tubuh seseorang.	3. Kategori C		
1269	SD00006.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	1. Kategori A 2. Kategori B 3. Kategori C	Jumlah	Orang
1270	SD00006.00.01	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Acquired Immuno Defiiency Syndrome (AIDS)	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
1271	SD00590.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Persentase	Persen
1272	SD00595.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Human Immunodefiiency Virus (HIV)	Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Defiiency Syndrome (AIDS)	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Persentase	Persen
1273	SD00709.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Proporsi	Proporsi permil (1000)
1274	SD01640.00.00	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1275	SD01009.00.00	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB)	Insiden Tuberkolosis	Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Proporsi	Proporsi per 100.000

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			per 100.000 penduduk	(ITB) per 100.000 penduduk	waktu yang sama kemudian dikali 100.000.	kebutuhan		penduduk
1276	SD01012.00.00	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
1277	SD01013.00.00	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk	1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
1278	SD00796.00.01	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus TB	Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.	Berdasarkan diagnosa: 1. TB aktif 2. TB laten	Jumlah; persentase	Orang; persen
1279	SD00796.00.02	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus TB	Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB	1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1280	SD01247.00.01	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Tuberkulosis (TB)	Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.	1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1281	SD01247.00.02	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Tuberkulosis (TB)	Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.	1. TB aktif 2. TB laten	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1282	SD00366.00.00	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Annual Parasite Incidence (API)	Angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah.	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1283	SD00856.00.00	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kejadian Malaria per 1000 orang	Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
1284	SD00081.00.00	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Malaria	Penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles	1. Plasmodium falciparum (Malaria Tropika) 2. Plasmodium vivax (Malaria Tertiana) 3. Plasmodium ovale (Malaria Ovale) 4. Plasmodium malariae (Malaria Quartana) 5. Plasmodium knowlesi	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1285	SD00540.00.00	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Eliminasi Malaria	Suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografi tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta adab tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
1286	SD09712.00.00	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA	Jumlah; Persentase	Kabupaten/Kota; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1287	SD00501.00.00	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B	Dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan darah pada ibu hamil paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kehamilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1288	SD00585.00.01	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Hepatitis B	Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B	1. Hepatitis B akut 2. Hepatitis B kronik	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1289	SD00585.00.02	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Hepatitis B	Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1290	SD00586.00.01	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Hepatitis B dan C	Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat berlanjut menjadi sirosis atau kanker hati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1291	SD00586.00.02	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Hepatitis B dan C	Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat berlanjut menjadi sirosis atau kanker hati	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
1292	SD009998.00.00	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu dibagi jumlah penduduk yang berisiko pada periode yang sama dan dikali 100.000	1. Hepatitis B akut 2. Hepatitis B kronik	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1293	SD014660.00.00	3.3.4*	Insiden Hepatitis B	Persentase	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			per 100.000 penduduk	kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia dikali 100%.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1294	SD00352.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilariamya < 1%	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN	Jumlah; Persentase	Kabupaten/Kota; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
1295	SD60748.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	(a) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis: Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Microfilaria rate (Mf-rate)>1% yang mendapat POPM Filariasis dibagi jumlah seluruh penduduk di kabupaten/kota dengan Mf-rate>1% dan dinyatakan dalam satuan persen (%). (b) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis: Jumlah kasus baru tanpa cacat yang ditemukan dan dibati dibagi semua kasus baru kusta yang dibati dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1296	SD060167.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Kusta	Penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae, yang menyerang saraf tepi, kulit dan organ lainnya (kecuali Susunan Saraf Pusat). Sumber penularan adalah manusia, yaitu orang yang terkena kusta yang belum mendapatkan pengobatan. Penularan terjadi melalui pernafasan setelah kontak yang lama dan erat, karenanya maka pada kusta, yang tertular adalah anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita.	1. Kusta Tuberkuloid 2. Kusta Lepromatosa 3. Kusta Borderline	Jumlah; persentase	Orang; persen
1297	SD01361.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Penyakit kaki gajah (filariasis)	Penyakit menular disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan WHO yaitu dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun.	1. Filariasis kulit 2. Filariasis limfatik 3. Filariasis rongga tubuh	Jumlah; persentase	Orang; persen
1298	SD01361.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Penyakit kaki gajah (filariasis)	Penyakit menular disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan WHO yaitu dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun.	1. Filariasis kulit 2. Filariasis limfatik 3. Filariasis rongga tubuh	Jumlah; persentase	Orang; persen
1299	SD01704.00.00	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan	Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	dibagi		14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
1300	SD00537.00.00	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Eliminasi	Upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1301	SD00539.00.00	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Eliminasi Kusta	Eliminasi kusta berarti angka prevalensi <1/ 10.000 penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1302	SD00710.00.00	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi Kusta (<1 kasus/10.000 penduduk) pada tahun tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1303	SD01129.00.00	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Status Eliminasi Kusta	Kondisi suatu daerah di mana penularan di masyarakat serta angka kesakitan dan kecacatan dapat diturunkan serendah mungkin.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1304	SD00538.00.00	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Eliminasi Filariasis	Eliminasi kusta berarti angka angka mikrofilaria menjadi < 1%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1305	SD00711.00.00	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1306	SD00252.00.00	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Penanggulangan Filariasis	Semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi (microfilaria rate) serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan Filariasis di suatu wilayah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
1307	SD01368.00.00	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis	Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis dilaksanakan melalui pokok kegiatan: a. Surveilans Kesehatan; b. Penanganan Penderita; c. Pengendalian faktor risiko; dan d. Komunikasi, informasi, dan edukasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
1308	SD01306.00.00	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Wilayah Endemis Filariasis	Satuan kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1309	SD00887.00.00	3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	Kematian Akibat Penyakit Jantung, Kanker, Diabetes, atau Penyakit Pernapasan Kronis	Persen orang berusia 30 tahun yang akan meninggal sebelum ulang tahun ke 70 karena penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat mortalitas saat ini pada setiap usia dan ia tidak akan mati dari penyebab kematian lainnya (misalnya, cedera atau HIV / AIDS).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1310	SD00103.00.00	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Merokok	Aktivitas membakar tembakau maupun cerutu kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa; setiap hari maupun kadang-	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/K

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kadang.			ota ; Persen
1311	SD01485.00.00	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤18 tahun	Perbandingan jumlah penduduk umur 10 sampai 18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun.	1. Merokok tiap hari 2. Merokok kadang-kadang	Jumlah; persentase	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Persen
1312	SD01652.00.00	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi	Perbandingan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen;
1313	SD01165.00.00	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Tekanan Darah Tinggi	Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin penderita: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
1314	SD00469.00.00	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dampak Obesitas	Meningkatnya probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, osteoartritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (Obstructive Sleeping Apneu).	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin penderita: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
1315	SD00681.00.00	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indeks Massa Tubuh (IMT)	Alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan	1. Kategori Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat: < 17,0 2. Kategori Kurus Kekurangan berat badan tingkat ringan: < 17,0 – 18,4 3. Kategori Normal: 18,5 – 25,0 4. Kategori Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan: 25,1 –	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						27,0 5. Kategori Gemuk Kelebihan berat badan tingkat berat: > 27,0		
1316	SD01645.00.00	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persentase jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen;
1317	SD00849.00.00	3.4.10	Upaya Rehabilitatif	Upaya Rehabilitatif Kesehatan Jiwa	Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk: a. mencegah atau mengendalikan disabilitas; b. memulihkan fungsi sosial; c. memulihkan fungsi okupasional; dan d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1318	SD00643.00.00	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Jumlah kematian akibat bunuh diri (data dari kepolisian maupun dari pelayanan kesehatan) dibagi jumlah seluruh kematian dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1319	SD00442.00.00	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Bunuh Diri	Tindakan merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu atau zat (obat atau racun) yang mengakibatkan kematian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
1320	SD01389.00.00	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Percobaan bunuh diri	Tindakan dengan sengaja merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu, atau zat (obat atau racun) dengan tujuan mengakhiri kehidupan yang tidak mengakibatkan kematian, namun membutuhkan intervensi medik psikiatrik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1321	SD00713.00.00	3.4.3	Jumlah Kab/Kota yang memiliki puskesmas yang	Jumlah kabupaten/kota yang sudah	Klasifikasi Jumlah Kab/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah	Kabupaten/Kota	Metadata Indikator SDGs

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	memiliki minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas di kabupaten/kota tersebut yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.				Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial (Bappenas)
1322	SD00971.00.00	3.4.4	Kesehatan Jiwa	Kesehatan jiwa	Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
1323	SD01818.00.00	3.4.5	Indikator global yang akan dikembangkan.	Puskesmas yang menyelengarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih kesehatan jiwa 2) Melakukan kegiatan promotif kesehatan jiwa 3) Melakukan deteksi dini 4) Layanan pengobatan dasar dan rujukan kesehatan jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Puskesmas ; Persen	uNIT; Persen
1324	SD01097.00.00	3.4.6	Upaya Kesehatan Jiwa	Upaya Kesehatan Jiwa	Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1325	SD00850.00.00	3.4.7	Upaya Kuratif	Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa	Kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga,kembaga, dan masyarakat.			
1326	SD01139.00.00	3.4.8	Upaya Preventif	Suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.	Klasifikasi Upaya Preventif	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen	Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 tahun 2014
1327	SD00848.00.00	3.4.9	Upaya Promotif	Upaya Promotif Kesehatan Jiwa	Kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1328	SD00445.00.00	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Cakupan Intervensi Pengobatan Bagi Gangguan Penyalahgunaan Zat	Jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah total orang dengan gangguan penggunaan narkoba pada tahun yang sama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1329	SD00551.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Fasilitas layanan kesehatan	Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.	1. Puskesmas 2. Klinik pratama 3. RSU 4. RS khusus	Persentase; Jumlah; status	Persen; Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ;jenis kelamin dan kelompok umur
1330	SD00758.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan	Jumlah penyalahguna narkotika dan	Jumlah absolut pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan NAPZA yang datang dan tercatat menjalani terapi dan rehabilitasi NAPZA di layanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pelayanan rehabilitasi medis	pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	rehabilitasi medis yang telah ditetapkan menjadi IPWL, baik milik sektor kesehatan, BNN, masyarakat maupun swasta.			
1331	SD00034.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Layanan Rehabilitasi Medis	Fasilitas layanan kesehatan baik Puskesmas, Klinik Pratama, RSU atau RS khusus, yang telah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Menteri Kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
1332	SD00099.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Mengakses Layanan Rehabilitasi	Penyalah guna zat, termasuk narkotika dan alkohol yang telah mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1333	SD01302.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Rehabilitasi Medis	Proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1334	SD01309.00.00	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Rehabilitasi Pengguna NAPZA	Suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan NAPZA, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1335	SD00771.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Jumlah yang mengakses layanan pasca	Absolut pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang mengakses layanan pascarehabilitasi, setelah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				rehabilitasi	selesai menjalani program rehabilitasi.			
1336	SD01006.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
1337	SD01007.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
1338	SD00047.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
1339	SD00048.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan /dibantu	Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
1340	SD00188.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Pasca Rehabilitasi	Kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.			
1341	SD01363.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Penyalah Guna	Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1342	SD01649.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Prevalensi penyalahgunaa n narkoba	Jumlah sampel orang berusia 10–59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10–59 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1343	SD01318.00.00	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Rehabilitasi Sosial	Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1344	SD00626.00.00	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Alkohol	Seseorang dikatakan pernah meminum minuman beralkohol apabila telah meminumnya meskipun hanya satu atau dua teguk. Jika hanya sekedar mengecap beberapa tetes, belumlah dikatakan meminum. Minuman beralkohol yang banyak beredar di pasaran yaitu bir, tuak, arak, angciu,ciu, brem (sari ketan/tebu), anggur beras, minuman putau, mansion house, wine, whisky, vodka, bandy, malaga, vigour, kamput (kambing putih), cap tikus dan sebagainya yang beralkohol atau yang disebut minuman keras.	1. Golongan A (kurang dari 5%) 2. Golongan B (5% s.d. 20%) 3. Golongan C (lebih dari 20%)	Jumlah; persentase	Orang; persen
1345	SD00739.00.00	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Jumlah Minuman Keras/Beralko hol (Liter per Kapita 15 Tahun Keatas) yang	Perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang dikonsumsi penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam liter per kapita.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume/ju mlah	Liter/kapita

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Dikonsumsi oleh Penduduk Umur ≥15 tahun				
1346	SD00985.00.00	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dibagi jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1347	SD00645.00.00	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
1348	SD00846.00.00	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Kecelakaan Lalu Lintas	Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
1349	SD00353.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase	1. Sterilisasi Perempuan 2. Sterilisasi Pria 3. Spiral/IUD 4. Susuk KB	Jumlah	Orang
1350	SD00355.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-	Angka prevalensi	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	kontrasepsi modern pada kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)	usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)	kebutuhan		
1351	SD60356.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur).	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi modern dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1352	SD60357.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Angka prevalensi kontrasepsi pada kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang menggunakan alat kontrasepsi dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				wanita usia subur/WUS)				
1353	SD00358.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Angka prevalensi kontrasepsi pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur).	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1354	SD00360.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1355	SD00822.01.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana	Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.					
1356	SD00108.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Metode Kontrasepsi (CPR)	Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1357	SD00109.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Metode kontrasepsi modern	Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat.	1. sterilisasi perempuan/metode operasi wanita (mow); 2. sterilisasi pria/metode operasi pria (mop) 4. pil 5. spiral/IUD 6. suntik KB 7. diafragma 8. kondom 9. metode amenorrhea laktasi (MAL) 10. kontrasepsi darurat	Jumlah	Metode
1358	SD01733.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi	Proporsi pasangan usia reproduksi/subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan	Perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan PUS yang memerlukan alat kontrasepsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			modern.	keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode moderm				
1359	SD01763.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	Persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1360	SD01259.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Unmet need KB (ke butuhan keluarga tidak terpenuhi) Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Subur).				
1361	SD01261.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Unmet need KB (kebutuhan keluarga tidak terpenuhi) Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)	Perbandingan antara Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dengan Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1362	SD01297.00.00	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Wanita Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1363	SD00642.01.00	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Jumlah kelahiran pada perempuan remaja umur (i) 10-14 tahun atau (ii) 15-19 tahun pada periode tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada pertengahan periode yang sama dikali 1.000.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Proporsi	Kelahiran/penduduk; Per 1000
1364	SD00642.02.00	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000	Angka kelahiran remaja (umur	Banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Proporsi	Kelahiran/penduduk; Per 1000

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perempuan di kelompok umur yang sama.	15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	umur yang sama pada pertengahan periode.			
1365	SD01223.00.00	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur nya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Anak
1366	SD01224.00.00	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Proporsi	Kelahiran/perempuan; Per 1000
1367	SD00447.00.00	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak	**Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)				
1368	SD00448.00.00	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Rata-rata cakupan pelayanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses pelayanan pada populasi umum dan populasi yang paling tidak beruntung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks; Persentase	Rerata; Persen
1369	SD01237.00.00	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Tracer indikator cakupan pelayanan kesehatan	Tracer indikator cakupan pelayanan kesehatan	1. Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita. a. Keluarga berencana: persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang pernah kawin atau hidup bersama kebutuhan keluarga berencana terpenuhi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Indikator SDG 3.7.1); b. Perawatan kehamilan: persentase	Indeks; Persentase	Rerata; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh pelayanan antenatal 4 kali atau lebih; c. Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria-tetanus-pertussis; d. Perawatan balita: Persentase anak dibawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalah pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan 2. Penyakit menular: a. Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						berhasil diobati; b. HIV/AIDS: Persentase penduduk yang hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi antiretroviral; c. Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei; d. Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi improved. 3. Penyakit tidak menular. a. Hipertensi: Age-standardized prevalensi tekanan darah tidak meningkat (tekanan darah sistolik <140 mmHg atau tekanan darah diastolik <90 mmHg) pada penduduk usia ≥18 tahun; b. Diabetes: Age-		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						standardized rata-rata gula darah puasa (mmol/L) pada penduduk usia ≥25 tahun ; c. Merokok: Age-standardized prevalensi penduduk usia ≥15 tahun yang tidak merokok dalam kurun waktu 30 hari sebelum survei (indikator SDG 3.a.1). 4. Kapasitas dan akses pelayanan. a. Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 penduduk; b. Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader (bagian dari indikator 3.c.1); c. Keamanan kesehatan:		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 indikator kapasitas yang dicapai (Indikator 3.d.1).		
1370	SD060550.00.00	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Lapangan KB, TKBK, Pos KB.	1. RS Pemerintah/RS Swasta/BSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
1371	SD012660.00.00	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1372	SD012662.01.00	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki kebutuhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1373	SD003372.00.00	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran	Asuransi Kesehatan	Sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.		anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.	kebutuhan		
1374	SD00754.00.00	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. Pekerja penerima upah 2. Pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja 3. Penerima bantuan iuran.	Persentase	Persen
1375	SD00270.02.00	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Pendapatan Rumah tangga	Seluruh disposable income rumah tangga, yang terdiri atas total pendapatan (setelah dikurangi pajak), gaji pokok dan denda. Total pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari properti, pendapatan dari produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri, transfer yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, serta transfer yang diterima dalam bentuk layanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
1376	SD01623.00.00	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total	Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan	Setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.		dan untuk semua anggota rumah tangga			
1377	SD01770.00.00	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar/lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan) untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1378	SD00446.00.00	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1379	SD00663.00.00	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.			
1380	SD00647.00.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
1381	SD00884.00.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1382	SD01050.02.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1383	SD01052.00.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1384	SD01053.00.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1385	SD01249.00.00	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Udara Ambien	Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
1386	SD00644.00.00	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
1387	SD00555.00.00	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Fasilitas Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
1388	SD00884.00.00	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1389	SD00646.00.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Angka kematian akibat keracunan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
1390	SD00884.00.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1391	SD0909.01.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Keracunan	Keracunan yang disebabkan oleh semua zat kimia termasuk obat-obatan dan makanan atau keracunan paparan dan zat berbahaya.	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan 5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.	Persentase	Persen
1392	SD0909.02.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Keracunan	Masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan 5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.	Persentase	Persen
1393	SD0909.02.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Keracunan	Masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.		
1394	SD01708.00.00	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1395	SD00103.00.00	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Merokok	Aktivitas membakar tembakau maupun ganja kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa; setiap hari maupun kadang-kadang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1396	SD01486.00.00	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1397	SD01511.00.00	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir	Perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1398	SD00955.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1399	SD00155.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah	Obat	Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Obat; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			memperoleh vaksin program nasional.		menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.	kebutuhan		
1400	SD00156.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Obat Esensial	Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen
1401	SD01472.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1402	SD01619.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1403	SD01792.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke - 3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu. 2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu. 3. Cakupan vaksi konjugat pneumokus/PCV (dosis terakhir dalam jadwal): Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1404	SD01814.02.01	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah	Puskesmas (Pusat	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan	a. Puskesmas non rawat inap	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			memperoleh vaksin program nasional.	Kesehatan Masyarakat)	perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.	b. Puskesmas rawat inap		
1405	SD01814.02.02	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.	a. Puskesmas kawasan perkotaan b. Puskesmas kawasan pedesaan c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terkecil	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1406	SD01289.00.00	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Vaksin	Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.	1. Vaksin yang Hidup 2. Vaksin yang Sudah Dimatikan 3. Vaksin yang Berisi Sub Unit dari Antigen 4. Vaksin Yang berisi Toksoid	Persentase	Persen
1407	SD00936.00.00	3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.	1. Lahir 2. Batin/Mental/Spiritual	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
1408	SD00161.02.00	3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Official Development Assistance (ODA)	Aliran dana ke negara-negara dan wilayah dalam daftar DAC (Development Assistance Committee) untuk Penerima ODA dan ke lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara dan daerah, atau oleh lembaga ekselcutif mereka;dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah 3. Kerjasama Teknik	Jumlah; Nilai	Bantuan/Lembaga; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen)			
1409	SD00161.06.00	3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Official Development Assistant (ODA)	Bantuan yang mengalir ke negara dan wilayah dalam daftar DAC (Development Assistance Committee) dari penerima ODA dan ke lembaga-lembaga multilateral	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah 3. Kerjasama Teknik	Jumlah; Nilai	Bantuan/Lembaga/transaksi; Rupiah
1410	SD01230.00.00	3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Jumlah dari seluruh ODA yang dialirkan dari semua donor ke negara-negara berkembang untuk penelitian medis dan kesehatan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan/Lembaga/transaksi; Rupiah
1411	SD00950.00.00	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Keterjangkauan obat	Dinyatakan terjangkau apabila tidak ada upah tambahan untuk memenuhi kebutuhan obat esensial bagi pekerja tidak terampil dengan gaji terendah pada sektor pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Harga; Persentase	Obat; Rupiah;Persen
1412	SD00954.00.00	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Ketersediaan obat	Fasilitas kesehatan dinyatakan memiliki ketersediaan obat apabila tersedia 32 obat essensial untuk pelayanan, pencegahan dan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular pada pelayanan kesehatan primer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1413	SD01697.00.00	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Indeks multidimensi yang dilaporkan sebagai proporsi (%) dari fasilitas kesehatan yang memiliki serangkaian obatobatan berkualitas yang tersedia dan terjangkau dibandingkan dengan jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei di tingkat nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1414	SD00899.00.00	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.	1. tenaga medis 2. tenaga psikologi klinis 3. tenaga keperawatan 4. tenaga kebidanan 5. tenaga kefarmasian 6. tenaga kesehatan masyarakat 7. tenaga kesehatan lingkungan 8. tenaga gizi 9. tenaga keterapian fisik 10. tenaga keteknisian medis 11. tenaga teknis biomedika 12. tenaga kesehatan tradisional 13. tenaga kesehatan lain	Proporsi	Proporsi per mil (1000)
1415	SD00282.01.04	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kesehatan.		lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	kebutuhan		
1416	SD01174.01.01	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	1. Tenaga medis 2. Tenaga psikologi klinis 3. Tenaga keperawatan 4. Tenaga kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga kesehatan masyarakat 7. Tenaga kesehatan lingkungan 8. Tenaga gizi 9. Tenaga keterapian fisik 10. Tenaga keteknisian medis 11. Tenaga teknik biomedika 12. Tenaga kesehatan tradisional 13. Tenaga kesehatan lain	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1417	SD01174.02.02	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, meracakup:tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis.	1. Dokter umum/spesialis 2. Dokter gigi (tidak termasuk tukang gigi) 3. Bidan 4. Tenaga kesehatan lainnya (misalnya: apoteker/asisten apoteker, tenaga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat, dll.)		
1418	SD00847.00.00	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
1419	SD01385.00.00	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulation/IHR)	Suatu instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk dipersamakan dengan negara anggota WHO. IHR mengatur tata cara dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular, seperti efek dari Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika). Intrumen tersebut untuk membantu suatu negara mengidentifikasi apakah suatu keadaan merupakan PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), mengarahkan negara untuk mengkaji suatu kejadian di wilayahnya dan menginformasikan kepada WHO setiap kejadian yang merupakan PHEIC sesuai dengan kriteria sebagai berikut (1) Berdampak/berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat, (2) KLB atau sifat kejadian tidak diketahui, (3) Berpotensi menyebar secara internasional, (4) Berisiko terhadap perjalanan ataupun perdagangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peraturan; Persen
1420	SD01281.00.00	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan	Regulasi kesehatan internasional	Persentase atribut dari 13 kapasitas inti yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu. Ke-13 kapasitas inti ini meliputi: (1) Undang-undang, kebijakan,dan	1. level <1: prasyarat (level dasar) 2. Level 1: input dan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			darurat kesehatan.	dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	pembiayaan nasional; (2) Koordinasi dan komunikasi Titik Fokus Nasional; (3) Pengawasan; (4) Tanggapan; (5) Kesiapan; (6) Komunikasi risiko; (7) Sumber Daya Manusia; (8) Laboratorium; (9) Tempat masuk; (10) Peristiwa zoonosis; (11) Keamanan pangan; (12) Peristiwa kimia; (13)Darurat nuklir	proses 3. Level 2: output dan hasil 4. Level 3: tambahan		
1421	SD01456.00.00	3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1422	SD00398.00.00	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1423	SD01685.00.00	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat	Jumlah anak-anak dan orang muda diakhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum, dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	akhir SMP/kelas 9 yang mencapai atandar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika				
1424	SD01078.00.00	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1425	SD01084.00.02	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1426	SD00075.00.00	4.1.1.(p)	Proporsi anak-anak	Madrasah	Salah satu bentuk satuan pendidkan formal dalam	1. MI Negeri	Jumlah;	Sekolah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Ibtidaiyah (MI)	binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar	2. MI Swasta	Persentase	Persen
1427	SD01684.00.00	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Perbandingan anak kelas tertentu yang mencapai standar minimum pada asesmen yang diujikan untuk membaca dan matematika diperoleh dengan membandingkan jumlah anak kelas i yang mencapai standar minimum pada asesmen yang diujikan dengan jumlah seluruh anak kelas i yang mengikuti asesmen yang diujikan, dinyatakan dalam satuan persen (%).	1. siswa di bawah standar minimum 2. siswa yang mencapai atau melampaui standar minimum	Persentase	Persen
1428	SD01078.00.00	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.					
1429	SD01250.00.00	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Ukuran capaian belajar siswa dalam kompetensi dasar akademik yang meliputi membaca (literasi) dan matematika (numerasi).	Capaian ini menggambarkan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Capaian ini dapat diukur melalui dua sumber data: a. Pertama, capaian kompetensi minimum untuk siswa kelas 5 dan kelas 8 diukur dengan menggunakan hasil AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. b. Kedua, hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa usia 15 tahun di kelas 9 ataupun kelas 10. PISA adalah survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara melalui uji kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan sains.	1. siswa di bawah standar minimum 2. siswa yang mencapai atau melampaui standar minimum.	Persentase	Persen
1430	SD01343.00.00	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Rentang Usia Penyelesaian Pendidikan di Setiap Jenjang	Rentang usia yang diukur antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.	1. Jenjang SD/Sederajat 13-15 tahun 2. Jenjang SMP/Sederajat 16-18 tahun 3. Jenjang SMA/Sederajat 19-21	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tahun		
1431	SD01209.00.00	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia SD/sederajat yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.	1. Tidak Tamat SD/Sederajat 2. Lulus SD/Sederajat	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1432	SD01210.00.00	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia SMA/sederajat yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.	1. Tidak Tamat SMA/Sederajat 2. Lulus SMA/Sederajat	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1433	SD01211.00.00	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia SMP/sederajat yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.	1. Tidak Tamat SMP/sederajat 2. Lulus SMP/sederajat	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1434	SD00631.00.00	4.1.2.ja)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Anak tidak sekolah	Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.	1. Kelompok usia PAUD/sederajat: 3 – 6 tahun 2. Kelompok usia SD/sederajat: 7 – 12 tahun 3. Kelompok usia SMP/sederajat: 13 – 15 tahun 4. Kelompok usia SMA/sederajat: 16 – 18 tahun	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1435	SD00632.00.00	4.1.2.ja)	Angka anak tidak	Anak tidak	Jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Penduduk;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	sekolah PAUD	jenjang PAUD yang tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan PAUD.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1436	SD00638.00.00	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Angka Anak tidak sekolah SD/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang SD/sederajat tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan SD/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1437	SD00639.00.00	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Angka Anak tidak sekolah SMA/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang SMA/sederajat tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1438	SD00640.00.00	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Angka Anak tidak sekolah SMP/sederajat	Perbandingan jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang SMP/sederajat tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1439	SD00874.00.00	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Kelompok usia sekolah	Anak-anak dan remaja sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang terdaftar, sedang bersekolah, atau sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.	1. Kelompok usia PAUD/sederajat: 3 – 6 tahun 2. Kelompok usia SD/sederajat: 7 – 12 tahun 3. Kelompok usia SMP/sederajat: 13 – 15 tahun	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4. Kelompok usia SMA/sederajat: 16 – 18 tahun		
1440	SD01683.00.00	4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik	Perbandingan Jumlah anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik pada periode tertentu dengan Jumlah total anak usia 24-59 bulan pada periode yang sama	1. Berkembang dengan baik. Berdasarkan ECDI, anak usia dini dinyatakan berkembang dengan baik apabila tiga dari empat domain (kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial-emosional, dan kemampuan belajar) perkembangan dinilai baik. 2. Tidak berkembang dengan baik.	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1441	SD01200.00.00	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir sebagai peserta didik aktif, baik di tingkat Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD maupun Sekolah Dasar/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1442	SD00680.00.00	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terakhir, menurut jenis kelamin.					
1443	SD00274.00.01	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Pendidikan Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi	Jumlah; persentase	Unit; persen
1444	SD00274.00.02	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Pendidikan Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	1. Tidak tamat SD 2. SD / sederajat 3. SMP / sederajat 4. SMA / sederajat 5. DI/DII/DIII 6. DIV/S1 7. S2/S3	Jumlah; persentase	Unit; persen
1445	SD00278.00.00	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Pendidikan Nonformal	Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.	1. Paket A setara SD/MI 2. Paket B setara SMP/MTs 3. Paket C setara SMA/MA	Jumlah; persentase	Unit; persen
1446	SD01326.00.00	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan	Remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terakhir, menurut jenis kelamin.					
1447	SD01201.00.00	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Perbandingan Jumlah usia muda atau dewasa yang berpartisipasi dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pelatihan dalam 12 bulan terakhir pada periode tertentu dengan Jumlah total usia muda atau dewasa pada periode yang sama	1. Usia muda (15 – 24 tahun) 2. Dewasa (25 – 64 tahun) Laki-laki dan perempuan, dalam SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SM/SMK/MA/Paket C, pendidikan tinggi, atau pendidikan nonformal lainnya seperti kursus,	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1448	SD00323.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
1449	SD00326.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen
1450	SD00507.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma	Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.	1. Diploma satu (D1) 2. Diploma dua (D2) 3. Diploma tiga (D3) 4. Diploma empat (D4)	Jumlah	Orang
1451	SD00508.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi	Diploma dua	Program diploma dengan masa studi 2 tahun dan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	(D2)	lulusannya bergelar Ahli Muda (A.Ma).	analisis atau sesuai kebutuhan		
1452	SD00509.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma empat (D4)	Program diploma dengan masa studi 4 tahun dan lulusannya bergelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1453	SD00510.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma satu (D1)	Program diploma dengan masa studi 1 tahun dan lulusannya bergelar Ahli Pratama (A.P.).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1454	SD00512.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma tiga (D3)	Program diploma dengan masa studi 3 tahun dan lulusannya bergelar Ahli Madya (A.Md).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1455	SD01402.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Perguruan Tinggi	Pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	1. Diploma satu (D1) 2. Diploma dua (D2) 3. Diploma tiga (D3) 4. Diploma empat (D4) 5. Strata satu (S1) 6. Strata dua (S2) 7. Stanata (S3)	Jumlah; Persentase	Perguruan Tinggi; Persen
1456	SD01664.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program doktor (S3)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1457	SD01665.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program doktor terapan	Kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.			
1458	SD01670.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program magister (S2)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1459	SD01671.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program magister terapan	Kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1460	SD01675.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program profesi	Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1461	SD01676.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program sarjana (S1)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1462	SD01678.00.00	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program spesialis	Pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1463	SD00506.00.00	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun)	Dewasa	Orang yang berusia lebih dari 19 tahun kecuali jika hukum nasional menetapkan seseorang sebagai orang dewasa pada usia lebih dini.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; proporsi	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).					
1464	SD00944.00.00	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Keterampilan Teknologi dan Komunikasi	Kegiatan yang berhubungan dengan komputer untuk mengukur keterampilan TIK meliputi: - Menyalin atau memindahkan file atau folder - Menggunakan alat salin dan tempel untuk menggandakan atau memindahkan informasi dalam dokumen - Mengirim email dengan file yang dilampirkan (misal dokumen, gambar, dan video) - Menggunakan rumus aritmatika dasar dalam spreadsheet - Menghubungkan dan memasang perangkat baru (misal modem, kamera, printer) - Menemukan, mengunduh, menginstal, dan mengkonfigurasi perangkat lunak. - Membuat presentasi elektronik dengan perangkat lunak presentasi (termasuk teks, gambar, suara, video atau grafik) - Mentransfer file antara komputer dan perangkat lain - Menulis program komputer menggunakan bahasa pemrograman khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1465	SD01777.00.00	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan	Perbandingan jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) dan jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibandingkan jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) dan penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk;Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan komunikasi (TIK).	teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
1466	SD01167.00.00	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Teknologi dan Komunikasi	Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
1467	SD00324.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Angka partisipasi kasar (APK)	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1468	SD60330.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Kasar(APK) antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas Perguruan Tinggi	Rasio antara APK siswa disabilitas di jenjang pendidikan Perguruan tinggi dengan APK siswa tanpa disabilitas di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1469	SD60331.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-	Angka Partisipasi Kasar(APK) antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas SMA/Sederajat	Rasio antara APK siswa disabilitas di jenjang pendidikan SMA/Sederajat dengan APK siswa tanpa disabilitas di jenjang pendidikan SMA/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1470	SD00332.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Kasar(APK) antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas SMP/Sederajat	Rasio antara APK siswa disabilitas di jenjang pendidikan SMP/Sederajat dengan APK siswa tanpa disabilitas di jenjang pendidikan SMP/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1471	SD00333.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	Angka Partisipasi Kasar(APK) antara kuintil terendah dan kuintil tertinggi Perguruan	Rasio antara APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dengan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Tinggi				
1472	SDG0334.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Kasar(APK) antara kuintil terendah dan kuintil tertinggi SMA/Sederajat	Rasio antara APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan SMA/Sederajat dengan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan SMA/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1473	SDG0335.00.00	4.5.1*	Rasio Angka	Angka	Rasio antara APK Kuintil Terendah di jenjang	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Partisipasi Kasar(APK) antara kuintil teredah dan kuintil tertinggi SMP/Sederajat	pendidikan SMP/Sederajat dengan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan SMP/Sederajat	analisis atau sesuai kebutuhan		
1474	SD00336.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b)	Angka Partisipasi Kasar(APK) Perguruan Tinggi antara pedesaan dan perkotaan	Rasio antara APK pedesaan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dengan APK perkotaan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1475	SD00337.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Kasar(APK) Perguruan Tinggi antara perempuan dan laki-laki	Rasio antara APK perempuan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dengan APK laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1476	SD00338.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat,	Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/sederajat antara pedesaan dan perkotaan	Rasio antara APK pedesaan di jenjang pendidikan SMA/sederajat dengan APK perkotaan di jenjang pendidikan SMA/sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1477	SD00339.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/sederajat antara perempuan dan laki-laki	Rasio antara APK perempuan di jenjang pendidikan SMA/sederajat dengan APK laki-laki di jenjang pendidikan SMA/sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1478	SD00340.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi	Rasio antara APK pedesaan di jenjang pendidikan SMP/sederajat dengan APK perkotaan di jenjang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pendidikan SMP/sederajat	kebutuhan		
1479	SD090341.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan	Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/sederajat antara perempuan dan laki-laki	Rasio antara APK perempuan di jenjang pendidikan SMP/sederajat dengan APK laki-laki di jenjang pendidikan SMP/sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.					
1480	SD00342.01.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Pergunaan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen
1481	SD00343.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	Rasio antara APM siswa disabilitas untuk usia 7 sampai 12 tahun dengan APM siswa tanpa disabilitas untuk usia 7 sampai 12 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1482	SD00344.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) antara Kuintil Terendah	Rasio antara APM Kuintil Terendah untuk usia 7 sampai 12 tahun dengan APM Kuintil Tertinggi untuk usia 7 sampai 12 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1483	SD00346.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat	Angka Partisipasi Murni (APM)	Rasio antara APM pedesaan untuk usia 7 sampai 12 tahun dengan APM perkotaan untuk usia 7 sampai 12 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Sekolah Dasar (SD) antara pedesaan dan perkotaan				
1484	SID0347.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) antara perempuan dan laki-laki	Rasio antara APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahun dengan APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1485	SD090348.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Pergurnan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan Nonformal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1486	SD090350.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.		Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).			
1487	SD00073.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	1. MA Negeri 2. MA Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1488	SD00074.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan	Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan	1. MAK Negeri 2. MAK Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(i) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.		dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.			
1489	SD000375.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas,	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.	1. MI Negeri 2. MI Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1490	SD000776.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	1. MTs Negeri 2. MTs Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1491	SD01822.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) perempuan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) laki-laki.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1492	SD01823.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah /teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat , dan Perguruan Tinggi.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan /pedesaan), c) kuintil terendah /kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/tanpa disabilitas).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penduduk;Persen
1493	SD01824.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat; dan (i) Rasio Angka	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar laki-laki.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1494	SDG1825.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Uly a dan paket C setara SM) perempuan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat menengah laki-laki.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			disabilitas.					
1495	SD018827.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Rasio APM-SMP	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
1496	SD01078.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a)	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1497	SD01079.00.02	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1498	SD01080.00.02	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1499	SD01081.00.00	4.3.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1500	SD01083.00.00	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Penguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)	Salah satu bentuk satuan pendidkan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1501	SD01084.00.02	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Penguruan Tinggi untuk (a) perempuan / laki-	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.					
1502	SD01085.00.02	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD / sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan , (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas /tanpa disabilitas.	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1503	SD00680.00.00	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.					
1504	SD01540.00.00	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1505	SD01326.00.00	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1506	SD01254.03.01	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.		usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.			
1507	SD01254.01.02	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
1508	SD00320.00.00	4.6.1.ja)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Termasuk dapat membaca dan menulis: 1. Penyandang disabilitas penglihatan yang dapat membaca dan menulis huruf braille. 2. Dapat membaca dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah. 3. Orang difabel/cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menulis. 4. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis.			
1509	SD00321.00.00	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf penduduk umur 15-24 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1510	SD00322.00.00	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf penduduk umur 15-59 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1511	SD01445.00.00	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1512	SD00564.00.00	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a)	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.					
1513	SD00568.00.00	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Hak Asasi Manusia	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri 4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak	Persentase	Persen
1514	SD00683.00.00	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender	Jenjang Pendidikan	Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.	1. Jenjang pendidikan formal 2. Jenjang pendidikan nonformal	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.					
1515	SD06941.00.00	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Kesetaraan Gender	Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh ke sempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1516	SD06143.00.00	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.	1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 2. Kurikulum pendidikan tinggi	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.					
1517	SD00277.00.00	4.7.1	Pengamsutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Pendidikan Nasional	Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
1518	SD00279.00.00	4.7.1	Pengamsutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk	Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable	Upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Development)				
1519	SD013820.00	4.7.1	Pengamutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Pengarusutam aan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				guru, (d) penilaian siswa				
1520	SD00365.01.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Air Minum Layak	Air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	1. Air ledeng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air 5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)	Persentase	Persen
1521	SD00513.01.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Disabilitas	Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (reading difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects).	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil	Jumlah; Proporsi	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Barang Kecil Menggunakan Jari		
1522	SD00513.02.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Disabilitas	Seseorang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah.	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari	Jumlah	Kasus
1523	SD00947.01.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			higenis bagi semua (WASH).			8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas		
1524	SD01024.03.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higenis bagi semua (WASH).	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak dimaksudkan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1525	SD00680.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					
1526	SD01784.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi SD/MI/sederajat dengan akses ke fasilitas i	Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1527	SD01785.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(WASH).	siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higenis bagi semua (WASH)				
1528	SD01787.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi SMA/SMK/MA /sederajat dengan akses ke fasilitas i	Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1529	SD01788.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet	Proporsi SMP/MTs/sederajat dengan	Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	akses ke fasilitas i	persen (%).			
1530	SD01069.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Sanitasi Dasar	Sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana Buang Air Besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
1531	SD01077.00.00	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)	Sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang	1. Sekolah Negeri 2. Sekolah Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		berlaku.			
1532	SD01579.00.00	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persentase banyaknya siswa yang mengalami perundungan (bullying) terlepas dari seberapa seringnya di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK atau sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1533	SD00393.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Total mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia (Pemri) dan dinyatakan dalam orang. Beasiswa Unggulan ditujukan untuk mahasiswa jenjang pendidikan master (S2) dan doctoral (S3) di Indonesia dan bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia pada bidang pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
1534	SD00403.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah	Beasiswa	Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa yang ada di	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.		perguruan tinggi diantaranya Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM).	kebutuhan		
1535	SD00404.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Bantuan keuangan yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada siswa internasional dari negara-negara berkembang untuk mengejar gelar master mereka di Universitas Indonesia (a financial assistance offered by the Indonesian Government to International students coming from developing countries to pursue their master degree in Indonesian Universities)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1536	SD00405.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Beasiswa Unggulan	Pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.	1. Program Sarjana (S1) 2. Program Magister (S2) 3. Program Doktor (S3)	Persentase	Persen
1537	SD00079.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
1538	SD00161.04.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara	Official Development Assistance (ODA)	Ukuran diterimanya pengembangan kerjasama internasional. Dalam rangka menyediakan tempat belajar bagi negara berkembang di institusi pendidikan negara donor.	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah 3. Kerjasama Teknik	Jumlah; Nilai	Bantuan/Lembaga; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			berkembang.					
1539	SD01298.00.00	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Warga Negara Asing (WNA)	Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1540	SD00509.00.00	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan.	Diploma empat (D4)	Program diploma dengan masa studi 4 tahun dan lulusannya bergelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1541	SD00567.00.00	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan.	Guru	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1542	SD01454.00.00	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan dibagi dengan seluruh jumlah guru dikali 100%	1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA,(ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pendidikan.		Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik		
1543	SD0161200.00	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan.	Program Sarjana (S1)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memanfaatkan dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1544	SD01096.00.00	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang dan jenis Pendidikan.	Sertifikat Pendidik	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sertifikat; Persen
1545	SD00364.00.00	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.					
1546	SD00593.00.00	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Hukum Nasional Responsif Gender	Sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum nasional yang ditinjau meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KemenPPPA).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1547	SD00952.00.00	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender.	1. Laki-Laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
1548	SD00957.00.00	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan	Upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender yang diukur berdasarkan: 1. Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya 2. Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan	1. kebijakan yang mendorong atau memajukan kesetaraan gender 2. penegakan hukum dan pemantauan hasil pelaksanaannya.	Jumlah; Persentase	Peraturan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	3. Lapangan kerja dan ekonomi 4. Perkawinan dan keluarga.			
1549	SD00630.04.01	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
1550	SD00859.01.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Penggunaan kekuatan fisik yang disengaja, untuk mengancam diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok atau komunitas, yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, terhambatnya pertumbuhan atau kecacatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1551	SD00859.02.02	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum			
1552	SD00859.02.02	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	1. Kekerasan Seksual 2. Kekerasan Fisik 3. Kekerasan Emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1553	SD00860.02.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan	Kekerasan Emosional	Ditunjukkan dengan perilaku menghina atau membuat merasa rendah diri, merendahkan atau mempermalukan istri/pasangannya di depan orang lain, dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi istri/pasangannya (misalnya dengan cara berteriak atau membanting sesuatu), mengancam akan menyakiti istri/pasangannya atau orang yang istri/pasangannya sayangi, serta tindakan psikis lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terakhir.					
1554	SD00860.01.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1555	SD00861.02.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Fisik	Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1556	SD00861.01.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap,	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain		
1557	SD00862.00.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dilemakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, baik maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dalam video seks.			
1558	SD00864.01.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Anak	Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1559	SD00864.02.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Anak	Semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1560	SD00864.03.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau	Kekerasan Terhadap Anak	Tindak kekerasan secara fisik, seksual, pengabaian emosional atau pengabaian terhadap anak.	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.					
1561	SD00865.00.02	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut: a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					terjadinya. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.			
1562	SDG1642.00.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1563	SDG1758.00.00	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				bulan terakhir				
1564	SD00859.02.02	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1565	SD00859.02.02	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	1. Kekerasan Seksual 2. Kekerasan Fisik 3. Kekerasan Emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1566	SD00862.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					seksual); percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan ancaman atau paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah ekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.			
1567	SD00862.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
1568	SD00865.00.02	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			terakhir.		a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami (istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebaginya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.			
1569	SD00282.01.04	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1570	SD01479.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1571	SD01707.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan	Berupa informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1572	SD01759.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
1573	SD01118.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1574	SD01119.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1575	SD01256.00.00	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	Suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC),	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dalam 12 bulan terakhir.		Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.			
1576	SD01433.00.00	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1577	SD01762.00.00	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1578	SD01130.00.00	5.3.1*	Proporsi perempuan	Status Hidup	Kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat.	1. Kawin berdassarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Bersama				
1579	SD01134.00.00	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Status Perkawinan	Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati.	1. belum kawin 2. kawin 3. cerai hidup 4. cerai mati	Persentase	Persen
1580	SD01282.00.00	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Usia Kawin Pertama	Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun
1581	SD00356.00.00	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut	Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)	Semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau total genitalia wanita eksternal, atau cedera lain pada organ genital wanita karena alasan non-medis (all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons)	1. Tipe 1 (Clitoridectomy) 2. Tipe 2 (Excision) 3. Tipe 3 (Infibulation) 4. Tipe 4 (all other harmful procedures to	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelompok umur.			the female genitalia for non-medical purposes)		
1582	SD01438.00.00	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur	**Indikator global yang akan dikembangkan**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1583	SD01254.03.01	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dihitung kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
1584	SD01254.01.02	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
1585	SD01798.00.00	5.4.1	Proporsi waktu yang	Proporsi waktu	Perbandingan waktu yang dibabiskan untuk pekerjaan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi	rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1586	SD00152.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Kursi di parlemen	Kursi di parlemen mengacu pada jumlah mandat parlemen, juga dikenal sebagai jumlah anggota parlemen. Kursi biasanya diperoleh oleh anggota dalam suatu pemilihan umum parlemen. Kursi juga dapat diisi dengan nominasi, penunjukan, pemilihan tidak langsung, rotasi anggota dan melalui pemilihan diluar pemilihan umum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1587	SD00181.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Parlemen	Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Parlemen
1588	SD01625.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Posisi manajerial	Jenis jabatan yang tugas utamanya terdiri dari menentukan dan merumuskan kebijaksanaan pemerintah, dan juga undang-undang dan peraturan pemerintah, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang dan peraturan pemerintah, mewakili pemerintah dan bertindak atas nama pemerintah, atau merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dan kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perusahaan dan organisasi, atau departemen			
1589	SD01714.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1590	SD01716.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1591	SD01717.00.00	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1592	SD00652.00.00	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Jabatan manager	Menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).	KBJI	Jumlah; presentase	Orang; persen
1593	SD01765.00.00	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta	1. Posisi managerial/kepemimpinan di pemerintahan;	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				posisi managerial	perusahaan milik publik atau swasta.	2. Posisi managerial/kepemimpinan di perusahaan publik atau swasta.		
1594	SD00937.00.00	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Kesehatan Reproduksi	Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
1595	SD00992.00.00	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma 10. Mal 11. Pantang Berkala/ kalender 12. Sanggama terputus 13 Metode Modern lainnya 14. Metode Tradisional lainnya	Jumlah; persentase	Pengguna; persen
1596	SD00214.00.00	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-	Pelayanan Kesehatan	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.		kuratif dan rehabilitatif	kebutuhan		
1597	SD00215.00.00	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi	Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1598	SD01764.00.00	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan adalah perbandingan perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.	1. Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS); 2. Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	Persentase	Persen
1599	SD01254.03.01	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.		Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	kebutuhan		
1600	SD01254.01.02	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
1601	SD00591.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Hukum	Aturan resmi terkait tindakan yang ditentukan, atau secara resmi diakui mengikat dan ditegakkan oleh otoritas pengendali yang mengatur perilaku aktor (termasuk orang-orang, perusahaan, asosiasi, lembaga pemerintah).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan
1602	SD00937.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-	Kesehatan Reproduksi	Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi					
1603	SD00214.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Pelayanan Kesehatan	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1604	SD00226.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Pembatasan	undang-undang dan regulasi memuat batasan dalam lingkup penerapannya yang Meliputi, meskipun tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan persyaratan untuk otorisasi pihak ketiga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan
1605	SD01387.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi	Peraturan/regulasi	Perintah, keputusan eksekutif, Menteri atau administrasi lainnya. Pada tingkat kota, regulasi disebut juga tata cara. Peraturan dan tata cara yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		dikeluarkan oleh entitas pemerintah memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit.			
1606	SD01284.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Tersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan, Dokumen
1607	SD01104.00.00	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan	Sistem hukum jamak	Sistem hukum dan berbagai sumber hukum saling berdampingan. Sistem seperti itu biasanya berkembang selama periode waktu tertentu sebagai konsekuensi dari warisan kolonial, agama dan faktor sosial budaya lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			seksual dan reproduksi					
1608	SD01254.03.01	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
1609	SD01254.01.02	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
1610	SD00573.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau	Hak guna-bangunan	Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.					
1611	SDG05574.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak guna-usaha	Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1612	SDG05576.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak milik	Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1613	SDG05578.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah	Hak pakai	Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.		pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini			
1614	SD000580.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak-hak atas tanah	Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.	1. Hak Milik 2. Hak Guna-Usaha 3. Hak Guna-Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak Membuka Tanah 7. Hak Memungut Hasil Hutan 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53	Persentase	Persen
1615	SD000604.00.03	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan	Kepemilikan lahan	hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat.	Klasifikasi Wilayah	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.					
1616	SD00904.00.02	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Kepemilikan lahan	Hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1617	SD00306.01.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Lahan pertanian (agricultural land)	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(meadows dan pastures) tetap (LU5)		
1618	SD00306.03.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Lahan pertanian (agricultural land)	Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mencakup: 1. Lahan yang dipakai untuk tanaman yang siklusnya kurang dari 1 tahun; 2. Lahan yang dipakai untuk menanam tanaman herba atau tanaman pakan; 3. Lahan subur yang sedang tidak ditanami; 4. Lahan yang ditanami tanaman jangka panjang 5. Lahan yang ditanami tanaman pakan atau ditinggalkan sebagai lahan kosong selama lebih dari 5 tahun	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap (LU5)	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen
1619	SD00282.01.04	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1620	SD01739.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian	Proporsi penduduk	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak tanah atas pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	kebutuhan		
1621	SD01760.00.00	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	Proporsi jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1622	SD00576.00.00	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Hak milik	Hak tunin-menunin, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1623	SD00580.00.00	5.a.2*	Ketersediaan	Hak-hak atas	Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang	1. Hak Milik	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	tanah	bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.	2. Hak Guna-Usaha 3. Hak Guna-Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak Membuka Tanah 7. Hak Memungut-Hasil Hutan 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53		
1624	SD00591.00.00	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Hukum	Sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1625	SD00951.01.01	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin	Melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol				
1626	SD00951.01.02	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Melibat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau mengawasi lahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1627	SD00951.02.01	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau mengawasi lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah adalah sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kontrol				
1628	SD00951.02.02	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah adalah sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1629	SD00093.00.00	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Memiliki telepon genggam	Apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1630	SD01701.00.00	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Perbandingan antara individu yang menguasai/memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1631	SD01170.00.00	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Termasuk telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
1632	SD01170.00.00	5.b.1*	Proporsi individu yang	Telepon Genggam/Selul	Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menguasai/memiliki telepon genggam.	er (Ponsel)	jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone.	kebutuhan		
1633	SD00564.00.00	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1634	SD00941.00.00	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Kesetaraan Gender	Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1635	SD00956.01.00	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Mengukur apakah Pemerintah mempunyai sistem untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender.	Klasifikasi Wilayah	Persentase	Persen
1636	SD00956.02.00	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk	Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur apakah Pemerintah mempunyai sistem untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			perempuan.	kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan				
1637	SD00634.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Air Baku	Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.	1. Sumber air permukaan 2. Cekungan air tanah 3. Air hujan	Volume	Liter
1638	SD00345.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; Volume; Persentase	Rumah tangga; Liter, Kubik; Persen
1639	SD00354.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Liter
1640	SD00365.02.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum	Air Minum yang Layak	Air minum yang terlindung meliputi air keleng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang	1. Air kleng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air	Jumlah; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang dikelola secara aman		jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)		
1641	SDG00409.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses Air Minum Layak	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung; sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung	1. Mudah diperoleh 2. Cukup sulit diperoleh 3. Sangat sulit diperoleh	Persentase	Persen
1642	SDG00412.01.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses aman	Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.	1. Air Kemasan 2. Ledeng 3. Perpipaan 4. Perpipaan Eceran 5. Kran halaman 6. Hidran umum 7. Sumur Bor /Pompa 8. Sumur Terlindungi 9. Mata air Terlindungi 10. Penampungan Air Hujan.	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen
1643	SDG00434.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses layak terbatas	Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit.	1. Air Kemasan 2. Ledeng 3. Perpipaan 4. Perpipaan Eceran 5. Kran halaman 6. Hidran umum	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. Sumur Bor/Pompa 8. Sumur Terlindungi 9. Mata air Terlindung 10. Penampungan Air Hujan.		
1644	SD00436.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses layak dasar	Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang.	1. Air Kemasan 2. Ledeng 3. Perpipaan 4. Perpipaan Eceran 5. Kran halaman 6. Hidran umum 7. Sumur Bor/Pompa 8. Sumur Terlindungi 9. Mata air Terlindung 10. Penampungan Air Hujan.	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen
1645	SD00484.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses tidak layak	Apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung.	1. Sumur Tidak Terlindung 2. Mata Air Tidak Terlindung	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen
1646	SD00492.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Akses tidak tersedia	Apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan.	1. Sungai 2. Danau 3. Waduk 4. Kolam 5. Irigasi	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen
1647	SD00460.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang dikelola secara aman		jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.			
1648	SD00845.01.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Industri	Cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1649	SD00845.02.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1650	SD00782.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Kapasitas prasarana air baku	Kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1651	SD00783.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik (m3/dtk)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	m3/dtk
1652	SD00282.01.04	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	kebutuhan		
1653	SD01369.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
1654	SD01549.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1655	SD01559.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.	1. Akses tidak tersedia 2. Akses tidak layak 3. Akses layak terbatas 4. Akses layak dasar 5. Akses Aman	Persentase	Persen
1656	SD01619.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1657	SD01772.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang	Proporsi populasi yang	Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%)	kebutuhan		
1658	SD01050.02.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makanya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1659	SD01052.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1660	SD01053.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1661	SD01074.00.00	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Satu Dapur	Jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rumah Tangga
1662	SD01145.00.01	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang	Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak Terlindung 8. Mata Air Terlindung 9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya		
1663	SD01146.02.01	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Sumber air minum layak	Jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.	1. Air Kemasan 2. Ledeng 3. Perpipaan 4. Perpipaan Eceran 5. Kran halaman 6. Hidran umum 7. Sumur Bor/Pompa 8. Sumur Terlindungi 9. Mata air Terlindung 10. Penampungan Air Hujan.	Jumlah; Volume; persentase	Rumah tangga; Liter; Kubik; persen
1664	SD00412.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Akses Aman	apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1665	SD00419.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Akses Belum Layak	(i) apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) apabila rumah tangga di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta (iii) apabila rumah tangga di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1666	SD00428.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Akses Layak Bersama	(i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1667	SD00432.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Akses Layak Sendiri	(i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1668	SD00437.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1669	SD00438.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Buang air besar sembarangan BABS tertutup	Rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1670	SD00451.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Cuci tangan pakai sabun	Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1671	SD00460.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		kesehatan umum, dan sebagainya.			
1672	SD00496.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
1673	SD00499.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Desa/Kelurahan
1674	SD00500.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF /SBS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa/keluarahan; Persen
1675	SD00555.00.00	6.2.1*	Persentase rumah	Fasilitas	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan,	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Fasilitas;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sanitasi Layak	antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1676	SD00947.01.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen
1677	SD00714.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah	Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kabupaten/Kota

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota			
1678	SD00773.01.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1679	SD00773.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
1680	SD00882.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
1681	SD00973.00.00	6.2.1*	Persentase rumah	Kondisi stop	Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	buang air besar sembarangan (SBS)	tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1682	SD000021.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah	Kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota/Kabupaten; Persen
1683	SD000072.01.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Lumpur Tinja	Limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah tangga; Persen
1684	SD000072.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk	Lumpur tinja	Campuran padatan dan fluida yang diambil dari sub-sistem pengolahan setempat (tangki septik).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun					
1685	SD00097.01.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Mencuci tangan dengan sabun dan air	Salah satu tindakan dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1686	SD00097.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Mencuci tangan dengan sabun dan air	Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1687	SD00190.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T	Banyaknya rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T dibagi dengan dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1688	SD01355.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang	Pengamanan limbah cair	Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	rumah tangga	mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.	kebutuhan		
1689	SD01360.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Pengamanan sampah rumah tangga	Melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1690	SD01437.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1691	SD01548.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan	Persentase rumah tangga yang melakukan praktik BABS di tempat terbuka	Banyaknya rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS di tempat terbuka dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dengan air dan sabun					
1692	SD01551.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1693	SD01557.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1694	SD01558.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1695	SD01560.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan	Persentase rumah tangga yang	Diukur melalui 5 (lima) indikator: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b)	1. Akses Aman 2. Akses Layak Sendiri 3. Akses Layak Bersama	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	4. Akses Belum Layak		
1696	SD01573.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, baik terjadwal maupun tidak (on call basis), dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1697	SD01619.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1698	SD01741.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara	Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan	Perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	sabun dan air				
1699	SD01773.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1700	SD01781.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani (total)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1701	SD01050.02.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1702	SD01051.00.00	6.2.1*	Persentase rumah	Rumah tangga	Banyaknya rumah tangga yang tersambung ke sistem	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	(RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Tangga; Persen
1703	SD01052.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1704	SD01053.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1705	SD01071.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.			
1706	SD01108.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan	Sistem pengelolaan air limbah yang melayani komplek perumahan dan komplek perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1707	SD01108.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Komunal	Sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1708	SD01108.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1709	SD01135.00.00	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang	Stop Buang Air Besar	Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sembarangan (BABS)	sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.	kebutuhan		
1710	SD000049.01.00	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Limbah	Bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1711	SD000049.02.00	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Limbah	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1712	SD017200.00.00	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Proporsi limbah cair industri air limbah yang diolah secara aman	**Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1713	SD01483.00.01	6.3.1.[a]	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Persentase limbah cair industri air limbah yang diolah secara aman	Perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1714	SDG1443.00.02	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Persentase limbah cair industri air limbah yang diolah secara	Perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan 11. Aceh 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				aman				
1715	SD01690.00.00	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1716	SD00102.00.00	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Kualitas air permukaan sebagai air baku	pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air permukaan dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas, serta kualitas air sungai dan waduk/ bendungan.	1. Air Sungai 2. Air Danau 3. Air Waduk/Bendungan	Indeks	Indeks
1717	SD01450.00.00	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Pengelolaan kualitas air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1718	SD00110.00.00	6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	Kualitas air tanah sebagai air baku	Pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air tanah dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada air tanah pada daerah terpilih yang diukur.			
1719	SD01450.00.00	6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	Pengelolaan kualitas air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1720	SD00530.00.00	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu	Efisiensi Penggunaan Air	Nilai tambah dari sektor utama tertentu (pertanian, pertambangan, listri, gas, uap, dan jasa) dibagi dengan volume air yang digunakan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1721	SD01598.00.00	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1722	SD01362.00.00	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Pengambilan (withdrawal) Air Tawar	Volume air tawar yang diambil dari sumbernya (sungai, danau, akuifer) untuk pertanian, industri, dan kota. Pengambilan air tawar termasuk air tawar primer (tidak diambil sebelumnya), air tawar sekunder (sebelumnya diambil dan dikembalikan ke sungai dan air tanah, seperti air limbah yang dibuang dan air drainase pertanian) dan air tanah. Itu tidak termasuk air non-konvensional, yaitu penggunaan langsung air limbah yang diolah, penggunaan langsung air drainase	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pertanian dan air desalinasi.			
1723	SD01214.00.00	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai keperluan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1724	SD01752.00.00	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Perbandingan antara kuantitas air permukaan yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1725	SD01753.00.00	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Perbandingan antara kuantitas air tanah yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1726	SD00487.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1727	SD00488.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Daya Rusak Air	Daya air yang merugikan kehidupan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1728	SD00977.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan	Konservasi	Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Sumber Daya Air	keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1729	SD00272.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Pendayagunaan Sumber Daya Air	Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proyek; Persen
1730	SD01471.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Pengelolaan Sumber Daya Air	Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1731	SD01726.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Pengendalian Daya Rusak Air	Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Upaya; Persen
1732	SD01144.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
1733	SD01147.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
1734	SD01202.00.00	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Derajat indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh). Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu (i) lingkungan pendukung, (ii) kelembagaan dan peran serta, (iii) pendanaan dan (iv)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Instrument pengelolaan. Data Indikator 6.5.1 dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.			
1735	SD00449.00.01	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Cekungan Lintas Batas	Cekungan air permukaan (sungai, danau) dan air tanah yang terletak pada perbatasan atau lintas batas negara. Wilayah cekungan lintas batas untuk air permukaan (sungai, danau) ditetapkan berdasarkan hasan cekungan. Untuk air tanah, wilayah cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan hasan akifer.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah	Luas	km2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
1736	SD00449.00.02	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Cekungan Lintas Batas	Cekungan air permukaan (sungai, danau) dan air tanah yang terletak pada perbatasan atau lintas batas negara. Wilayah cekungan lintas batas untuk air permukaan (sungai, danau) ditetapkan berdasarkan luasan cekungan. Untuk air tanah, wilayah cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan luasan akifer.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	km2
1737	SD00487.00.00	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1738	SD01411.00.01	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Pengaturan kerjasama sumber daya air	Perjanjian bilateral atau multilateral atau konvensi atau pengaturan formal lainnya antara negara yang mengatur kerangka kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pengaturan kerjasama dianggap operasional apabila kriteria berikut terpenuhi; (a) adanya lembaga bersama, mekanisme bersama atau komisi untuk kerjasama lintas batas; (b) adanya	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan	Jumlah	Perjanjian

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1739	SD01411.00.02	6.5.2*	Proporsi wilayah	Pengaturan	Perjanjian bilateral atau multilateral atau konvensi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Perjanjian

komunikasi resmi yang dilakukan antar negara secara berkala (minimal satu tahun sekali) dalam bentuk pertemuanpertemuan, baik politis maupun teknis; (c) memiliki tujuan dan strategi bersama, rencana pengelolaan bersama, atau rencana aksi yang disepakati oleh kedua negara; (d) adanya pertukaran data dan informasi secara berkala (minimal satu tahun sekali).

17. Bengkulu
18. Lampung
19. Kepulauan Bangka Belitung
21. Kepulauan Riau
31. Dki Jakarta
32. Jawa Barat
33. Jawa Tengah
34. Di Yogyakarta
35. Jawa Timur
36. Banten
51. Bali
52. Nusa Tenggara Barat
53. Nusa Tenggara Timur
61. Kalimantan Barat
62. Kalimantan Tengah
63. Kalimantan Selatan
64. Kalimantan Timur
65. Kalimantan Utara
71. Sulawesi Utara
72. Sulawesi Tengah
73. Sulawesi Selatan
74. Sulawesi Tenggara
75. Gorontalo
76. Sulawesi Barat
81. Maluku
82. Maluku Utara
91. Papua Barat
94. Papua

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	kerjasama sumber daya air	atau pengaturan formal lainnya antara negara yang mengatur kerangka kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pengaturan kerjasama dianggap operasional apabila kriteria berikut terpenuhi: (a) adanya lembaga bersama, mekanisme bersama atau komisi untuk kerjasama lintas batas; (b) adanya komunikasi resmi yang dilakukan antar negara secara berkala (minimal satu tahun sekali) dalam bentuk pertemuan/pertemuan, baik politis maupun teknis; (c) memiliki tujuan dan strategi bersama, rencana pengelolaan bersama, atau rencana aksi yang disepakati oleh kedua negara; (d) adanya pertukaran data dan informasi secara berkala (minimal satu tahun sekali).	analisis atau sesuai kebutuhan		
1740	SDG18d1.00.00	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Jumlah Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang tercakup dalam pengaturan operasional, yang terletak di dalam batas negara (km2) dengan Total luas akifer lintas batas yang tercakup dalam pengaturan operasional (km2) dibagi jumlah Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang terletak di dalam batas negara (km2) dengan Total luas akifer lintas batas (km2).	11. Nanggroe Aceh Darusalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
1741	SD01801.00.00	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Jumlah Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang tercakup dalam pengaturan operasional, yang terletak di dalam batas negara (km2) dengan Total luas akifer lintas batas yang tercakup dalam pengaturan operasional (km2) dibagi jumlah Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang terletak di dalam batas negara (km2) dengan Total luas akifer lintas batas (km2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1742	SD01144.00.00	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional		tanah.	kebutuhan		
1743	SD01147.00.00	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
1744	SD00487.00.00	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1745	SD00531.00.00	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
1746	SD00532.00.01	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Ekosistem Perairan	Lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air tawar dan menjaga kualitas air.	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
1747	SD005532.00.02	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Ekosistem Perairan	Lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air tawar dan menjaga kualitas air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
1748	SD015599.00.01	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari	Perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4)	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				waktu ke waktu	kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah.	14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						91. Papua Barat 94. Papua		
1749	SD01599.00.02	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1750	SD01144.00.00	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
1751	SD01147.00.00	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
1752	SD00637.00.00	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
1753	SD00410.02.00	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah	Belanja Negara	Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah pusat menurut program.	Nilai	Rupiah
1754	SD00747.00.00	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang	Jumlah ODA terkait air dan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			menjadi bagian rencana belanja pemerintah	sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah		kebutuhan		
1755	SD00161.03.00	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah	Official Development Assistance (ODA)	Bantuan pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang.	1. Pinjaman Yen 2. Bantuan Dana Hibah 3. Kerjasama Teknik	Jumlah; Nilai	Bantuan/Lembaga; Rupiah
1756	SD00184.00.00	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Partisipasi Masyarakat	Peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Konsultasi publik 2. Penyampaian Aspirasi 3. Rapat dengar pendapat umum 4. Kunjungan kerja 5. Sosialisasi 6. Seminar 7. Lokakarya 8. Diskusi	Persentase	Persen
1757	SD00239.02.00	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
1758	SD01795.00.00	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal	Proporsi unit pemerintah	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.		kebutuhan		
1759	SD000559.00.00	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Listrik non-PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.	1. Tenaga surya 2. BBM 3. Lainnya	Jumlah	Kwh
1760	SD000660.00.00	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Listrik PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.	1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1.300 VA 4. 2.200 VA 5. 3.500-5.500 VA 6. 6.600-14.000 VA 7. Di atas 14.000 VA	Jumlah	Kwh
1761	SD001828.00.00	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi.	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
1762	SD000987.00.00	7.1.1.[a]	Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Rata-rata	Kwh/Kapita

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(kwh/kapita)	jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.			
1763	SD00377.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Bahan Bakar	Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak, batu bara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1764	SD00378.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Bahan Bakar Gas	bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1765	SD00379.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Bahan Bakar yang Bersih	Target tingkat emisi dan rekomendasi bahan bakar spesifik (contohnya batubara dan minyak tanah yang belum diolah) yang tercakup dalam pedoman normatif pedoman WHO untuk kualitas udara dalam ruangan: pembakaran bahan bakar rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1766	SD00543.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Energi	Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1767	SD01736.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1768	SD01152.00.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber	Sumber Energi	Sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut,	Sumber energi terbarukan dan tidak	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.		biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.	terbarukan		
1769	SD01166.01.00	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Teknologi	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
1770	SD01062.00.00	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga (Sambungan Rumah (SR))	Banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sambungan; Persen
1771	SD00282.01.04	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1772	SD01838.00.00	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga. Rasio penggunaan gas rumah tangga diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas dengan total rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
1773	SD00401.00.00	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran Energi Terbarukan (%)	Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1774	SD00544.00.00	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Energi Final	Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1775	SD00546.00.01	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Energi Terbarukan	Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.	1. Energi matahari/solar 2. Tenaga air 3. Tenaga angin 4. Energi Biogas 5. Energi Panas bumi 6. Energi gelombang air laut 7. Energi sampah 8. Energi Biomassa	Persentase	Persen
1776	SD00545.00.00	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Energi Primer	Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1777	SD01020.00.00	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas	Keadaan tingkatan atau ukuran intensnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1778	SD01023.00.00	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas Energi Primer	Total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah
1779	SD00577.00.00	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	Akuntabel	Dapat dipertanggungjawabkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1780	SD003388.00.00	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	***Indikator global yang perlu dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah;Nilai	Bantuan; USD
1781	SD001612.00.00	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	Pinjaman Luar Negeri	Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang dikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1782	SD003546.00.02	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam	Energi terbarukan	Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Watt, MegaWatt

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			watt per kapita)		suhu lapisan laut			
1783	SD00785.00.01	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)	Kapasitas terpasang listrik	Daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Watt, MegaWatt
1784	SD00787.00.00	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)	Proporsi total daya listrik maksimum yang mampu diproduksi seluruh pembangkit energi terbarukan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1785	SD00120.00.00	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)	Nameplate capacity	Output maksimum generator / pembangkit atau peralatan produksi tenaga listrik lainnya dalam kondisi yang ditentukan oleh pabrikan dan biasanya ditunjukkan pada pelat nama yang terpasang secara fisik ke generator.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Volt
1786	SD00017.00.00	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu PDB Per kapita dengan harga konstan.	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Persentase	Persen
1787	SD00282.01.04	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1788	SD00189.00.01	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDB per kapita.	Menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran	Rasio	Rupiah/kapita

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.	2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha		
1789	SD00189.00.02	8.1.1.ja)	PDB per kapita.	PDB per kapita.	Menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.	1. rendah/low-income (PDB/kapita <= $1,025) 2. Menengah rendah/lower middle-income (PDB/kapita $1,026 - $3,995) 3. Menengah tinggi/upper middle-income ($3,996 - $12,375) 4. Tinggi/high-income (PDB/kapita > = $12,376)	Rasio	Rupiah/kapita
1790	SD01657.00.00	8.1.1.ja)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	PDB per kapita menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB)Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Rasio	Rupiah/kapita
1791	SD01658.00.00	8.1.1.ja)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Rasio	Rupiah/kapita
1792	SD00364.01.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk	Anjungan Tunai Mandiri/Auto	Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) adalah perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah	1. ATM Tarik Tunai 2. ATM Setor/Tarik Tunai	Jumlah	ATM

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dewasa	mated Teller Machine (ATM)	pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai dari rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang dan atau jasa.			
1793	SD00364.02.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Anjungan Tunai Mandiri/Auto mated Teller Machine (ATM)	Perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
1794	SD00691.00.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
1795	SD00715.00.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kantor bank/atm
1796	SD00716.00.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
1797	SD00779.01.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank	Kantor Bank	Kantor Bank adalah seluruh jaringan/unit kantor bank	1. Kantor Pusat	Jumlah;	Kantor;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya. Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor layanan bank antara lain meliputi: kantor pusat non operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu diluar negeri, kantor perwakilan bank umum diluar negeri, dan kas keliling/kas mobil/kas terapung, baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional dan Syariah.	2. Kantor Cabang 3. Kantor Cabang Pembantu 4. Kantor Kas 5. Unit Pembantu	Persentase	Persen
1798	SD00779.02.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Kantor Bank	Seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya.	1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Kantor Cabang Pembantu 4. Kantor Kas 5. Unit Pembantu	Jumlah	Unit
1799	SD00284.01.00	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Penduduk Dewasa	Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu negara yang berusia 15 tahun atau lebih.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1800	SD00041.00.00	8.10.1.ja)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Kredit dengan Penjaminan Tertentu	Kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu., sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
1801	SD00069.00.00	8.10.1.ja)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Kredit UMKM	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.			
1802	SD01713.00.00	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1803	SD01229.00.00	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Total Kredit	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank secara total.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
1804	SD01273.00.00	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Usaha Kecil	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	1. Modal Usaha: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
1805	SD01275.00.00	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Usaha Menengah	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau	1. Modal Usaha: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	(sepuluh miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)		
1806	SD01276.00.00	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Usaha Mikro	Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1. Modal Usaha: paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
1807	SD00018.00.00	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Persentase	Persen
1808	SD00019.00.00	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentese	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			per tahun	PDB riil per orang bekerja per tahun	persen.			
1809	SD01656.00.00	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	PDB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1810	SD01171.04.02	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Tenaga kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1811	SD01171.05.02	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Tenaga kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1812	SD00197.00.00	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Pekerja Informal	penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1813	SD00198.00.01	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Pekerja informal di sektor non-pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1814	SD00198.00.02	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor	Pekerja informal di sektor non-	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			dan jenis kelamin	pertanian				
1815	SD00282.01.04	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau meteka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1816	SD01719.02.00	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non-pertanian dikali 100 persen.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentae	Persen
1817	SD01133.00.00	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Status Pekerjaan	Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama.	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai 5. Pekerja Keluarga atau tidak dibayar 6. Pekerja Bebas	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1818	SD00408.02.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1819	SD00427.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha	Berusaha Dibantu Buruh	KRT/ART berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Tetap/Buruh Dibayar	buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.	kebutuhan		
1820	SD00443.01.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Buruh/Karyawan/Pegawai	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1821	SD00032.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Layanan Keuangan	Bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.	1. Lembaga Bank 2. Lembaga Non Bank	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
1822	SD00282.01.04	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1823	SD01435.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase akses layanan keuangan formal UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Diperoleh dengan membagi jumlah rekening kredit UMKM dengan jumlah total UMKM, dikalikan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentae	Persen
1824	SD01581.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase tenaga kerja formal	Presentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentae	Persen
1825	SD01253.00.02	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha	UMKM	Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	1. Usaha Mikro 2. Usaha Kecil	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan			3. Usaha Menengah		
1826	SD01273.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Usaha Kecil	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	1. Modal Usaha: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
1827	SD01276.00.00	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Usaha Mikro	Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1. Modal Usaha: paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
1828	SD00675.00.00	8.4.1	Jejak material (material footprint yang dihitung selama tahun g selama tahun berjalan.	Jejak Material (Material Footprint)	Jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	MF per kapita; Persen
1829	SD00676.00.00	8.4.1	Jejak material	Jejak material	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Material

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(material footprint) yang dihitung selama tahun g selama tahun berjalan.	(material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan		analisis atau sesuai kebutuhan		
1830	SD01337.00.00	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Strategi
1831	SD00443.01.00	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Buruh/Karyaw an/Pegawai	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1832	SD01265.00.00	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam kerja	Imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.	1. < 5juta 2. 5 - 10 juta 3. > 10 juta	Nilai	Ribu Rupiah/jam
1833	SD01266.00.00	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan 4 (empat).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rata-rata
1834	SD01267.00.00	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah/Gaji Bersih	Imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan.	1. < 5juta 2. 5 - 10 juta 3. > 10 juta	Nilai	Rupiah
1835	SD00362.01.02	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.	Menurut lokasi: 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelamin dan kelamin dan kelompok umur.					
1836	SD01370.01.00	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelamin dan kelompok umur.	Pengangguran	Pengangguran terdiri dari: 1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (Putus asa). 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.	1. Pengangguran Terbuka 2. Pengangguran Tersembunyi	Jumlah; persentase	Orang; persen
1837	SD01206.01.00	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	1. <= 5% 2. 5,1% - 10% 3. > 10%	Persentase	Persen
1838	SD01206.02.00	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.	1. <= 5% 2. 5,1% - 10% 3. > 10%	Persentase	Persen
1839	SD01207.00.00	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran berdasarkan jenis kelamin/kelompok umur dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kelompok umur.	dan kelompok umur				
1840	SD00095.00.00	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Mencari Pekerjaan	Kegiatan dari seseorang yang berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu seminggu yang lalu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1841	SD00202.01.01	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Pekerja setengah pengangguran	Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1842	SD00202.01.02	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Pekerja setengah pengangguran	Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).	1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma (DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1843	SD01213.00.00	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Tingkat setengah pengangguran.	Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari membagi penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dengan penduduk yang bekerja, dikali 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1844	SD00283.00.00	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Penduduk Dalam Kategori Usia Muda	Penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1845	SD01523.00.00	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja	Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang	Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			atau mengikuti pelatihan (NEET).	sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen.			
1846	SD00408.02.00	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1847	SD00421.00.00	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa seperti perdagangan dan perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara, perdagangan anak untuk pelacuran atau kegiatan terlarang lainnya, dan pekerjaan lain yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan anak-anak.	1. Tentara Anak 2. Pelacuran Anak 3. Eksploitasi Anak Lainnya	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1848	SD00195.00.00	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang	Pekerja Anak	Semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: (1) bentuk bentuk	1. Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum	Jumlah;	Jam Kerja, Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).		terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya	jam kerja; 2. Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu; 3. Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.		
1849	SD01452.00.00	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti traning atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1850	SD01703.00.00	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Proporsi jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja (orang) dibagi dengan jumlah	Semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: (1) bentukbentuk terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya	1. Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum jam kerja; 2. Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun	Jumlah; Kelompok Umur	Jam Kerja, Orang; Umur

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			(dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	penduduk usia 10-17 tahun (orang) dikalikan dengan 100	(International Conference of Labour Statisticians [ICLS] 18)	dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu; 3. Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.		
1851	SD00842.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja	kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan satu atau lebih pekerja mengalami cedera, penyakit atau kematian. Kecelakaan kerja harus dipertimbangkan kecelakaan perjalanan, transportasi atau lalu lintas di mana pekerja terluka dan yang timbul dari atau dalam perjalanan kerja; yaitu, saat terlibat dalam ekonomi aktivitas, atau di tempat kerja, atau menjalankan bisnis majikan.	1. Kecelakaan kerja fatal 2. Kecelakaan kerja non fatal	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
1852	SD00843.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja Fatal	Cedera akibat kerja yang fatal: cedera akibat pekerjaan yang menyebabkan kematian dalam waktu satu tahun sejak kecelakaan kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
1853	SD00844.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja Non-Fatal	Cedera non fatal akan menyebabkan hilangnya hari kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1854	SD00113.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Migran Lokal Kota	Penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima (5) tahun sebelum survei berada di luar wilayah kota.	1. Dari pedesaan 2. Dari perkotaan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1855	SD00207.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Pekerjaan	Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja.	KBJI	Jumlah	Pekerjaan
1856	SD01132.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Status Migran	Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei.	1. Migran luar kota 2. Migran lokal kota	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1857	SD01197.00.00	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	***Indkikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Frekuensi
1858	SD00760.00.00	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan	Jumlah	Dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			yang menerapkan norma K3.	perusahaan yang menerapkan norma K3	menerapkan norma K3.	analisis atau sesuai kebutuhan		
1859	SD00940.00.00	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Selanjutnya Disingkat K3	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1860	SD01600.00.00	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan	Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero), Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan.	1. PT 2. CV 3. Firma 4. PT (Persero) 5. Perusahaan Umum 6. Perusahaan Jawatan	Jumlah; Persentase	Perusahaan; Persen
1861	SD00193.01.00	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Pekerja	Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (buruh).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1862	SD01356.00.00	8.8.2	Peningkatan	Peningkatan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait		analisis atau sesuai kebutuhan		
1863	SD00994.00.00	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi pariwisata terhadap PDB	Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku); b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1864	SD00015.00.00	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dengan mengurangi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-t terhadap kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-(t-1), dibagi dengan nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1865	SD01766.00.00	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap	Proporsi pertumbuhan kontribusi pariwisata	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari membagi penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			PDB.	terhadap PDB	investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku, dikalikan dengan 100 persen.			
1866	SD01314.02.00	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Wisatawan Mancanegara	Orang yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanan tidak untuk bekerja atau memperoleh penghasilan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1867	SD01314.01.00	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Wisatawan Mancanegara	Setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.	1. Wisatawan (tourist) Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: a. Personal: berlibur, rekreasi, menganjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser,	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pertunjukan, dan lain-lain. 2. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).		
1868	SD00142.00.00	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Kunjungan wisatawan nusantara	Perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1869	SD00282.01.04	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1870	SD01313.00.00	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Wisatawan	Orang yang melakukan wisata.	1. visitor (pengunjung) 2. Tourist (wisatawan) 3. Excursionist (pelancong)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1871	SD01315.00.00	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan	Wisatawan	Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah	1. Penduduk yang	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			wisatawan nusantara.	Nusantara	teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.	melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; 2. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; 3. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).	Persentase	Persen
1872	SD00503.00.00	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Devisa sektor pariwisata	Penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.	1. Migas 2. Non migas	Jumlah	Juta USD
1873	SD01314.03.00	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Wisatawan Mancanegara	Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.			
1874	SD00394.00.00	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Bantuan Untuk Komitmen dan Pencairan Perdagangan	Total pengeluaran dan komitmen total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dari semua donor untuk bantuan perdagangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1875	SD00395.00.00	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bantuan/Rupiah
1876	SD00007.00.00	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Adanya strategi nasional terkait ketenaigakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Strategi Nasional terkait ketenagakerjaan pemuda direpresentasikan dengan berbagai dokumen (peraturan perundangan-undangan, rencana aksi, peta jalan, dan sebagainya) yang memuat langkahlangkah strategis pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen,Strategi
1877	SD00637.00.00	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.			Belanja		
1878	SD00666.02.01	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Hari Tua (JHT) 3. Jaminan Pensiun (JP) 4. Jaminan Kematian (JKm)	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen
1879	SD00666.02.02	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan	1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun 4. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan/program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.		bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.			
1880	SD01106.00.00	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiunan 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan/Program; Persen
1881	SD01233.00.00	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			ketenagakerjaan nasional.	terhadap anggaran nasional dan PDB				
1882	SD00496.02.00	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
1883	SD00282.01.04	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1884	SD01620.00.00	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	jumlah agregat masyarakat yang tinggal dalam jarak kurang dari 2 km dari akses jalan dengan kondisi yang layak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Penduduk
1885	SD01620.00.00	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Jumlah agregat masyarakat yang tinggal dalam jarak kurang dari 2 km dari akses jalan dengan kondisi yang layak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Penduduk
1886	SD00653.00.02	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan	1. jalan nasional 2. jalan provinsi	Panjang; Persentase	Km; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	3. jalan kabupaten 4. jalan kota 5. jalan desa		
1887	SD00653.00.03	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	1. jalan bebas hambatan 2. jalan raya 3. jalan sedang 4. jalan kecil	Panjang; Persentase	Km; Persen
1888	SD00654.00.00	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Jalan Nasional	Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional.	1. Jalan Arteri Primer 2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi 3. Jalan tol 4. Jalan strategis nasional	Panjang; Persentase	Km; Persen
1889	SD00798.00.00	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kategori Kondisi Baik dan Sedang	Kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka International Roughness Index (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1890	SD00972.00.00	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional.	Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat	Roughness Indeks IRI; persentase	m/km; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).		
1891	SD009972.00.00	9.1.1.ja)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi mantap jalan nasional dipenuhi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.	Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk	Roughness Indeks IRI; persentase	m/km; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).		
1892	SD006657.00.00	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Jalan Tol	jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Persentase	Km; Persen
1893	SD003179.00.00	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang jalan tol yang telah terbangun dan dioperasikan diukur dalam satuan km.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	Km
1894	SD003223.00.00	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Pembangunan	Proses, cara, perbuatan membangun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
1895	SD006558.00.00	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta	Jalur Kereta	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang	1. Jalur Tunggal	Panjang;	Km; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			api.	Api	meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	2. Jalur Ganda	Persentase	
1896	SDG0915.00.00	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Kereta Api	Kendaraan dengan tenaga gerak (listrik, diesel, atau tenaga uap) yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan atau sedang bergerak diatas rel, terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
1897	SDG0178.00.00	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda)	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	Km
1898	SDG0693.00.00	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah Barang	Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Barang,Kg
1899	SDG0756.00.00	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah Penumpang	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1900	SDG0381.00.00	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Bandara atau bandar udara	Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. (Permenhub No. PM39 Tahun 2019).	1. ARFL < 800m 2. 800m <= ARFL <= 1200m 3. 1200m <= ARFL <= 1800m 4. 1800m <= ARFL *ARFL = Aeroplane Reference Field Length	Jumlah	Bandara
1901	SDG0208.00.00	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan	Pelabuhan	Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di	1.Pelabuhan Utama	Jumlah	Pelabuhan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			penyeberangan.		sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.	2. Pelabuhan Pengumpul 3.Pelabuhan Pengumpan 4.Pelabuhan Laut 5.Pelabuhan Sungai dan Danau		
1902	SD00209.00.00	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dermaga
1903	SD00210.00.00	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Pelabuhan Strategis	Pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, diantaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelabuhan
1904	SD00361.00.00	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Angka-angka per kapita	Ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah;persen
1905	SD00863.01.00	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1906	SD00863.02.00	9.2.1*	Proporsi nilai	Industri	Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai	KBLI	Jumlah;	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Manufaktur	"transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru" terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).		Persentase	
1907	SD00146.00.00	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Nilai tambah industri manufaktur	Jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1908	SD01728.00.00	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1909	SD01727.00.00	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1910	SD00863.01.00	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1911	SD00863.02.00	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri	Industri Manufaktur	Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai "transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			manufaktur.		baru," terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).			
1912	SD00016.00.00	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1913	SD01654.00.02	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1914	SD00863.01.00	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor pada sektor industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1915	SD01793.00.00	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor pada sektor industri manufaktur yaitu mereka yang bekerja pada	Proporsi tenaga kerja pada sektor pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			lapangan pekerjaan kategori C. Industri Pengolahan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)					
1916	SD01171.03.02	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor pada sektor industri manufaktur.	Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1917	SD01171.04.02	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor pada sektor industri manufaktur.	Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1918	SD00855.00.00	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Industri Kecil	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1919	SD00871.00.00	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Industri Pengolahan	Unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerning struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut.	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1920	SD00144.01.00	9.3.1*	Proporsi nilai	Nilai Tambah	Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya	1. Nilai output	Jumlah;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.		intermediate input (biaya antara).	2. Nilai input	persentase	persen
1921	SD00145.00.00	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Nilai tambah industri kecil	Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1922	SD01725.00.00	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1923	SD00855.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Industri Kecil	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
1924	SD00030.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.	1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumsi	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
1925	SD00052.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit Investasi	Kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
1926	SD00061.00.00	9.3.2*	Proporsi industri	Kredit	Kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase;	Persen;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			kecil dengan pinjaman atau kredit.	Konsumsi	barang-barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir).	analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kredit; Rupiah
1927	SD000066.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit Modal Kerja	Kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
1928	SD000078.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit yang diberikan	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.	1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumsi	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1929	SD01364.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Penyaluran Kredit	Terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. -Kredit modal kerja: kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah. -Kredit investasi: kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan. -Kredit konsumsi: kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir).	1. Milik sendiri: ... % 2. Pihak lain: ... %	Persentase	Persen
1930	SD01702.00.00	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1931	SD00485.02.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan	Data Aktivitas (AD)	Besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas emisi gas rumah kaca.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.					
1932	SD00542.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Emisi Gas Rumah Kaca	Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1933	SD00549.01.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Faktor Emisi	Faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1934	SD00563.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1935	SD00563.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1936	SD00863.02.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri	Industri Manufaktur	Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai "transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru," terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			manufaktur.					
1937	SD01538.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1938	SD01829.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio emisi co2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi co2 dengan nilai tambah sektor industri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
1939	SD01195.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Tingkat Emisi	Perkalian antara data aktifitas dengan faktor emisi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton
1940	SD01196.00.00	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor ah sektor industri manufaktur.	Tingkat emisi gas rumah kaca	Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO_2e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari sektor IPPU (Industrial Processing and Product Use).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1941	SD00542.00.00	9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.	Emisi gas rumah kaca	Lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1942	SD00863.03.00	9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.	Industri Manufaktur	Transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru," terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penjualan (grosir atau eceran)			
1943	SD01358.00.00	9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri diperoleh dengan cara membagi penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2e/tahun) dengan baseline sektor industri pada tahun tersebut (ton CO2e/tahun).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1944	SD01022.00.00	9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.	Intensitas emisi sektor industri.	Intensitas emisi merupakan gas rumah kaca (GRK) yang terlepas ke atmosfer yang dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
1945	SD00289.01.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Peneliti	Para profesional yang terlibat dalam konsepsi atau penciptaan pengetahuan baru. Mereka melakukan penelitian dan meningkatkan atau mengembangkan konsep, teori, model, teknik instrumentasi, perangkat lunak atau metode operasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peneliti; Persen
1946	SD00290.00.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Peneliti; Rasio
1947	SD00291.01.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Penelitian	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penilitian; Persen
1948	SD01677.00.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Pengembangan	Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan kesamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1949	SD01655.00.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1950	SD01687.00.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB (Gross Domestic Expenditure on Research and Development/GERD) diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha (industri manufaktur, pertambangan, dan energi) dan swasta non profit dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1951	SD01035.00.00	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Riset	Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1952	SD00526.00.00	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1953	SD00289.02.00	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan	Peneliti	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk		pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.			
1954	SD01395.00.00	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Perekayasa	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1955	SD01688.00.00	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1956	SD00526.00.00	9.5.2.ja)	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat			
1957	SD00289.02.00	9.5.2.(a)	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Peneliti	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1958	SD01395.00.00	9.5.2.(a)	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Perekayasa	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1959	SD01803.00.00	9.5.2.(a)	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) dihitung dengan membagi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah berikut: Kemenristek, LIPI, dan BPPT dengan total jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1960	SD00368.00.00	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk	Arus Resmi Lainnya (Tidak Termasuk Kredit Ekspor yang Didukung Secara Resmi)	Transaksi oleh sektor resmi yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai ODA, baik karena mereka tidak terutama ditujukan untuk pembangunan, atau karena mereka tidak cukup lunak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			infrastruktur.					
1961	SD01221.00.00	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dukungan
1962	SD00149.00.00	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Nilai Tambah Teknologi Menengah dan Tinggi	Tambahan bernilai tinggi industri manufaktur dengan intensitas teknologi yang lebih tinggi dan produktivitas tenaga kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1963	SD01729.00.00	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Proporsi
1964	SD00851.00.00	9.b.1*	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Industri berteknologi menengah dan tinggi	Industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325. Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1965	SD00993.00.00	9.b.1*	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Kontribusi ekspor produk industri	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi diperoleh dengan membagi jumlah ekspor produk industri berteknologi tinggi dengan total jumlah ekspor	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berteknologi tinggi	produk, kemudian dikalikan dengan 100 persen.			
1966	SD00993.00.00	9.b.1.ja)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi diperoleh dengan membagi jumlah ekspor produk industri berteknologi tinggi dengan total jumlah ekspor produk, kemudian dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1967	SD00422.01.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Akses bergerak pitalebar (mobile broadband)	Akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).	1. Modem portabel 2. Modem nirkabel USB 3. Tablet / smartphone 4. Perangkat seluler lainnya	Kecepatan	Mbps
1968	SD01024.01.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Internet	Istilah umum yang dipakai untuk menunjuk Network komputer dan layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai informasi termasuk e-mail, Gopher, FTP dan World Wide Web.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1969	SD01024.02.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Internet	Sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman world wide web (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak dibatasikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon seluler, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun seluler.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1970	SD00669.00.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Jaringan 4G	Jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1971	SD01700.00.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani	Proporsi individu yang	Proporsi individu yang menggunakan internet dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Nilai	Proporsi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			mobile broadband.	menggunakan Internet	tahun ke atas yang menggunakan internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen.	kebutuhan		
1972	SD01750.00.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband diperoleh dengan cara membagi jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband) dibagi dengan jumlah total luas pemukiman Indonesia dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1973	SD01170.00.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Termasuk telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
1974	SD01170.00.00	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
1975	SD00721.00.00	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan	Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus sertifikasi PPID dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pejabat

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan				
1976	SD00192.00.00	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pejabat
1977	SD00723.00.00	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1978	SD00852.00.00	17.6.1.(a)	Kegiatan saling berbagi	Kegiatan saling berbagi	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Kegiatan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	tahun berjalan.	kebutuhan		
1979	SD000921.01.00	17.6.1.ja)	Kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1980	SD000922.00.00	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara memuat tipe kerjasamanya.	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1981	SD000922.00.00	17.6.1.ja)	Kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).			
1982	SD00923.00.00	17.6.1.ja)	Kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerjasama Triangular	Kerjasama Selatan- Selatan yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
1983	SD00008.00.00			Adaptasi	Suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya	1. Adaptasi bentuk tubuh (morfolog) 2. Adaptasi proses metabolisme tubuh (fisiolog) 3. Adaptasi perilaku	Pementase	Persen
1984	SD00009.00.00			Adat istiadat	Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
1985	SD00010.00.00			Adil	Memperlakukan seseorang dengan cara yang benar atau masuk akal, atau memperlakukan sekelompok orang secara setara dan tidak membiarkan pendapat pribadi memengaruhi penilaian Anda.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Skala	Satuan Skala
1986	SD00002.00.00			Adiwiyata	Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	a. Adiwiyata Nasional b. Adiwiyata Mandiri	Jumlah	Unit
1987	SD00314.00.00			Administrasi Pemerintahan	Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.	1. Administrasi Perekonomian Negara 2. Administrasi peradilan. 3. Administrasi	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kepegawaian Negara 4. Administrasi hubungan luar negeri 5. Administrasi Pembangunan		
1988	ST00583.00.00			Aerobic treatment	Sistem pengelolaan kotoran hewan melalui oksidasi biologis dari kotoran yang telah dikumpulkan menjadi cairan baik dengan aerasi paksa atau alami. Aerasi alami terbatas pada kolam aerobik dan fakultatif dan sistem lahan basah dan utamanya terjadi karena adanya fotosintesis. Oleh karena itu, sistem ini biasanya menjadi anoksik selama periode tanpa sinar matahari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Sistem
1989	SP00125.01.00			Agama	Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia.	1. Islam 2. Kristen 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khong Hu Chu 7. Agama Lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1990	SP00125.02.00			Agama	Ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi kegenerasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat	1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu 7. Agama Kepercayaan	Jumlah, Persentase	Agama, Persen
1991	ST00667.01.00			Agroforestri	Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan di mana spesies pohonpohon hutan dan tanaman hutan lainnya sengaja ditanam di tanah yang sama dengan tanaman pertanian atau ternak, baik secara bersamaan maupun bergilir. Agroforestri dicirikan oleh adanya interaksi	Klasifikasi agroforestri berdasarkan produksi: - Kehutanan - Pertanian/ Perkebunan	Jumlah	Sistem

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ekologis dan ekonomi antara komponen-komponen yang berbeda. Agroforestri meliputi sistem agrosilvicultural (pohon dan tanaman), silvopastoral (pohon dan ternak), dan agrosilvipastoral (pohon, tanaman dan ternak).	- Peternakan		
1992	ST00667.02.00			Agroforestri	Kebenaran agroforestri pada usaha pertanian merupakan praktik pertanian berkelanjutan melalui dampaknya sehubungan dengan tanah, air, tanaman, hewan, dan udara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Agroforestri
1993	SD00628.00.00			Air	Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.	1. Kelas satu (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut) 2. Kelas dua (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Kelas tiga (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembuddayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut) 4. Kelas empat (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut)		
1994	SP00155.00.00			Air Isi Ulang	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan.	1. Air isi ulang air mineral 2. Air isi ulang reverse osmosis	Volume	Liter
1995	SP00069.00.00			Air Kemasan	Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) atau kemasan gelas.	1. Sekali Pakai 2. Isi Ulang	Volume	Liter
1996	SP00070.00.00			Air Leding	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen, termasuk leding meteran dan leding eceran.	1. Leding meteran 2. Leding eceran	Volume	m3
1997	SP00554.00.00			Air limbah yang mendapat	air yang dari segi kualitas tidak bisa lagi digunakan untuk tujuannya semula diproduksi (yaitu air limbah),	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Volume; Persentase	Liter; M3; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perlakuan	yang telah mengalami perlakuan tertentu untuk air limbah dan dialirkan untuk pengguna.	kebutuhan		
1998	SD00345.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; Volume; Persentase	Rumah tangga; Liter, Kubik; Persen
1999	SP00074.02.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Air Minum yang Layak	Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	1. Air ledeng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air 5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)	Jumlah; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen
2000	ST00560.00.00			Air permukaan	air yang ditemukan di permukaan bumi yang terlihat secara terbuka, misalnya kali, sungai, telaga, danau, lahan basah, atau laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	Liter; M3; Persen
2001	SP00078.00.00			Air Pompa/Sumur Bor	Air tanah yang cara pengambilannya menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur bor).	1. Pompa tangan 2. Pompa listrik 3. Kincir angin 4. Sumur artesis	Persentase	Persen
2002	SP00080.00.00			Air Sumur	Air tanah yang cara pengambilannya melalui lubang tanah atau sumur, termasuk sumur terlindung dan tidak terlindung.	1. Sumur terlindung 2. Sumur tidak terlindung	Persentase	Persen
2003	SP00084.00.00			Air Sungai/ Danau	Sumber air permukaan tanah berupa sungai atau danau, termasuk yang disalurkan melalui pipa paralon atau diambil langsung.	peruntukan dan volume penggunaan	Volume; Persentase	Liter; M3; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2004	SD003386.02.00			Air Tanah	Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2005	ST003566.01.00			Air tanah	Air yang tersimpan di bawah tanah dalam lapisan akuifer - yakni, air dalam tanah pada zona jenuh dibawah permukaan air, dimana peri-pori tanah berisi air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	Liter; M3; Persen
2006	ST003567.00.00			Akurisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan tungau.	1. Kelthane MF 2. Morestan 25 WP 3. Morocidae 400 EC 4. Omite 57 EC 5. Plictran 50 WP 6. Tedion 75 EC	volume	sesuai jawaban responden (tidak ada standar satuan)
2007	SE001559.00.00			Akses terhadap pendidikan dan pelatihan	Kesempatan dan kemudahan sumber daya manusia memperoleh pendidikan dan pelatihan.	1. Pendidikan formal 2. Pendidikan non formal	Program	Sekolah; Pendidikan kepemudaan, pendidikan ketrampilan, Pendidikan keaksaraan.
2008	SE001559.00.02			Akses terhadap pendidikan dan pelatihan	Kesempatan dan kemudahan sumber daya manusia memperoleh pendidikan dan pelatihan.	1. Pelatihan keahlian 2. Pelatihan kejuruan	Program	Penataran, pembinaan, Pelatihan kerja, pelatihan pengembangan, case study, laboratory training, lecture, dan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								progammed learning.
2009	ST00628.00.00			Aksesi	Suatu contoh yang unik dari benih, materi tanaman, atau tanaman yang dipelihara dalam sebuah bank genetik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Aksesi; Persen
2010	SP00129.00.00			Aksesibilitas Perumahan/Apartemen	Tingkat kemudahan lokasi perumahan/apartemen untuk dicapai oleh masyarakat	a)Ketersediaan angkutan umum (1.Ya 2. Tidak); b)Kondisi jalan menuju perumahan/apartemen memadai (1.Ya 2.Tidak); c)Lebar jalan utama; d)Jarak perumahan/apartemen ke pusat kota; e)Jarak perumahan/apartemen ke rumah sakit terdekat; f)Jarak perumahan/apartemen ke pusat perbelanjaan terdekat; g)Jarak perumahan/apartemen ke sarana pendidikan terdekat	Panjang/lebar; Jarak	meter, kilometer (km)
2011	SD00535.00.00		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
2012	SP00131.00.00			Akta kematian	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2013	SP00132.00.00			Aktif/ikut serta dalam kegiatan organisasi	Ikut serta adalah berpartisipasi dalam organisasi baik sebagai pengurus maupun anggota. Seseorang dianggap sebagai anggota organisasi bila yang bersangkutan harus mendaftar untuk menjadi anggota. Keanggotaan di dalam organisasi seperti KORPRI, OSIS, BEM, dan PGRI tidak dianggap sebagai anggota organisasi.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah; persentase	Orang; Persen
2014	ST00635.00.00			Aktivitas ekonomi rumah tangga lainnya	Aktivitas ekonomi yang dilakukan rumah tangga di area usaha pertanian, atau dalam jarak yang dekat dengan usaha pertanian, selain kegiatan produksi pertanian. Hal ini dapat berupa memancing, mengumpulkan hasil-hasil hutan, kerajinan tangan, dan menjalankan bisnis keluarga. Tidak termasuk bekerja dengan bayaran sebagai pekerja di bagian pertanian ataupun nonpertanian di usaha pertanian itu sendiri atau bekerja di suatu bisnis yang tidak berhubungan dengan usaha pertanian.	1. Aktivitas-aktivitas pendukung pertanian dan aktivitas pasca panen 2. Perburuan, penangkapan, dan aktivitas pelayanan terkait 3. Kehutanan dan penebangan 4. Pemancingan dan budidaya ikan 5. Manufaktur 6. Memproses produk-produk pertanian (agroprocessing) § Kerajinan tangan 7. Perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaran bermotor 8. Hotel dan restoran (tidak termasuk agrowisata)	Jumlah	aktivitas

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						9. Agrowisata 10. Lainnya		
2015	SP00136.00.00			Aktualisasi Pancasila	pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2016	ST00644.00.00			Akuakultur	Budidaya organisme air seperti ikan, krustasea, moluska dan tanaman, sebagai lawan dari bentuk eksploitasi air lain seperti perikanan tangkap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase, Jumlah	Persen, Budidaya
2017	ST00648.00.00			Akuakultur berbasis daratan	Akuakultur yang dipraktekkan di sawah, kolam, tangki, raceway (saluran buatan, yang dibuat seperti jalur pacuan kuda, untuk budidaya organisme akuatik), dan area lahan lainnya pada usaha pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase, Jumlah	Persen, Budidaya
2018	SP00138.00.01			Alamat Tempat Tinggal	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos.	1. Alamat Sesuai KTP 2. Alamat Domisili	Wilayah	Satuan Lingkungan Setempat (SLS)/RT/RW
2019	SP00138.00.02			Alamat Tempat Tinggal	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos.	1.Alamat Sesuai KTP/Paspor/SIM/Legal 2.Alamat Domisili	Wilayah	Satuan Lingkungan Setempat (SLS)/RT/RW
2020	SE00186.00.01			Alamat Usaha	Lokasi kegiatan usaha dilakukan	Berdasarkan wilayah : 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Wilayah	Alamat
2021	SE00186.00.02			Alamat Usaha	Lokasi kegiatan usaha dilakukan	Berdasarkan area : 1. Kawasan Berikat 2. Kawasan Ekonomi Khusus 3. Kawasan Industri 4. Kluster	Wilayah	Alamat
2022	SP00140.00.00			Alasan memilih moda	Alasan responden memilih menggunakan moda transportasi utama tersebut untuk sampai ke tempat	1. Kecepatan 2. Kenyamanan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				transportasi utama dari tempat kegiatan ke tempat tinggal	tinggal	3. Keamanan 4. Biaya 5. Kepraktisan 6. Mobilitas tinggi 7. Lainnya		
2023	SP00141.00.00			Alasan memilih moda transportasi utama ke tempat kegiatan	Alasan responden memilih menggunakan moda transportasi utama tersebut untuk sampai ke tempat kegiatan	1. Kecepatan 2. Kenyamanan 3. Keamanan 4. Biaya 5. Kepraktisan 6. Mobilitas tinggi 7. Lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2024	SP00143.00.00			Alasan pindah ke tempat tinggal sekarang	Alasan mengapa responden melakukan perpindahan dari tempat tinggal sebelumnya ke tempat tinggal sekarang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2025	SP00144.00.00			Alasan tidak ingin beralih menggunakan moda transportasi umum	Alasan responden tidak ingin beralih menggunakan moda transportasi umum saat pergi dan/atau pulang ke/dari tempat kegiatan	1. Tidak aman 2. Tidak nyaman 3. Tidak praktis 4. Jauhnya akses ke kendaraan umum 5. Waktu tempuh lama 6. Waktu tunggu lama 7. Biaya lebih mahal	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2026	SP00145.00.00			Alasan utama berangkat ke luar negeri	Alasan mengapa responden pindah/berangkat ke luar negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2027	ST006886.00.00			Alat dan Mesin Pasca Panen	Alat atau mesin yang digunakan dalam proses lanjutan setelah panen.	1. Alat Sortasi 2. Alat Pemilah (Grader) 3. Mesin Pengering 4. Cold Storage (Ruangan Berpendingin)	Jumlah	Alat

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Wrapping 6. Sealer 7. Pembuka Durian		
2028	ST006/06.00.00			Alat Penangkapan Ikan	sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan	1. jaring lingkar (surrounding nets) 2. pukat tarik (seine nets) 3. pukat bela (trawls) 4. penggaruk (dredges) 5. jaring angkat (lift nets); 6. alat yang dijatuhkan (falling gears); 7. Jaring insang (gillnets and entangling nets); 8. perangkap (traps); 9. pancing (hooks and lines); 10. alat penjepit dan melukai (grappling and wounding)	Jumlah	Alat
2029	ST007/04.00.00			Alat pengolah lahan	Alat yang digunakan untuk mengolah lahan pertanian, biasanya digunakan tenaga manusia, ditarik dengan traktor atau ternak, seperti cangkul, bajak, sekop/garpu, garu/sisir, brujul dan linggis/tugal	1. cangkul 2. bajak 3. garu tanah/sisir 4. sekop/garpu 5. brujul 6. linggis/tugal	jumlah	Alat
2030	ST007/05.00.00			Alat penjepit dan melukai	Kelompok alat penangkap ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya dengan cara menoengkeram, mengait/ menjepit, melukai dan/atau membunuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Alat

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sasaran tangkapan.			
2031	ST00709.00.00			Alat yang dijatuhkan (falling gears)	Kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bamboo yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Alat
2032	SD00627.00.00			Alokasi Pemasaran	Pemasaran adalah proses, cara, aktivitas memasarkan atau menyebarluaskan suatu produk/barang atau jasa.	1. Dalam satu kabupaten/kota 2. Luar kabupaten/kota dalam satu provinsi 3. Luar provinsi 4. Langsung luar negeri/importir	persentase	persen
2033	SD00630.01.01			Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.	1. Anak kandung 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2034	SD00630.02.00			Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah/belum mempunyai anak	1. Anak kandung 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2035	SD00630.03.00			Anak	anak dengan usia 0 (nol) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.	1. Anak kandung 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2036	SD00630.04.01			Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak kandung 2. Anak tiri/adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2037	SD00630.01.02			Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak	1. Anak Kandung 2. Anak Asuh Tiri 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.	4. Anak Terlantar		
2038	SD00630.04.02		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak kandung 2. Anak tiri/adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2039	SD00630.04.02		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Anak kandung 2. Anak tiri/adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
2040	SP00150.00.00			Anak dibawah 5 tahun	Balita atau bawah lima tahun adalah anak umur 0-59 bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2041	SP00151.00.00			Anak lahir hidup	Anak yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah	Anak
2042	SP00152.00.00			Anak yang terlantar	Anak dikatakan telantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 8 kriteria ketelantaran sebagai berikut: 1. Tidak/belum pernah sekolah; atau tidak bersekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar 2. Makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat < 14 kali dalam seminggu terakhir 3. Makan lauk pauk nabati berprotein tinggi <=3 kali dan lauk pauk hewani berprotein tinggi <=2 kali dalam seminggu terakhir 4. Memiliki pakaian layak pakai <4 stel 5. Tidak mempunyai lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					6. Bila sakit tidak diobati (tidak berobat jalan/rawat inap dan tidak mengobati sendiri) 7. Yatim piatu atau ayah kandung bukan anggota rumah tangga 8. Umur <15 tahun dan seminggu yang lalu bekerja atau mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja			
2043	SE00209.00.00			Andil Inflasi bulanan menurut komponen	Sumbangan/andil inflasi/deflasi komoditas pada bulan tertentu	Inti, Bergejolak, Diatur pemerintah	Persentase	Persen
2044	SE00210.00.00			Andil Inflasi Kelompok Bahan Makanan	Sumbangan/andil inflasi/deflasi komoditas pada bulan tertentu	1. Inflasi month to month 2. Inflasi year to date 3. Inflasi year to year	Persentase	Persen
2045	SE00211.00.00			Andil Inflasi Komponen Energi	Sumbangan/andil inflasi/deflasi komoditas pada bulan tertentu	1. Inflasi month to month 2. Inflasi year to date 3. Inflasi year to year	Persentase	Persen
2046	SD00636.00.00			Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Jumlah	Rupiah
2047	SD00636.00.00	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Jumlah	Rupiah
2048	SP00153.00.00			Anggota	Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya	1. Kepala Keluarga	Jumlah;	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Keluarga	tercantum dalam Kartu Keluarga.	2. Suami/Istri 3. Anak Kandung 4. Anak Adopsi/Tiri 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang Tua/Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu/Sopir/Tukang Kebun 0. Lainnya	Rata-rata	
2049	SE00212.00.00			Anggota Koperasi	Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	1. Anggota 2. Calon Anggota	Jumlah	Anggota
2050	SE00212.00.02			Anggota Koperasi	Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Anggota
2051	SE00212.00.03			Anggota Koperasi	Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. Diploma 5. Sarjana 6. Magister 7. Doktor	Jumlah	Anggota
2052	SE00212.00.04			Anggota Koperasi	Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	1. Pengusaha 2. Non Pengusaha	Jumlah	Anggota
2053	ST00710.00.00			Anggota koperasi produsen	Orang yang memiliki pekerjaan mandiri pada sebuah usaha yang dijalankan seperti koperasi, dimana setiap anggota memiliki bagian yang sama dengan anggota lain dalam menentukan organisasi produksi, penjualan dan/atau pekerjaan lainnya, investasi dan distribusi hasil/pendapatan antar anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2054	SP00093.00.00			Angin Puyuh/puting	angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak meningkar menyerupai	1. Perkiraan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				beliung/topan	spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).			
2055	SD00641.00.00			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi permil (1000)
2056	SD00323.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
2057	SD00323.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Usia sekolah SD/Mi/Sederajat adalah 7-12 tahun	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
2058	SD00323.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat 4. APK SMA/ MA/	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat		
2059	SD00325.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (Day Care).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2060	SD00327.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A) turut diperhitungkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2061	SD00328.00.00			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2062	SD00329.00.00			Angka	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat	bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket B) turut diperhitungkan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2063	SD00342.02.00			Angka Partisipasi Murni (APM)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen
2064	SD00342.02.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen
2065	SD00349.00.00			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah	Perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(MI)/Sederajat	SD/MI/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).			
2066	SD00349.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat	Perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2067	SD00350.00.00			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2068	SD00350.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2069	SD00351.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat	Perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun.. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2070	SP00071.00.00			Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2071	SP00072.00.00			Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Proporsi anak usia 7-17 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap anak usia 7-17 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				7-17 tahun				
2072	SD00359.00.00			Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2073	SD00359.00.00		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2074	SD00362.01.03			Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.	Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan: 1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma (DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3	Jumlah; persentase	Orang; persen
2075	SD00362.02.01			Angkatan Kerja	Terdiri dari penduduk yang bekerja (untuk mendapatkan penghasilan/keuntungan) dan pengangguran.	Menurut lokasi: 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Orang; persen
2076	SD00362.02.02			Angkatan Kerja	Terdiri dari penduduk yang bekerja (untuk mendapatkan penghasilan/keuntungan) dan pengangguran.	Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan:	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma (DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3		
2077	SP00073.01.01			Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	1. Bekerja 2. Sementara Tidak Bekerja 3. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2078	SP00075.00.00			Antre	Menunggu untuk mendapat giliran dengan berdiri berderet ke belakang, seperti : membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Antrian; Persen
2079	SP00076.00.00			Aplikasi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)	Aplikasi wawancara responden yang dipasang pada perangkat pintar (tablet/ smartphone) berbasis android.	1. CAPI Online 2. CAPI Offline	Jumlah	Aplikasi
2080	ST00555.00.00			Aplikator pupuk	Suatu alat penanaman bibit padi yang dapat menanam dua baris atau lebih sekali jalan yang digerakkan oleh tenaga manual (manusia), ternak dan tenaga mekanis (traktor).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	unit
2081	SP00077.00.00			Apotek	Suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
2082	ST00556.00.00			Apresiasi	Suatu kegiatan pemberian penghargaan dari	a. Penyuluh Kehutanan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Wanabestari	pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PNS; b. PKSM; c. KTH; d. Kader Konservasi Alam; e. Kelompok Pecinta Alam; f. Kelompok Masyarakat Pengawas Izin Hutan Kemasyarakatan; g. Pengelola Hutan Desa; dan h. Pengelola Hutan Adat		
2083	ST005557.00.00			Area lainnya yang tidak termasuk klasifikasi manapun	Mencakup semua area usaha pertanian yang tidak termasuk klasifikasi manapun.	1. penggunaan lahan yang dibangun dan lahan terkait 2. lahan yang digunakan untuk pemeliharaan dan pemulihan fungsi lingkungan 3. perairan darat untuk pemeliharaan dan pemulihan fungsi lingkungan 4. perairan laut 5. penggunaan lahan lainnya 6. penggunaan perairan darat lainnya 7. penggunaan perairan laut lainnya	Luas	meter persegi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						8. lahan yang digunakan 9. perairan laut yang tidak digunakan 10. perairan laut yang tidak digunakan		
2084	ST00558.00.00			Area panen	Area total dimana hasil tanaman dikumpulkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	M2; Hektar
2085	ST00559.00.00			Area tanaman tetap	Area tanaman pada satu titik waktu. Tanaman tetap hanya dimasukkan jika mereka tumbuh untuk tujuan memproduksi suatu hasil. Kategori ini tidak termasuk kebun pembibitan, dimana material pembiakan tanaman diproduksi untuk dijual atau digunakan oleh usaha pertanian itu sendiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	M2; Hektar
2086	ST00561.00.00			Area yang digunakan untuk akuakultur	Termasuk didalamnya area (lahan, perairan darat dan perairan laut) untuk fasilitas budidaya, termasuk fasilitas pendukung. Akuakultur mengacu kepada pembudidayaan organisme air, seperti ikan, moluska, krustasea, tanaman air, buaya, aligator, dan hewan-hewan amfibi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
2087	ST00562.00.00			Artemia	Jenis pakan untuk ikan yang baru menetas seperti kutu air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	unit
2088	SE00111.00.00			Asal bahan baku utama	Asal tempat dari bahan baku utama yang diperoleh/dibeli	a. Dalam satu kabupaten/kota b. Luar kabupaten/kota satu provinsi c. Luar Provinsi d. Langsung luar negeri/impor	Persentase	Persen
2089	SE00112.00.00			Asal izin usaha	Asal izin usaha sesuai lembaga yang memberikan izin	1. BKPM	Jumlah,	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					usaha	2. BKPMD 3. Ditjennak 4. Pemda/Dinas Prov/Kab/Kota	persentase	
2090	SD00370.00.00			ASI (Air Susu Ibu) Ekskusif	Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan (0–5 bulan 29 hari), tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral.	1. Ya ASI Eksklusif 2. Tidak ASI Eksklusif	Persentase	Persen
2091	ST00563.00.00			Asosiasi	kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, persatuan antarrekan usaha, misalnya Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Asosiasi; Persen
2092	SP00079.00.00			Awak Kapal	Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil atau buku daftar awak kapal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Orang; Persen
2093	SD00373.00.00			Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
2094	ST00564.00.01			Badan hukum	Bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang (departemen terkait) yang diperkuat dengan akte.	1. Perusahaan Negara (PN), 2. Perusahaan Daerah (PD), 3. Persero, 4. Perum, 5. Perseroan Terbatas (PT), 6. Naamloze Vennootschap (NV), 7. Commanditaire	Jumlah; Persentase	Badan Hukum; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Vennootschap (CV), 8. Firma, 9. Koperasi/KUD, 10. Yayasan		
2095	ST00564.00.02			Badan hukum	Bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang (departemen terkait) yang diperkuat dengan akte.	1. PT/ PT Persero/Perum 2. CV 3. Firma 4. Koperasi/Dana Pensiun 5. Yayasan 6. Ijin Khusus 7. Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing	Jumlah; Persentase	Badan Hukum; Persen
2096	SE00113.00.00			Bahan Bakar Pembangkit Tenaga Listrik	Seluruh Bahan Bakar Yang Digunakan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik milik negara maupun milik swasta	1. Provinsi 2. Jenis Bahan Bakar	Jumlah	MW
2097	SE00110.00.00			Bahan Baku	Bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk atau barang setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	persentase	persen
2098	SE00114.00.00			Bahan Baku Utama	Bahan baku yang paling banyak digunakan dalam proses produksi	KBKI (Pilihan berapa digit)	Jumlah; Persentase	Bahan baku; persen
2099	UL00002.00.00			Bahan Perusak Ozon (BPO)	Hasil buangan yang dikeluarkan oleh alat yang menggunakan refrigerant identifier Hydrofluorochlorofluorocarbon (HCFC) yang belum sesuai atau tidak ramah lingkungan	1. HCFC-22 2. HCFC-122 3. HCFC-141b 4. HCFC-225 5. HCFC-142b	Jumlah; Persentase	Matric Ton; Persen
2100	UL00002.00.02			Bahan Perusak Ozon (BPO)	Hasil buangan yang dikeluarkan oleh alat yang menggunakan refrigerant identifier Hydrofluorochlorofluorocarbon (HCFC) yang belum	1. Sevicing 2. Foam 3. Pemadam Api dan	Jumlah; Persentase	Matric Ton; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sesuai atau tidak ramah lingkungan	4. Pelarut.		
2101	SP00081.00.00			Bahasa daerah	Suatu bahasa yang bersumber dari suatu wilayah/suku/etnis tertentu atau yang dituturkan oleh penduduk wilayah/suku/etnis tertentu. Misal bahasa sunda, jawa, madura, minangkabau, bugis, banjar, bali, betawi, dsb	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
2102	ST00565.00.00			Bakterisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan bakteri atau virus. Contoh jenis bakterisida: - Agrimycin 15/1,5 WP - Stablex 10 WP - Tenamycin 21,6 SP - Tetramycin (membunuh virus CVPD yang menyerang tanaman jeruk	1. Disinfektan 2. Antibiotik 3. Antiseptik	Jumlah; Persentase	Badan Hukum; Persen
2103	SP00082.00.00			Balai pengobatan	Tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan	Wilayah	Jumlah	Fasilitas
2104	SP00083.00.00			Balas Jasa dan Upah Pekerja	Menanyakan nilai balas jasa/upah untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak tetap/harian. Rincian ini meliputi upah/gaji pokok, upah dalam bentuk barang, tunjangan, dan pengeluaran lainnya.	Upah/gaji, Upah lembur, tunjangan, premi iuran BPJS ketenagakerjaan, premi iuran BPJS kesehatan, lainnya	Nilai	Rupiah
2105	SE00115.01.00			Balas Jasa Pekerja	Kompensasi yang diberikan kepada pekerja berupa gaji, upah lembur, hadiah, bonus atau tunjangan baik dalam bentuk uang maupun barang.	1. Upah dan gaji 2. Iuran pensiun 3. Tunjangan sosial & asuransi 4. Lainnya (tunjangan, lembur, hadiah, bonus)	Jumlah	Rupiah
2106	SE00115.02.00			Balas Jasa Pekerja	Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang, perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam	1. Upah/gaji, 2. Upah lembur, 3. tunjangan sosial, 4. asuransi,	Jumlah	rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					upah/gaji walaupun tidak tertulis dalam rencana/catatan perusahaan, upah lembur diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja diluar jam kerja biasa, untuk tunjangan terdiri dari tunjangan kecelakaan kerja (karyawan kecelakaan saat menjalankan tugas), tunjangan kesehatan (perawatan kesehatan yang diberikan karyawan berupa obat-obatan, konsultasi kesehatan dan biaya rumah sakit), tunjangan lainnya ftunjangan diberikan karyawan berupa tiket liburan, beasiswa untuk keluarga karyawan), insentif lainnya asuransi tunjan diberikan ke karyawan berupa premi asuransi yang dibayarkan perusahaan asuransi.	5. tunjangan, 6. lembur, 7. hadiah bonus		
2107	SE00116.00.00			Balas jasa pekerja perusahaan gas	Pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan rutin, upah lembur, uang transportasi, uang makan, hadiah, bonus, iuran dana pensiun, tunjangan sosial, asuransi pekerja, dan pengeluaran lainnya yang dibayarkan dalam bentuk uang maupun barang, termasuk biaya untuk jasa pekerja outsourcing, dan balas jasa pekerja asing	Jenis balas jasa	Jumlah	Juta Rupiah
2108	SP00085.00.01			Balita (Anak usia di bawah 5 Tahun)	anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan)	Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-Laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
2109	SP00085.00.02			Balita (Anak usia di bawah 5 Tahun)	anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan)	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
2110	SP00086.00.00			Bangunan	Tempat berlindung tetap maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap	1. Bangunan Tempat Tinggal (BTT) 2. Bangunan Bukan Tempat Tinggal (BBTT)	Jumlah	Bangunan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2111	SP00087.00.00			Bangunan Bukan Tempat Tinggal (BBTT)	Bangunan yang tidak berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk, seperti toko, restoran/rumah makan, tempat ibadah, bengkel, salon dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bangunan
2112	SD00382.00.00			Bangunan Embung Air	Bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2113	SD00383.00.00			Bangunan konservasi tanah dan air	Sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi tanah dan air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2114	SD00384.00.00			Bangunan pengendali jurang (gully plug)	Bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada paritparit, melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu yang berfungsi untuk mengendalikan/ mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2115	SP00088.00.00			Bangunan Tempat Tinggal (BTT)	Bangunan yang memiliki pintu keluar masuk sendiri dan berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bangunan
2116	SP00089.00.00			Banjir	peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kerugian			
2117	SP00094.00.00			Banjir	peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2118	SP00090.00.00			Banjir Bandang	banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2119	SP00095.00.00			Banjir Bandang	banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2120	SE00117.00.00			Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
2121	SE00118.00.00			Bank Umum Pemerintah	Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.			
2122	SE00119.00.00			Bank Umum Swasta	Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
2123	SP00091.00.00			Bantaran sungai	Ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	lokasi
2124	SE00120.00.00			Bantuan Keuangan	Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan; Rupiah
2125	SP00092.00.00			Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.			
2126	SE00121.00.01			Banyaknya hari kerja per bulan	Banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam sebulan	Nov 2019 s.d. Okt 2020	Jumlah	Hari
2127	SE00121.00.02			Banyaknya Hari Kerja Usaha/Perusahaan per Bulan	banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam sebulan.	1 s.d. 31	Waktu	Hari
2128	SP00103.00.00			Banyaknya moda transportasi untuk sampai ke tempat kegiatan	Jumlah moda transportasi yang digunakan responden untuk sampai ke tempat kegiatan	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 3 kali atau lebih 4. Tidak menggunakan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2129	SP00104.00.00			Banyaknya moda transportasi untuk sampai ke tempat tinggal	Jumlah moda transportasi yang digunakan responden untuk sampai ke tempat tinggal	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 3 kali atau lebih 4. Tidak menggunakan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2130	SE00122.00.00			Banyaknya pekerja	Semua orang tanpa memperhatikan usia dan jenis kelamin yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan usaha di perusahaan/usaha. Termasuk dalam penghitungan : pengusaha, pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap, pekerja dibayar maupun tidak dibayar.	1. Kelompok umur 2. Jenis pekerjaan (Pekerja produksi dan pekerja lainnya) 3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	Orang
2131	SD00397.00.02			Banyaknya pekerja tetap perusahaan HTI, Perum Perhutani dan	pekerja tetap terdiri dari pekerja kantor/administrasi dan pekerja hutan/lapangan	Berdasarkan tingkat pendidikan : 1. tidak sekolah/tidak tamat SD 2. SD	Jumlah	orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Perusahaan lainnya		3. SLTP 4. SLTA 5. D1/D3 6. D4/S1 7. S2/S3)		
2132	SE00123.00.01			Banyaknya pekerja tetap perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan lainnya	pekerja tetap terdiri dari pekerja kantor/administrasi dan pekerja hutan/lapangan	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan	Jumlah	orang
2133	SE00124.00.00			Banyaknya Perusahaan Penggalian	Perusahaan yang melakukan kegiatan sesuai kode KBLI dua digit 08 (Pertambangan dan Penggalian Lainnya)	1. Jenis Bahan Galian Utama 2. Kegiatan Perusahaan 3. Provinsi 4. Badan hukum	Jumlah	Perusahaan
2134	SE00125.00.00			Banyaknya Produksi (Output)	Semua kehaaran yang dihasilkan dalam proses produksi industri manufaktur mikro dan kecil.	Banyaknya per produk/komoditi yang dibuat oleh usaha/perusahaan triwulan sekarang dan triwulan yang lalu	Jumlah	Satuan standar; Rupiah
2135	SE00126.00.00			Banyaknya produksi penangkaran satwa/tumbuhan liar	Banyaknya produksi penangkaran satwa/tumbuhan liar selama tahun survei	1. Tumbuhan Liar 2. Satwa Liar	Volume	m3, pohon, ekor
2136	SE00127.00.00			Banyaknya rata-rata pekerja/karyawan per hari	Jumlah pekerja (laki-laki, perempuan), pekerja produksi atau lainnya. Jika jumlah pekerja fluktuatif selama periode 1 (satu) semester, maka yang dicatat adalah banyaknya pekerja rata-rata harian	a. Pekerja Produksi b. Pekerja Non Produksi (Lainnya) adalah Pekerja yang tidak terkait	Jumlah	orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kerja	Tidak termasuk (!) : Orang yang dibayar hanya berdasarkan komisi Orang yang bekerja sendiri seperti konsultan dan kontraktor Pegawai yang bekerja bukan di sektor industri manufaktur seperti pegawai unit perkebunan, pegawai unit pertambangan Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi atau yang berhubungan dengan itu, yaitu sejak bahan-bahan masuk ke pabrik sampai hasil produksinya keluar dari pabrik. Pekerja Non Produksi (Lainnya) adalah Pekerja yang tidak terkait langsung dengan proses produksi misalnya pimpinan perusahaan, pegawai keuangan, pegawai administrasi, penjaga malam, dsb. Pekerja Tetap (permanent employee) adalah Pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Pekerja Tidak Tetap adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.	langsung dengan proses produksi c. Pekerja Tetap (permanent employee) d. Pekerja Tidak Tetap		
2137	SP0010500.00			Banyaknya Rumah Tangga Menurut Jenis Bangunan Senasus	Bagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan.	1. Bangunan Tempat Tinggal Sendiri 2. Bangunan Tempat Tinggal Bersama 3. Bangunan Campuran	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Sendiri 4. Bangunan Campuran Bersama		
2138	SP00106.00.00			Banyaknya Rumah Tangga Menurut Kegiatan Ekonomi Kepala Rumah Tangga (KRT)	Salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/ dianggap/ ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.	1. Tidak bekerja 2. Bekerja Buruh/ Karyawan 3. Bekerja Pengusaha	Persentase	Persen
2139	SP00107.00.00			Banyaknya Rumah Tangga Menurut Status Tempat Tinggal	Rumah tangga biasa, seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur	1. Milik sendiri 2. Kontrak 3. Sewa 4. Dinas 5. Bebas sewa 6. Lainnya	Persentase	Persen
2140	SE00128.00.00			Banyaknya Usaha Penggalian Rumah Tangga	Usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan sesuai kode KBLI dua digit 08 (Pertambangan dan Penggalian Lainnya)	Berdasarkan : 1. Jenis Bahan Galian Utama 2. Kegiatan Usaha 3. Provinsi	Jumlah	Usaha
2141	ST00568.00.00			Batas kawasan hutan	Batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan atau batas antar fungsi kawasan hutan. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. Batas fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan.	Klasifikasi berdasarkan Jenis Batas Kawasan Hutan: 1. Batas Luar Kawasan Hutan 2. Batas Fungsi Kawasan Hutan	Panjang	km
2142	SE00129.00.00			Beban Non-Operasional	Seluruh beban untuk menunjang non-operasional perusahaan. Misalnya Beban Bunga, balas jasa pemodal, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2143	SE00130.00.00			Beban	Seluruh beban untuk menunjang operasional	Klasifikasi berdasarkan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Operasional	perusahaan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2144	SD00408.02.00			Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2145	SD00408.02.00			Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2146	SP00108.03.00			Bekerja	Melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa, penghasilan atau keuntungan, upah atau gaji, hasil usaha sewa, bunga, dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2147	ST00569.01.00			Bekerja	Kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, minimal selama 1 (satu) jam berturut-turut tanpa terputus dalam seminggu yang lalu. Catatan: Petani yang membudidayakan tanaman pokok yang Sebagian besar hasilnya digunakan sendiri termasuk bekerja. Pekerja profesi yang sedang tidak ada order tetapi memproduksi barang/jasa untuk rumahtangganya dikategorikan bekerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2148	SE00131.00.00			Belanja Bagi Hasil	belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2149	SE00132.00.00			Belanja	pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus	Klasifikasi berdasarkan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Bantuan Keuangan	dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya, dan partai politik dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2150	SE00133.00.00			Belanja Bantuan Sosial	belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2151	SE00134.00.00			Belanja Bunga	belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2152	SE00135.00.00			Belanja desa/nagari	Pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/nagari)	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal	Nilai	Rupiah
2153	SE00136.00.00			Belanja Hibah	belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2154	SE00137.00.00			Belanja Langsung	bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal	Nilai	Rupiah
2155	SD00410.01.00			Belanja Negara	Semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.	1. Belanja Langsung 2. Belanja Tak Langsung	Nilai	Rupiah
2156	SE00138.00.00			Belanja Pegawai	pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.	kebutuhan		
2157	SE00139.00.00			Belanja Subsidi	Belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2158	SE00140.00.00			Belanja tidak Langsung	bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan sosia 6. Belanja Bagi hasil 7. Belanja Bantuan Keuangan 8. Belanja Tidak terduga	Nilai	Rupiah
2159	SE00141.00.00			Belanja Tidak terduga	belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2160	SP00109.00.00			Belum Kawin	Status dari seseorang yang belum atau tidak terikat dalam perkawinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2161	UL00003.00.00			Bendera merah putih	bendera lambang negara Republik Indonesia berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Tidak termasuk yang berbentuk umbul-umbul atau bendera	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Bendera; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					merah putih kecil dari plastik yang berderet.			
2162	ST00570.00.00			Benih (perikanan)	Benih ikan/biota air lainnya yang masih berukuran relatif kecil tetapi siap untuk dipelihara dan dibesarkan guna menghasilkan ikan/biota air lainnya dalam ukuran konsumsi. Benih mempunyai ciri khas walaupun masih berukuran kecil tetapi bentuknya sudah seperti bentuk dewasanya	1. Benih air laut 2. air tawar 3. air payau	Massa; Jumlah	Kg; Ekor; Butir
2163	ST00571.00.00			Benih Bersertifikat	Benih yang proses produksinya melalui sistem sertifikasi benih, sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau sertifikasi produk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Jumlah	Kg; Ekor; Butir
2164	ST00572.00.00			Benih ikan air tawar	Benih ikan dari jenis ikan yang hidup di air tawar, sekitar ukuran 3-5 cm, 5-8 cm, 8-12 cm.	Seluruh benih ikan air tawar	Massa; Jumlah	Kg; Ekor; Butir
2165	ST00573.00.00			Benih ikan laut	Benih ikan yang hidup di laut, sekitar ukuran 7-12 cm	Seluruh benih ikan air laut	Massa; Jumlah	Kg; Ekor; Butir
2166	ST00574.00.00			Benih Tidak Bersertifikat	Benih yang proses produksinya tidak melalui sistem sertifikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Jumlah	Kg; Ekor; Butir
2167	SE00142.02.00			Bentuk badan hukum	Jenis Badan Hukum meliputi : Perusahaan Negara (PN), Perusahaan Daerah (PD), Persero, Perum, Perseroan Terbatas (PT), Naamloze Vennootschaap (NV), Commanditair Venootschap (CV), Firma, Koperasi, Yayasan dan Lainnya	1. PT/CV/Firma 2. PN/PD/Perum 3. Koperasi 4. Yayasan 5. Tidak berbadan hukum	Jumlah, persentase	Perusahaan
2168	SE00142.03.00			Bentuk badan hukum	Status badan hukum dari perusahaan	1. PT/CV/Firma 2. PN/PD/Perum 3. Koperasi 4. Yayasan	Jumlah, persentase	Perusahaan
2169	SE00142.04.00			Bentuk badan hukum	Jenis atau bentuk badan usaha suatu organisasi/perusahaan	1. PT/CV/Firma 2. PN/PD/Perum	Jumlah, persentase	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Koperasi 4. Yayasan		
2170	ST00575.00.00			Bentuk badan hukum perusahaan pertanian	Jenis atau bentuk badan usaha suatu organisasi/perusahaan pertanian	1. Perusahaan Negara (PN) 2. Perusahaan Daerah (PD) 3. Persero, Perum, Perseroan Terbatas (PT) 4. Naamloze Vennootschaap (NV) 5. Commanditair Venootschap (CV) 6. Firma 7. Koperasi/KUD 8. Yayasan	Jumlah	Perusahaan
2171	SE00143.00.00			Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha	Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akta. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hokum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan Badan usaha yang badan hukum: usaha yang modalnya dipisah, seperti: perseroan terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. Badan usaha yang bukan badan hukum: usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti: persekutuan komanditer (CV), Firma (Fa), dan perorangan.	1. PT. Persero (BUMN) 2. PT 3. CV 4. Koperasi 5. Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing 6. Lainnya	Jumlah	Perusahaan
2172	ST00576.00.00			Benur	Benih udang laut dan tawar dengan ukuran Post Larva	Benih crustacea (udang	Produksi	Ribu ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sekitar 10, 15, 20, 25, 30 hari.	udangan)		
2173	ST000577.00.00			Berat Basah	berat rumput laut dalam kondisi basah atau masih mengandung air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kilogram
2174	ST000578.00.00			Berat gabah	-Jumlah sampel gabah untuk pengeringan minimal 200 kg -Jumlah sampel gabah untuk penggilingan untuk masing-masing skala usaha/perusahaan penggilingan padi adalah: 1. PPB minimum 150 kg 2. PPM minimum 100 kg 3. PPK minimum 50 kg	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kilogram
2175	ST000579.00.00			Berat hidup ternak	Berat suatu ternak sebelum dipotong	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Kg/Ekor
2176	ST000580.00.00			Berat Kering	berat rumput laut dalam kondisi kering atau setelah melalui proses pengeringan/penjemuran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
2177	SD000425.00.00			Berkumpul	Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain rapat, rapat umum, mogok, konser musik, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan.	1. Rapat 2. Rapat Umum 3. Mogok 4. Konser Musik 5. Rapat Akbar (di lapangan) 6. Kegiatan Peribadatan	Jumlah	Kegiatan
2178	SD000427.00.00			Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	Berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap dan dibayar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2179	SD000429.01.00			Berusaha Dibantu Buruh Tidak	Kepala rutä/anggota rutä bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Tetap/Pekerja Keluarga	buruh/karyawan/ pegawai tidak tetap atau pekerja keluarga			
2180	SD00429.02.00			Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga	bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dengan mempekerjakan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2181	SP00110.00.00			Berusaha dibantu pekerja dibayar	Bekerja atau berusaha yang menggunakan paling sedikit satu orang pekerja dibayar dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2182	SP00111.00.00			Berusaha dibantu pekerja tidak dibayar	Bekerja atau berusaha yang menggunakan pekerja tak dibayar dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2183	SD00430.01.00			Berusaha Sendiri	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandaidengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2184	SD00430.02.00			Berusaha Sendiri	Bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2185	SP00112.03.00			Berusaha sendiri	Bekerja atau berusaha tanpa dibantu pekerja dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis, seperti	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sopir lepas, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang, dan lain-lain	kebutuhan		
2186	ST00581.00.00			Biaya	Pengeluaran yang benar-benar digunakan dalam referensi waktu survei yang terdiri dari biaya bunga, sewa lahan, balas jasa buruh/karyawan, penyusutan, pajak tak langsung netto dan biaya antara. Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok tidak termasuk dalam biaya.	1. Benih 2. Pupuk 3. Pestisida 4. Upah buruh 5. Jasa pertanian 6. Sewa lahan 7. Sewa alat/sarana usaha 8. bunga pinjaman 9. penyusutan alat/mesin 10. pajak tak langsung 11. Retribusi 12. Premi asuransi 13. Bahan bakar (BBM) untuk usaha pertanian 14. lainnya..	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2187	SE00144.01.01			Biaya Antara Perusahaan Geothermal (Panas Bumi)	Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk biaya bahan bakar & listrik, biaya ATK, biaya pemeliharaan & suku cadang, biaya jasa, dan biaya pemulihan lingkungan	Berdasarkan Jenis Pengeluaran	Jumlah	Juta Rupiah
2188	SE00144.01.02			Biaya Antara Perusahaan Penggalian	Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk biaya bahan bakar & listrik, biaya ATK, biaya pemeliharaan & suku cadang, biaya jasa, dan biaya pemulihan lingkungan	Provinsi	Jumlah	Juta Rupiah
2189	SE00144.01.01			Biaya Antara Perusahaan Pertambangan Migas	Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk biaya bahan bakar & listrik, biaya ATK, biaya pemeliharaan & suku cadang, biaya jasa, dan biaya pemulihan lingkungan	Berdasarkan Jenis Pengeluaran	Jumlah	Juta Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2190	SE00144.02.00			Biaya antara perusahaan pertambangan non migas	Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi	Jenis barang tambang	Nilai	Rupiah
2191	SE00144.01.02			Biaya Antara Usaha Penggalian Rumah Tangga	Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi termasuk biaya bahan bakar & listrik, biaya ATK, biaya pemeliharaan & suku cadang, biaya jasa, dan biaya pemulihan lingkungan	Provinsi	Jumlah	Juta Rupiah
2192	ST00582.00.00			Biaya Bunga dan Sewa Lahan	Penjumlahan dari biaya bunga atas pinjaman, sewa lahan, sewa lahan untuk pertanian, dan bunga modal.	1. Biaya bunga atas pinjaman 2. Sewa lahan 3. Sewa lahan untuk pertanian 4. Bunga modal	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2193	SE00145.00.00			Biaya lainnya	Biaya lainnya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan proses produksi selama tahun survei	1. Managemen fee 2. biaya promosi 3. biaya perjalanan dinas 4. biaya pencegahan pencemaran lingkungan 5. biaya peningkatan kemampuan SDM 6. biaya riset dan pengembangan 7. biaya telpon 8. fax 9. internet 10. surat menyurat	Jumlah, Persentase	Nilai
2194	SE00146.00.00			Biaya pegawai/karyawan	Kompensasi tenaga kerja terdiri dari gaji dan lainnya (upah lembur, bonus, tunjangan, asuransi kecelakaan di tempat kerja dan sebagainya)	1. Kontribusi sosial pemberi kerja (pensium dan non-pensium) 2. Pajak Penghasilan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Pembayaran ke perusahaan/organisasi lain (misalnya agen tenaga kerja) untuk pegawai/karyawan 4. Upah dan gaji 5. Pembayaran berbasis saham pegawai/karyawan dan opsi saham, dibebankan ke perusahan/organisasi untuk pegawai/karyawan yang mendapatkan upah, dan dibayarkan pada periode ini.		
2195	SE.001.47.00.00			Biaya Produksi	Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan lain sebagainya.	1.Biaya Tenaga Kerja 2.Bahan Baku Langsung 3.Bahan Penolong 4.Biaya Modal/Pinjaman 5.Biaya Energi 6.Biaya Air 7.Biaya Transportasi 8.Biaya Komunikasi 9.Biaya Sewa 10.Biaya Pengusutan 11.Biaya Lainnya	Nilai, Persentase	Rupiah, Persen
2196	SE.001.48.00.00			Biaya royalti	Royalti sebagai konsumsi antara adalah ketika perusahaan membayar lisensi untuk penggunaan aset	1. Biaya royalti atas sumber daya alam	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tetap tidak berwujud. >>> dicatat sebagai item pengeluaran Penjelasan dalam SNA 2008: Konsumsi antara termasuk pembayaran sewa atas penggunaan aset tetap, apakah peralatan atau bangunan yang disewa dari unit institusi lain dengan cara sewa guna usaha (operating lease), dan juga termasuk fee, komisi, royalti, dll; yang dibayarkan di bawah aturan lisensi (SNA 6.214)	2. Biaya royalti lainnya		
2197	SE00149.00.00			Biaya sewa	Jumlah yang dibayar oleh pengguna aset tetap pada pemiliknya, di bawah sewa guna usaha atau kontrak serupa untuk hak menggunakan aset dalam produksi untuk jangka waktu tertentu. Kegunaan sewa cukup besar untuk: 1. Menutup seluruh biaya langsung yang ditanggung pemilik termasuk biaya pemeliharaan aset 2. pengurangan nilai aset selama periode itu (konsumsi barang modal tetap) 3. biaya bunga atas nilai aset di awal periode	1. Sewa Tanah 2. Sewa Bangunan 3. Sewa Kendaraan 4. Sewa Lainnya	Nilai	Rupiah
2198	ST00584.00.00			Biaya sewa (kecuali sewa lahan)	Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan peralatan/perlengkapan dan bangunan/konstruksi, seperti sewa alat pertanian dan hewan, alat peternakan, alat dan sarana penagkapan ikan, kendaraan tanpa sopir, tempat usaha dan mesin.	1. Sewa alat pertanian dan hewan; 2. Alat peternakan; 3. Alat dan sarana penangkapan ikan; 4. Kendaraan tanpa sopir 5. Tempat usaha dan mesin	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2199	ST00585.00.00			Biaya Sewa (kecuali Sewa Lahan dan Bagi Hasil)	Penjumlahan dari biaya sewa (kecuali sewa lahan), sewa lahan, dan sewa lainnya.	1. Biaya sewa (kecuali sewa lahan); 2. Sewa lahan; 3. Sewa lainnya	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2200	SE.00150.00.00			Biaya sewa dan royalti	Jumlah Biaya sewa ditambah biaya royalti	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2201	SE.00151.00.00			Biaya sewa ruang dagang	Biaya yang dikeluarkan pedagang untuk menyewa toko/kios atau los	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2202	SE.00152.00.00			Biaya transportasi perjalanan pergi dan pulang dalam sehari	Biaya yang dikeluarkan dalam sehari untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang ke/dari tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Biaya	Rupiah
2203	SE.00153.00.00			biaya/pengeluaran	Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi pada usaha/perusahaan selama satu triwulan yang habis dipakai/digunakan setiap periode triwulan. Biaya/pengeluaran yang dimaksud termasuk untuk jasa industri (makloh)	Jumlah seluruh pengeluaran, tidak dirinci	Jumlah	Rupiah
2204	ST00586.00.00			Bibit	potongan thallus muda berumur 25 – 35 hari yang diperlukan untuk penanaman rumput laut secara vegetatif dengan berat 50 – 100 gram.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bibit
2205	ST00587.00.00			Bibit bersertifikat	Bibit yang dapat disertifikasi memenuhi standar nasional tertentu mengenai kemurnian fisik dan genetis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bibit
2206	ST00588.00.00			Bibit tanaman	Anakan dari tanaman induk yang siap untuk ditanam/masih dalam polibag	1. tanaman 2. biji 3. stek 4. kultur jaringan 5. cangkok 6. daun 7. batang 8. akar	Jumlah	Kg; Rumpun; Batang; Pohon
2207	ST00589.00.00			Bibit Ternak	Ternak yang memunyai sifat unggul dan	**1. Ternak Besar**	Jumlah	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan	**2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**		
2208	ST00590.00.00			Bibit tidak bersertifikat	Bibit yang tidak tersertifikasi menurut standar nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bibit
2209	ST00591.00.00			Bibit unggul	Bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot dan kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bibit
2210	ST00592.00.00			Bidang lahan	Sehamparan tanah yang dikuasai oleh suatu rumahtangga/badan yang dibatasi oleh sungai, jalan umum, hutan, selokan umum dan semacamnya atau dibatasi oleh lahan yang dikuasai pihak lain atau jenis lain. Yang dimaksud badan di sini seperti lembaga berbadan hukum, desa dan adat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen
2211	SE00154.01.00			Bidang Pekerjaan Utama	Pengelompokkan perusahaan konstruksi menurut jenis pekerjaan dan keahliannya berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.	1. Konstruksi Gedung (KBLI 41) 2. Konstruksi Sipil (KBLI 42) 3. Konstruksi Khusus (KBLI 43)	Jumlah	Perusahaan, Usaha
2212	SE00154.02.00			Bidang Pekerjaan Utama	Penggolongan perusahaan konstruksi berdasarkan kemampuan melaksanakan suatu bidang, sub bidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi.	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 3. Konstruksi Khusus	Jumlah	Perusahaan, Usaha
2213	SE00155.00.00			Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan	Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja selama pekerja tersebut bekerja pada usaha/perusahaan responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan (terhitung mulai dari usaha/perusahaan itu	1. Manajerial 2. Keterampilan/teknik produksi 3. Pemasaran 4. AMDAL	Jumlah	Pelatihan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					beroperasi/berproduksi secara komersial).			
2214	SP00113.00.00			Bisa Berbahasa Indonesia	Apabila responden mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh responden) dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2215	SE00156.00.00			Broad Economic Categories (BEC)	Kode pengelompokan barang menurut penggunaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kode/Kelompok
2216	ST00593.00.00			Bubu termasuk Bubu Ambai (Portable Traps)	Perangkap yang mempunyai satu atau dua pintu masuk dan dapat diangkat dengan mudah (dengan atau tanpa perahu). Untuk menarik perhatian ikan, di dalam/di luar perangkap itu diberi umpan atau daun kelapa. Kemudian alat tersebut dipasang di dasar atau dekat permukaan perairan selama jangka waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2217	ST00594.00.00			Budidaya Campuran (poli culture)	Budidaya yang dilakukan untuk beberapa jenis ikan secara bersama-sama.	air tawar, air laut, air payau	Produksi	Kg
2218	ST00595.00.00			Budidaya Ikan Darat	Kegiatan/lapangan usaha perikanan yang dilakukan di perairan daratan meliputi : kolam, sungai, karamba, waduk, danau, dan pearairan daratan lainnya	1. Pembenihan/pendederan 2. Pembesaran 3.Pembenihan dan pembesaran	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2219	ST00596.00.00			Budidaya ikan di kolam air tawar	Kegiatan/lapangan usaha yang meliputi pembenihan, atau pembesaran ikan dengan menggunakan kolam air tawar (kolam air tenang dan deras).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2220	ST00597.00.00			Budidaya ikan di lahan padi	Penggunaan lahan untuk budidaya padi dan organisme akuatik sekaligus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Produksi	1. Kg 2. Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(rice-cum-fish)		kebutuhan		3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2221	ST005598.00.00			Budidaya ikan di perairan umum	Pemeliharaan ikan di air tawar yang dilakukan di sungai-sungai, danau, waduk atau rawa. Jenis-jenis ikan yang dipelihara pada umumnya adalah ikan mas, tawes, nilem, mujair, nila, gurami sepat siam, tambakan dan lele. Pemeliharaan tersebut dapat berupa pemeliharaan satu jenis ikan saja atau beraga jenis secara bersama-sama. Berdasarkan struktur fasilitas pemeliharaannya, budidaya di perairan umum biasanya dilakukan di karamba, jaring apung, dan pancang pagar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2222	ST005599.00.00			Budidaya ikan di sawah	Kegiatan/lapangan usaha yang meliputi pembenihan, atau pembesaran ikan dengan menggunakan sawah (sawah tanpa padi atau mina padi) sebagai sarana budidaya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2223	ST006600.00.00			Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Air Tawar	1. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kolam 2. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kolam air deras 3. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di sawah dengan padi (mina padi) 4. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di sawah tanpa padi (penyelang) 5. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di karamba 6. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di pen 7. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di drum dan tempat lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2224	ST006600.00.00			Budidaya ikan/biota perairan	Budidaya ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di air tawar seperti kolam/tebat/empang, kolam air deras, karamba, dan sawah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lainnya di air tawar	Jenis ikan/biota perairan lainnya yang dipelihara antara lain ikan mas, mujair, tawes, nilam, gurami, sepat, lele, gabus, behit, dan kodok.			4. Gram 5. (000) ekor
2225	ST00601.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di darat	1.Budidaya ikan/biota perairan lainnya di air tawar 2. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di tambak air payau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2226	ST00602.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di karamba	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa) dengan wadah berbentuk kurungan yang umumya dibuat dari bambu atau kayu, kawat atau jaring.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2227	ST00603.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kolam	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di kolam air tawar yang airnya relatif tenang. Biota perairan lainnya seperti udang air tawar dan belut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2228	ST00604.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kolam air deras	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di kolam air deras.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2229	ST00605.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan laut dengan wadah berbentuk kurungan yang biasanya dibuat dari jaring.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2230	ST00606.00.00			Budidaya ikan/biota perairan	Budidaya ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di laut atau perairan yang terletak di muara sungai, laguna, dan lainnya yang dipengaruhi pasang surut,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lainnya di laut	dengan menggunakan kurungan apung, pen dan sebagainya.			4. Gram 5. (000) ekor
2231	ST00607.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di pen	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, dan rawa) dengan cara memagar sebagian perairan dengan kayu, bambu atau bahan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2232	ST00608.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di rakit	Pemeliharaan biota perairan selain ikan (rumput laut, binatang lunak seperti kerang-kerangan) yang dilakukan di laut dengan menggunakan rakit yang biasanya dibuat dari bambu atau kayu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor 6. Tali Rentang
2233	ST00609.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di sawah dengan padi (mina padi)	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di sawah yang masih banyak digenangi air, biasanya pada saat padi masih berumur muda.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2234	ST00610.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di sawah tanpa padi (penyelang)	Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya di sawah yang digenangi air sebelum ditanami padi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2235	ST00611.00.00			Budidaya ikan/biota perairan lainnya di	Budidaya ikan/biota perairan lainnya di tambak air payau yang letaknya tidak jauh dari laut dan pada umumnya airnya merupakan campuran air laut dan air tawar. Jenis ikan yang dipelihara terutama bandeng	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tambak air payau	dan udang. Di beberapa daerah bandeng dipelihara di tambak yang airnya tawar. Dalam hal demikian pemeliharaan tersebut dimasukkan ke dalam budidaya ikan di air payau			5. (000) ekor
2236	ST00612.00.00			Budidaya khusus ikan hias	Jenis pemeliharaan ikan dimana jenis ikan yang dipelihara/dibudiayakan adalah khusus jenis ikan hias baik menggunakan media air tawar, air payau maupun air laut.	1. Pembenihan/pendederan 2. Pembesaran 3.Pembenihan dan pembesaran	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2237	ST00613.00.00			Budidaya kolam/tambak	Pembiakan atau pemeliharaan tanaman atau hewan air di kolam/tambak alami atau buatan.	1. Pembenihan/pendederan 2. Pembesaran 3.Pembenihan dan pembesaran	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2238	ST00614.00.00			Budidaya tanaman kehutanan	Kegiatan yang meliputi pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan/pemanenan hasil tanaman kehutanan.	Klasifikasi berdasarkan jenis kayu/non kayu	jumlah	m3, kg, sm
2239	ST00615.00.00			Budidaya Tunggal	Budidaya yang dilakukan hanya untuk satu jenis ikan saja.	1. Pembenihan/pendederan 2. Pembesaran 3.Pembenihan dan pembesaran	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor
2240	SP00114.00.00			Bukan Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.	1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2241	SP00115.00.00			Buku/bacaan	Jenis buku atau bacaan meliputi koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan bacaan lainnya,	1. koran/surat kabar 2. majalah/tabloid 3. buku cerita	Jumlah; persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					baik dalam media cetak maupun elektronik.	4. buku pelajaran sekolah 5. buku pengetahuan 6. kitab suci 7. bacaan lainnya		
2242	SE00157.00.00			Bulan dan Tahun Pekerjaan	Bulan dan tahun dimana pekerjaan dimulai dan selesai termasuk yang masih belum selesai untuk masing-masing proyek	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kode Bulan dan tahun	Masehi
2243	ST00616.00.00			Bulan Operasi Penangkapan	Bulan dalam kalender Masehi dimana nelayan melakukan operasi penangkapan ikan tanpa memperhatikan jumlah hari kerja. Walaupun dalam bulan yang bersangkutan hanya melakukan satu trip penangkapan, maka tetap dihitung satu bulan kerja.	Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III	Jumlah	Trip
2244	ST00617.00.00			Bulan panen	bulan pada saat dilakukan pemanenan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Bulan
2245	ST00618.00.00			Bunga atas pinjaman	Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk pembayaran bunga atas modal pinjaman selama referensi waktu survei	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2246	ST00619.00.00			Bunga modal	Balas jasa penggunaan uang dari bank, lembaga keuangan lainnya dan perorangan sebagai modal untuk kegiatan usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2247	ST00620.00.00			Burayak	Benih ikan yang baru menetas sampai berumur satu minggu.	Benih ikan air laut, air tawar, air payau	Produksi	Ekor
2248	SD00443.02.00			Buruh/Karyawan/Pegawai	Seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki majikan yang sama dalam sebulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2249	ST00621.00.00			Buruh/karyawan/pegawai di luar sektor pertanian	mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada kegiatan diluar sektor pertanian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2250	ST00622.00.00			Buruh/karyawan/Pegawai pertanian	mereka yang bekerja pada suatu usaha di sektor pertanian, baik yang berupa usaha rumah tangga atau bukan usaha rumah tangga (perusahaan), atas dasar balas jasa dengan mendapatkan upah/gaji dalam bentuk uang/barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2251	SP00116.00.00			Buruh/Karyawan/Pegawai/Pekerja dibayar	Penduduk yang bekerja kepada orang lain atau instansi/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2252	SP00117.00.00			Busana daerah/tradisional	busana/pakaian yang menjadi identitas oleh sebagian besar pendukung kebudayaan tertentu. Busana daerah/tradisional yang digunakan harus lengkap (atasan dan bawahan), kecuali untuk busana tradisional daerah tertentu yang hanya memiliki bawahan saja. Penggunaan aksesoris busana daerah tidak harus lengkap. Tidak termasuk jika hanya menggunakan aksesoris busana tradisional tertentu. Contoh busana daerah: kebaya, ulee balang, aesan gede, baju bodo, baju cele, paksian, king baba, Ujung Serong, dsb. Batik tidak termasuk pakaian tradisional karena merupakan pakaian nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Baju; Persen
2253	UL00004.00.00			Cadangan terkira (probable reserves)	Sumber daya tertunjuk dan sebagian sumber daya mineral/batubara terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomis.	1. Nasional 2. Badan Usaha	Jumlah	Ton/m3
2254	ST00623.00.00			Cagar alam	Hutan suaka alam yang karena keadaan alamnya	Klasifikasi berdasarkan	luas	hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan untuk keperluan/kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan perkembangannya berlangsung secara alami.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2255	SP00118.00.00			Cakupan wilayah	Wilayah geografis Indonesia atau teritorial Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah
2256	ST00624.00.00			Cara Komponen Kualitas Produk Perikanan	Cara Komponen Kualitas Produk Perikanan meliputi: 1. Pengujian organoleptik 2. Pengujian mikrobiologi 3. Pengujian kimia 4. Pengujian Fisika	1. Pengujian organoleptik 2. Pengujian mikrobiologi 3. Pengujian kimia 4. Pengujian Fisika	Jumlah	Pengujian
2257	ST00625.00.00			Cara Pengawetan/Pengolahan Hasil Perikanan	Cara Pengawetan/Pengolahan Hasil Perikanan meliputi: 1. Pengeringan 2. Penggaraman 3. Peragian 4. Pengalengan (pembotolan, kendil) 5. Pembekuan 6. Pemakaian bahan kimia 7. Radiasi	1. Pengeringan 2. Penggaraman 3. Peragian 4. Pengalengan (pembotolan, kendil) 5. Pembekuan 6. Pemakaian bahan kimia 7. Radiasi	Jumlah	Metode
2258	SP00119.00.00			Cerai Hidup	Berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi, termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum atau wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi telah melahirkan anak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2259	SP00120.00.00			Cerai Mati	Seseorang yang ditinggal meninggal oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2260	SP00121.00.00			Cluster	Sebuah perumahan yang berkelompok dalam satu	1. Cluster berpagar	Jumlah;	Cluster;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lingkungan dengan bentuk rumah yang serasi dan menggunakan sistem gerbang yang dijaga 24 jam sebagai alat kontrol keamanan	2. Cluster tanpa berpagar 3. Non Cluster	Persentase	Persen
2261	SP00122.00.00			Cucu	Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2262	SD00453.01.01			Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
2263	SD00453.01.02			Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	1. DAS yang meningkat jumlah mata airnya 2. DAS lintas negara yg sudah memiliki Mou	Jumlah	DAS dan Dokumen MoU
2264	SD00453.01.02			Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, Prosentase	Hektar (Ha), Prosentase
2265	SD00453.02.00			Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber	1. RPDAS sudah di internalisasi ke dalam	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dgn tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan	RTRW 2. RPDAS belum di internalisasi ke dalam RTRW		
2266	SD00454.01.00			Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara	Suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antarnegara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
2267	SD00454.02.00			Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara	1. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. 2. DAS yang batasnya melintasi wilayah dua atau lebih negara	1. DAS yang meningkat jumlah mata airnya 2. DAS lintas negara yg sudah memiliki Mou	Jumlah	DAS dan Dokumen MoU
2268	SD00455.00.00			Daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus yaitu mencakup daerah yang memiliki program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan pengurangan risiko bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan pasca Bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah
2269	SD00457.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Daerah kumuh	Daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Daerah/Kawasan
2270	SD00460.00.00			Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebaginya.			
2271	SP00123.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebaginya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
2272	SD00461.00.00			Daerah Tangkapan Air Danau	Luasan lahan yang mengalingi dansau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
2273	SD00464.00.02			Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; persentase	Daerah; persen
2274	SP00124.00.02		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; persentase	Daerah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah			
2275	SD00465.00.00			Daerah Tertinggal yang Terentaskan	Daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
2276	SD00465.00.00		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Daerah Tertinggal yang Terentaskan	Daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
2277	SD00452.00.00			Daerah Tertinggal, Terdepan dan Tertukar (3T)	Daerah yang termasuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan).	1. Tertinggal 2. Terdepan 3. Terluar (Perbatasan)	Jumlah; persentase	Daerah; Persen
2278	SD00466.00.00			Daerah yang Mengalami Bencana Alam atau Bencana Sosial	Daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
2279	SD00467.00.00			Dam Penahan	Bendungan kecil yang loks air dengan konstruksi bronjong batu atau pasangan batu spesi yang dibuat pada alur sungai / jurang dengan tinggi maksimal 4 meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dam; Persen
2280	SD00468.00.00			Dam Pengendali	Bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air dengan konstruksi urugan tanah homogen, bronjong kawat atau lapisan kedap air dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dam; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter.			
2281	SE00160.00.00			Dana Alokasi Khusus	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2282	SE00161.00.00			Dana Alokasi Umum	transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2283	SE00162.00.00			Dana R&D	Alokasi laba untuk pengembangan riset dan inovasi.	1. Belanja litbang intramural 2. Belanja litbang ekstramural	Nilai	Rupiah
2284	SD00471.01.00			Danau	Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2285	SD00471.02.01			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	status mutu air, status trofik,	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
							; laju; Persentase	Persen
2286	SD00471.02.02			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	tingkat atau laju sedimentasi	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2287	SD00471.03.00			Danau	Sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2288	SD00471.02.03			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2289	SD00471.02.04			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	1. 0-25% 2. 25-30% 3. > 30%	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2290	SD00471.02.02			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan	laju sedimentasi	Jumlah; luas;	Danau; Km2; ppm;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sebutan istilah lokal.		Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2291	SD00471.02.05			Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	laju erosi,	Jumlah; luas; Konsentrasi kandungan; laju; Persentase	Danau; Km2; ppm; m/tahun, m3/tahun, ton/tahun; Persen
2292	SD00472.01.00			Danau Prioritas	Danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danaunya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
2293	SD00472.02.00			Danau Prioritas	Danau yang telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional/ provinsi/ kabupaten	tingkat kerusakan, keanekaragaman hayati, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana, komitmen pemda	jumlah	danau
2294	SD00473.01.00			Danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Banyaknya danau yang meningkat kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas yaitu yaituDanau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Poso, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentasi, Batur, Rawadanau, dan Rawapening.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Indeks	Danau; Indeks
2295	SD00473.02.00			Danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang dilakukan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas air danau, terutama danau prioritas nasional	1. status mutu air 2. status trofik,	jumlah	danau
2296	SD00475.00.00			Danau yang	Danau yang telah dilakukan upaya-upaya penurunan	Laju Erosi	jumlah	danau

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurun tingkat erosinya	erosi melalui kegiatan RHL vegetatif maupun sipil teknis			
2297	SD00476.00.01			Danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2298	SD00476.00.02			Danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.	laju sedimentasi	jumlah	danau
2299	SD00478.01.00			DAS prioritas	DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas dan 10 DAS prioritas lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS
2300	SD00478.02.00			DAS prioritas	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, Prosentase	Hektar (Ha), Prosentase
2301	SD00479.00.01			DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep menengah	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2302	SD00479.00.02			DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, persentase	Hektar (Ha), persen
2303	SD00480.00.01			DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air serta pembangunan sumur resapan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2304	SD00480.00.02			DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air serta pembangunan sumur resapan.	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, Prosentase	Hektar (Ha), Prosentase

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2305	SD00481.00.00			DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan, serta peningkatan HHBK	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, persentase	Hektar (Ha), persen
2306	SD00482.00.00			DAS yang meningkat jumlah mata airnya negara	DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2307	UL00005.00.00			Data	Tabulasi data	Migas; Non migas	Volume/berat bersih; Nilai CIF	Kg; USD
2308	ST000626.00.01			Data Indeks Kerentanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim	Data Sebaran wilayah berdasarkan jenis kerentanan yang tertuang dalam SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Perubahan Iklim	1. Sangat Rendah 2. Rendah 3. Sedang 4. Tinggi 5. Sangat Tinggi	Persentase	Persen
2309	ST000626.00.02			Data Indeks Kerentanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim	Adalah Data Sebaran wilayah berdasarkan jenis kerentanan yang tertuang dalam SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Perubahan Iklim	Gambaran Potensi Desa yang berdampak kerentanan Perubahan Iklim	Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi	Prosentase (%)
2310	SD00487.00.00			Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2311	SD00488.00.00			Daya Rusak Air	Daya air yang merugikan kehidupan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2312	SD00489.00.00			Daya Saing Nasional	Daya saing suatu negara tergantung pada kapasitas industrinya untuk berinovasi dan meningkatkan. Perusahaan mendapatkan keuntungan melawan pesaing terbaik dunia karena tekanan dan tantangan. Mereka mendapat manfaat dari memiliki saingan domestik yang kuat, pemasok berbasis rumah yang agresif, dan menuntut pelanggan lokal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2313	SP00126.00.00			Daya Terpasang Listrik Berlangganan	Daya terpasang listrik berlangganan adalah besar kapasitas listrik yang terpasang terlihat dari meteran yang terpasang baik dari PLN maupun Listrik Swasta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	KiloWatt
2314	ST00627.00.00			Dedak	Jenis pakan ikan yang terbuat dari serbuk halus kulit padi sebagai pakan ikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
2315	SD00491.00.00			Degradasi	Proses di mana keindahan atau kualitas sesuatu dihancurkan atau dimanjakan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2316	SD00493.00.00			Degradasi Hutan	Perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2317	SD00495.00.00			Depresiasi/Amortisasi	Pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Untuk menghindari kebingungan, istilah "konsumsi barang modal tetap" digunakan di dalam SNA untuk membedakan dari "depresiasi atau penyusutan" seperti yang umumnya diukur di dalam neraca bisnis (SNA 1.67).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2318	SD00496.01.00			Desa	Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Desa
2319	SD00496.02.00			Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
2320	SD00497.00.00			Desa Mandiri	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
2321	SD00498.00.00			Desa Tertinggal	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
2322	SP00127.00.00			Developer	Perusahaan pengembang perumahan dan properti lainnya dalam pembangunan dan penjualan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Developer; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perumahan	kebutuhan		
2323	SE00163.00.00			Dewan Pengawas Syariah Koperasi	Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah	Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	Dewan Pengawas Syariah Koperasi
2324	ST00629.00.00			Dijonkan	Dijual dikebun/sawah sebelum masa panen (masih hijau).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2325	SP00128.00.00			Distribusi Tenaga Listrik	Penggunaan tenaga listrik yang didistribusikan ke pelanggan	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pelanggan	Jumlah	MWh/GWh
2326	ST00630.00.00			Ditebaskan	Dijual pada saat produksi siap untuk dipanen. Pelaksanaan pemanenan menjadi tanggung jawab penebas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah; nilai	m3; rupiah
2327	ST00631.00.00			Diversifikasi tanaman	Sistem penganekaragaman jenis tanaman perkebunan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Sistem
2328	SD00524.00.01			Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen
2329	SD00525.00.01			Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen
2330	ST00632.00.00			Donasi	Mengacu pada bibit yang didonasikan dari institusi nasional atau internasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Donasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan		
2331	ST00633.00.00			Drainase	Pemindahan pembuangan buatan untuk air permukaan atau air tanah berlebih – bersamaan dengan substansi larut lainnya – dari permukaan lahan dengan pipa permukaan atau subpermukaan, untuk meningkatan produksi pertanian. Ini tidak termasuk drainase alami air berlebih ke danau, rawa, dan sungai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Drainase
2332	SD00527.00.00			Dukungan Finansial	Dukungan mengenai (urusan) keuangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
2333	SP00130.00.00			Dusun	Bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dusun
2334	SE00164.00.00			Efisiensi	Penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang maksimum atau membandingkan masukan dan keluaran yang diterima	1. input per output 2. skala usaha 3. skala output 3. KBLI 3 digit	Jumlah, Persentase	Nilai
2335	SE00165.00.00			Efisiensi Perusahaan	Pengeluaran/Pendapatan X 100 %	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai;Persentase	Rupiah;Persen
2336	SE00166.03.00			Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean; Kegiatan/ transaksi mengeluarkan dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah)	HS/BTKI: 2, 6, dan 8 digit	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2337	SE00167.00.01			Ekspor kayu olahan	Hasil kayu bulat yang sudah diolah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi yang dijual ke luar daerah/negeri.	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Produk: 1. Panel 2. Woodworking 3. Furniture Kayu 4. Pulp 5. Paper	Massa; Nilai	Ton; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Veneer 7. Kerajinan 8. Wood Chip/Serbuk Kayu 9. Bangunan Prefabrikasi		
2338	SE00167.00.02			Ekspor kayu olahan	Hasil kayu bulat yang sudah diolah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi yang dijual ke luar daerah/negeri.	Klasifikasi ekspor kayu berdasarkan: 1. Ukuran dan tingkat olahan 2. Toleransi ukuran dan kecacatan	Massa; Nilai	Ton; USD
2339	SE00168.00.00			Ekspor menurut Kode Harmonized System (HS)	Sistem klasifikasi barang perdagangan internasional untuk menetapkan tarif, mencatat data statistik perdagangan, atau lainnya yang mengacu pada ketentuan WCO	HS/BTKI	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2340	SE00169.00.00			Ekspor menurut Kode International Standard Industrial Classification (ISIC)	Kode pengelompokan menurut jenis aktivitas ekonomi	ISIC	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2341	SE00170.00.00			Ekspor menurut Kode Standard International Trade Classification (SITC)	Kode klasifikasi barang yang digunakan untuk mengklasifikasikan ekspor dan impor suatu negara untuk memungkinkan perbandingan berbagai negara dan tahun	SITC	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2342	SE00171.00.00			Ekspor menurut Moda	Moda angkutan yang digunakan saat mengeluarkan barang dari daerah pabean	1. Laut 2. Kereta Api	Nilai; volume/berat	US$, Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Transportasi		3. Jalan Raya 4. Udara 5. Pos 6. Multimoda 7. Instalasi Pipa 8. Perairan 9. Lainnya	at bersih	
2343	SE00172.00.00			Ekspor menurut Negara Tujuan Ekspor	Negara tujuan barang akan diekspor	Negara	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2344	SE00173.00.00			Ekspor menurut Pelabuhan Muat Ekspor	Pelabuhan dimana barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dengan tujuan luar daerah pabean	Pelabuhan	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2345	SE00174.00.00			Ekspor menurut Provinsi Asal Barang Ekspor	Provinsi tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor. Dalam hal eksportir bukan produsen, maka provinsi asal barang adalah provinisi asal barang disimpan atau ditimbun.	Provinsi	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2346	SE00175.00.00			Ekspor menurut Provinsi Muat Ekspor	Provinsi dimana pelabuhan muat ekspor berada	Provinsi	Nilai; volume/berat bersih	US$, Kg
2347	ST00634.00.00			Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	Proses transportasi untuk kepentingan perdagangan TSL dari Indonesia ke suatu negara lain.	1. Tumbuhan Alam 2. Satwa Liar	Jumlah	1. Ekor/Batang 2. Kg. 3. M3
2348	SE00176.00.00			Email	Elektronik Mail atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau	1.Email Perusahaan 2.Email Pribadi	Jumlah	Alamat email

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					handphone yang memiliki akses internet.			
2349	SD00541.00.00			Embung	Bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2350	SE00177.00.00			Enterprise group/ grup korporasi/ konglomerasi / grup Perusahaan / kelompok usaha	Suatu korporasi (perusahaan) induk yang mengendalikan beberapa anak perusahan yang memiliki unit bisnis yang berbeda dan beberapa di antaranya juga mengendalikan anak perusahaannya masing-masing dibawah satu kepemilikan yang sama. Untuk beberapa kasus, kelompok usaha tidak dalam bentuk korporasi (perusaaan). Kelompok usaha yang dibentuk umumnya bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi seperti skala ekonomi, pengendalian pasar yang lebih luas dan peningkatan produktivitas domestik melalui pengelolaan bisnis yang lebih baik.	Klasifikasi menurut status badan usaha: 1. Definitif 2. Tidak Definitif Klasifikasi menurut status globalisasi [1] Semua residen (domestik/ non-MNE) [2] multinasional (MNE) Klasifikasi menurut Kepemilikan / kontrol 1. Publik/ pemerintah 2. Swasta nasional (domestik) 3. Swasta asing	Jumlah	unit
2351	SD00547.00.00			Erosi	Proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2352	SP00133.00.01			Faktor Fisik Perumahan/Apartemen	Faktor fisik pada perumahan/apartemen yang dilihat dari sisi kerawanan banjir dan kejahatan	Berdasar Wilayah Bebas Banjir : 1 (bebas banjir) 2 (rawan banjir) ; b)Wilayah rawan kejahatan : kode 1 (rawan kejahatan), kode 2 (aman dari kejahatan)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2353	SP00133.00.02			Faktor Fisik Perumahan/Apartemen	Faktor fisik pada perumahan/apartemen yang dilihat dari sisi keterawanan banjir dan kejahatan	Berdasar Wilayah rawan kejahatan : 1 (rawan kejahatan) 2 (aman dari kejahatan)	Persentase	Persen
2354	SP00134.00.00			Famili lain	Mereka yang ada hubungan famili dengan kepala keluarga atau dengan suami/istri kepala keluarga, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2355	SD005550.00.00	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Laporan KB, TKBK, Pos KB.	1. RS Pemerintah/RS Swasta/RSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
2356	ST006536.00.00			Fasilitas penyimpanan untuk pupuk dianggap tertutup (dengan tutup beton, tenda, terpal, dan lain-lain)	Fasilitas penyimpanan yang terlindungi dari hujan atau presipitasi lainnya dan penutup dapat menguranggi emisi amonia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	luas	m2
2357	ST006537.00.00			Fasilitas penyimpanan untuk pupuk kandang cair/semi cair	biasanya berupa tangki kedap air, terbuka atau tertutup, atau laguna berjajar untuk penyimpanan pupuk kandang cair/semi cair.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2358	ST00638.00.00			Fasilitas penyimpanan untuk pupuk kandang padat	Biasanya berupa struktur segitiga, persegi panjang, atau persegi dengan lantai beton dan dinding berupa beton bertulang atau kayu. Lantai biasanya miring ke arah sisi terbuka, tempat rembesan/drainase dari pupuk padat yang tertumpuk dikumpulkan dalam selokan dan disimpan secara terpisah. Tumpukan atau timbunan pupuk padat yang disimpan di ladang sebelum disebarkan tidak termasuk dalam pengertian ini.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas penyimpanan pupuk padat	m2
2359	SD00555.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Fasilitas Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
2360	SP00135.00.00			Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh anggota keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
2361	ST00639.00.00			Flood recession	Area pinggiran sungai atau sumber air lainnya dimana cocok tanam dilakukan, yang menggunakan air sisa banjir. Floating rice termasuk tanaman flood recession. Fasilitas mungkin dibangun untuk menahan sisa air banjir, kasus ini termasuk dalam kategori irigasi terkendali sebagian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	M2; Persen
2362	SD00558.00.00			Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Salah satu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota melalui keikutsertaan masyarakaat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Bisa dilakukan dengan Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota (FDPPKB)guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Forum; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2363	ST00640.00.00			Frekuensi panen	Jumlah panen yang dilakukan mulai dari tanam sampai dibongkar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Panen; Persen
2364	ST00641.01.00			Fungisida	Substansi yang menghancurkan atau menghambat pertumbuhan jamur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	Liter; Persen
2365	ST00641.02.00			Fungisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau jamur (fungi) seperti bercak daun, karat daun, busuk daun dan cacar daun. Contoh jenis fungisida: - Actidione - Maneb Brestan - Aliette 80 WP - Manzate 200 - Altan 50 WP - Orthocide 50 WP - Antracol 70 WP - Perenox - Basiment 235 - Polycom 80 WP - Bavistin - Polyram 80 WP - Baycor 300 EC - Rabcide 50 WP - Bayleton 250 EC - Rhoneb - M - Beam 75 WP - Ridomil 2 G - Benlate - Ridomil 35 SD - Benlate T-20/20 WP - Rinosan 50 EC - Bubur Bordox - Socony - Calixin 750 - Tanalith CT 106 - Calixin MR - Topsin - Carbolinium - Organomerkuri - Carbendazim - Validocin 3 AS - Delsene MX 200 - Vapam - Demasen - Velimek 80 WP - Derosol 60 WP - Cobox - Derusal - Copper sandoz - Difolatan 80 WP - Cupravit OB 21 - Dimazeb 80 WP - Daconil 75 WP	1. Actidione 2. Maneb Brestan 3. Aliette 80 WP 4. Manzate 200 5. Altan 50 WP 6. Orthocide 50 WP 7. Antracol 70 WP 8. Perenox 9. Basiment 235 10. Polycom 80 WP 11. Bavistin 12. Polyram 80 WP 13. Baycor 300 EC 14. Rabcide 50 WP 15. Bayleton 250 EC 16. Rhoneb 17. M 18. Beam 75 WP 19. Ridomil 2 G 20. Benlate 21. Ridomil 35 SD 22. Benlate T-20 /20 WP 23. Rinosan 50 EC 24. Bubur Bordox Socony 25. Calixin 750	Volume; Persentase	Liter; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					- Dithane M-45 - Masalgin 50 WP - Dowco 262 - Moduna 509 FW - Fonac 2 - Nimrod 250 EC - Fujiwan 400 EC - Vondozeb 79 WP - Fylomac - Zincofol 68 WP - Karathane 19,5 WP - Zineb - Kasumiron 25/ 1 WP - Natrium Dikromat	26. Tanalith CT 106 27. Calixin MR 28. Topsin 29. Carbolinium 30. Organomerkuri 31. Carbendazim 32. Validacin 3 AS 33. Delsene MX 200 34. Vapam 35. Demason 36. Velimek 80 WP 37. Derosol 60 WP 38. Cobox 39. Derusal 40. Copper sandoz 41. Difolatan 80 WP 42.Cupravit OB 21 43. Dimazeb 80 WP 44. Daconil 75 WP 45. Dithane M-45 46. Masalgin 50 WP 47. Dowco 262 - Moduna 509 FW 48. Fonac 2 49. Nimrod 250 EC 50. Fujiwan 400 EC 51. Vondozeb 79 WP 52. Fylomac 53. Zincofol 68 WP 54. Karathane 19,5 WP 55. Zineb 56. Kasumiron 25/ 1		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						WP 57. Natrium Dikromat*		
2366	ST00642.00.00			Gabah kering panen	Gabah yang diperoleh pada saat panen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Berat	Kg
2367	ST00643.00.00			Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
2368	UL00006.00.00			Garam Rakyat	Garam yang dihasilkan oleh petambak garam atau kelompok usaha garam	1. Garam bahan baku 2. Garam konsumsi 3. Garam industri	Jumlah	Ton
2369	SD00561.00.00			Garis Kemiskinan Internasional	Persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,90 dollar AS pada PPP (Purchasing Power Parity) 2011.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2370	SD00562.01.00			Garis Kemiskinan Nasional	Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemikinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dari komoditas dalam keranjang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan Susenas modul konsumsi	Provinsi Perkotaan Provinsi Perdesaan	Persentase	Persen
2371	SP00096.00.00			Gelombang pasang laut	gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari			
2372	SP00096.00.00			Gelombang pasang laut	gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2373	SP00097.00.00			Gempa Bumi	getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2374	SE00178.00.00			GeoTagging UMKM	Posisi lokasi kantor/usaha UMKM secara Geografis berdasarkan GPS	1.Longitude 2.Latitude	Koordinat	Bujur dan Lintang
2375	SD00566.00.00			Green Waste	Upaya pengelolaan limbah/ sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R yaitu reduce (mengurangi sampah), reuse (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), recycle (mendaur ulang sampah)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kota
2376	ST00645.00.00			Gross Tonnage (GT) Kapal	Pengukuran besaran volume kapal perikanan yang dilakukan pada bagian ruangan-ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada di dalam kapal dan dinyatakan dalam Gross Tonnage dengan menggunakan satuan "Register Tonnage" (1 RT = 100	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Register Tonnage	m3; ft

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ft3 = 2,8328 m3)			
2377	ST00646.00.00			Group perusahaan	Perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham pada satu atau beberapa perusahaan lain untuk mengendalikan atau turut serta mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	unit
2378	ST00647.00.00			Gulma (Tanaman penggangu)	Tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia atau tumbuhan yang kegunaannya belum dikehendaki. Berdasarkan definisi tersebut, tumbuhan apa saja termasuk tanaman yang biasa dibudidayakan dapat dipandang sebagai gulma bila tumbuhnya tidak dikehendaki. Sebagai contoh, tanaman padi yang tumbuh sendiri diantara tanaman tembakau adalah gulma.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Gulma; Persen
2379	SP00098.00.00			Gunung meletus	fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2380	SP00098.00.00			Gunung meletus	fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2381	SP00137.00.00			Hak Anak	bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah	1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan dan Pemanfaatan waktu	Jumlah; Persentase	Hak; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						luang		
2382	ST00649.00.00			Hak gadai/hak gadai tanah (pertanian atau bangunan)	Dalam pengertian yang berasal dari hukum adat, sebagai akibat adanya perbuatan hukum yang disebut "jual gadai".	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Hak Gadai; Persen
2383	SD00575.02.00			Hak memilih	keputusan untuk memilih secara aktif yang dilakukan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam menentukan seorang pemimpin (bupati, gubernur, dan presiden) atau anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Hak pilih; Persen
2384	ST00650.00.00			Hak pemungutan hasil hutan (HPHH)	Hak yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang pemungutan hasil hutan yang mana diuraikan bahwa dengan memungut hasil hutan secara sah begitu saja tidaklah lantas ia memperoleh suatu hak, tetapi pemungutan hasil hutan itu ia lakukan bersama-sama dengan pembukaan dan pengesahaan tanah itu secara nyata.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hak
2385	ST00651.00.00			Hak pengelolaan hutan desa (HPHD)	Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
2386	ST00652.00.00			Hak pengusahaan	Hak yang diberikan kepada perusahaan atau Badan-badan Hukum baik swasta maupun asing, berwenang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hutan	untuk menebang kayu, mengangkut dan menjualnya. Walaupun hak ini bukan suatu hak atas tanah, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan tanah, umpamanya tempat penimbunan kayu, perumahan, penggergajian, perkantoran dan lain-lain. Hak pengusahaan hutan ini tidak dapat dialihkan dan juga tidak dapat dibebani dengan hak hipotek. Hak ini menjadi hapus apabila waktunya habis, biasanya 20 tahun, atau hak ini dilepaskan atau dicabut untuk kepentingan umum	kebutuhan		
2387	ST00653.00.00			Hak sewa tanah pertanian dinyatakan bersifat sementara	Sehubungan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menghendaki setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Hak Sewa Tanah; Persen
2388	SD00582.00.00			Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan	Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2389	ST00654.00.00			Hama tanaman	Binatang-binatang pengganggu dan perusak tanaman. Hama tanaman terdiri dari: 1. Hama perusak akar, seperti nematoda, larva kumbang (uret = hindi), rayap, dan semut. 2. Hama perusak batang/cabang seperti penggerek, tikus dan babi hutan. 3. Hama perusak daun seperti ulat, kepik, kumbang, belalang, kutu tumbuh-tumbuhan, dan tungau.	1. Perusak Akar 2. Perusak Batang/cabang 3. Perusak daun 4. Perusak buah	Jumlah; Persentase	Hama; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					4. Hama perusak buah seperti penggerek buah, kepik buah, burung, dan babi hutan.			
2390	ST00655.00.00			Hama/Penyakit	organisme yang menggangu tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut menjadi terhambat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Hama; Persen
2391	SP00139.00.00			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Tahun
2392	UL00007.00.00			Harga Batubara Acuan (HBA)	Harga yang ditetapkan melalui Kepmen di awal bulan di hari efektif dimana HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8% dan Ash 15%.	Batubara	Jumlah	USD/Ton
2393	SE00179.00.00			Harga Daging	Merupakan rata-rata harga daging per kg dalam rupiah. Harga tersebut merupakan harga yang berlaku selama triwulan berjalan di daerah tersebut.	Klasifikasi harga berdasarkan analisis	Harga Rata-rata	Rupiah/Kg
2394	SE00180.00.00			Harga kelebihan tanah/luas lantai per meter persegi (m2)	Harga atas tanah dalam perumahan di luar tipe yang disediakan oleh pengembang dikarenakan letak (hook) atau lainnya. Kelebihan luas lantai dijumpai pada unit apartemen yang memiliki kelebihan luas lantai dibanding unit dengan tipe yang sama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
2395	SE00181.00.00			Harga Komoditas mesin dan perlengkapan	Harga komoditas/barang mesin dalam katalog ICP yang dapat ditemui di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
2396	SE00182.00.00			Harga Komoditas-	Harga yang dibeli oleh petani dari pedagang/penjual yang menjual barang-barang yang diperlukan untuk	Subsektor Pertanian	Berat dan Volume	Kg, Gram, Liter, Ikat,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Komoditas Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	kegiatan produksi pertanian maupun barang modal untuk kegiatan produksi pertanian, penyedia jasa transportasi dan jasa buruh			Meter dsb
2397	SE00183.00.00			Harga Komoditas-Komoditas Produksi	Harga Transaksi dari Produksi pertanian yang terjadi ditingkat petani	Subsektor Pertanian	Berat dan Volume	Kg, Gram, Liter, Kat, Meter dsb
2398	SE00184.00.00			Harga Konsumen Barang dan Jasa Kelompok Perumahan	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	90 Kota IHK: Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Padang, Bukittinggi, Tembilahan, Pekanbaru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang, Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjungpandan, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang,	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Pontianak, Singkawang, Sampit, Palangkaraya, Kotabaru, Tanjung, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, Manado, Kotamobagu, Luwuk, Palu, Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Baubau, Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke, Timika, Jayapura.		
2399	SE00185.00.00			Harga Konsumen Barang dan Jasa Kelompok Sandang	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	90 Kota IHK: Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Padang, Bukittinggi, Tembilahan, Pekanbaru, Dumai, Buregi, Jambi, Palembang,	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjungpandan, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Pontianak, Singkawang, Sampit, Palangkaraya, Kotabaru, Tanjung, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, Manado, Kotamobagu, Luwuk, Palu, Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Baubau, Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke, Timika,		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Jayapura.		
2400	SE001487.00.00			Harga Konsumen Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi Seluruh Indonesia	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	34 Ibukota Provinsi: 1. Banda Aceh 2. Medan 3. Padang 4. Pekan Baru 5. Jambi 6. Palembang 7. Bengkulu 8. Bandar Lampung 9. Pangkal Pinang 10. Tanjung Pinang 11. DKI Jakarta 12. Bandung 13. Semarang 14. Yogyakarta 15. Surabaya 16. Serang 17. Denpasar 18. Mataram 19. Kupang 20. Pontianak 21. Palangka Raya 22. Banjarmasin 23. Samarinda 24. Tanjung Selor 25. Manado 26. Palu 27. Makassar 28. Kendari 29. Gorontalo 30. Mamuju	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						31. Ambon 32. Ternate 33. Jayapura 34. Manokwari		
2401	SE00188.00.00			Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	90 Kota IHK: Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Padang, Bukittinggi, Tembilahan, Pekanbaru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang, Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjungpandan, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Pontianak, Singkawang.	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Sampit, Palangkaraya, Kotabaru, Tanjung, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, Manado, Kotamobagu, Luwuk, Palu, Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Bau-bau, Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke, Timika, Jayapura.		
2402	SE001189.00.00			Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	90 Kota IHK: Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Padang, Bukittinggi, Tembilahan, Pekanbaru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang, Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjungpandan, Pangkalpinang, Batam,	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2403	SE.001190.00.00		Harga Konsumen Nasional Barang dan	Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai.	12 Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Jasa		September, Oktober, November, Desember		
2404	UL00008.00.00			Harga Mineral Acuan (HMA)	Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disebut HMA yang ditetapkan setiap bulannya dengan besaran tercantum pada Lampiran I pada Keputusan Menteri yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM Logam).	1. Nikel 2. Kolabalt 3. Timbal 4. Seng 5. Alumunium 6. Tembaga 7. Emas Sebgai Mineral Ikutan 8. Perak sebagai Mineral Ikutan 9. Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit 10. Mangan 11.Bijih Krom 12. Konsentrat Ilmenit 13. Konsentrat Titanium	Jumlah	USD/dmt; USD/once
2405	SE00191.00.00			Harga penjualan gas	Harga penjualan gas yang disalurkan diperoleh dari rata-rata penjualan dibagi volume gas yang disalurkan oleh perusahaan gas kepada setiap jenis pelanggan	Jenis pelanggan	Nilai	Rupiah per Mscf
2406	SE00192.01.00			Harga pokok penjualan	Hasil penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual pada awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli dalam suatu periode) dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang yang tersedia pada akhir periode).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2407	SE00192.02.00			Harga Pokok Penjualan	Harga perolehan barang yang diperdagangkan oleh perusahaan dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2408	ST00656.00.00			Harga Yang	Harga pembelian yang dibayarkan petani.	Klasifikasi berdasarkan	Nilai;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Dibayarkan Petani		analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2409	ST00657.00.00			Harga yang diterima petani	Harga produsen yang diterima oleh usaha (rumahtangga pertanian).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2410	SE00193.00.00			Harga-harga komoditas konsumen perdesaan pada bulan pencacahan	Harga barang-barang ditingkat konsumen yang dikonsumsi sehari-hari oleh petani di perdesaan	COICOP	Berat dan Volume	Kg, Gram, Liter, Ikat, Meter dsb
2411	SE00194.00.00			Hari kerja disabilitas per minggu	Banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Hari
2412	SE00195.00.01			Hari kerja per minggu	Banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu	Berdasarkan status: 1. Pekerja dibayar 2. Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah ; Persentase	Orang; Persen
2413	SE00195.00.02			Hari kerja per minggu	Banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu	Berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah ; Persentase	Orang; Persen
2414	SE00196.00.00			Harmonized System (HS)	Kode pengelompokan barang	HS/BTKI	Jumlah	Kode
2415	ST00658.00.00			Hasil hutan	Semua produk yang dihasilkan/diperoleh dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu.	1. Kayu 2. Non-Kayu	Volume; Jumlah	m3; kg; sm
2416	SD00584.00.00			Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2417	ST00659.00.00			Hasil Hutan	Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Jenis;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kayu	olahan atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan	Jenis Sortimen: 1. Kayu Bulat 2. Kayu Olahan	Massa	Ton
2418	SE.001197.00.00			Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Milik Daerah, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2419	ST.006660.01.00			Herbisida	Substansi yang digunakan untuk menghancurkan atau mengambat pertumbuhan tumbuhan tertentu, seperti gulma.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	Liter; Persen
2420	ST.006660.02.00			Herbisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan penggangu (herba) seperti alang-alang, rerumputan, eceng gondok,dll. Contoh jenis herbisida: Agroxone 4 Gramoxone Asulox 40 Karmex 80 WP Baepafon 85 SP Kematop 200 AS Basta 200 AS Lasso 480 EC Bladex 50 WP Londax 10 WP Carugard 50 WP Nabu 187 EC Coal 2 E Panodin 24	1. Agroxone 4 2. Asulox 40 3. Baspafon 85 SP 4. Basta 200 AS 5. Bladex 50 WP 6. Carugard 50 WP 7. Coal 2 E 8. Devrinol 50 WP 9. Difenex 60 WP 10. DMA-6 11. Dowpon M 12. Dual 500 EC 13. Eagle 360 AS 14. Ferremine 720 AS 15. Galek 250/250 EC 16. Gallant 240 EC 17. Gardona 24 EC 18. Gardon 480 EC	Volume; Persentase	Liter; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Devrinol 50 WP Paracol Difenex 60 WP Pelitapon DMA – 6 Perrinol Dowpon M Rifit 500 EC Dual 500 EC Rikf H 5 G Eagle 360 AS Rikf 3 G Fenemine 720 AS Ronstar 12 L Galex 250/250 EC Round Up Gallant 240 EC Sencor 70 WP Gardona 24 EC Target 26/38 SP Gardon 480 EC Tordon 101 Gesapax 500 FW Zorial 80 WP Gesaprom 500 FW	19. Gesapax 500 FW 20. Gesaprom 500 FW 21. Gramoxone 22. Karmex 80 WP 23. Kensatop 200 AS 24. Lasso 480 EC 25. Lordax 10 WP 26. Nabu 187 EC 27. Panodin 24 28. Paracol 29. Pelitapon 30. Perrinol 31. Rifit 500 EC 32. Rikf H 5 G 33. Rikf 3 G 34. Ronstar 12 L 35. Round Up 36. Sencor 70 WP 37. Target 26/38 Sp 38. Tordon 101 39. Zorial 80 WP		
2421	ST000661.00.00			Hewan pembiakan mengacu	Hewan betina yang dirawat utamanya untuk reproduksi daripada untuk produksi makanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor
2422	SD005589.00.00			Hijauan pakan ternak (forage)/pakan kasar	Mencakup rumput segar atau campuran rumput dan legum, dimakan sendiri oleh hewan dengan cara merumput atau dipotong oleh manusia dan diberikan ke hewan; silase rumput atau campuran rumput dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(roughage)	legume; jerami (rumput atau campuran rumput dan legum kering); silase seluruh tanaman (jagung, gandum, jelai, oat, gandum hitam dan lain-lain); sisa tanaman (brangkasan jagung, jerami tanaman, bagian atas tebu, daun pisan dan lain-lain); daun-daun pohon.			
2423	ST00662.00.00			Hortikultura	Segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika	1. Sayuran 2. Buah-buahan 3. Tanaman Hias 4. Tanaman Obat-obatan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2424	SP00142.00.00			Hotel	jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
2425	ST00663.00.00			Huma	Lahan kering yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas ; Persentase	Hektar ; Persen
2426	SD00598.00.00			Hutan Adat (HA)	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2, Ha
2427	ST00664.00.00			Hutan agatis	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon agatis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2428	SD00599.01.00			Hutan Alam	Unit vegetasi berlapis-lapis yang umumnya didominasi oleh pohon (sebagian besar hijau atau semi-gugur), yang strata gabungannya memiliki tumpang tindih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mahkota (yaitu penutup mahkota 75% atau lebih), dan di mana rumput di strata herba (jika ada) umumnya jarang.			
2429	ST00665.02.00			Hutan alam	Hutan yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia, yang biasanya terdiri dari berbagai jenis pohon.	1. Hutan Primer 2. Hutan Sekunder	Luas	Ha
2430	ST00666.00.00			Hutan bakau	Hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, habitatnya kaya dengan endapan lumpur, pohon-pohonnya berakar nafas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2431	ST00668.00.00			Hutan bambu	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon bambu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2432	ST00669.00.00			Hutan cadangan	Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukkannya belum ditetapkan dan tidak dibebani hak milik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2433	ST00670.00.00			Hutan cendana	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon cendana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2434	ST00671.00.00			Hutan dan lahan berpohon lainnya (other wooded land)	Lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai "lahan pertanian" utama yang memenuhi salah satu dari definisi berikut: Lahan hutan adalah lahan yang membentang seluas lebih dari 0.5 ha dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan kanopi hutan yang menutupi lebih dari 10 persen lahan tersebut, atau pepohonan yang mampu mencapai batasan ini dalam habitat tersebut (in situ). Lahan berhutan lainnya (other wooded land) adalah lahan yang membentang seluas lebih dari 0.5 ha dengan: (i) pepohonan lebih tinggi dari 5 m dan kanopi hutan yang menutupi 10 persen lahan, atau pepohonan yang mampu mencapai batasan ini dalam habitat tersebut (in situ); atau (ii) tinggi pepohonan	1. Lahan hutan 2. Lahan berkayu lainnya	Luas	Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tidak mencapai 5 m dalam habitatnya namun kanopi hutan menutupi lebih dari 10 persen lahan (misalnya beberapa jenis vegetasi pohon alpine, bakau zona kering, dan lain-lain); atau (iii) kombinasi semak-semak, belukar dan pepohonan yang menutupi lebih dari 10 persen lahan			
2435	SD000600.00.01			Hutan Desa (HD)	Hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2436	SD000600.00.02			Hutan Desa (HD)	Hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.	Hutan Desa (HD)	Luas	Ha
2437	ST000672.00.00			Hutan ekaliptus	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon ekalitus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2438	ST000673.00.00			Hutan gambut	Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang beriklim tipe A dan B. Jenis tanahnya organosol dengan lapisan gambut setebal 50 cm atau lebih. Pada umumnya terletak di antara hutan rawa dengan hutan hujan. Tegakan hutan selalu hijau dan mempunyai banyak lapisan tajuk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2439	ST000674.00.00			Hutan hujan	Hutan yang terdapat di wilayah dengan tipe iklim A atau B dapat dikatakan selalu basah. Jenis tanahnya podsol, latosol, ahvial, dan regosol dengan drainase yang baik dan terletak cukup jauh dari pantai. Tegakan hutan banyak didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2440	ST000675.00.00			Hutan jati	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon jati (monokultur).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2441	ST000676.00.00			Hutan jeunjing/sengo	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon jeunjing/sengon.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				n		kebutuhan		
2442	ST00677.00.00			Hutan kamper	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon kamper.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2443	ST00678.00.00			Hutan kayu putih	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon kayu putih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2444	SD00601.00.01			Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2445	SD00601.00.02			Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Luas	Ha
2446	SD00602.01.00			Hutan Konservasi	Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam (KPA) 3. Taman buru (TB)	Luas	Km2
2447	ST00679.02.00			Hutan Konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari Kawasan hutan suaka alam (KSA), Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) dan taman buru.	1. Kawasan hutan suaka alam (KSA): Cagar Alam, Suaka Marga Satwa 2. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA): Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam 3. Taman buru	Luas	Ha
2448	ST00680.00.00			Hutan lainnya	Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya.	kebutuhan		
2449	ST00681.00.00			Hutan Lindung	kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2450	ST00682.00.00			Hutan mahoni	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon mahoni.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2451	ST00683.00.00			Hutan meranti	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon meranti.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2452	ST00684.00.00			Hutan milik	Hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik yang dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain atau Badan Hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2453	ST00685.00.00			Hutan musim	Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai tipe iklim C dan D dengan rata-rata curah hujan setahun antara 1.000 - 2.000 mm. Tegakan hutan ini didominasi oleh jenis-jenis pohon yang menggugurkan daun di musim kering. Terdapat dua lapisan tajuk yang jelas berbeda. Kaya tumbuhan merambat yang berkayu dan banyak tumbuh berba.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2454	ST00687.00.00			Hutan negara	Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2455	ST00688.00.00			Hutan pantai	Hutan yang terdapat pada daerah-daerah kering tepi pantai. Tidak terpengaruh iklim. Tanahnya berpasir dan berbatu-batu serta terletak di atas garis pasang tertinggi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2456	ST00689.00.00			Hutan payau	Hutan yang terdapat pada daerah-daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Terpengaruh pasang surut. Tidak terpengaruh oleh iklim. Tanah lumpur, pasir atau lumpur berpasir. Hanya mempunyai satu stratum tajuk. Pohon-pohon dapat mencapai tinggi 50 m.	kebutuhan		
2457	ST00690.00.00			Hutan pinus	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon pinus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2458	ST00691.00.00			Hutan primer	Hutan alam yang belum dijamah manusia, misalnya hutan tropika basah di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2459	SD00603.01.00			Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2460	ST00692.02.00			Hutan produksi	Kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor dengan kata lain. Hutan produksi dibedakan atas Hutan produksi tetap (HP), Hutan produksi terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) .	1. Hutan produksi tetap (HP) 2. Hutan produksi terbatas (HPT) 3. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	Luas	Ha
2461	ST00693.00.00			Hutan produksi terbatas (HPT)	Hutan produksi yang kemungkinan dapat mengalami konversi untuk usaha lain, seperti untuk keperluan perkebunan, pemukiman transmigrasi, dan jalan. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2462	ST00694.00.00			Hutan produksi tetap (HP)	Hutan produksi yang bersifat tetap atau tidak akan mengalami konversi untuk usaha lain. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.			
2463	ST000695.00.00			Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2464	SD000604.00.00			Hutan Rakyat (HR)	Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2465	ST000697.00.00			Hutan ramin	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon ramin.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2466	ST000698.00.00			Hutan rawa	Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang selalu tergenang air tawar. Tidak terpengaruh oleh iklim. Pada umumnya terletak di belakang hutan payau, dengan jenis tanah aluvial. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon yang tingginya bisa mencapai 40 m dan terdiri atas banyak lapisan tajuk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2467	ST000699.00.00			Hutan sekunder	Hutan alam yang terjadi sesudah penebangan hutan primer atau sesudah perladangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2468	ST000700.00.00			Hutan sonokeling	Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon sonokeling.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2469	ST000701.00.00			Hutan tanaman	Hutan yang terjadi karena proses penanaman, biasanya terdiri dari satu atau beberapa jenis pohon. Tegakan hutan banyak didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2470	SE00198.00.00			Hutan Tanaman Industri (HTI)	Hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
2471	SD00605.00.01			Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2472	SD00605.00.02			Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Luas	Ha
2473	ST00702.00.00			Hutan Tetap	Kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap	1. Hutan konservasi 2. Hutan lindung 3. Hutan produksi terbatas 4. Hutan produksi tetap	Luas	Ha
2474	ST00703.00.00			Hutan wisata	Kawasan hutan yang diperuntukkan secara khas untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman wisata alam (TWA) dan Taman laut.	1. Taman wisata alam (TWA) 2. Taman laut.	Luas	Ha
2475	SP00146.00.00			Ijazah/STTB	Lembaran atau tanda bukti keluhusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	dokumen
2476	SP00147.00.00			Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar	Mengacu pada ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki penduduk.	1. Tidak/Belum Tamat SD 2. Tamat	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(STTB)/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		SD/MI/Sederajat 3. Tamat SLTP/MTs/Sederajat 4. Tamat SLTA/MA/Sederajat 5. Tamat SM Kejuruan 6. Tamat Diploma I/II 7. Tamat Diploma III/Akademi 8. Tamat Diploma IV/S1 9. Tamat S2/S3		
2477	SD006608.00.00			Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-RE)	Ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Izin, Unit; Km2, Ha
2478	ST000705.00.02			Ikan	Segala jenis organisme yang sebuah atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	1. Ikan bersirip (pisces). 2. Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea). 3. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (molusca). 4. Ubur-ubur dan sebangsanya	Produksi	1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep		Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
							(coelenterata). 5. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata). 6. Kodok dan sebangsanya (amphibia). 7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia). 8. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia). 9. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae). 10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.		
2479	ST060706.00.00			Ikan rucah		Ikan yang tidak mempunyai nilai ekonomis untuk pakan ikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	Kg
2480	ST060707.00.00			Ikan segar/hidup		Ikan hidup/mati tetapi masih dalam kondisi segar dan nilai ekonominya rendah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	Kg
2481	SD060611.01.02			Impor		Kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean RI	HS/BTKI	Volume/berat bersih; Nilai CIF	Kg; USD

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2482	SD00612.00.00		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Imunisasi	Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.	1. Imunisasi Dasar 2. Imunisasi Lanjutan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2483	SD00614.02.00			Imunisasi Dasar Lengkap	Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima imunisasi DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali). Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).	1. Imunisasi Lengkap 2. Imunisasi Tidak Lengkap	Persentase	Persen
2484	SD00614.01.00		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Imunisasi Dasar Lengkap	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: – 1 (satu) kali imunisasi BCG; – 3 (tiga) kali imunisasi DPT; – 3 (tiga) kali imunisasi HB; – 3 (tiga) kali imunisasi Polio; dan – 1 (satu) kali imunisasi Campak.	1. Bacillus Calmette Guerin (BCG), 2. Diphteria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPTHB-Hib), 3. Hepatitis B pada bayi baru lahir, 4. Polio, dan 5. Campak	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
2485	SD00619.00.00			Indeks	Sistem angka yang digunakan untuk membandingkan nilai hal-hal yang berubah sesuai satu sama lain atau standar tetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2486	SP00148.00.00			Indeks	alat ukur objektif yang dapat memperlihatkan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (IAP)	aktualisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2487	SD00620.01.00			Indeks Aspek Kebebasan	Aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60) atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2488	UL00009.00.00			Indeks berantai	suatu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan/perkembangan nilai atau kuantitas suatu peubah pada tahun ke t dibandingkan dengan nilai atau kuantitas tahun t-1 dikalikan 100	Jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja per perusahaan industri, biaya input perusahaan, nilai output, nilai tambah, dan pengeluaran untuk tenaga kerja IBS	Jumlah, Persentase	Nilai
2489	SP00149.00.00			Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Suatu ukuran yang memberikan gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya 5 dimensi gerakan revolusi mental.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2490	SD00623.00.00			Indeks Hak-Hak Politik	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2491	SE00199.00.00			Indeks Harga Konsumen	indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga	11 Kelompok Pengeluaran:	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
2492	SE00200.00.00			Indeks Harga Produsen Industri Pengolahan	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen industri pengolahan	Indeks Harga Produsen Industri Pengolahan menurut subsektor	Indeks	Indeks
2493	SE00201.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Angkutan Penumpang	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa angkutan penumpang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2494	SE00202.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Kesehatan	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2495	SE00203.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Pendidikan	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2496	SE00204.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Pengadaan Listrik dan Gas	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa pengadaan listrik dan gas	Indeks Harga Produsen Jasa Pengadaan Listrik dan Gas menurut subsektor (Ketenagalistrikan dan Pengadaan Gas)	Indeks	Indeks
2497	SE00205.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Pengelolaan Air	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa pengelolaan air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2498	SE00206.00.00			Indeks Harga Produsen Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman	Indeks Harga Produsen Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman menurut subsektor (Akomodasi dan Makanan Minuman)	Indeks	Indeks
2499	SE00207.00.00			Indeks Harga Produsen Pertambangan Penggalian	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen di sektor pertambangan dan penggalian	Indeks Harga Produsen Pertambangan Penggalian menurut subsektor	Indeks	Indeks
2500	SE00208.00.00			Indeks Harga Produsen Pertanian	Ukuran perubahan harga yang diterima oleh produsen sektor pertanian.	Indeks Harga Produsen Pertanian menurut subsektor	Indeks	Indeks
2501	SD00625.00.01			Indeks Kapasitas Lembaga	Indeks yang tentapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60–80)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Demokrasi	kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi.	3. Buruk (indeks < 60) atau sesuai kebutuhan		
2502	SD006S0.00.01			Indeks Kebahagiaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kebahagiaan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. Perlu tiaan 2. Perdesaan	Skala Indeks : 0-100	Indeks
2503	SD006S0.00.02			Indeks Kebahagiaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kebahagiaan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. Laki-laki 2. Perempuan	Skala Indeks : 0-100	Indeks
2504	SD006S0.00.03			Indeks Kebahagiaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kebahagiaan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	Skala Indeks : 0-100	Indeks
2505	SD006S0.00.04			Indeks Kebahagiaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kebahagiaan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. <=24 2. 25-40 3. 41-64 4. >=65	Skala Indeks : 0-100	Indeks
2506	SD006S0.00.05			Indeks Kebahagiaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kebahagiaan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2507	SD006692.00.01			Indeks Kebahagiaan - Indeks Dimensi Kepuasan Hidup	Tingkat kepuasan penduduk Indonesia dalam skala 0-100.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Indeks	Indeks
2508	SD006692.00.02			Indeks Kebahagiaan - Indeks Dimensi Kepuasan Hidup	Tingkat kepuasan penduduk Indonesia dalam skala 0-100.	1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	Indeks	Indeks
2509	SD007S0.00.01			Indeks Kebahagiaan -	Tingkat makna hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. Laki-laki 2. Perempuan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)				
2510	SD00750.00.02			Indeks Kebahagiaan - Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)	Tingkat makna hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100	1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	Indeks	Indeks
2511	SD00803.00.01			Indeks Kebahagiaan - Indeks Dimensi Perasaan (Afeksi)	Tingkat perasaan penduduk Indonesia dalam skala 0-100.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Indeks	Indeks
2512	SD00803.00.02			Indeks Kebahagiaan - Indeks Dimensi Perasaan (Afeksi)	Tingkat perasaan penduduk Indonesia dalam skala 0-100.	1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	Indeks	Indeks
2513	SD00875.00.01			Indeks Kebebasan	Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60–80) 3. Buruk (indeks < 60) atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2514	SE00271.00.00			Indeks Kedalaman Harga Gabah di Bawah	Ukuran rata-rata kesenjangan antara harga hasil observasi dengan HPP.	1. Tingkat Petani (GKP) 2. Tingkat Penggilingan (GKG)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Harga Pembelian Pemerintah (HPP)				
2515	SD01015.00.00			Indeks Kehilangan Makanan Global	Ukuran totalitas kerugian yang terjadi dari waktu pencatatan produksi pertanian hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Dihitung secara kuantitas, kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan (dalam kkal) per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian diindeks.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2516	SE00286.00.00			Indeks Kepatuhan Harga Gabah di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Gambaran distribusi harga hasil observasi yang berada di bawah HPP	1. Tingkat Petani (GKP) 2. Tingkat Penggilingan (GKG)	Indeks	Indeks
2517	SD01030.00.01			Indeks Kesetaraan	merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang dambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60–80) 3. Buruk (indeks < 60) atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tertentu.			
2518	SP00156.00.00			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Skala Indeks : 0-100	Indeks
2519	ST00720.00.00			Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresidari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai tanpa satuan yang menggambarkan kualitas air berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter/indikator kualitas air. IKA memberikan informasi yang mudah dipehami dan berguna untuk publik dan pengambil kebijakan.	1. Sangat Buruk (10-30) 2. Buruk (30-40) 3. Sedang (40-50) 4. Baik (50-60) 5. Sangat Baik (60-70)	Indeks	Indeks
2520	ST00727.00.00			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah nilai yang menggambarkan mutu air laut yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian parameter kunci dengan faktor konversinya.	1. Sangat Baik (100 > I > 90) 2. Baik (90 > I > 70) 3. Sedang (70 > I > 50) 4. Kurang (50 > I > 25) 5. Sangat Kurang (25 > I > 0)	Indeks	Indeks
2521	ST00730.00.00			Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai yang menggambarkan kualitas fungsi ekosistem gambut yang dihitung dari luas dampak adanya kanal dan luas areal terbakar serta nilai tutupan hutan dan belukar pada Kawasan Hutan dan belukar pada Kawasan Lindung Sempadan Sungai dengan kelerengan > 25% terhadap luas fungsi ekosistem gambut pada suatu wilayah dan waktu tertentu	1. Sangat Baik (90 <Xs 100) 2. Baik (70 <Xs 90) 3. Sedang (50 <Xs 70) 4. Buruk (25 <Xs 50) 5. Sangat Buruk(0 < Xs 25)	Indeks	Indeks
2522	ST00732.00.00			Indeks Kualitas Lahan	IKL adalah untuk merepresentasikan kondisi dari kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh Dampak	1. Sangat Baik (90 <Xs 100)	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Kebakaran dan Kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan	2. Baik (70 <Xs 90) 3. Sedang (50 <Xs 70) 4. Buruk (25 <Xs 50) 5. Sangat Buruk (0 < Xs 25)		
2523	ST007742.00.00			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lindung. Tutupan lahan adalah tutupan vegetasi pada hamparan daratan yang diinterpretasi menggunakan citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung berdasarkan parameter luas tutupan hutan, semak belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung, serta luas Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota, Taman Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, dan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	1. Sangat Baik (90 <Xs 100) 2. Baik (70 <Xs 90) 3. Sedang (50 <Xs 70) 4. Buruk (25 <Xs 50) 5. Sangat Buruk (0 < Xs 25)	Indeks	Indeks
2524	SD000678.00.00			Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2525	ST007754.00.00			Indeks orientasi pertanian (IOP)	Pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan.	1. IOP>1 2. IOP<1 3. IOP=1	Nilai	Satuan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					1. Nilai IOP > 1 merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi nasional; 2. Nilai IOP < 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; dan 3. Nilai IOP =1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian.			
2526	SE00226.00.00			Indeks Output Perdagangan	Penjumlahan nilai margin dan pendapatan jasa triwulan saat ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2527	SP00183.00.00			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan memberikan gambaran pembangunan kebudayaan dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: 1) dimensi ekonomi budaya 2) dimensi pendidikan 3) dimensi ketahanan sosial budaya 4) dimensi warisan budaya 5) dimensi ekspresi budaya 6) dimensi budaya literasi 7) dimensi kesetaraan gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2528	SP00188.00.00			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Alat ukur untuk mengetahui sejauh mana pembangunan/kemajuan pemuda di Indonesia. Aspek pembangunan pemuda dikelompokkan dalam 5 domain, yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan dan kesejahteraan, 3) lapangan dan kesempatan kerja, 4) partisipasi dan kepemimpinan, serta 5) kesetaraan gender dan diskriminasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2529	SE00227.00.00			Indeks	nilai pembelian dari seluruh kegiatan perdagangan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pembelian Triwulanan	pada triwulan berjalan dibagi dengan nilai pembelian pada triwulan sebelumnya ditampilkan dalam metode ADHB dan ADHK	analisis atau sesuai kebutuhan		
2530	SP00200.00.00			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Suatu alat untuk mengukur sudah sejauh mana pemenuhan hak anak di Indonesia. IPHA merupakan bagian dari IPA dan disusun berdasarkan 4 klaster yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2531	SE00228.00.00			Indeks Pendapatan Jasa	nilai hasil bagi nilai pendapatan jasa reparasi mobil dan sepeda motor dari triwulan berjalan dengan triwulan sebelumnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2532	SE00229.00.00			Indeks Penjualan Triwulanan	nilai penjualan dari seluruh kegiatan perdagangan pada triwulan berjalan dibagi dengan nilai penjualan pada triwulan sebelumnya ditampilkan dalam metode ADHB dan ADHK	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2533	SP00205.01.00			Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks komposit yang mengukur budaya zero tolerance masyarakat terhadap korupsi.	1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi) 4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)	Indeks	Indeks
2534	SP00205.02.00			Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks yang mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).	1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi) 4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)	Indeks	Indeks
2535	SP00207.00.00			Indeks	Salah satu ukuran yang mampu menggambarkan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Perlindungan Anak (IPA)	upaya perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian terkait serta masyarakat. IPA disusun berdasarkan 5 klaster yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2536	SP00209.00.00			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Suatu alat untuk memonitor capaian perlindungan khusus anak. IPKA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang disusun dari Klaster Perlindungan Khusus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2537	SE00238.00.00			Indeks Produktivitas	Produktivitas perdagangan diukur dengan nilai penjualan yang menggambarkan omset perusahaan yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Nilai indeks yang melebihi seratus dan pertumbuhan yang melebihi nol menggambarkan produktivitas pekerja yang meningkat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2538	SD00765.01.00			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2539	SD00765.02.00			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks rawan bencana, BNPB, 2013). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
2540	SD00769.00.00			Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko	Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tinggi				
2541	SE00246.00.00			Indeks Tenaga Kerja	nilai hasil bagi rata-rata pekerja perdagangan triwulan saat ini dengan triwulan sebelumnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2542	SE00249.00.00			Indeks Unit Value	Perubahan unit value barang impor (HS) dengan metode tahun dasar	Merujuk ke kode HS	Indeks	Indeks
2543	SE00251.00.01			Indeks unit value ekspor	Indeks yang mengukur perubahan harga komoditas ekspor	Merujuk ke kode HS	Indeks	Indeks
2544	SE00251.00.02			Indeks unit value ekspor	Indeks yang mengukur perubahan harga komoditas ekspor	Merujuk ke kode SITC	Indeks	Indeks
2545	ST00784.00.00			Induk	Ikan atau biota lain pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ikan
2546	SD00845.01.00			Industri	Cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2547	SD00845.02.00			Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2548	SD00876.00.00			Industri pengolahan bukan hasil pertanian	Pembuatan batu bata, barang kerajinan dari perak dan sebagainya	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2549	SD00885.00.00			Industri pengolahan hasil pertanian	Kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian	KBLI	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.			
2550	SE00261.00.00			Inflasi bulanan menurut komponen	Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	1. Inti 2. Bergejolak 3. Diatur pemerintah	Persentase	Persen
2551	SE00263.00.00			Inflasi Kelompok Bahan Makanan	Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	1. Inflasi month to month 2. Inflasi year to date 3. Inflasi year to year	Persentase	Persen
2552	SE00264.00.00			inflasi komponen energi	Inflasi Komponen Energi adalah inflasi yang dihitung dengan melihat persentase perubahan Indeks Harga Konsumen yang terdiri dari komoditas yang termasuk ke dalam komponen energi, yaitu: 1. Bahan Bakar Rumah Tangga 2. Tarif Listrik 3. Bensin 4. Solar	1. Inflasi month to month 2. Inflasi year to date 3. Inflasi year to year	Persentase	Persen
2553	SE00265.00.00			Inflasi Nasional	Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	1. Inflasi month to month 2. Inflasi year to date 3. Inflasi year to year	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2554	SD00947.01.00			Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen
2555	SD00947.01.00	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas		
2556	SD009947.02.00			Infrastruktur	Prasarana yang dapat memperbanyak mobilitas arus barang dan jasa.	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk diatas	Jumlah; Persentase	Infrastruktur ; Persen
2557	SP002249.00.00			Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	Proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit (skin to skin contact) antara kulit ibu dengan kulit bayi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2558	SE002276.01.00			Inovasi	Inovasi adalah produk atau proses baru atau peningkatan produk/proses yang berbeda secara signifikan dari yang dihasilkan/dimiliki oleh perusahaan sebelumnya berupa produk yang telah diperkenalkan ke pasar atau proses yang telah digunakan oleh perusahaan.	1. Produk 2. Proses 3. Alat 4. Gagasan	Jumlah	Produk; Proses; Alat; Gagasan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2559	ST00809.02.00			Inovasi	Hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan atau sosial.	1. Produk 2. Proses 3. Alat 4. Gagasan	Jumlah	Produk; Proses; Alat; Gagasan
2560	ST00811.01.00			Insektisida	Substansi yang digunakan untuk membunuh atau mengusir serangga	1. Cair 2. Padat 3. Aerosol	Volume; Persentase	Liter; Persen
2561	ST00811.02.00			Insektisida	bahan yang digunakan untuk mengendalikan serangga (insektisida) seperti belalang, kepik, wereng dan ulat.	1. Cair 2. Padat 3. Aerosol	Volume; Persentase	Liter; Persen
2562	SD00979.00.00			Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2563	SD00990.00.00			Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfatan air limbah yang aman untuk pertanian	Upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2564	SD01014.00.00			Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja	Instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga. Instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke lingkungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(IPLT)				
2565	ST00815.00.00			Intensifikasi Cengkeh (IC)	Usaha budidaya tanaman cengkeh rakyat dalam menghasilkan cengkeh dengan penerapan sapta usaha yang dianjurkan untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Intensifikasi; Persen
2566	ST00816.00.00			Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR)	Usaha budidaya tanaman kapas rakyat dalam menghasilkan kapas dengan penerapan sapta usaha yang dianjurkan untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Tanaman kapas dapat digolongkan termasuk intensifikasi minimal apabila telah dilakukan sebagai berikut : - Penggunaan benih unggul dengan populasi sebanyak 30.000 rumpun/ha. - Penanaman dilakukan 2 - 3 bulan sebelum musim kemarau. - Dosis pupuk per hektar sebanyak 80% dari anjuran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Intensifikasi; Persen
2567	ST00817.00.00			Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI)	usaha budidaya tanaman tebu rakyat dalam menghasilkan tebu dan gula dengan penerapan teknologi sapta usaha yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan pandapatan petani dan produksi petani. Tanaman tebu dapat digolongkan termasuk intensifikasi minimal apabila telah dilakukan sebagai berikut : - Jumlah bibit minimal 80% dari anjuran dan minimum asal bibit 50% sesuai anjuran. - Pengolahan tanah minimum 80% sesuai buku teknis dan kelambatan tanam tidak lebih dari 30 hari dari batas akhir bulan tanam optimal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Intensifikasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					- Dosis pupuk per hektar sebanyak 80% dari anjuran.			
2568	ST00818.00.00			Intensifikasi Tembakau (IT)	Upaya meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam bentuk sapta usaha dengan tujuan peningkatan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta penyediaan bahan baku pabrik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Intensifikasi; Persen
2569	SD01024.03.00			Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
2570	SD01024.02.00			Internet	Sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
2571	ST00819.00.00			Intesifikasi	Upaya meningkatkan produkstivitas dari sumberdaya usaha tani yang terbatas dengan penerapan Sapta Usaha yang dianjurkan untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta mempertahankan pelestarian sumber daya alam. Intensifikasi meliputi komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah; persentase	Intensifikasi; Persen
2572	ST00820.00.00			Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi	Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (GRK&MPV) adalah upaya untuk menyelenggrakan inventarisasi GRK, monitoring, pelaporan dan verifikasi dari masing-masing sektor	1. Sektor Kehutanan 2. Sektor Limbah 3. Sektor Energi 4. Sektor Industri (PPU) 5. Sektor Pertanian	Persentase CO_2e	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep (MPV)	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2573	SD01025.02.01			Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	1. Dalam Negeri 2.Luar Negeri	Nilai	Rupiah; USD
2574	SD01025.02.03			Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	1. PMA 2. PMDN	Nilai	Rupiah; USD
2575	SD01025.03.04			Investasi	Biaya pembangunan fasilitas pemurnian dalam bentuk penawaran , kontrak dan estimasi biaya yang wajar meliputi : 1. Persiapan awal 2. Persiapan proyek 3. Pelaksanaan Proyek 4. Utilitas 5. Infrastruktur pendukung 6. Commisioning and start up	1. Rencana 2. Realisasi	Nilai	Rupiah; USD
2576	SD01031.00.00	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Investasi Luar Negeri Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
2577	SD01032.00.00	7.b.1	Proporsi nilai	Investasi Luar	Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing.	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Negeri/ Penanaman Modal Luar Negeri/ Penanam Modal Asing	dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.	analisis atau sesuai kebutuhan		Modal
2578	SD01033.00.00	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Investasi/Penanaman Modal	Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	1. Penanaman modal dalam negeri 2. Penanaman modal luar negeri	Jumlah	Rupiah/ USD
2579	UL00012.00.00			Iptek Hasil Litbang dan Inovasi	Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah proses, cara dan/atau aktivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, penglajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IPTEK Dukungan SDG's	Jumlah	Paket Iptek
2580	ST00821.01.01			Irigasi	Penyediaan air untuk lahan, selain dari air hujan, untuk meningkatkan produksi tanaman atau rerumputan pakan ternak. Irigasi biasanya mengimplikasikan adanya infrastruktur dan penalatan untuk mengalirkan air ke tanaman, seperti saluran irigasi, pompa, parcaran air atau sistem air lokal.	1. irigasi terkendali pemih 2. irigasi terkendali sebagian	Jumlah	Irigasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Tetapi, irigasi juga mencakup pengaturan tanaman manual menggunakan ember, penyiram tanaman dan alat-alat lainnya. Banjir lahan yang tidak terkontrol karena meluapnya sungai atau kali tidak termasuk irigasi.			
2581	ST00822.00.00			Irigasi lokal	Sistem dimana air didistribusikan melalui jaringan pipa bertekanan rendah, dalam pola yang telah ditentukan, dan dilepaskan dalam jumlah kecil ke setiap tanaman. Ada beberapa jenis yakni: irigasi tetesan (air diteteskan pelan-pelan ke permukaan tanah); irigasi pancaran air mikro atau semprotan (air disemprotkan ke tanah di dekat tanaman atau pohon); dan irigasi bubbler (air dialirkan melalui aliran kecil ke baskom/baskom kecil atau ke tanah dekat pohon-pohon). Istilah-istilah lain yang sering digunakan yang mengacu ke irigasi lokal adalah irigasi mikro, irigasi trickle, irigasi aliran harian, irigasi drop, irigasi sip, dan irigasi diurnal.	1. irigasi tetesan air 2. irigasi pancaran air mikro atau semprotan 3. irigasi bubbler 4. irigasi mikro 5. irigasi trickle 6. irigasi aliran harian 7. irigasi drop 8. irigasi sip 9. irigasi diurnal.	Jumlah	Irigasi
2582	ST00823.00.00			Irigasi non PU	Irigasi yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2583	ST00824.00.00			Irigasi pancaran air	Merujuk kepada air yang dialirkan melalui jaringan pipa bertekanan sebelum kemudian di alirkan ke tanaman melalui pipa percikan (sprinkler nozzle). Sistem ini mensimulasikan curah hujan dengan mengalirkan air ke tanaman melalui semprotan tinggi (overhead spraying).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Irigasi
2584	ST00825.00.00			Irigasi permukaan	Sistem yang menemui sebagian atau seluruh lahan dengan air untuk tujuan irigasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Irigasi
2585	ST00826.00.00			Irigasi sederhana	irigasi yang sistem pembagian airnya belum teratur dan pihak PU sudah ikut membangun sebagian dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(irigasi PU)	jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungan). Penjelasan: Air dapat diatur, bangunan-bangunannya belum/ tidak permanen (mulai dari primer sampai tersier).	kebutuhan		
2586	ST007111.00.00			Irigasi sementak (spate irrigation)	adalah metode irigasi acak menggunakan air banjir dari anak sungai/watercourse atau dasar sungai/riverbed yang normalnya kering (disebut pula wadi).	1. Streambed 2. Wadi	Jumlah	Irigasi
2587	ST007112.00.00			Irigasi setengah teknis	Sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini PU hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai oleh PU. Penjelasan: Air dapat diatur seluruh sistem, tetapi yang dapat diukur hanya sebagian (primer/sekunder). Bangunan, sebagian belum permanen (sekunder/tersier), primer sudah permanen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2588	ST007113.00.00			Irigasi teknis	Jaringan irigasi di mana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer dan sekunder serta tersier, di mana saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas PU. Penjelasan: Air dapat diatur dan diukur sampai dengan saluran tersier serta bangunannya permanen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2589	ST007114.00.01			Irigasi terkendali penuh	metode irigasi permukaan, pancaran (sprinkler), dan lokal	1. Irigasi permukaan (Surface irrigation) 2. Pancaran air	Jumlah	Irigasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(Sprinklers) 3. Irigasi lokal (Localized irrigation)		
2590	ST00714.00.02			Irigasi terkendali penuh	metode irigasi permukaan, pancaran (sprinkler), dan lokal	1. Air permukaan (surface water) 2. Air tanah (groundwater) 3. Gabungan air permukaan dan air tanah 4. Persediaan air kota (municipal water supply) 5. Air limbah yang mendapat perlakuan (treated wastewater) 6. Lainnya	Jumlah	Irigasi
2591	ST00715.00.00			Irigasi terkendali sebagian	Pengendalian air banjir untuk mengairi tanaman (irigasi serentak/spate irrigation) atau lahan basah (equipped lowlands) (termasuk metode pengendalian air di area lahan basah dan dasar lembah pedalaman, dan bercocok tanam di area bekas banjir untuk memanfaatkan kelembaban yang tersisa/flood recession cultivation)	1. Equipped wetland and inland valley bottoms 2. Equipped flood recession cultivation 3. Irigasi serentak (spate irrigation) 4. Lainnya	Jumlah	Irigasi
2592	ST00821.01.02			Irigasi	Penyediaan air untuk lahan, selain dari air hujan, untuk meningkatkan produksi tanaman atau rerumputan pakan ternak. Irigasi biasanya mengimplikasikan adanya infrastruktur dan penalatan untuk mengalirkan air ke tanaman, seperti saluran irigasi, pompa, pancaran air atau sistem air lokal. Tetapi, irigasi juga mencakup pengairan tanaman	1. Permanen 2. Belum permanen	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					manual menggunakan ember, penyiram tanaman dan alat-alat lainnya. Banjir lahan yang tidak terkontrol karena meluapnya sungai atau kali tidak termasuk irigasi.			
2593	ST00821.01.03			Irigasi	Penyediaan air untuk lahan, selain dari air hujan, untuk meningkatkan produksi tanaman atau rerumputan pakan ternak. Irigasi biasanya mengimplikasikan adanya infrastruktur dan peralatan untuk mengalirkan air ke tanaman, seperti saluran irigasi, pompa, pancaran air atau sistem air lokal. Tetapi, irigasi juga mencakup pengairan tanaman manual menggunakan ember, penyiram tanaman dan alat-alat lainnya. Banjir lahan yang tidak terkontrol karena meluapnya sungai atau kali tidak termasuk irigasi.	1. Primer 2. Sekunder 3. Tersier	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2594	ST00821.02.01			Irigasi	sistem atau cara pengambilan, penyaluran, pengaturan pemberian dan pengendalian air untuk keperluan pertanian.	1. irigasi terkendali penuh 2. irigasi terkendali sebagian	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2595	ST00821.02.02			Irigasi	sistem atau cara pengambilan, penyaluran, pengaturan pemberian dan pengendalian air untuk keperluan pertanian.	1. Permanen 2. Belum permanen	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2596	ST00821.02.03			Irigasi	sistem atau cara pengambilan, penyaluran, pengaturan pemberian dan pengendalian air untuk keperluan pertanian.	1. Primer 2. Sekunder 3. Tersier	Jumlah; Persentase	Irigasi; Persen
2597	SP00157.00.00			Istri	Istri dari kepala keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2598	ST00716.00.00			Izin Pemanfaatan Hutan	Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu,	1. IUPHHK 2. IUPHHBK 3. IPHHK 4. IPHHBK	1. Jumlah, 2. Luas	1. Unit, 2. Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.	5. IUPJL 6. IUPK		
2599	ST00716.00.00			Izin Pemanfaatan Hutan	izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.	1. IUPHHK 2. IUPHHBK 3. IPHHK 4. IPHHBK 5. IUPJL 6. IUPK	1. Jumlah, 2. Luas	1. Unit, 2. Hektar
2600	ST00717.00.00			Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	Usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin
2601	ST00717.00.00			Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	Usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin
2602	ST00718.00.00			Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.	1. IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi diatas 6.000 m^3/Tahun 2. IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan kurang	1. Jumlah 2. Volume	1. Unit, 2. m^3

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dari 6.000 m³/Tahun		
2603	ST00719.00.00			Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)	Usaha berbadan hukum yang mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan dari Menteri Kehutanan atau Gubernur/Bupati untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada Hutan Produksi Alam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin
2604	ST00721.00.00			Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	Izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin
2605	ST00722.00.00			Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi	1. IUPHHK-HA 2. IUPHHK-HTI	Jumlah	Izin
2606	ST00723.00.00			Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin
2607	SD00651.00.00			Jabatan Fungsional Statistisi	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.	1. Statistisi Terampil Statistisi Pelaksana 2. Statistisi Terampil Statistisi Pelaksana Lanjutan 3. Statistisi Terampil Statistisi Penyelia 4. Statistisi Ahli Statistisi Pertama 5. Statistisi Ahli Statistisi Muda	Jumlah; presentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Statistisi Ahli Statistisi Madya 7. Statistisi Ahli Statistisi Utama		
2608	ST00724.00.01			Jagung Hibrida	Jagung yang merupakan keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inhibrida homozigot.	1. Pioner 2. BISI 3. NK 4. DK 5. Lainnya	Jumlah; Nilai	Kg/Ton; Rupiah
2609	ST00724.00.02			Jagung Hibrida	Jagung yang merupakan keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inhibrida homozigot.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kg
2610	ST00725.00.01			Jagung Komposit	Jagung yang benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri dan terjadi secara alami	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Kg/Ton; Rupiah
2611	ST00725.00.02			Jagung Komposit	Jagung yang benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri dan terjadi secara alami	1. Arjuna 2. Bisma 3. Joeter 4. Sukma raga 5. Goter 6. Kretek 7. Gajah mas 8. Genjah rante 9. Lainnya	Jumlah	Kg
2612	ST00726.00.01			Jagung Lokal	Varietas jagung yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Kg/Ton; Rupiah
2613	ST00726.00.02			Jagung Lokal	Varietas jagung yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara	1. Jagung merah delima tongkol coklat 2. Jagung merah delima tongkol putih	Jumlah	Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Jagung merah dara 4. Jagung lokal putih 5. Jagung putut 6. Jagung kuning genja		
2614	SD00655.00.00			Jalan Raya	jalan besar dan lebar, biasanya beraspal, dapat dilalui kendaraan dari dua arah berlawanan; jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain dan biasanya digunakan untuk kendaraan bermotor dan masyarakat umum, termasuk juga pemanfaatan bahu jalannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jalan; Persen
2615	SD00656.00.00			Jalan Rel	Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung, beserta perangkatnya yang menghalangi jalannya kereta api.	1. Lebar jalan rel 1067mm 2. Lebar jalan rel 1435mm	Panjang; Persentase	Km; Persen
2616	ST00728.00.00			Jalan utama menuju kawasan hutan	Jalan yang biasanya dilalui oleh anggota rumah tangga untuk menuju kawasan hutan, apabila jalan yang biasa dilalui tersebut terdapat beberapa kondisi/jenis jalan, maka kondisi/jenis jalan yang dipilih adalah yang terpanjang. Apabila rumahnya berada di dalam kawasan hutan maka jalan yang dimaksud adalah jalan yang dilalui oleh ART untuk keluar dari kawasan hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km
2617	SD00658.00.00			Jalur Kereta Api	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	1. Jalur Tunggal 2. Jalur Ganda	Panjang; Persentase	Km; Persen
2618	ST00729.00.00			Jam biasanya bekerja	Nilai dari waktu yang digunakan untuk menggerakan suatu pekerjaan untuk periode referensi pendek (misalnya minggu) selama periode observasi yang panjang (bulan, musim, tahun) dan mencakup jam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Jam

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lembur yang biasanya dilakukan, baik dibayar atau tidak.			
2619	SE00213.00.01			Jam kerja	Jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja / melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk istirahat resmi) dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai dalam sehari	1. Pekerja dibayar 2. Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah	Jam
2620	SE00213.00.02			Jam kerja	Jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja / melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk istirahat resmi) dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai dalam sehari	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Jam
2621	SE00214.00.00			Jam Kerja per Hari	Rata-rata jam kerja usaha/perusahaan melakukan kegiatan selama sehari. Penghitungan didekati dengan penjumlahan jam kerja selama bulan kegiatan atau sebulan yang lalu dibagi jumlah hari kerja	1 s.d. 24	Waktu	Jam
2622	SP00158.00.00			Janin	Anak dalam kandungan yang belum lahir dari minggu ke-8 setelah pembuahan hingga saat kelahiran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	ibu hamil
2623	ST00731.00.00			Jarak tanam	Jarak rata-rata antar tanaman.	1. Jarak tanaman semusim 2. Jarak tanaman tahunan	Jarak	cm m
2624	SP00159.00.00			Jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kegiatan utama	jarak dari tempat tinggal sampai ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Km
2625	ST00733.00.00			Jarak terdekat ke kawasan hutan	Jarak terdekat yang biasa dilalui anggota rumah tangga untuk memiju hutan. Jika rumah tangga berada di dalam kawasan hutan maka jarak terdekat ke kawasan hutan adalah 0 (nol) km.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km, m

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2626	ST00734.00.00			Jaring Angkat (Lift Net)	Jaring berbentuk empat persegi panjang, diberatkan di dalam air secara horizontal dengan menggunakan batang bambu/kayu sebagai rangkanya. Penasangan jaring dapat di lapisan tengah, dasar atau permukaan perairan. Ikan yang datang akibat daya tarik lampu atau terbawa arus, tertangkap dengan jalan mengangkat jaring tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2627	ST00735.00.00			Jaring Angkat Lainnya (Other Lift Net)	Jaring angkat yang tidak termasuk di atas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2628	ST00736.00.00			Jaring apung	Wadah pemeliharaan ikan di perairan umum berbentuk kurungan dari jaring yang diapungkan pada sebuah rakit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2629	ST00737.00.00			Jaring Insang (Gill net)	Jaring yang berbentuk empat persegi panjang dan dilengkapi dengan pemberat pada tali ris bawahnya dan pelampung-pelampung pada tali ris atasnya. Jaring ini di pasang tegak lurus di dalam air dan menghadang arah gerak ikan. Ikan-ikan tertangkap karena tersangkut pada mata jaring atau tergulung oleh jaring tersebut.	1. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net) 2. Jaring Insang Tetap (Set Gill Net) 3. Jaring Klitik (Shrimp Gill Net) 4. Jaring Lingkar (Encircling Gill Net)	Jumlah	Unit
2630	ST00738.00.00			Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net)	Jaring yang dalam operasi penangkapan dibiarkan hanyut mengikuti arus dan salah satu ujungnya dikaitkan pada perahu/kapal. Alat ini ditujukan untuk menangkap ikan-ikan permukaan (Pelagic-fish).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2631	ST00739.00.00			Jaring Insang Tetap (Set Gill Net)	Jaring insang yang dipasang menetap untuk sementara waktu dengan menggunakan jangkar. Pemasangan jaring ini dapat berorientasi tegantung dari ikan yang akan ditangkap, dipasang dekat/pada dasar perairan untuk menangkap ikan dasar (demersal fish), pada lapisan tengah atau permukaan perairan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2632	ST00740.00.00			Jaring Klitik	Jaring insang yang dipasang di dasar perairan menetap	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(Shrimp Gill Net)	dalam jangka waktu tertentu, umumnya 3-5 jam. Jaring ini khusus untuk menangkap udang.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2633	ST00741.00.00			Jaring Langkar (Encircling Gill Net)	Jaring insang yang dipersiskan dengan cara melingkari gerombolan ikan pemukaan. Setelah terkurung, gerombolan ikan dikejutkan sehingga menabrak dan tersangkut pada jaring. Cara melingkarnya adalah dengan melemparkan jaring dari kapal yang bergerak melingkar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2634	ST00743.00.00			Jaring Tiga Lapis (Trammel Net)	Jaring yang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari tiga lapis jaring, dimana ukuran mata jaring bagian dalam lebih kecil daripada kedua lapis jaring luarnya. Alat ini digunakan untuk menangkap udang sehingga dipasang di dasar perairan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2635	SD00670.00.00			Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2636	ST00744.00.00			Jaringan irigasi	Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi budidaya tanaman pangan, tanaman perkebunan, ikan, udang dan biota air lainnya mulai dari penyediaan (sumber), pengambilan, pembagian, pemberian serta pembuangannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2637	ST00745.00.00			Jaringan kuarter	Sistem/saluran yang menghubungkan aliran air irigasi pada saluran tersier ke unit yang lebih kecil, sehingga air bisa terbagi lebih teratur dan lebih cepat, yaitu apabila tiap petak sawah, kolam/tambak dapat menerima air langsung dari saluran (bukan dari air pembuangan dari petak sawah, kolam/tambak yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					diairi terlebih dahulu).			
2638	SE00215.00.00			Jaringan perusahaan	Kelembagaan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain. Jaringan perusahaan terdiri dari tunggal, kantor pusat, kantor cabang, perwakilan, atau unit pembantu/penunjang	1. Tunggal 2. Kantor Pusat 3. Cabang 4. Perwakilan 5. Unit Pembantu/ Penunjang	Jumlah	Perusahaan
2639	SE00216.00.00			Jaringan usaha/perusahaan	Jaringan usaha dari usaha/perusahaan yang bersangkutan.	1. Tunggal 2. Kantor Pusat 3. Cabang/Perwakilan Regional 4. Perwakilan Asing 5. Pabrik (manufaktur)/Unit produksi 6. Unit Pembantu/Penunjang	Jumlah	unit
2640	SE00217.00.00			Jasa industri	Biaya yang dikeluarkan untuk ongkos produksi/pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha lain atau pihak lain (makloon) selama tahun survei. Perusahaan hanya menyediakan bahan-bahan serta menerima hasil produksinya	1. Jasa makloon dalam negeri 2. jasa makloon luar negeri	Jumlah, Persentase	Nilai
2641	SE00217.00.00			Jasa industri	Biaya yang dikeluarkan untuk ongkos produksi/pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha lain atau pihak lain (maklun) selama tahun survei. Perusahaan hanya menyediakan bahan-bahan serta menerima hasil produksinya	1. Jasa makloon dalam negeri 2. jasa makloon luar negeri	Jumlah, Persentase	Nilai
2642	ST00746.01.00			Jasa kehutanan	Jasa penebangan dan atau penanaman pohon	1. Jasa pengolahan lahan 2. Jasa penanaman 3. Jasa penebangan dan atau penanaman pohon	Jumlah; Persentase	Unit Usaha, Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Jasa kehutanan lainnya		
2643	ST00746.02.00			Jasa kehutanan	Kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang kehutanan, Jasa kehutanan meliputi jasa pengolahan lahan, penanaman, jasa penebangan dan atau penanaman pohon.	1. Jasa pengolahan lahan 2. Jasa penanaman 3. Jasa penebangan dan atau penanaman pohon 3. Jasa kehutanan lainnya	Jumlah; Persentase	Unit Usaha; Rumah Tangga; Persen
2644	ST00747.00.00			Jasa kehutanan lainnya	Kegiatan usaha yang tidak tercakup di dalam butir i seperti kegiatan: pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan, pengangkutan kayu di dalam hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Unit Usaha; Rumah Tangga; Persen
2645	ST00748.00.00			Jasa perikanan	Jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad penggangu, persiapan kolang, dan uji mutu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Unit Usaha; Rumah Tangga; Persen
2646	SE00218.00.00			Jasa Perikanan Budidaya	Jasa perikanan budidaya adalah jasa yang secara langsung menyangkut kegiatan jasa sarana, jasa produksi, dan jasa pasca panen pada kegiatan perikanan budidaya air tawar payau dan laut termasuk ikan hias	1. Kolam 2. Tambak 3. KJA 4. Bak 5. Karamba 6. Minapadi 7. Aquarium 8. Tali rentang 9. Rakit 10. Alat sortir 11. Jala sampling 12. Jasa konstruksi 13. Pompa 14. Kincir	Jumlah; Persentase	Unit Usaha; Rumah Tangga; Persen
2647	ST00749.00.00			Jasa pertanian	Jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan,	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Unit Usaha,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tanaman pangan/hortikultura/perkebunan	pengendalian jasad penggangggu, pemanenan dan pasca panen.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Rumah Tangga; Persen
2648	ST007500.00.00			Jasa Peternakan	Kegiatan jasa penunjang peternakan untuk peningkatan perkembangbiakan, peningkatan pertumbuhan dan peningkatan hasil peternakan atas dasar balas jasa atau kontrak. Kegiatan jasa peternakan meliputi jasa pelayanan kesehatan, pemiccekan, penetasan telur, pengebirian dsb.	Jasa peternakan terdiri dari: 1.Jasa pelayanan kesehatan ternak 2. Jasa pemiccekan ternak 3. Jasa penetasan telur 4. Jasa pelayanan peternakan lainnya	Jumlah; Persentase	Unit Usaha, Rumah Tangga; Persen
2649	SE00219.00.00			Jenis Bahan Baku	Jenis input yang digunakan dalam proses produksi	1. Bahan baku 2. Bahan baku utama 3. Bahan penolong 4. Bahan energi 5. lainnya	Jumlah; Persentase	Jenis bahan baku; persen
2650	SE00220.00.00			Jenis Izin usaha	Jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha/perusahaan	1. Izin Prinsip 2. Izin Operasional 2. Izin Tertentu 3. Izin Lainnya	Jumlah	Izin
2651	SE00221.00.00			Jenis kegiatan usaha	Penggolongan jenis usaha berdasarkan lapangan usaha	21 Lapangan usaha (cat: Masukkan 21 Lapangan Usaha berdasarkan KBLI)	Jumlah	Usaha
2652	SE00222.00.00			Jenis kegiatan utama perusahaan/usaha	Kegiatan utama usaha/perusahaan adalah kegiatan usaha/perusahaan yang menghasilkan nilai produksi paling besar. Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan produk/jasa industri dengan volume terbesar. Jika nilai dan volume produk/jasa industri sama besar,	Tuliskan deskripsinya secara lengkap mulai proses hingga output	Kode KBLI 5-digit	10110 - 33200

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan produk/jasa industri dengan waktu produksi paling lama. Jika nilai dan volume produk/jasa industri serta waktu produksi sama besar, maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan pengakuan responden.			
2653	SD00680.00.00			Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
2654	ST00751.00.01			jenis kepemilikan lahan lainnya	Jenis kepemilikan lahan lainnya termasuk: lahan yang dijalankan dibawah kepemilikan sementara, seperti perwalian; lahan yang diterima oleh seorang anggota dari kepemilikan bersama untuk digunakan secara pribadi; dan lahan yang sedang dalam proses pewarisan. Negara-negara dapat menambahkan kategori lainnya untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2655	ST00751.00.02			jenis kepemilikan lahan lainnya	Jenis kepemilikan lahan lainnya termasuk: lahan yang dijalankan dibawah kepemilikan sementara, seperti perwalian; lahan yang diterima oleh seorang anggota dari kepemilikan bersama untuk digunakan secara pribadi; dan lahan yang sedang dalam proses pewarisan. Negara-negara dapat menambahkan kategori lainnya untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal.	1. Lahan perwalian 2. Lahan kepemilikkan bersama untuk digunakan secara pribadi 3. Lahan dalam proses pewarisan	Jumlah	Hektare
2656	SE00223.00.00			Jenis Lapangan Usaha Koperasi	Koperasi yang menjalankan usaha sesuai dengan jenis lapangan usaha koperasi	1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Pemasaran 5. Koperasi Simpan Pinjam 6. Koperasi Lainnya	Jumlah	Koperasi
2657	SP00160.00.00			Jenis mitigasi:	Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh	1. Perkotaan	Jumlah	mitigasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll	yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.	2. Perdesaan		
2658	SP00161.00.00			Jenis mitigasi: Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker)	perlengkapan yang disipayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untuk antisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	mitigasi
2659	SP00162.00.00			Jenis mitigasi: Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	mitigasi
2660	SP00163.00.00			Jenis mitigasi: Sistem peringatan dini bencana alam	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan loud speaker, dan lainnya	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	mitigasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2661	SP00164.00.00			Jenis mitigasi: Sistem peringatan dini khusus tsunami	Fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	mitigasi
2662	ST00752.00.00			Jenis pakan (untuk tiap jenis hewan ternak)	Jenis bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.	1. Hijauan (forage)/pakan kasar (roughage) 2. Produk sampingan agro ndustri/komponen konsentrat, termasuk tanaman 3. Swill (sisa makanan yang dicampur dengan air)/sampah rumah tangga 4. Suplemen/zat tambahan lain	Jumlah	Kg
2663	ST00753.00.00			Jenis praktik pengolahan tanah/tillage (untuk usaha pertanian)	Pelanggaran fisik tanah (physical soil loosening) yang dilakukan dalam suatu rentang penggunaan pembudidayaan tanaman, baik dengan tangan atau mekanis	1. Olah tanah konvensional (conventional tillage) 2. Olah tanah konservasi (conservation tillage) 3. Nol atau tidak ada olah tanah	Persentase	Persen
2664	UL00010.00.00			Jenis Usaha	Usaha pengolahan ikan melalui rangkaian kegiatan	1.	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				UPI	dan/atau perlakuan dan bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.	Penggaraman/pengeringan Ikan; 2. Pemindangan Ikan; 3. Pengasapan/penanggangan Ikan; 4. Peragian/fermentasi Ikan; 5. Pembuatan minyak Ikan; 6. Pengalengan Ikan; 7. Pengolahan rumput laut; 8. Pembekuan Ikan; 9. Pendinginan/pengesan Ikan; 10. Pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly ikan atau surimi; 11. Pengolahan kerupuk Ikan, kerupuk, peyek Ikan, dan sejenisnya.		
2665	SD.00684.00.00		Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat/ijazah.	Tidak tamat SD, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/MA/Paket C/ Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, S2/S3	Jumlah	Orang/ jiwa
2666	SD.00685.00.00			Jenjang	Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang ditduduki	1. Paket A	Jumlah	Jenjang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti	oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C).	2. SDLB 3. SD 4. MI 5. Paket B 6. SMP LB 7. SMP 8. MTs 9. Paket C 10. SMLB 11. SMA 12. MA 13. SMK 14. MAK 15. D1/D2 16. D3 17. D4 18. S1 19. Profesi 20. S2 21. S3		Pendidikan;
2667	SP00165.00.00			Jorong/Korong/Kampuang	Bagian dari wilayah Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jorong/Korong/Kampuang
2668	ST00755.00.00			Jumah hewan yang meninggal karena sebab alami	Kematian karena sebab alami selama tahun referensi yang terjadi hewan yang pada saat kematiannya merupakan hewan milik usaha pertanian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, persentase	ekor, persen
2669	SP00166.00.00			Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi	Meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2670	SE00224.00.00			Jumlah ART	Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang	1. Tidak bekerja	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Ekonomi	biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya).	2. Bekerja Buruh/ Karyawan 3. Bekerja Pengusaha		
2671	SE00225.00.00			Jumlah ART Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang baik di jenjang pendidikan formal maupun bukan formal kesetaraan (Paket A/B/C).	1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. Tidak/Belum Tamat SD 3. SD 4. SLTP 5. SLTA 6. Diploma I/II 7. Diploma III/ Akedemi 8. Diploma IV/ S1/ S2/S3	Persentase	Persen
2672	SP00167.00.00			Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2673	SP00168.00.00			Jumlah Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)	Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Temas BRI.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2674	SP00169.00.00			Jumlah Bank	Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses	1. Perkotaan	Jumlah	Fasilitas

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll)	pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri,, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb	2. Perdesaan		
2675	SP00170.00.00			Jumlah Bidan	Banyaknya bidan yang ada di desa/kelurahan	1. Perdesaan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang
2676	SD00695.01.01			Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara	1. Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS. 2. Banyaknya DAS di Lintas Negara yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS
2677	SD00695.02.01			Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki	1. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. 2. DAS yang batasnya melintasi wilayah dua atau lebih negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS dan Dokumen MoU

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara				
2678	SD00695.02.02			Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara	1. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah peraian yang masih terpengaruh aktifitas daratan. 2. DAS yang batasnya melintasi wilayah dua atau lebih negara	1. DAS yang meningkat jumlah mata airnya 2. DAS lintas negara yg sudah memiliki Mou	Jumlah	DAS dan Dokumen MoU
2679	ST000756.01.02			Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas	1. Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS. 2. Banyaknya DAS di Lintas Negara yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara.	1. DAS yang meningkat jumlah mata airnya 2. DAS lintas negara yg sudah memiliki Mou	Jumlah	DAS dan Dokumen MoU

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Negara				
2680	SPO0171.00.00			Jumlah dan persentase pasar menurut lama beroperasi	Sebaran jumlah dan persentase pasar menurut klasifikasi lama beroperasi	1. 0 - 5 tahun 2. 6 - 10 tahun 3. 11 - 20 tahun 4. 21 - 30 tahun 5. > 30 tahun 6. Tidak ada informasi	Jumlah, Persentase	Nilai, Persen
2681	SPO0172.00.00			Jumlah dan persentase Pasar Menurut Pengelola	Sebaran Pasar Menurut Pengelola	Klasifikasi Pengelola 1. Pemerintah Pusat / BUMN 2. Pemerintah Daerah / BUMD 3. Swasta 4. Perorangan	Jumlah, Persentase	Nilai, Persen
2682	SPO0173.00.00			Jumlah dan persentase Pasar Rakyat Menurut Lama Beroperasi Setelah Renovasi Terakhir	Sebaran Pasar Menurut Lama Beroperasi Setelah Renovasi Terakhir	1. 0 - 5 tahun 2. 6 - 10 tahun 3. 11 - 20 tahun 4. 21 - 30 tahun 5. > 30 tahun 6. Tidak ada informasi 7. Tidak Pernah Renovasi	Jumlah, Persentase	Nilai, Persen
2683	SPO0174.00.00			Jumlah dan Persentase Pasar Tradisional/Rakyat Menurut Jenis Bangunan	Sebaran Pasar Rakyat Menurut Jenis Bangunan	1. Permanan 2. Tidak Permanan	Jumlah, Persentase	Nilai, Persen
2684	SPO0175.00.00			Jumlah dan proporsi Penduduk	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja	1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama		2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan 3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis 4. Tenaga Usaha Penjualan 5. Tenaga Usaha Jasa 6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 7. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar 8. Lainnya		
2685	SP00176.00.00			Jumlah dan proporsi Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Menurut Daerah Tempat Tinggal	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja menurut daerah tempat tinggal	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
2686	SP00177.00.00			Jumlah dan proporsi Penduduk Bekerja Menurut Jenis	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja menurut jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pekerjaan Utama Menurut Jenis Kelamin				
2687	SP00178.00.00			Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kategori Jumlah Jam Kerja	Penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja terhadap jumlah penduduk bekerja	1. 0 jam 2. 1-34 jam 3. 35-48 jam 4. 49 jam ke atas	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
2688	SP00179.00.01			Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kategori Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal	Penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja terhadap jumlah penduduk bekerja	1. 0 jam 2. 1-34 jam 3. 35-48 jam 4. 49 jam ke atas	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
2689	SP00179.00.02			Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kategori Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal	Penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja terhadap jumlah penduduk bekerja	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2690	SP00180.00.01			Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kategori Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin	Penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja terhadap jumlah penduduk bekerja	1. 0 jam 2. 1-34 jam 3. 35-48 jam 4. 49 jam ke atas	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
2691	SP00180.00.02			Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kategori Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin	Penduduk usia kerja yang bekerja menurut jam kerja terhadap jumlah penduduk bekerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
2692	SP00181.00.00			Jumlah dan proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja	1. A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. B. Pertambangan dan Penggalian 3. C. Industri Pengolahan 4. D. Pengadaan Listrik dan Gas 5. E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6. F. Konstruksi	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. G. Perdagangan Besar dan Eceran 8. H. Transportasi dan Pergudangan 9. I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. J. Informasi dan Komunikasi 11. K. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. L. Real Estat 13. M,N. Jasa Perusahaan 14. O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 15. P. Jasa Pendidikan 16. Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. R,S,T,U. Jasa Lainnya		
2693	SP0018220.01		Jumlah dan proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Menurut Jenis	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja menurut jenis kelamin	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air,	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kelamin		Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estat M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa Lainnya		
2694	SPO0182.00.02		Jumlah dan proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	Jumlah dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama terhadap jumlah penduduk bekerja menurut jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Utama Menurut Jenis Kelamin				
2695	SD.00700.00.00			Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS
2696	SD.00701.00.00			Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	1. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya 2. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya	Luas, Prosentase	Hektar (Ha), Prosentase
2697	SP.00184.00.01			Jumlah desa/kelurahan berdasarkan lokasi terhadap kawasan hutan	Banyaknya desa/kelurahan berdasarkan lokasi terhadap kawasan hutan	1. Di dalam kawasan hutan 2. Di tepi/sekitar hutan 3. Di luar kawasan hutan	Jumlah	desa/kel
2698	SP.00184.00.02			Jumlah desa/kelurahan berdasarkan lokasi terhadap kawasan hutan	Banyaknya desa/kelurahan berdasarkan lokasi terhadap kawasan hutan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
2699	SP.00185.00.00			Jumlah desa/kelurahan berdasarkan mitigasi bencana alam	Banyaknya desa/kelurahan menurut mitigasi bencana alamnya	Wilayah dan Jenis Mitigasi	Jumlah	desa
2700	SP.00186.00.00			Jumlah desa/kelurahan	Banyaknya desa/kelurahan menurut tipologinya	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				n berdasarkan tipologinya				
2701	SP00187.00.00			Jumlah desa/keluraha n menurut akses jalan darat antar desa/keluraha n	Banyaknya desa/kelurahan menurut akses jalan darat antar desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
2702	SP00189.00.00			Jumlah desa/keluraha n menurut jenis Permukaan jalan darat antar desa/keluraha n	Banyaknya desa/kelurahan menurut permukaan jalan darat antar desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
2703	SP00190.00.00			Jumlah desa/keluraha n menurut lalu lintas dari ke desa/keluraha n	Banyaknya desa/kelurahan menurut lalu lintas dari ke desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa
2704	SP00191.00.00			Jumlah desa/keluraha n yang berbatasan langsung dengan laut	Banyaknya desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
2705	SP00192.00.00			Jumlah Desa/Keluraha	Banyaknya desa/kelurahan yang dilalui sungai	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				n yang Dilalui Sungai				
2706	SP00193.00.00			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Permukiman di Bantaran Sungai	Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki permukiman di bantaran sungai.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
2707	SP00194.00.00			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian Bencana Alam	Banyaknya desa/kelurahan menurut kejadian bencana alam di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa
2708	SP00195.00.00			Jumlah dokter gigi	Banyaknya dokter gigi	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang
2709	SP00196.00.00			Jumlah dokter umum	Banyaknya Dokter meliputi dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewa	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang
2710	SP00197.00.00			Jumlah Gereja Katolik	Banyaknya tempat ibadah untuk umat Katolik.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2711	SP00198.00.00			Jumlah Gereja Kristen	Banyaknya tempat ibadah untuk umat Kristen.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2712	SP00199.00.00			Jumlah hari melakukan perjalanan ke tempat kegiatan	Pada hari apa biasanya responden tersebut melakukan perjalanan ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	hari
2713	ST00757.00.00			Jumlah hewan	Populasi hewan pada suatu waktu tertentu, biasanya pada hari referensi sensus.	1. Jantan 2. Betina	Jumlah	ekor
2714	ST00758.00.00			Jumlah hewan	Penjualan atau pembuangan/disposal lainnya hewan-	1. Penjualan	Jumlah,	Ekor, persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang dibuang/dispose	hewan yang dirawat oleh usaha pertanian selama tahun referensi. Ini termasuk hewan yang dijual, hewan yang diberikan sebagai hadiah, sebagai pembayaran untuk jasa, atau alasan lainnya.	2. Kematian 3. Pemotongan 4. Pengurangan lain	Persentase	
2715	ST00759.00.00			Jumlah hewan yang diperoleh	Pembelian atau perolehan lainnya dari hewan ternak oleh usah pertanian selama periode referensi. Ini termasuk hewan yang diterima sebagai hadiah atau sebagai pembayaran pekerjaan.	1. Pembelian 2. Kelahiran 3. Penambahan lain	Jumlah	Ekor
2716	ST00760.00.00			Jumlah hewan yang disembelih	Jumlah hewan yang dirawat oleh usaha pertanian yang disembelih selama periode referensi. Ini termasuk hewan yang disembelih sendiri oleh usaha pertanian dan hewan miliki usaha pertanian yang disembelih oleh orang lain. Penjualan hewan hidup untuk disembelih – misalnya, dijual ke rumah jagal. Penyembelihan hewan milik orang lain di usaha pertanian tidak termasuk dalam item ini.	1. Pemotongan di RPH/TPH 2. Pemotongan sendiri	Jumlah	Ekor
2717	ST00761.00.00			Jumlah hewan yang lahir	Kelahiran hidup yang terjadi selama periode referensi pada hewan yang merupakan bagian dari usaha pertanian tersebut saat hewan itu melahirkan. Kelahiran dari hewan milik usaha pertanian lain yang saat itu berada di usaha pertanian tersebut untuk sementara waktu tidak termasuk dalam penghitungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, persentase	Ekor, persen
2718	SP00201.00.00			Jumlah Kamar Tidur	Banyaknya kamar tidur untuk masing-masing tipe rumah yang dibangun oleh responden (pengembang), termasuk kamar pembantu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	buah
2719	SP00202.00.00			Jumlah Kapel	Banyaknya tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2720	SD00719.00.00			Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh	Jumlah kawasan suaka alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah kawasan pelestarian alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan Jumlah taman buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam (KPA) 3. Taman buru (TB)	Jumlah	Kawasan Konservasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				nilai indeks METT minimal 70%	dengan satuan kawasan konservasi.			
2721	SP00203.00.00			Jumlah Kelenteng	Banyaknya tempat ibadah umat Konghucu.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2722	SP00204.00.01			Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	jiwa
2723	SP00204.00.02			Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu	1. Angin puyuh/putting beliung/topan 2. Banjir 3. Banjir Bandang 4. Gelombang pasang laut 5. Gempa Bumi 6. Gunung meletus 7. Kebakaran hutan dan lahan 8. Tanah longsor 9. Tsunami	Jumlah	jiwa
2724	SD00735.00.00			Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan	Jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton
2725	SP00206.00.00			Jumlah Masjid	Tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2726	SD00738.00.00			Jumlah	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik)	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Metadata

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menghimpun metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2727	SD.00749.00.00			metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/ Lembaga ditambah dengan jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2728	SE.00230.00.00			Jumlah pekerja	Pekerja terdiri dari pekerja tetap dan pekerja tidak tetap	Jenis kelamin dan pendidikan tertinggi (Tidak sekolah/tidak tamat SD, SD, SLTP, SLTA, D1/D3, D4/S1, dan S2/S3)	Jumlah	Orang
2729	SE.00231.00.00			Jumlah pelanggan air bersih	Pelanggan air bersih adalah semua orang yang menjadi pelanggan perusahaan air bersih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2730	SE.00232.00.00			Jumlah Pemakaian air	Biaya penggunaan air adalah biaya air yang dibeli dari perusahaan air bersih/ perusahaan air baku untuk keperluan usaha/perusahaan, termasuk air kemasan yang digunakan untuk keperluan kantor.	1. Ada nilai ekonomis 2. Tidak berbiaya	Jumlah	Nilai, Kerh

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2731	SE00233.00.00			Jumlah Pemakaian listrik	biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan usaha/perusahaan, seperti untuk penerangan, menjalankan mesin, mencuci dan keperluan lain. Biaya ini berdasarkan rekening tagihan bulanan atau pembelian token listrik yang sudah digunakan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KWH
2732	SE00234.01.01			Jumlah pengeluaran bahan bakar dan pelumas	Banyak penggunaan bahan bakar dan pelumas yang dipakaian selama tahun survei	1. Bensin 2. Minyak Solar/Diesel 3. Minyak Bakar 4. Minyak Tanah 5. Batu Bara 6. Kokas, 7. Gas dari PGN 8. LPG 9. Arang 10. Kayu bakar 11. Bahan Bakar Lainnya dan Pelumas	Jumlah Persentase	Liter, Ton, Kg, MMBTU
2733	SE00234.01.02			Jumlah pengeluaran bahan bakar dan pelumas	Banyak penggunaan bahan bakar dan pelumas yang dipakaian selama tahun survei	1. Bensin 2. Minyak Solar/Diesel 3. Minyak Tanah 4. Briket Batu Bara 5. Gas kota 6. LPG 7. Lainnya (Kayu bakar, arang, sekam, cangkang sawit, ampas tebu, dll) 8. Pelumas	Jumlah	Liter, Kg, M3
2734	SE00234.02.01			Jumlah pengeluaran bahan bakar dan pelumas	Nilai Penggunaan bahan bakar dan pelumas selama tahun survei	1. Bensin 2. Minyak Solar/Diesel 3. Minyak Bakar 4. Minyak Tanah 5. Batu Bara	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Kokas, 7. Gas dari PGN 8. LPG 9. Arang 10. Kayu bakar 11. Bahan Bakar Lainnya dan Pelumas		
2735	SE00234.02.02			Jumlah pengeluaran bahan bakar dan pelumas	Nilai Penggunaan bahan bakar dan pelumas selama tahun survei	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2736	SE00234.01.03			Jumlah pengeluaran bahan bakar dan pelumas	Banyak penggunaan bahan bakar dan pelumas yang dipakaian selama tahun survei	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Persentase	Liter, Ton, Kg, MMBTU
2737	SE00235.00.01			Jumlah Pengeluaran bahan bakar dan pelumas untuk pembangkit tenaga listrik	Banyak penggunaan bahan bakar dan pelumas yang khusus digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik selama tahun survei	1. Bensin 2. Minyak Solar/Diesel 3. Minyak Bakar 4. Minyak Tanah 5. Batu Bara 6. Kokas, 7. Gas dari PGN 8. LPG 9. Arang 10. Kayu bakar 11. Bahan Bakar Lainnya dan Pelumas	Jumlah Persentase	Liter, Ton, Kg, MMBTU
2738	SE00235.00.02			Jumlah Pengeluaran bahan bakar dan pelumas untuk	Banyak penggunaan bahan bakar dan pelumas yang khusus digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik selama tahun survei	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Persentase	Liter, Ton, Kg, MMBTU

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pembangkit tenaga listrik				
2739	SE00236.00.00			Jumlah pengeluaran pekerja	Pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak tetap/harian.	1. Upah/gaji 2. Upah lembur 3. Tunjangan 4. Premi iuran BPJS ketenagakerjaan 5. Premi iuran BPJS kesehatan 6. lainnya	Nilai	Rupiah
2740	SE00237.00.00			Jumlah pengeluaran tenaga kerja	Pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja produksi dan pekerja lainnya, perusahaan yang mempunyai kantor pusat, pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja di sini tidak termasuk pekerja/ karyawan di kantor pusat	1. Upah/gaji 2. Upah lembur 3. Tunjangan 4. Premi iuran BPJS ketenagakerjaan 5. Premi iuran BPJS kesehatan 6. lainnya	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
2741	SP00209.00.00			Jumlah penginapan: hostel/motel/losmen/wisma	Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat dalam Podes mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2742	SD00755.00.00			Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pengunjung; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				statistik melalui website				
2743	SD007757.00.00			Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	**Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Jumlah	Penumpang; Metrik ton
2744	SP002210.00.00			Jumlah penyandang cacat	Banyaknya orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2745	SE002239.00.00			Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	1. Jumlah perusahaan HTI 2. Perum Perhutani 3. Perusahaan lainnya	Jumlah	perusahaan
2746	ST007762.00.00			Jumlah perusahaan hak pengusahaan hutan	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan
2747	SE002240.00.00			Jumlah Perusahaan Kehutanan	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya, serta Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	HPH, Perum/HPHT, dan TSL	Jumlah	Perusahaan
2748	ST007763.00.00			Jumlah perusahaan pembuddaya	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya	1. Hutan Tanaman Industri (HTI) 2. Perum Perhutani	Jumlah	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tanaman kehutanan		3. Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya		
2749	ST00764.00.00			Jumlah perusahaan penangkaran tumbuhan/satwa liar	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan
2750	SP00211.00.00			Jumlah Pura	Tempat sembahyang umat Hindu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2751	SP00212.00.00			Jumlah rumah sakit	Jumlah Sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2752	SP00213.00.00			Jumlah rumah sakit bersalin	Banyaknya Rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2753	SP00214.00.00			Jumlah Rumah Tangga	Banyaknya rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2 . Rumah Tangga Khusus	Jumlah	Rumah Tangga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2754	SE00241.00.00			Jumlah Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan	Apabila responden menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang mempunyai nilai lebih tinggi.	1. Listrik PLN 2. Listrik Non PLN 3. Bukan Listrik	Persentase	Persen
2755	SE00242.00.00			Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Mandi/Cuci	Banyaknya rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Mandi/Cuci. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.	1. Air Dalam Kemasan 2. Leding 3. Sumur Bor / Pompa 4. Sumur 5. Mata Air 6. Air Permukaan 7. Air Hujan 8. Lainnya	Persentase	Persen
2756	SE00243.00.00			Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum	Banyaknya umah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.	1. Air Dalam Kemasan 2. Leding 3. Sumur Bor / Pompa 4. Sumur 5. Mata Air 6. Air Permukaan 7. Air Hujan 8. Lainnya	Persentase	Persen
2757	SP00215.00.01			Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi	Banyaknya sarana dan prasarana ekonomi di suatu wilayah	1. Perlintaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
2758	SP00215.00.02			Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi	Banyaknya sarana dan prasarana ekonomi di suatu wilayah	1. Kelompok pertokoan 2. Pasar dengan bangunan permanen 3. Pasar dengan bangunan semi permanen 4. Pasar tanpa bangunan	Jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Minimarket/swalayan 6. Restoran/rumah makan 7. Warung/kedai makanan minuman 8. Hotel 9. Penginapan 10. Toko/warung kelontong		
2759	SP00216.00.01			Jumlah Sarana Kesehatan	Banyaknya sarana kesehatan adalah jumlah secara fisik berupa bangunan sarana kesehatan yang masih berfungsi (memberikan pelayanan kesehatan)	1. Perlatan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
2760	SP00216.00.02			Jumlah Sarana Kesehatan	Banyaknya sarana kesehatan adalah jumlah secara fisik berupa bangunan sarana kesehatan yang masih berfungsi (memberikan pelayanan kesehatan)	1. Rumah sakit 2. Rumah sakit bersalin 3. Puskesmas dengan rawat inap 4. Puskesmas tanpa rawat inap 5. Puskesmas Pembantu 6.Poliklinik/balai pengobatan 7. Tempat Praktik dokter 8. Rumah bersalin 9. Tempat praktik bidan 10. Poskesdes 11. Polindes 12.Apotek	Jumlah	unit
2761	SP00217.00.01			Jumlah Sarana Lembaga Keuangan yang	Banyaknya sarana lembaga keuangan yang beroperasi memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat	1. Perlatan 2. Perdesaan	Jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Beroperasi				
2762	SP00217.00.02			Jumlah Sarana Lembaga Keuangan yang Beroperasi	Banyaknya sarana lembaga keuangan yang beroperasi memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat	Jenis Lembaga Keuangan: 1. Bank Umum Pemerintah 2. Bank Umum Swasta 3. BPR	Jumlah	unit
2763	SP00218.00.01			Jumlah Sarana Pendidikan	Banyaknya sarana pendidikan adalah jumlah lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
2764	SP00218.00.02			Jumlah Sarana Pendidikan	Banyaknya sarana pendidikan adalah jumlah lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.	Jenis Sarana Pendidikan: 1. Pos PAUD 2. TK/RA/BA 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Akademi/PT	Jumlah	unit
2765	ST00765.00.00			Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah	1. SDGPP tanaman dihitung sebagai jumlah total aksesi unik dari sumber daya tanaman yang disimpan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang. Jumlah aksesi tersebut harus mencakup aksesi yang ada di fasilitas koleksi dasar (base collections) dan aksesi unik yang disimpan di fasilitas konservasi jangka menegah (sebagai koleksi aktif) hanya apabila aksesi tersebut dipertimbangkan/direncang menjadi bagian dari koleksi dasar nasional. Koleksi dasar dapat mencakup dalam bentuk benih, dipelihara di lapangan/kebun (fild), cryo-preserved atau koleksi in vitro, tergantung.	1. SDGPP Tanaman 2. SDGPP Hewan	Jumlah; Persentase	Sumber daya; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ataupun jangka panjang	pada spesies yang dikonservasi dan ketersediaan fasilitas konservasi di setiap lokasi. 2. SDGPP hewan dihitung dari jumlah ras-ras lokal yang disimpan dalam suatu koleksi bank genetik dengan volume material genetik yang disimpan dalam jumlah yang cukup untuk merekonstitusi (menghadirkan kembali) ras hewan jika terjadi (ancaman) mengalami kepunahan.			
2766	SP00219.00.00			Jumlah Surau/Langgar /Musala	Tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2767	SP00220.00.01			Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
2768	SP00220.00.02			Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum	Jenis Tempat Ibadah: 1. Masjid 2. Musala/Surau/Langgar 3. Gereja Kristen 4. Gereja Katolik 5. Kapel 6. Pura 7. Wihara 8. Kelenteng	Jumlah	unit
2769	SP00221.00.00			Jumlah tempat praktik bidan	Sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2770	SE00244.01.01			Jumlah tenaga kerja	Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat			
2771	SE00244.01.02			Jumlah tenaga kerja	Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat	1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
2772	SE00244.01.03			Jumlah tenaga kerja	Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
2773	SE00244.02.01			Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
2774	SE00244.02.02			Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah	Orang
2775	SE00244.02.03			Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
2776	SE00244.03.00			Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja kehuarga/tidak dibayar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2777	SP00222.00.00			Jumlah tenaga kesehatan lainnya	Tenaga kesehatan lainnya meliputi: tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.			
2778	SP00223.00.01			Jumlah Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan	Banyaknya tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang
2779	SP00223.00.02			Jumlah Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan	Banyaknya tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	1. Dokter umum 2. Dokter spesialis gigi 3. Bidan 4. Tenaga kesehatan lainnya	Jumlah	Orang
2780	SP00224.00.00			Jumlah TK/RA/BA	Meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2781	SE00245.00.00			Jumlah Unit yang dibangun	Jumlah unit rumah yang dibangun untuk masing-masing tipe rumah (baik yang sudah terjual dan yang belum terjual)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	unit
2782	SP00225.00.00			Jumlah warung/kedai makanan minuman	Usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2783	SP00226.00.00			Jumlah Wihara	Tempat ibadah umat Buddha.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
2784	SP00227.00.00			Jurong	Bagian wilayah dalam Gampong (Desa) yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Jurong

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Pemerintahan Gampong di wilayah Aceh.	kebutuhan		
2785	SD00773.01.00			Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
2786	SD00773.02.00			Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
2787	SD00774.00.00			Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dimaksud meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut: 1. Wilayah terluar yang terdapat di 9 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 20. 2. Wilayah terdepan yang terdapat di 8 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 23. 3. Wilayah tertinggal yang terdapat di 22 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 99.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
2788	SD00775.00.00			Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kabupaten/kota
2789	ST00766.00.00			Kadar air gabah dan beras	Jumlah kandungan air dalam butir gabah dan beras yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2790	SE00247.00.00			Kaki Lima/Selasar/ Emperan	tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap, bersifat temporer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
2791	ST00767.00.00			Kantor administratur	Suatu unit kegiatan ekonomi/usaha yang mengatur kegiatan administrasi kebun yang bersifat resmi. Kantor administratur dapat bertanggung jawab terhadap satu atau beberapa lokasi kebun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
2792	SD00780.00.00			Kantor Cabang Koperasi	Kantor Cabang Koperasi adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang Pembantu 3. Kantor Kas	Jumlah	Kantor
2793	SE00248.00.00			Kantor pusat	Perusahaan/usaha yang mempunyai cabang/perwakilan unit pembantu di tempat lain yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantunya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan
2794	ST00768.00.00			Kapal Motor	Kapal yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak dan mesinnya diletakkan permanen di dalam kapal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kapal
2795	ST00769.00.00			Kapal Perikanan	Kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.	1. Kapal Motor 2. Perahu Motor Tempel 3. Perahu Tanpa Motor	Jumlah	Unit
2796	UL00011.00.00			Kapasitas	Kemampuan maksimum/optimal perusahaan industri untuk berproduksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Satuan berat
2797	SD00781.00.00			Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya	Upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				air	antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.			
2798	SE00250.00.00			Kapasitas Produksi Per Tahun	Potensi volume produksi yang dapat dihasilkan dalam setahun dalam kondisi normal	1.Produk Utama 2.Produk Sampingan	Jumlah, Nilai, Persentase	Unit, Rupiah, Persen
2799	SD00786.00.00			Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik	Seluruh kapasitas terpasang baik yang dimiliki oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik milik negara maupun milik swasta	1. Provinsi 2. Jenis Pembangkit	Jumlah	MW
2800	SD00791.00.00			Karantina	Tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
2801	SD00792.00.00			Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
2802	SD00793.00.00			Karantina Tumbuhan	Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
2803	ST00770.00.00			Karkas Babi	Bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan cara disembelih, dikerok buhunya, dipisahkan kepala dan kakinya serta dikeluarkan jeroan nya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Hasil	Ton
2804	ST00771.00.00			Karkas Ruminansia	Bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah Hasil	Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					jeroannya, dipisahkan kepalanya, kaki mulai dari tansus/ karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih	kebutuhan		
2805	ST00772.00.00			Karkas Unggas	Bagian tubuh yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia	**1. Ayam Ras Pedaging** **2. Ayam Ras Petelur** **3. Ayam Buras/Kampung/Lokal** **4. Itik** **5. Itik Manila** **6. Puyuh**	Jumlah Hasil	Ton
2806	SP00228.00.00			Kartu Keharga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KK
2807	SP00228.00.00			Kartu Keharga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	dokumen
2808	SP00229.00.00			Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KTP
2809	SE00252.00.00			Kas dan Setara Kas	Saldo kas (cash on hand) dan rekening giro serta investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek. Khusus bank, setara kas meliputi giro pada Bank Indonesia dan bank umum serta surat berharga jangka pendek lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2810	ST00773.00.00			Kawasan Ekosistem Esensial	Kawasan Ekosistem Esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.	1. Ekosistem Karst 2. Lahan Basah 3. Mangrove 4. Lahan Gambut 5. Koridor Wisata	Jumlah kawasan; Luas	Kawasan, Unit; Hektar (Ha)
2811	SD00801.00.01			Kawasan Hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya	1. Hutan Negara 2. Hutan Adat	Luas	Km2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudahditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	3. Hutan Hak 4. Hutan Produksi 5. Hutan Lindung 6. Hutan Konservasi		
2812	ST00774.00.02			Kawasan hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudahditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	1. Kawasan hutan yang masih berhutan 2. Kawasan hutan yang sudah tidak berhutan	Luas	Km2, Ha
2813	ST00775.00.00			Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya	1. KHDTK Diklat Kehutanan 2. KHDTK Litbang Kehutanan 3. KHDTK Religi dan Budaya	Luasan	Ha
2814	ST00776.00.00			Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah, dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luasan	Ha
2815	SD00802.00.00			Kawasan Hutan Konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam (KPA) 3. Taman buru (TB)	Luas	Km2
2816	ST00777.00.00			Kawasan	Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai	1. Taman Nasional (TN)	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hutan Pelestarian Alam (KPA)	fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk dalam kelompok KPA adalah Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).	2. Taman Hutan Raya (THR) 3. Taman Wisata Alam (TWA)		
2817	ST00778.00.00			Kawasan hutan suaka alam (KSA)	Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan	1. Cagar Alam 2. Suaka marga satwa	Luas	Ha
2818	ST00779.00.00			Kawasan hutan yang masih berhutan	Kawasan hutan yang berisi dan didominasi oleh pepohonan (masih berupa hutan primer maupun sekunder)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2819	ST00780.00.00			Kawasan hutan yang sudah tidak berhutan	Kawasan hutan yang didominasi oleh belukar, tanah kosong, pemukiman, ladang dan sebagainya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
2820	SD00805.01.01			Kawasan Konservasi	Kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi perairan yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta taman buru.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	1. Jumlah kawasan 2. Luas	1. Unit 2. Ha
2821	SD00808.00.00			Kawasan Lindung	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2822	SD00809.00.00			Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnnya 1 juta jiwa.			
2823	SD00809.00.00			Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnnya 1 juta jiwa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2824	SD00810.00.00			Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	1. Taman Nasioanl (TN) 2. Taman Hutan Raya (THR) 3. Taman Wisata Alam (TWA)	Luas	Km2
2825	SD00811.00.00			Kawasan Perdesaan	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayanan jasa permerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2826	SD00814.00.00			Kawasan Perkotaan Besar	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2827	SD00815.00.00			Kawasan Perkotaan Kecil	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2828	SD00816.00.00			Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar	Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kawasan perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kawasan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pelayanan perkotaan (SPP)				
2829	SD009817.00.00			Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2830	SD009817.00.00			Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
2831	ST009781.00.00			Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	1. Kawasan budidaya tanaman pangan 2. Kawasan budidaya hortikultura 3. Kawasan budidaya perkebunan 4. Kawasan budidaya perkebunan 5. Kawasan budidaya peternakan	Luas; Persentase	Km2; Persen
2832	SD009819.00.00			Kawasan Suaka Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	1. Cagar Alam (CA) 2. Suaka Margasatwa (SM)	Luas	Km2
2833	SD009820.00.00			Kawasan Taman Buru	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km2
2834	SD009821.00.00			Kawasan Wisata Ilmiah	Dalam hal ini konsep wisata ilmiah yang dimaksud adalah pengelolaan KHDTK sebagai suatu kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kegiatan bermain, belajar dan berwisata serta kegiatan pembelajaran	1. Pendidikan alam dan lingkungan 2. Kegiatan	Jumlah	Kegiatan, Tema

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lainnya yang menyenangkan. Dalam hal ini pola pengelolaan yang dimaksud adalah memadukan tema-tema wisata ilmiah yang dikemas dalam bentuk wisata. Pembelajaran yang menyenangkan tersebut dapat berupa permainan (game), bermain peran (role play) dan demonstrasi (demonstration). Pengunjung dapat menyaksikan dan ikut serta proses budidaya, memanen dan melestarikan berbagai sumberdaya hutan yang dikembangkan berdasarkan produk-produk litbang yang telah diperoleh.			
2835	SD00822.01.00			Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2836	SD00822.02.00			Kawin	Status mempunyai istri bagi laki-laki atau mempunyai suami bagi perempuan, baik tinggal bersama maupun terpisah, termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), telah hidup bersama, atau oleh masyarakat dianggap sebagai suami-istri.	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2837	SD00822.01.00		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2838	SE00253.00.00			KBLI Sektor Industri Pengolahan	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor industri pengolahan	Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), KBLI :	Kode	Jumlah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Industri Pengolahan (Kategori C)		
2839	SE00254.00.00			KBLI Sektor Kontruksi	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor Konstruksi	KBLI : 41, 42, 43	Kode	Jumlah
2840	SP00230.00.00			Keagamaan	pengajian, persekutuan doa, perayaan hari besar Keagamaan, ceramah agama, kajian kitab suci. Tidak termasuk ibadah yang wajib dan rutin dilaksanakan, misalnya solat jum'at, kebaktian di gereja, dsb	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2841	SD00826.01.00			Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
2842	SD00826.02.00			Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
2843	SD00826.03.00			Keanekaragaman Hayati	Semua mahluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
2844	SD00828.00.00			Keasaman Laut	Ketika CO2 dilepaskan ke atmosfer larut dalam air laut sehingga beberapa perubahan kimia terjadi pada air laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2845	SP00099.00.00			Kebakaran hutan dan lahan	suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
2846	ST00782.00.00			Kebakaran	suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api,	1. Perkotaan	Jumlah	Kejadian,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hutan dan lahan	sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat menganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar	2. Perdesaan		Orang
2847	SP00231.00.00			Keberadaan pemukiman di bantaran sungai	Ruang antara tepi paling sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	pemukiman
2848	SE00255.00.00			Keberadaan Perusahaan	Keberadaan perusahaan saat dikunjungi meliputi: -Aktif adalah keberadaan perusahaan masih aktif, termasuk perusahaan yang sedang tidak dapat proyek atau ijin usaha sudah kadaluwarsa tapi masih beroperasi -Tutup sementara adalah keberadaan perusahaan yang tidak aktif untuk sementara waktu dan berencana akan beroperasi lagi -Tutup adalah keberadaan perusahaan sudah tidak aktif lagi atau sudah pindah ke provinsi lain -Tidak ditemukan adalah keberadaan perusahaan sudah tidak ditemukan di lapangan (berdasarkan hasil Field Checking/UDP2020, SKTH2019, dan SKTR2020) -Bukan konstruksi adalah perusahaan yang dikunjungi sudah tidak melakukan kegiatan pada sektor konstruksi	1. Aktif 2. Tutup Sementara 3. Tutup 4. Tidak Ditemukan 5. Bukan Konstruksi	Jumlah	Perusahaan
2849	ST00783.00.00			Keberadaan praktik konservasi	Aktivitas untuk mempertahankan atau meningkatkan kapasitas produksi lahan pada area yang terpengaruh oleh atau rentan	1. Rotasi tanaman 2. Teras atau cara lain untuk mengontrol erosi	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tanah (untuk usaha pertanian)	degradasi, termasuk pencegahan dan reduksi erosi tanah, pemadatan dan salinitas, konservasi atau drainase air tanah, dan pemeliharaan atau peningkatan kesuburan tanah	pada lereng		
2850	SP00232.00.00			Keberadaan sungai di desa/keraha n	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	sungai
2851	SD00837.00.00			Kebijakan	Serangkaian ide atau rencana apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang telah disepakati secara resmi oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau partai politik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen
2852	ST00785.00.00			Kebun pembibitan	Area dimana tanaman, pohon, atau tanaman menjalar muda dikembangbiakkan untuk tujuan penanaman kembali.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
2853	ST00786.00.00			Kebun plasma yang belum dikonversi	Perkebunan rakyat yang dibangun dan dibina oleh perusahaan perkebunan yang terkait dengan program PIRBUN yang belum disertakan ke rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
2854	ST00787.00.00			Kebun sendiri/inti	Kebun yang pengelolaan budidayanya dilakukan oleh administratur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
2855	SP00233.01.00			Kecamatan	Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kecamatan
2856	ST00788.00.00			Kegiatan budidaya tanaman hortikultura	Meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Usaha tanaman hias meliputi usaha pembesaran tanaman dan usaha pengembangbiakan tanaman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2857	SE00256.00.00			Kegiatan Ekonomi	Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung	1. Tidak Bekerja 2. Buruh / Karyawan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kepala Rumah Tangga (KRT)	jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/ dianggap/ ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.	3. Pengusaha		
2858	ST00789.00.00			Kegiatan ekonomi lainnya di rumah tangga	Kegiatan selain produksi pertanian pada usaha, dilakukan oleh enterprise dimana usaha adalah sebuah bagian seperti: aktivitas pendukung untuk aktivitas pertanian dan pasca panen; berburu, meramu, dan aktivitas layanan terkait; Kehutanan dan penebangan; Perikanan dan akuakultur; Manufaktur; serta Perdagangan grosir dan retail, perbaikan kendaraan bermotor	1. Jasa penunjang pertanian 2.Manufaktur Pengolahan produk pertanian 3.Manufaktur Kerajinan Tangan 4. Perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan bermotor 5. Hotel dan restoran 6. Agrowisata 7. Lainnya	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2859	SP00234.00.00			Kegiatan ekstrakurikuler	Kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.	1. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 2. Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan	Jumlah	Kegiatan
2860	SP00235.00.00			Kegiatan organisasi	Organisasi adalah suatu sistem perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu, baik formal (berbadan hukum) maupun tidak. Kegiatan suatu organisasi biasanya dibingkai dalam suatu keanggotaan dan kepengurusan (memiliki ketua, sekretaris dan bendahara) dan memiliki aturan-aturan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kegiatan; Persen
2861	SP00236.00.00			Kegiatan sosial kemasyarakatan	kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial (tidak mencari keuntungan ekonomi) dan dilakukan di lingkungan tempat tinggal.	1. Kegiatan keagamaan 2. Kegiatan keterampilan 3. Kegiatan olahraga /	Jumlah; persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						permainan 4. Gotong royong 5. Arisan 6. Kematian 7. Lainnya		
2862	SE00257.00.00			Kegiatan Utama	jenis kegiatan usaha/perusahaan yang memipunyai nilai produksi/pendapatan paling besar.	Kode KBLI 5-digit	Kode	Jumlah
2863	SW00237.00.00			Kegiatan utama komuter	kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, dan kursus	1. Bekerja 2. Sekolah 3. Kursus	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2864	ST00790.00.00			Kegiatan Utama Perusahaan Peternakan	Aktivitas utama perusahaan peternakan yang paling banyak menghasilkan pendapatan terbesar	1. Pembibitan 2. Budidaya 3. Penetasan telur hanya ada di LTU 4. Pengumpul Susu hanya di di LTS	Jumlah, persentase	Perusahaan
2865	SE00258.00.00			Kegiatan utama usaha/perusahaan	Kegiatan utama usaha/perusahaan adalah kegiatan usaha/perusahaan yang menghasilkan nilai produksi paling besar. Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan produk/jasa industri dengan volume terbesar. Jika nilai dan volume produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan produk/jasa industri dengan waktu produksi paling lama. Jika nilai dan volume produk/jasa industri serta waktu produksi sama besar, maka kegiatan utama ditentukan berdasarkan pengakuan responden.	Dinyatakan dengan KBLI	Jumlah	Kode
2866	SD00854.00.00			Kegiatan yang dianggap melakukan Illegal,	Kegiatan yang dianggap melakukan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, antara lain: 1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Unreported and Unregulated Fishing	tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melahui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut. 3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.			
2867	ST007791.00.00			Kegunaan akhir/end use	Tujuan dari tanaman tersebut.	1. Makanan untuk konsumsi manusia 2. Pakan hewan 3. Bahan bakar bio 4. Kegunaan lain	Persentase	Persen
2868	ST007792.00.00			Kehutanan	Kegiatan yang menghasilkan produksi hutan (kayu gelondongan, rotan, damar, sengon, bambu dan sebagainya) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memunjang kehidupan dan mengguing resiko. Yang termasuk:	1. Budidaya tanaman kehutanan 2. Usaha pemungutan hasil hutan 3. Usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar 4. Usaha penangkapan satwa liar	volume	m3, kg, sn, pohon, ekor
2869	SP002338.00.00			Keinginan beralih ke moda transportasi umum	Alasan responden yang berjalan kaki atau menggunakan moda transportasi pribadi sebagai moda utama memiliki keinginan beralih menggunakan moda transportasi umum	1. Ya 2. Tidak	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2870	SP002239.00.00			Kejadian Bencana Alam	Kejadian/bencana alam yang dicakup adalah bencana yang menganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat di desa/kelurahan.	1. Angin puyuh/putting beliung/topan 2. Banjir 3. Banjir Bandang 4. Gelombang pasang laut 5. Gempa Bumi 6. Gunung meletus 7. Kebakaran hutan dan lahan 8. Tanah longsor 9. Tsunami	Jumlah	desa/kel
2871	SD000858.01.00			Kejahatan Kekerasan	Tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat dancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta berdanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan sekual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, penerasan, dan sebagainya.	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; persentase	Kasus; persen
2872	SE002259.00.00			Kekayaan Bersih	Hasil penguranagan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2873	SP001102.00.00			Kekeringan (Lahan)	Keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan			
2874	SP00240.00.00			Kekeringan (Lahan)	Keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian
2875	SD00868.00.00			Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
2876	SD00868.00.00			Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
2877	SD00868.00.00		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
2878	ST00793.00.01			Kelahiran/	Ternak yang dilahirkan/ditetaskan **dalam kondisi**	**1.Kerbau**	Jumlah	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Penetasan	hidup dan menunjukan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak	**2. Kuda** **3. Sapi Potong** **4. Sapi Perah** **5. Kambing** **6. Domba** **7. Babi** **8. Kelinci**	Ternak	
2879	ST00793.00.02			Kelahiran/ Penetasan	Ternak yang dilahirkan/ditetaskan **dalam kondisi** hidup dan menunjukan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak	**1. Ayam Ras Pedaging** **2. Ayam Ras Petelur** **3. Ayam Buras/Kampung/Lokal** **4. Itik** **5. Itik Manila** **6. Puyuh**	Jumlah Ternak	Ekor
2880	SE00260.00.00			Kelas pasar	Klasifikasi pasar tradisional menurut cakupan wilayah pelayanan	1. Kelas I / Pasar Regional 2. Kelas II / Pasar Kota 3. Kelas III / Pasar Wilayah 4. Kelas IV / Lingkungan	Kelas	Kategorik
2881	SD00870.00.00			Kelautan	Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2882	SP00241.00.02			Kelompok pertokoan	Sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Fasilitas
2883	SP00241.00.01			Kelompok pertokoan	Sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					satu.			
2884	ST00794.01.00			Kelompok Tani (Poktan)	Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
2885	ST00794.02.00			Kelompok Tani (POKTAN)	Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam menambahkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
2886	ST00795.01.00			Kelompok tani hutan	Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	a. Pemula b. Madya c. Utama	Jumlah
2887	ST00795.02.00			Kelompok tani hutan	Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
2888	ST00796.00.00			Kelompok Tani NRT	Kumpulan petani yang melakukan usaha pertanian oleh non rumah tangga maupun non perusahaan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kesejahteraan untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.			
2889	ST007797.00.00			Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)	Kumpulan Pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
2890	ST007798.00.00			Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP)	Kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengolah / pemasar ikan dan kelompok usaha garam rakyat dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan pemanfaatan wirausaha kelautan dan perikanan.	KUB nelayan, KUB Budidaya, KUB Budidaya Rumput Laut	Jumlah	KUB
2891	ST007799.00.00			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan /atau telah melakukan usaha di bidang perhutanan sosial dan diakui atau terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota setempat atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Hutan Lindung/ Konservasi (KPHP/KPHL/ KPHK) atau Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Desa	1. Biru (Blue) 2. Perak (Silver) 3. Emas (Gold) 4. Platina (Platinum)	Jumlah	Kelompok
2892	SP002242.00.00			Kelompok usia sekolah	Anak-anak dan remaja sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang terdaftar, sedang bersekolah, atau sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.	1. Kelompok usia PAUD/sederajat: 3 – 6 tahun 2. Kelompok usia SD/sederajat: 7 – 12	Jumlah; Persentase	Penduduk; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tahun 3. Kelompok usia SMP/sederajat: 13 – 15 tahun 4. Kelompok usia SMA/sederajat: 16 – 18 tahun		
2893	SD00877.01.00			Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
2894	SD00877.02.00			Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
2895	SD00877.03.00			Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam KK.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga; Persen
2896	SD00877.02.00			Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
2897	SD00878.00.00			Keluarga berencana (KB)	Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga; Persen
2898	SD00881.00.00			Keluarga	Keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase;	Persen;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Penggunaan Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)	oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.	analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	keluarga
2899	ST008(00.01.00			Keluarga Pertanian	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
2900	ST008(00.01.00			Keluarga Pertanian	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluarga
2901	ST008(00.02.00			Keluarga	Keluarga yang sekurang-kurangnya ada satu anggota	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Keluarga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pertanian	keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
2902	SP00243.00.00			Keluhan kesehatan	Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare,sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Keluhan
2903	SD00882.02.00			Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
2904	SP00244.01.00			Kelurahan	Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelurahan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2905	ST00801.00.01			Kematian Ternak	Kematian ternak karena sakit/kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas. **Mati karena disembelih/dipotong tidak termasuk dalam kategori kematian tetapi termasuk kategori pemotongan.**	**1. Ternak Besar** **2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**	Jumlah Ternak	Ekor
2906	ST00801.00.02			Kematian Ternak	Kematian ternak karena sakit/kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas. **Mati karena disembelih/dipotong tidak termasuk dalam kategori kematian tetapi termasuk kategori pemotongan.**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Ternak	Ekor
2907	SD00892.00.00			Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kementerian; Persen
2908	SD00893.01.01			Kemiskinan	Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach)	1. Kemiskinan Relatif 2. Kemiskinan Absolut	Persentase	Persen
2909	SD00893.02.01			Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).	1. Kemiskinan Relatif 2. Kemiskinan Absolut	Persentase	Persen
2910	SD00894.00.01			Kemiskinan Absolut	Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.			
2911	SD00894.00.02			Kemiskinan Absolut	Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2912	SD00896.00.00			Kemiskinan Relatif	Merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah ditentukan menurut pendapatan/pengeluaran.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2913	SE00262.00.01			Kemitraan	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasarprinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelakuUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.	1. Inti plasma; 2. subkontrak; 3. waralaba; 4. perdagangan umum; 5. distribusi dan keagenan; 6. bagi hasil; 7. kerja sama	Jumlah	Model Bisnis

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						operasional; 8. usaha patungan (joint venture); 9. penyumberluaran (outsourcing); 10. bentuk kemitraan lainnya		
2914	SE00262.00.02			Kemitraan	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelakuUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.	1. Supply-Chain 2. Pemasaran produk 3. Pembiayaan 4. Teknologi 5. SDM	Jumlah	Model Bisnis
2915	ST00802.00.01			Kemitraan Kehutanan (KK)	kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.	1. Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) 2. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) 3. Kemitraan Konservasi	Luas; Jumlah	Hektar; Kepala Keluarga, Unit SK
2916	ST00803.00.00			Kemitraan petani	Pola kerja sama antara perusahaan mitra dengan petani/kelompok tani.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2917	ST00804.00.00			Kemitraan usaha perkebunan	Kerjasama usaha antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok mitra (baik sebagai plasma maupun sebagai pekebun binaan kebun inti) sesuai dengn ketentuan yang berlaku.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kemitraan
2918	SD00898.00.00			Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; Persentase	Kendaraan; Persen
2919	SD00898.00.00			Kendaraan Bermotor	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Umum				
2920	SD00898.00.00			Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	persentase	Persen
2921	SP00245.00.00			Kepala Keluarga	Seorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga	1. laki-laki 2. perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga
2922	SD00901.00.01			Kepatuhan	Perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Kepatuhan Rendah 2. Kepatuhan Sedang 3. Kepatuhan Tinggi	Persentase	Persen
2923	SD00902.00.00			Kepatuhan Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2924	SD00904.00.01			Kepemilikan lahan	Hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat	1. Presence of a legally recognized document (Kepemilikan dokumen legal) 2. Right to sell (hak untuk menjual) 3. Right to bequeath (hak mewaris)	Jumlah; Persentase	Kepemilikan; Persen
2925	SD00904.00.02			Kepemilikan	Hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai,	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lahan	menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat	analisis atau sesuai kebutuhan		
2926	ST090805.00.01			Kepemilikan legal (legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik legal (legal owner-like possession)	Menggambarkan hak lahan yang memberikan keamanan kepemilikan secara hukum.	1. Sertifikat hak milik 2. Sertifikat hak guna bangunan 3. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun 4. Sertifikat hak guna usaha 5. Sertifikat hak pakai 6. Letter C/Girik/Petuk D/dll 7. Tanah garapan/tanah gogol gilir	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
2927	ST090805.00.02			Kepemilikan legal (legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik legal (legal owner-like possession)	Menggambarkan hak lahan yang memberikan keamanan kepemilikan secara hukum.	1. Lahan yang dimiliki pemilik usaha secara sah oleh negara 2. Lahan yang secara sah dimiliki oleh pemilik usaha tetapi dengan menyewa jangka panjang dengan biaya yang sangat kecil atau tidak ada dari negara 3. Lahan milik adat yang diakui sah oleh negara	Luas Lahan	m2; hektar
2928	ST090806.00.01			Kepemilikan	Menggambarkan jenis pengaturan kepemilikan lahan	1. Dimiliki tanpa	Jumlah;	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tak legal (non-legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik tak legal (non-legal owner-like possession)	informal, yang tidak memberikan keamanan kepemilikan lahan, dan jika muncul situasi tertentu pemilik usaha dapat diharuskan meninggalkan lahan.	dokumen resmi 2. Sewa dengan perjanjian tertulis 3. Sewa tanpa perjanjian tertulis 4. Menggarap tanah orang lain 5. Milik negara atau tanah adat yang diperoleh melalui program perhutanan sosial 6. Milik negara atau tanah adat yang diperoleh dengan perjanjian tertulis selain program perhutanan sosial 7. Milik negara atau tanah adat yang digunakan bersama tanpa perjanjian tertulis (hak guna yang tidak jelas) 8. Menempati/mengelola tanpa izin	Persentase	
2929	ST00806.00.02			Kepemilikan tak legal (non-legal ownership) atau	Menggambarkan jenis pengaturan kepemilikan lahan informal, yang tidak memberikan keamanan kepemilikan lahan, dan jika muncul situasi tertentu pemilik usaha dapat diharuskan meninggalkan lahan.	1. Lahan yang dikuasai oleh pemilik usaha tanpa membayar sewa tetapi tanpa kepemilikan yang sah.	Luas Lahan	m2, hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kepunyaan seperti pemilik tak legal (non-legal owner-like possession)		2. Lahan yang menguasai lahan milik negara 3. Lahan dimiliki oleh aturan kepemilikan adat tetapi tidak diakui oleh negara		
2930	SD00905.00.00			Kepuasan	Terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability.	1. Sangat Tidak Memuaskan 2. Tidak Memuaskan 3. Memuaskan 4. Sangat Memuaskan	Persentase	Persen
2931	SP00246.00.00			Kerajinan tradisional	kerajinan/barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan yang diwariskan secara turun-temurun (seperti tikar, anyaman, dan sebagainya). Termasuk jika barang tersebut dibuat dengan peralatan yang masih lebih banyak menggunakan keterampilan tangan (seperti kain tenun dan sebagainya).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Buah; Persen
2932	SD00919.00.00			Kerjasama Koperasi	Kerjasama Koperasi adalah pengembangan kerjasama / kemitraan usaha antar koperasi atau dengan pelaku usaha lain	1. Antar Koperasi 2. Non Koperasi	Jumlah	Koperasi; Lembaga
2933	SD00924.00.00			Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen
2934	SD00930.00.00			Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.	1. Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 3. Kesatuan Pengelolaan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Hutan Produksi (KPHP)		
2935	SD00932.00.00			Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)	KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen
2936	SD00934.00.00			Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen
2937	SD00935.00.00			Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan; Km2; Persen
2938	SD00939.00.00			Kesejahteraan Masyarakat	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2939	SE00266.00.00			Kesulitan Usaha/Perusahaan	Kesulitan/kendala yang dialami oleh usaha/perusahaan seperti; bahan baku, modal, pemasaran, infrastuktur, dll	1.Bahan baku 2. Permodalan 3. Pemasaran/penjualan produk 4. Persaingan 5. BBM, listrik dan gas 6. Infrastuktur 7. Tenaga kerja 8. Cuaca 9. Lainnya	Jumlah	Kendala
2940	SE00267.00.00			Keterangan perusahaan	Perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan yang berada pada tanah dan telah dibebani hak atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	volume dan nilai	m3 dan 000 Rp

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				HPH (IUPHHK-HA)	tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai dengan fungsi konservasi, lindung, dan produksi yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan.	kebutuhan		
2941	SD00945.00.00			Keterbatasan Fisik	Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2942	SD00946.00.00			Keterbatasan Intelektual	Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2943	SD00948.00.00			Keterbatasan Mental	Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. paikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2944	SD00949.00.00			Keterbatasan Sensorik	Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
2945	SD00961.00.00			Keuntungan	Hasil yang bisa diraih dengan tindakan atau aktivitas tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2946	SE00268.00.00			Kewajiban Jangka Panjang	Utang perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun	1. Utang obligasi 2. Utang bank jangka panjang 3. Utang jangka panjang lainnya	Nilai	Rupiah
2947	SP00247.00.00			Kewarganegaraan	Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.	1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing	Jumlah	Kewarganegaraan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(WNA)		
2948	ST00807.00.00			KHDTK Litbang Kehutanan	Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan.	1. Kawasan Wisata Ilmiah 2. Plot Penelitian dan pengembangan	Jumlah	Kawasan; Plot
2949	ST00807.00.00			KHDTK Litbang Kehutanan	KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan.	1. Kawasan Wisata Ilmiah 2. Plot Penelitian dan pengembangan	jumlah	1. kawasan wisata ilmiah 2. Plot
2950	SE00269.00.00			Kios/Toko	Tipe tempat berjualan yang tertutup yang mempunyai dinding pemisah, tingkat keamanan lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dalam kios dapat ditata dengan berbagai macam alat display	Klasifikasi ruang dagang	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
2951	SP00248.00.00			Kitab suci	Wahyu Tuhan yang di bukukan yang memuat ajaran-ajaran tentang seluruh aspek kehidupan bagi seluruh umat beragama, contoh: Al Qur'an, Tripitaka, Weda, Alkitab, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buku/Kitab
2952	SE00270.01.00			Klasifikasi pasar	Tipe Pasar menurut standar SNI (Tipe I, II, III, atau IV)	1. Tipe I 2. Tipe II 3. Tipe III 4. Tipe IV	Tipe	Kategorik
2953	SE00270.02.00			Klasifikasi pasar	Pembagian/pengelompokan jenis pasar	1. Pasar Tradisional/Rakyat 2. Pusat Perbelanjaan 3. Toko Modern/Swalayan	Tipe	Kategorik
2954	SD00962.00.00			Klimatologi	Gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2955	SE00272.00.00			Kode Identitas	kode identitas perusahaan dengan Digit pertama dan	Terdapat sejumlah kode	Jumlah	Kode

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Perusahaan Harga Perdagangan Besar (HPB)	kedua berisi kode provinsi, digit ketiga dan keempat berisi kode kabupaten/ kota, digit kelima sampai ketujuh berisi urutan responden	identitas perusahaan Harga Perdagangan Besar sesuai dengan jumlah responden seluruh Indonesia		
2956	SE00273.00.00			Kode Komoditas ICP	Kode komoditas berdasarkan ICP	Rincian Kode Komoditas ICP: terdapat 148 kode komoditas yang didata di Indonesia pada tahun 2020. Mulai dari 1501111060, 1501111070, 1501111080, ... , 1501121220	Jumlah	Kode
2957	SE00274.00.00			Kode Kualitas Harga Perdagangan Besar (HPB)	10 digit kode kualitas yang diambil dari 5 digit kode KBLI, 2 digit kode urutan komoditas, dan 3 digit urutan kualitas	jumlah kode kualitas sesuai dengan kualitas yang dicacah pada Survei Harga Perdagangan Besar	Jumlah	Kode
2958	SD00963.00.00			Kolaborasi Tematik Quickwins Program	Dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kolaborasi Tematik Quickwins Program
2959	ST00808.00.00			Kolam air deras	Kolam tempat pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang airnya mengalir deras terus menerus ke kolam sehingga terjadi proses penggantian air kolam secara total dalam waktu yang relatif singkat (+/- setiap 10 menit sekali) dan mempunyai pintu air untuk mengatur pemasukan dan pembuangan air, serta pemberian pakan secara intensif. Kolam air deras	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					selalu memakai pintu air monik bukan pintu air tradisional.			
2960	SE00275.00.00			Komoditas	Barang impor sesuai dengan klasifikasi internasional	HS	Berat bersih; Nilai CIF	Kg; USD
2961	SE00277.00.00			Komoditas Bahan Bangunan/Konstruksi	Material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut	Komoditas-komoditas yang tercakup pada VHKK 2020 dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yakni: Komoditas Material Natural dan Produk Lanjutannya; Komoditas Material Pabrikan; Komoditas Sewa Alat Berat dan Upah Jasa Konstruksi	volume, luas, berat, panjang, waktu (durasi sewa dan durasi bekerja)	meter kubik, meter persegi, meter, kilogram, 1 bulan (200 jam), orang hari (OH), per titik
2962	SE00278.00.00			Komoditas utama yang diperdagangkan	komoditas yang paling banyak dijual pada pasar rakyat tersebut	1. Bahan makanan seperti beras, singkong, ubi, telur, susu, sayur-mayur, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu masak, minyak goreng, daging sapi, daging ayam. 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau seperti makanan kemasan (snack), minuman kemasan, rokok. 3. Hewan ternak/hewan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						peliharaan seperti sapi, kambing, ayam, bebek, kucing, burung. 4. Hasil laut dan perikanan seperti ikan laut, ikan darat. 5. Tekstil/ barang dari tekstil seperti kain, pakaian, jilbab. VI. Elektronik & perlengkapan rumah tangga seperti TV, kulkas, mesin cuci, peralatan makan, peralatan masak. VII. Kerajinan dan alat kesenian seperti anyaman bambu,tas rajut, ukir kayu. VIII. Peralatan sekolah dan Alat Tulis Kantor (ATK) seperti buku, alat tulis, buku pelajaran, dll IX. Lainnya seperti bunga, barang bekas, dll		
2963	SE00279.00.00			Komponen tingkat komponen dalam negeri	Mengetahui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari dari barang yang dihasilkan dan jasa	1. Tenaga Kerja 2. Alat Kerja 3. Material	Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2964	ST006810.00.00			Kompos	Campuran dari substrat organik yang membusuk, seperti dari daun dan pupuk kandang, yang digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi. Selain itu juga mengacu pada substrat organik yang mengalami dekomposisi biologis dan distabilisasi dan dikonversi menjadi produk akhir yang stabil, bebas dari patogen dan bibit tanaman, dan dapat menguntungkan jika digunakan pada lahan (Haug, 1993).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kg
2965	SE000280.00.00			Komposisi Permodalan	Komposisi permodalan menunjukkan komposisi atas kepemilikan modal usaha, baik modal lancar maupun modal tetap.	1. Milik sendiri 2. Pinjaman Bank 3. Pinjaman Koperasi 4. Lembaga keuangan bukan Bank 5. Pinjaman Perorangan 6. Pinjaman Program pemerintah 7. Pinjaman Lembaga Swasta	Persentase	Persen
2966	SE000281.00.00			Kondisi dan Prospek Bisnis Konstruksi	Merupakan persepsi pengusaha terhadap kemajuan kondisi usaha saat triwulan survei dengan triwulan sebelumnya dan prospek pengusaha terhadap kemajuan bisnis konstruksi triwulan selanjutnya. 1. Pendapatan Usaha (Nilai Kontrak dan Pendapatan Lainnya) 2. Nilai Pekerjaan/Konstruksi yang Diselesaikan 3. Order Bahan Bangunan/Material (Semen, Pasir, Besi Beton, Besi Baja, dll) dan Komponen Lainnya (AC, Lift, Escalator, dll) oleh Perusahaan Ini. 4. Harga Bahan Bangunan/Material (Semen, Pasir, Besi Beton, Besi Baja, dll) dan Komponen Lainnya (AC, Lift, Escalator, dll)	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun	Persentase	persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					5. Jumlah Pekerja Tetap, Kontrak, dan Outsourching 6. Rata-rata Gaji Pekerja Tetap, Kontrak, dan Outsourcing 7. Jumlah Pekerja Tidak Tetap/Harian 8. Upah Pekerja Tidak Tetap/Harian per Orang per Hari			
2967	SE00282.00.00			Kondisi perusahaan	Aktivitas perusahaan	1. Aktif 2. Tutup Sementara 3. Tidak Ditemukan 4. Belum Berproduksi 5. Tutup 6. Alih Usaha	Jumlah, persentase	Perusahaan
2968	SE00283.00.00			Kondisi, Prospek, dan Permasalahan Perusahaan	Kondisi usaha bertujuan untuk mengetahui peluang perusahaan saat ini. Prospek usaha bertujuan untuk mengetahui pehaang perusahaan dimasa mendatang.	1. jika kondisi dan prospek naik 2. jika kondisi dan prospek tetap 3. jika kondisi dan prospek turun	Jumlah	Kondisi
2969	SD00976.00.00			Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2970	SD00977.00.00			Konservasi Sumber Daya Air	Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2971	ST00812.00.01			Konservasi sumber daya genetik untuk	Berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling terpercaya untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Konservasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pangan dan pertanian (SDGPP)	mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia			
2972	ST008113.00.00			Konservasi tanah	Praktik berkelanjutan untuk mencegah dan mengembalikan degradasi tanah melalui praktik penggunaan dan pengelolaan lahan yang tepat. Didefinisikan sebagai aktivitas untuk memperlambatkan atau meningkatkan kapasitas produksi lahan pada area yang terpengaruh oleh atau rentan degradasi, termasuk pencegahan dan reduksi erosi tanah, pemadatan dan salinitas, konservasi atau drainase air tanah, dan pemeliharaan atau peningkatan kesuburan tanah.	1. Rotasi tanaman 2. Teraseering	Nilai	Konversi
2973	SD006982.00.00			Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2974	SD006984.00.01			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. 16-25 tahun 2. 26-35 tahun 3. 36-45 tahun 4. 46-55 tahun 5. 56-65 tahun 5. >= 65 tahun	Jumlah; presentase	Orang; persen
2975	SD006984.00.02			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; presentase	Orang; persen
2976	SD006984.00.03			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. SLTP/sederajat 2. SLTA/sederajat 3. D1/D2/D3 4. D4/S1	Jumlah; presentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. S2/S3		
2977	SD00984.00.04			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Wiraswasta 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai BUMN/D 4. PNS/TNI/Polri 5. Peneliti/Dosen 6. Pegawai/Mahasiswa 7. Lainnya	Jumlah; presentase	Orang; persen
2978	SD00984.00.05			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam negeri 2. Lembaga pendidikan dan penelitian luar negeri 3. Kementerian dan lembaga pemerintah 4. Lembaga internasional; Media massa 5. Pemerintah daerah; Perbankan 6. BUMN/BUMD 7. Swasta Lainnya 8. Lainnya	Jumlah; presentase	Orang; persen
2979	SD00984.00.06			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Tugas sekolah/tugas kuliah 2. Skripsi/tesis/disertasi 3. Penelitian 4. Perencanaan 5. Evaluasi 6. Penyebaran Informasi	Jumlah; presentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2980	SD.000984.00.07			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Perpustakaan tercetak 2. Perpustakaan digital 3. Penjualan buku 4. Data mikro/peta digital/softcopy/publikasi 5. Konsultasi data statistik 6. Konsultasi kegiatan dan rekomendasi statistik	Jumlah; presentase	Orang; persen
2981	SD.000984.00.08			Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	1. Forum layanan statistik 2. PST/Perpustakaan BPS 3. Surat 4. E-mail 5. Telepon/Fax 6. Website BPS 7. Lainnya	Jumlah; presentase	Orang; persen
2982	SD.000992.00.00			Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma 10. Mal 11. Pantang Berkala/	Jumlah; persentase	Pengguna; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kalender 12. Sanggama terputus 13 Metode Modern lainnya 14. Metode Tradisional lainnya		
2983	SD00992.00.00		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, sanggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma 10. Mal 11. Pantang Berkala/ kalender 12. Sanggama terputus 13 Metode Modern lainnya 14. Metode Tradisional lainnya	Jumlah; persentase	Penggunaa; persen
2984	ST00814.00.00			Konversi lahan	Perubahan mengenai penggunaan lahan (alih fungsi) menurut kenyataan pada periode waktu tertentu.	1. Lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah. 2. Lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian. 3. Lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan sawah. 4. Lahan pertanian	Persentase; Luas	Persen; Km2, Hektar (Ha)

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						bukan sawah menjadi lahan bukan pertanian. 5. Lahan bukan pertanian menjadi lahan bukan sawah. 6. Lahan bukan pertanian menjadi lahan sawah.		
2985	SE00284.00.00			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Nilai konversi pada komoditas kayu bulat dan kayu papan yang digunakan untuk dasar penghitungan konversi satuan setempat ke satuan satuan standar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Konversi
2986	SE00285.00.00			Koperasi	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Koperasi Primer 2. Koperasi Sekunder	Jumlah	Koperasi
2987	SD00999.00.01			Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Korban jiwa (meninggal) yang dicatat merujuk pada seluruh kejadian dalam kurun waktu tersebut, bukan hanya pada tahun puncak kejadian bencana alam.	1. Perlatuan 2. Perdesaan	Jumlah	Orang
2988	SD00999.00.02			Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Korban jiwa (meninggal) yang dicatat merujuk pada seluruh kejadian dalam kurun waktu tersebut, bukan hanya pada tahun puncak kejadian bencana alam.	1. Angin puyuh/putting beliung/topan 2. Banjir 3. Banjir Bandang 4. Gelombang pasang laut 5. Gempa Bumi 6. Gunung meletus 7. Kebakaran hutan dan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lahan 8. Tanah longsor 9. Tsunami		
2989	SD01002.00.00			Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
2990	SD01010.00.02			Korupsi	Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka.	1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi) 4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)	Indeks	Indeks
2991	SD01011.00.00			Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
2992	SD00011.00.00			Kota Baru	Kota yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang atau kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
2993	SD00077.00.00			Kota Hijau	Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kota
2994	SD00129.00.00			Kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan	Kota hijau yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				green waste di kawasan perkotaan metropolitan				
2995	SD003177.00.00			Kota Hijau yang Menyediakan RTH di Kawasan Perkotaan Metropolitan dan Kota Sedang	Kota hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yang menyediakan area khusus sebagai RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
2996	SD002221.00.00			Kota Pusaka	Kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
2997	SD002280.00.00			Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	Kota dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidakberwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh di perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
2998	SD003069.00.00			Kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota sedang dan baru.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2999	SD000310.00.00			Kota Sedang di Luar Jawa yang Diarahkan Sebagai Pengendali (Buffer) Arus Urbanisasi dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Utama	Kota sedang di luar Jawa sebagai pengendali mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
3000	SD000312.00.00			Kota tangguh bencana yang terbentuk	Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
3001	SD000312.00.00			Kota Tangguh Bencana	Kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
3002	SD000324.00.00			Kotoran yang diambil untuk digunakan sebagai bahan bakar	Kotoran hewan yang telah mengering dan dibakar untuk bahan bakar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3003	ST000425.00.00			Kredit untuk tujuan pertanian	Kredit apapun yang disetujui dan tersedia untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan operasional usaha pertanian.	1. Bank komersial 2. Bank pembangunan pertanian 3. Koperasi kredit masyarakat 4. Pemberi pinjaman uang 5. Penyedia input	Jumlah; persentase	Unit; Persen; Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Kelompok bantu (self-help group) 7. Keluarga atau teman 8. Pemerintah 9. Sumber lainnya		
3004	SE0001201.00			Kualifikasi Perusahaan/Usaha	Kualifikasi usaha dibedakan berdasarkan status badan usaha	1. Perusahaan dengan status badan usaha CV, Firma, Koperasi/Dana Pensiun, Yayasan, dan Perwakilan perusahaan/lembaga asing maka kualifikasi usahanya adalah K1, K2, dan K3. 2. Perusahaan dengan status badan usaha PT/PT Persero/Perum maka kualifikasi usahanya adalah M1, M2, B1 dan B2. 3. Perusahaan dengan status badan usaha Seperti semua di poin 1 dan 2 bisa tidak memiliki kualifikasi jadi Non Kualifikasi, apabila masa berlaku sertifikasi badan usahanya telah expired atau belum pernah mendaftarkan sertifikasi badan usaha	Jumlah	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						ke LPJKN		
3005	SE00012.02.00			Kualifikasi Perusahaan/Usaha	Penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.	2. K1 3. K2 4. K3 5. M1 6. M2 7. B1 8. B2 9. NK	Jumlah	Perusahaan
3006	SD00096.00.00			Kualitas Air Danau	Meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3007	SD00104.00.00			Kualitas Air Sungai Sebagai Air Baku	Meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3008	SE00014.00.00			Kualitas Barang	Kualitas/ragam/jenis dari komoditas bahan bangunan/konstruksi. Terdapat 117 kualitas yang dicakup pada pencacahan VHKK2020 yang terbagi pada 3 jenis kuesioner. Pada kuesioner VHKK2020.MNPL terdapat 21 kualitas, kuesioner VHKK2020.MP terdapat 67 kualitas, dan kuesioner VHKK2020.SAU terdapat 29 kualitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Luas; Massa; Panjang; Waktu	meter3; meter2; meter; kilogram; 1 bulan (200 jam), orang hari (OH), per titik
3009	ST00443.00.00			KUB/Perkumpulan Usaha Rumput Laut	kelompok yang dibentuk oleh beberapa anggota masyarakat untuk meningkatkan usaha rumput laut dan kesejahteraan anggotanya. Kedudukan antar-anggota di dalam KUB sama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
3010	SP00041.00.00			Kuliah	Mengikuti kegiatan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, termasuk pendidikan diploma (D1/D2), sarjana muda (D3), sarjana (D4/S1), dan pascasarjana (S2 dan S3).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3011	ST00446.00.00			Kunjungan	Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan	1. Masuk Kawasan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Wisata Alam	tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala, keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam.	2. Camping 3. Tracking/Hiking/Climbing 4. Susur Gua 5. Pengamatan Hidupan Liar 6. Diving/Snorkling 7. Selancar 8. Arung Jeram 9. Memancing 10. Canopy Trail 11. Outbond Training 12. Lain-lain		
3012	SP00045.00.00			Kursus	Penyelenggaraan pendidikan non formal yang mempunyai kurikulum tertentu pada jangka waktu tertentu dan tempat tertentu yang dikelola oleh suatu lembaga atau yayasan. Tidak termasuk kursus kedinasan (penjenjangan), misalnya Diklatpim.	1. Bimbingan belajar 2. Komputer/teknologi informasi 3. Menjahit/tata busana 4. Otomotif/teknik/elektronik 5. Kecantikan/tata rias 6. Musik/tari/seni/budaya 7. Bahasa asing 8. Olah raga 9. Mengemudi 10. Kursus keagamaan 11. Lainnya	Jumlah	Kegiatan
3013	ST00452.00.00			KUSUKA	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian			
3014	ST00455.00.00			Ladang	Bagian apapun dari lahan, dari satu jenis kepemilikan lahan, seluruhnya dikelilingi oleh lahan, perairan, jalan, hutan, atau bentuk-bentuk lain yang tidak membentuk bagian dari usaha pertanian atau membentuk bagian dari usaha pertanian namun dari jenis kepemilikan lahan berbeda	1. Kepemilikan legal (legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik legal (legal owner-like possession) 2. Kepemilikan tak legal (non-legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik tak legal (non-legal owner-like possession) 3. Disewa dari orang lain 4. Jenis kepemilikan lahan lainnya	Luas	m2, hektar
3015	ST00461.00.00			Laguna anaerob	Lubang yang digali di tanah, biasanya berjajar beberapa buah, digunakan untuk penyimpanan pupuk kandang semi cair. Laguna anaerob dirancang untuk penyimpanan dalam berbagai jangka waktu, tergantung pada wilayah iklim, tingkat volatilitas penguapan padatan (solids loading) dan faktor operasi lainnya. Air dari laguna dapat diluar ulang sebagai air siram (flush water) atau digunakan untuk mengairi dan mengalirkan pupuk ke ladang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3016	ST00469.00.00			Lahan bagi hasil (sakap)	Lahan sewa yang dibayar dengan hasil panen/produksi. Besarnya bagian panen yang akan diserahkan kepada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga dari hasil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					panen/produksi. Istilah-istilah yang dipakai dibeberapa daerah antara lain maro, meniga, martilu, toyo, nengah, jejuron, kujang dan mampatigvi.			
3017	ST00473.00.00			Lahan bebas sewa	Lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa, dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diizinkan memakai dengan bebas sewa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3018	ST00475.00.00			Lahan bengkok/pelungguh	Lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3019	ST00478.00.00			Lahan berasal dari pihak lain yang berupa kawasan hutan	Lahan hutan milik negara yang dikuasakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikelola bersama biasanya dikenal dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lahan kehutanan juga bisa berasal dari lahan hutan yang dikelola masyarakat tanpa ijin negara (serobotan).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
3020	ST00481.00.00			Lahan Budidaya Ikan	Tempat yang dimiliki dan atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha atau pemerintah yang khusus untuk kegiatan pembudidayaan ikan baik kan hias, benih ikan atau ikan konsumsi.	1. Tambak 2. Kolam Air Tenang 3. Kolam Air Deras 4. Jaring Apung 5. Minapadi 6. Jaring Tancap 7. Karamba 8. Budidaya Rumput Laut	Luas	Hektar (Ha)
3021	ST00483.00.00			Lahan bukan Pertanian	Semua lahan selain lahan sawah dan lahan bukan sawah	1. Lahan rumah dan pekarangan 2. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitar	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3022	ST00489.00.00			Lahan bukan Pertanian lainnya	Meliputi jalan, saluran air, lapangan olah raga, lahan tandus, berpasir, terjal dan lahan berkapur, termasuk lahan yang digunakan untuk pembuatan genteng, batu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bata dan sebagainya. Lahan tersebut dapat berasal dari lahan sawah dan lahan bukan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 tahun.			
3023	ST00492.00.00			Lahan Bukan Sawah	Semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa dan lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3024	ST00498.00.00			Lahan dengan bangunan pertanian dan pekarangan pertanian	Permukaan lahan yang ditempati oleh bangunan-bangunan operasional pertanian (hanggar, lumbung, gudang, silo), bangunan untuk produksi hewan (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, pekarangan unggas) dan pekarangan pertanian. Area rumah pemilik usaha (termasuk halamannya) juga termasuk dalam klasifikasi ini jika termasuk bagian dari usaha pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3025	ST00502.00.00			Lahan gadai	Lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3026	ST00504.00.00			Lahan Garam	kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut.	1. Peminihan 2. Penampungan Air Tua 3. Meja Garam	Luas	Hektar (Ha)
3027	ST00509.00.00			Lahan garapan	Lahan yang dalam kebanyakan tahun digunakan untuk menumbuhkan tanaman sementara. Mencakup lahan yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman sementara selama periode referensi dua belas bulan, termasuk pula lahan yang normalnya digunakan namun sedang tidak gunakan atau belum disemai karena kejadian tidak terduga.	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3)	Luas; Persentase	Ha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3028	ST005111.00.00			Lahan hibah	Lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3029	ST005115.00.00			Lahan hutan Negara	Lahan yang digunakan untuk tanaman kayu-kayuan (tanaman tahunan) seperti angsana, sengon dan bambu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
3030	ST005116.00.00			Lahan kas desa/keluraha n	Lahan milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa. Lahan ini mungkin dimanfaatkan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3031	ST005117.00.00			Lahan kosong sementara	Lahan garapan yang sedang dalam masa istirahat panjang sebelum ditanami ulang. Ini mungkin merupakan bagian dari sistem rotasi usaha pertanian tersebut atau karena tanaman normal tidak dapat ditanam karena kerusakan akibat banjir, kurangnya air, tidak adanya input produksi, atau alasan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3032	SD002281.00.00			Lahan Kritis	Lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS).	1. Kritis 2. Tidak Kritis	Luas, persentase	Hektar (Ha); Persen
3033	ST005119.00.00			Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara	Termasuk lahan yang sementara (kurang dari lima tahun) digunakan untuk ditanami rerumputan makanan ternak untuk pakan ternak atau padang rumput.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3034	ST005121.00.00			Lahan padang rumput atau padang merumput	Lahan yang digunakan secara permanen (selama lima tahun atau lebih) untuk ditanami rerumputan makanan ternak melalui budidaya ataupun secara alami (sebagai padang rumput atau padang gembala	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ternak (meadows dan pastures) tetap	ternak liar).			
3035	ST00522.00.00			Lahan panen/ tanaman (cropland)	Total lahan garapan dan lahan tanaman tetap	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4)	Luas; Persentase	Ha; Persen
3036	ST00553.00.00			Lahan pembelian	Lahan yang didapat secara pembelian baik tunai maupun angsuran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3037	SD00305.01.00			Lahan Perkebunan	Lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
3038	SD00305.02.00			Lahan Perkebunan	Lahan yang memiliki status legal untuk dibuat perkebunan tanaman secara komersil pada lahan tersebut, berdasarkan pada undang-undang yang dijamin oleh pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
3039	SD00305.03.00			Lahan Perkebunan	Lahan untuk budidaya tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perkebunan besar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3040	SD00306.04.00			Lahan pertanian (agricultural land)	Lahan yang terdiri dari lahan yang diusahakan dan sementara tidak diusahakan (lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (selama 1 sampai 2 tahun) tidak dikelola/diusahakan) untuk pertanian.	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap (LU5)		
3041	SD060306.05.00			Lahan pertanian (agricultural land)	Total lahan panen/tanaman dan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap.	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap (LU5)	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen
3042	SD060523.00.00			Lahan pertanian bukan sawah	Semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah	1. Huma 2. Ladang, tegalan/kebun 3. Kolam/tebat/empang	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimaksukkan dalam lahan pertanian bukan sawah.	4. Tambak Air Payau 5. Lahan perkebunan 6. Lahan hutan Negara 7. Lahan untuk penggembalaan/padang rumput		
3043	ST00524.00.00			Lahan pertanian bukan sawah lainnya	Lahan yang digunakan untuk kandang, tanaman hias dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen
3044	ST00525.00.00			Lahan rumah dan pekarangan	Lahan untuk bangunan rumah serta halaman, biasanya diberi pagar atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Jika lahan di sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, maka dimasukkan ke dalam lahan tegal/kebun. Bagi rumah tangga yang tinggal pada bangunan bertingkat (misalnya pada lantai 3), maka luas bangunan tempat tinggal tersebut sama dengan luas lantai yang ditempatinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar; M2; Persen
3045	ST00526.00.01			Lahan sawah	Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan) dan/atau saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), lahan Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, termasuk di sini adalah lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.	1. Lahan sawah tadah hujan 2. Lahan sawah pasang surut 3. Lahan sawah lebak;	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3046	ST00526.00.01			Lahan sawah	Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan) dan/atau saluran untuk	1. Lahan sawah irigasi 2. Lahan sawah non	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), lurun Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, termasuk di sini adalah lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.	irigasi		
3047	ST00527.00.00			Lahan sawah irigasi (berpengairan)	Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.	1. Sawah irigasi teknis 2. Sawah irigasi setengah (semi) teknis 3. Sawah irigasi sederhana	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3048	ST00528.00.00			Lahan sawah irigasi desa/non PU	Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3049	ST00529.00.00			Lahan Sawah Irigasi Sederhana	Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya (bendungan) dibangun oleh PU.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3050	ST00530.00.00			Lahan sawah irigasi setengah teknis	Lahan sawah yang memperoleh irigasi dari irigasi setengah teknis. Sama halnya dengan pengairan teknis, namun dalam hal ini PU hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai oleh PU.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3051	ST00531.00.00			Lahan sawah irigasi teknis	Lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air ke dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Biasanya lahan sawah irigasi teknis mempunyai jaringan irigasi yang terdiri dari saluran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh PU. Ciri-ciri irigasi teknis: air dapat diatur dan diukur sampai dengan saluran tersier serta bangunannya permanen.			
3052	ST00532.00.00			Lahan Sawah Lebak	Lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak (bukan pasang surut).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3053	ST00533.00.00			Lahan sawah non irigasi (tak berpengairan)	Lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam, seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3054	ST00534.00.00			Lahan sawah pasang surut	Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3055	ST00535.00.00			Lahan sawah rawa lebak	Lahan sawah yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama tiga bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 cm.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3056	ST00536.00.00			Lahan sawah rawa pasang surut	Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, termasuk juga disini polder, yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3057	ST00537.01.00			Lahan sawah tadah hujan	Lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3058	ST00537.02.00			Lahan sawah tadah hujan	Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3059	ST00538.00.00			Lahan sementara tidak diusahakan	Lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (selama 1 sampai 2 tahun) tidak dikelola/diusahakan. Sedangkan lahan yang tidak diusahakan/dikelola selama lebih dari 2 tahun tidak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					termasuk lahan pertanian (lahan tidur).			
3060	ST005349.00.00			Lahan sewa	Lahan yang berasal dari pihak lain dengan membayar sewa yang besarnya sewa sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar/ kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa menyewa pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi maupun resiko dari penggarapan lahannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3061	ST005540.00.00			Lahan tanaman dibawah tutup pelindung/ protective cover	Lahan dibawah bangunan tetap dengan atap kaca, plastik atau material lainnya, digunakan untuk melindungi tanaman dari cuaca, hama, atau penyakit	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas Lahan	m2, hektar
3062	ST005541.00.00			Lahan tanaman semenatara	Termasuk didalamnya semua lahan yang digunakan untuk tanaman-tanaman yang siklus pertumbuhannya kurang dari satu tahun, tanaman tersebut harus ditabur lagi bibitnya atau ditanam lagi untuk produksi selanjutnya setelah panen selesai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3063	ST005542.00.00			Lahan tanaman tetap	Lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang tidak perlu di tanam ulang selama beberapa tahun; lahan dengan pepohonan dan belukar berbunga, misalnya mawar dan melati; dan kebun pembibitan (kecuali pohonpohon hutan, maka harus diklasifikasikan sebagai "hutan dan lahan berkayu lainnya"). Lahan tanaman tetap termasuk pula lahan yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman tetap dengan penutup pelindung. Lahan padang rumput atau padang makan ternak tetap tidak dikategorikan sebagai lahan tanaman tetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3064	ST005468.00.00			Lahan tidur	Lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian tetapi sudah tidak dimanfaatkan lebih dari dua tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3065	ST00543.00.00			Lahan untuk bangunan dan halaman sekitar	Lahan untuk bangunan rumah serta halaman, biasanya diberi pagar atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Jika lahan disekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, maka dianaskkan kedalam lahan tegal/kebun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3066	ST00544.00.00			Lahan untuk penggembalaan/padang rumput	Lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (diistirkan kosong lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3067	ST00545.00.00			Lahan warisan	Lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian harta orang yang telah meninggal dunia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3068	ST00546.00.00			Lahan yang berada di pihak lain	Meliputi lahan yang disewakan, lahan yang dibagi hasilkan, lahan yang digadaikan, lahan yang diserahkan kepada pihak lain dengan bebas sewa, lahan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3069	ST00547.00.00			Lahan yang berasal dari pihak lain	Lahan yang diperoleh secara bagi hasil, sewa, gadai, bengkok, bebas sewa, serobotan dan lahan garapan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar, M2; Persen
3070	ST00548.00.00			Lahan yang berasal dari pihak lain lainnya	Lahan yang didapatkan dari lainnya, seperti serobotan, lahan garapan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	luas	hektar, m2
3071	ST00549.00.00			Lahan yang digunakan untuk pertanian	Total "lahan pertanian" dan "lahan dengan bangunan pertanian dan pekarangan pertanian).	1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara.	Luas; Persentase	Ha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap (LU5) 6. Lahan bangunan pertanian dan pekarangan pertanian (LU6)		
3072	ST00550.00.00			Lahan yang dikuasai	Lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut dapat berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah (lahan pertanian) dan lahan bukan pertanian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	luas	hektar, m2
3073	ST00551.00.00			Lahan yang dimiliki	Lahan yang dimiliki biasanya berdasarkan pada landreform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat ataupun penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	luas	hektar, m2
3074	ST00552.00.00			Lahan yang diusahakan	Lahan yang dikuasai dan dikelola untuk usaha pertanian, termasuk lahan yang sementara tidak diusahakan karena menunggu musim selama kurang dari 1 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	hektar, m2
3075	SE00001.00.00			Lain-lain (PAD yang sah)	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ribu Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lain-lain.			
3076	SE00002.00.00			Lain-lain (pendapatan yang Sah)	pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ribu Rupiah
3077	SP00002.00.01			Lalu lintas dari ke desa/ke luraha n	Lalu lintas dari ke desa/kelurahan diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/ kelurahan lain	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
3078	SP00002.00.02			Lalu lintas dari ke desa/ke luraha n	Lalu lintas dari ke desa/kelurahan diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/ kelurahan lain	Jenis Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan: 1. Darat 2. Air 3. Darat dan Air 4. Udara	Jumlah	desa/kel
3079	SP00003.00.00			Lama perjalanan dari tempat kegiatan ke tempat tinggal	Durasi perjalanan (dalam menit) responden dari tempat kegiatan ke tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	menit
3080	SP00004.00.00			Lama perjalanan dari tempat tinggal ke tempat	Durasi perjalanan (dalam menit) responden dari tempat tinggal ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	menit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kegiatan				
3081	SP00005.00.00			Lama tinggal	Lama tinggal di alamat sekarang batasannya adalah SLS. Jika ada penduduk yang pindah rumah tetapi masih dalam satu SLS, maka lama tinggal dihitung selama dia tinggal di SLS tersebut meskipun tinggal di bangunan yang berbeda.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Bulan, Tahun
3082	ST00405.00.00			Lama Waktu Penjemuran	rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	hari
3083	SP00006.01.00			Lansia (Penduduk Lanjut Usia)	Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.	1. Lansia Muda (60-69 tahun) 2. Lansia Madya (70-79 tahun) 3. Lansia Tua (80+)	Jumlah; persentase	Orang; persen
3084	SP00006.02.00			Lansia (Penduduk Lanjut Usia)	seseorang berusia 60 tahun tahun ke atas	1. Laki-Laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3085	SP00007.00.00			Lantai	Bagian bawah atau dasar dari suatu ruangan di suatu rumah.	1. Keramik/marmer/granit 2. Ubin/tegel/teraso 3. Semen 4. Kayu/papan 5. Bambu 6. Tanah dan lainnya	Luas	m2
3086	SP00008.00.00			Lantai Granit	Suatu lantai yang terbuat dari batuan keras keputih-putihan yang dapat bertahan lebih lama dari keramik atau marmer.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
3087	SP00009.00.00			Lantai Keramik	Suatu lantai yang terbuat dari Tanah liat yang dibakar dan dicampur dengan mineral lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
3088	SP00010.00.00			Lantai Marmer	Suatu lantai yang terbuat dari batu gamping yang telah	Klasifikasi berdasarkan	Luas	m2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				atau Batu Pualam	mengalami metamorfosis dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb.	analisis atau sesuai kebutuhan		
3089	SE0000300.00			Lapangan usaha dari kegiatan utama	Lapangan usaha sesuai dengan kegiatan utama usaha/perusahaan. Apabila usaha/perusahaan mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan: 1. Kegiatan dengan nilai produksi/pendapatan terbesar; 2. Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, kegiatan utama ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar; 3. Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama, kegiatan utama ditentukan dari waktu terbanyak yang digunakan; 4. Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, kegiatan utama ditentukan dari pernyataan responden.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Jumlah	Lapigan Usaha
3090	ST0004600.00			Layanan dokter hewan	Seluruh layanan dokter hewan profesional yang digunakan untuk melindungi kesehatan hewan ternak yang dipelihara oleh usaha pertanian. Jenis layanan yang diterima mencakup pelayanan penyembuhan penyakit, prosedur bedah, inseminasi buatan, pembiakan (breeding), vaksinasi, pengobatan cacing, perawatan untuk parasit eksternal, saran medis umum, dan lain-lain. Termasuk pula layanan yang disediakan oleh organisasi pemerintah, seperti oleh tenaga medis di bidang kesehatan hewan, dan yang disediakan oleh organisasi swasta.	1. Data usaha pertanian secara keseluruhan 2. Data untuk masing-masing jenis hewan ternak utama	Jumlah	Layanan
3091	SD0003500.00			Layanan Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu ataupun di MCK	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Komunal. Khusus untuk daerah perdesaan, termasuk juga yang tempat pembuangan akhir tinjanya berupa lubang tanah.			
3092	SD00036.00.00			Legislasi	Pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahanyang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
3093	SD00042.00.00			Lembaga Keuangan	Semua badan yang melalui kegiatan- kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.	1. Perbankan konvensional 2. Perbankan Syariah 3. Pembiayaan dan Modal Ventura 4. Penunjang Pasar Modal 5. Perasuransian 6. Dana Pensiun 7. Pegadaian 8. Pedagang Valas 9. Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
3094	SD00044.01.00			Lembaga Pembiayaan	Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
3095	SD00044.02.00			Lembaga Pembiayaan	Suatu badan usaha di luar bank yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, ataupun surat sanggup bayar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
3096	SD00045.00.00			Lembaga Pembiayaan Infrastruktur	Badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Usaha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3097	SD00053.00.00			limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
3098	SD00055.00.00			Limbah Berbahaya	Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
3099	SP00011.00.00			Lingkungan sekitar	satuan wilayah yang dimulai dari tingkat terkecil (RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb) sampai dengan tingkat kabupaten/kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	wilayah	wilayah
3100	SP00012.00.00			Lingkungan sekitar rumah/tempat tinggal	Lingkungan pada tingkat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil yang berada di bawah desa/kelurahan, misalnya RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Wilayah	lingkungan setempat
3101	SE00004.00.00			Lokasi proyek	Lokasi dimana proyek dikerjakan untuk masing-masing proyek	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	lokasi
3102	SE00005.00.00			Lokasi Usaha	Tempat kegiatan proses produksi berlangsung di wilayah NKRI	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	lokasi
3103	ST00407.00.00			Lokasi utama	lokasi yang digunakan untuk melakukan usaha	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	lokasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				usaha budidaya	budidaya rumput laut yang diakui responden sebagai yang utama	analisis atau sesuai kebutuhan		
3104	SP000113.00.00			Lokasi wilayah desa/keluraha n terhadap kawasan hutan	Di dalam kawasan hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan. Di tepi/sekitar kawasan hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan. Di luar kawasan hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Lokasi
3105	SE000096.00.00			Los	tipe tempat berjualan yang bersifat tetap dan terbuka, dibatasi dengan barang- barang yang sukar bergerak misalnya meja dan sebagainya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
3106	ST000408.00.00			Luas areal	Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
3107	SD000065.00.00			Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
3108	ST000409.00.00			Luas Lahan budidaya	Luas lahan yang digunakan perusahaan untuk budidaya Ikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
3109	SD000068.00.00			Luas lahan kritis dalam KPH yang	Jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mendukung daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				direhabilitasi				
3110	ST00410.00.00			Luas lahan panen	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
3111	ST00411.00.00			Luas Lahan Usaha Hortikultura	seluruh luas lahan yang digunakan untuk budidaya hortikultura, baik yang ditanam secara tunggal maupun tumpang sari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
3112	SE00007.00.00			Luas lahan yang dikuasai Perum perhutani dan Perusahaan lainnya	Luas lahan yang dikuasai perusahaan Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	1. Perum Perhutani 2. Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya	Luas	Ha
3113	ST00412.00.00			Luas Panen	Luas tanaman yang dipungut hasilnya (hasil utama) setelah tanaman tersebut cukup umur. Tanaman yang diperhitungkan luasnya hanya terbatas pada tanaman yang jarak tanamnya maksimum 3 kali jarak tanam normal. Cara menghitung luas panen tanaman campuran/tumpangsari tidak akan diperkirakan berapa bagian yang ditanami tanaman masing-masing, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman tersebut normal atau tidak, asal tidak terlalu lebar. Bila terlalu lebar (jarak melintang membujur lebih dari 3 kali dari jarak tanam normal) tanaman tersebut dianggap tidak ada dan luasnya tidak perlu dilaporkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha), m2
3114	ST00413.00.00			Luas panen belum habis	Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar, M2
3115	ST00414.00.00			Luas Panen budidaya	Total luas tambak yang dipanen dalam setahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Luas	Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan		
3116	ST00415.00.00			Luas panen habis	Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim. Tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan di bongkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar, M2
3117	ST00416.00.00			Luas Panen Habis/ Dibongkar	Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar, M2
3118	ST00417.00.00			Luas panen tanaman perkebunan semusim	Luas panen tanaman semusim yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
3119	ST00418.00.00			Luas Panen Tanaman Semusim	Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 15 % dari keadaan normal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
3120	SD00070.00.00			Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
3121	ST00419.01.00			Luas Penguasaan Lahan	Lahan yang dikuasai perusahaan baik yang dimiliki sendiri atau disewa maupun yang berasal dari pihak lain. Tidak termasuk Kantor, dsb.	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Luas	Ha; m2
3122	ST00419.02.00			Luas	Bagian lahan yang dikuasai yang sedang digunakan	1. Tanaman Pangan	Luas	Ha; m2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pengusahaan Lahan	untuk proses budidaya.	2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan		
3123	ST00420.00.00			Luas Puso/Rusak	Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3124	ST00421.00.00			Luas rusak/tidak berhasil (Puso)	luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim. Tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang mengalami kerusakan karena serangan OPT, bencana alam, sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% keadaan normal. Termasuk tanaman yang sengaja dirusak sebelum waktu panen (karena serangan OPT, untuk pakan ternak, dsb)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha; m2
3125	ST00422.00.00			Luas tanah (rumah) atau luas unit (apartemen)	Luas tanah pada masing-masing tipe rumah yang dibangun oleh responden. Luas setiap unit apartemen pada masing-masing tipe apartemen (termasuk balkon)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
3126	ST00423.00.00			Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik pertanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk menggantí tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3127	ST00424.00.00			Luas Tanam Baru	Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan/triwulan laporan. Baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha; m2

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dicabut/dimusnahkan karena serangan OPT atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan/triwulan tersebut tanaman yang baru ditanam dibongkar kembali			
3128	ST00426.00.00			Luas tanam tanaman perkebunan semusim	Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
3129	ST00427.00.00			Luas tanaman yang dipanen berhasil (luas panen)	Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur, dan hasilnya paling sedikit 11% yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit tidak termasuk sebagai memungut hasil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha; m2
3130	ST00428.00.00			Luas tanaman yang dipanen muda	Luas tanaman yang dipungut hasilnya sebelum waktunya (belum cukup tua). Tanaman yang dipanen muda hanya tanaman jagung dan kedelai. Keterangan: Tanaman jagung yang dipungut hasilnya waktu masih muda (belum dapat dipipil) yang digunakan untuk sayuran atau diambil kulit buahnya untuk rokok (klobot) dan sebagainya, walaupun memberikan hasil tetap dimasukkan ke dalam tanaman yang dipanen muda, jadi tidak termasuk ke dalam yang dipanen berhasil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha; m2
3131	SD00071.00.00			Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi	Luas usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi dan keterwakilan ekosistem serta berupaya mengembalikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ekosistem	keseimbangan hayati dan ekosistemnya.			
3132	ST00429.00.01			Luhusan Karya Siswa	Karya siswa adalah PNS KLHK yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tugas belajar. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PNS KLHK sebagai karyasiswa untuk melanjutkan pendidikan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II atau yang setara dan Strata III atau yang setara, di dalam maupun di luar negeri.	1. S2 2. S3	Jumlah	Orang
3133	ST00429.00.02			Luhusan Karya Siswa	Karya siswa adalah PNS KLHK yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tugas belajar. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PNS KLHK sebagai karyasiswa untuk melanjutkan pendidikan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II atau yang setara dan Strata III atau yang setara, di dalam maupun di luar negeri.	1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri	Jumlah	Orang
3134	SD00073.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	1. MA Negeri 2. MA Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3135	SD00075.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.	1. MI Negeri 2. MI Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3136	SD00076.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,	1. MTs Negeri 2. MTs Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.			
3137	ST00430.00.00			Majalah Ilmiah	Terbitan berkala mengenai ilmu pengetahuan dan isinya khususnya tentang bidang ilmu.	1. Jurnal 2. Bulletin 3. Info Teknis	Akreditasi	peringkat
3138	ST00431.00.00			Majikan (employer)	Orang yang, bekerja pada usaha miliknya sendiri atau usaha milik bersama dengan satu atau beberapa rekan, memiliki pekerjaan mandiri dan dalam kapasitas ini secara terus menerus (termasuk periode referensi) memiliki satu atau lebih orang bekerja untuknya sebagai sebagai karyawan/pekerja.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3139	ST00432.00.00			Manajer yang dipekerjakan oleh perusahaan	Orang yang mengelola usaha pertanian sebagai perwakilan pemiliki usaha pertanian dan bertanggung jawab terhadap keuangan normal harian dan rutinitas produksi usaha pertanian. Manajer ini merupakan pekerja yang dibayar.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah Usia	Orang Tahun
3140	SE00008.00.00			Margin perdagangan	keuntungan yang diambil pedagang berupa selisih nilai jual dikurangi nilai beli dibagi nilai beli. Margin yang diambil adalah margin rata-rata keseluruhan barang yang dijual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	persen
3141	SE00009.00.00			Marketplace	Platform jualan online popular yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai usaha.	1. Tokopedia 2.Lazada 3. Shopee 4. Blibli 5. Facebook 6. Lainnya	Jumlah, Presentase	Marketplace, persen.
3142	SD00083.00.00			Masalah psikososial	Masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kejadian
3143	SP00014.00.00			Masih bersekolah/ber	Jika ART berumur 5 tahun ke atas terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sekolah	pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama, Instansi Pemerintah lain maupun Instansi Swasta	kebutuhan		
3144	SD00085.00.00			Masyarakat	Seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata	Orang
3145	SP00015.00.00			Mata air	Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya tanpa ditarik menggunakan alat atau pompa, termasuk mata air terlindung maupun tidak terlindung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3146	SD00087.00.00			Mata Air/ Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3147	SP00016.00.00			Media cetak	Media yang melakukan proses penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi cetak, dan dalam bentuk cetak. Berita/artikel yang di-print termasuk media cetak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	buah
3148	SP00017.00.00			Media elektronik/digital	Media dalam bentuk digital yang mana memerlukan media/alat elektronik (PC, Laptop, Handphone, Tablet, dll) untuk dapat mengakses/membaca artikel/berita tersebut. Kegiatan membaca artikel/berita tersebut dapat dilakukan secara online di internet maupun offline dalam bentuk softcopy.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	File, dokumen, Aplikasi, Situs/web
3149	SE00010.00.00			Media Penjualan Digital	Media online yang di gunakan oleh usaha/perusahaan dalam memasarkan produknya sebagai usaha e-commerce.	1.Website 2.Platform Digital	Jumlah	Media Digital
3150	SE00011.00.00			Media Sosial	Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. (KKBI)	1. Facebook 2. Instagram 3. Twitter 4. Lainnya	Jumlah	Media Sosial

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3151	SD00089.00.00			Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun
3152	SP00018.00.00			Membaca buku	Apabila seseorang selama seminggu terakhir melakukan aktivitas membaca. Jenis bacaan meliputi koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan bacaan lainnya, baik dalam media cetak maupun elektronik.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3153	SP00019.00.00			Membaca Kitab Suci	Khusus untuk kitab suci dianggap membaca apabila minimal membaca 1 ayat. Kitab suci yang dimaksud berupa satu kesatuan utuh. Termasuk kitab suci yang dibagi menurut juz. Tidak termasuk yang tergabung dengan doa-doa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kegiatan
3154	SP00020.00.00			Memberikan saran/pendapat	Memberikan saran/pendapat yaitu menyampaikan sudut pandang/gagasan/ide mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam pertemuan/rapat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3155	SD00091.00.00			Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	1. Membeli, 2. Tidak membeli	Jumlah; persentase	Rumah tangga; persen
3156	SD00091.00.00		Persentase rumah tangga yang	Memiliki Akses Terhadap	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum,	1. Membeli, 2. Tidak membeli	Jumlah; persentase	Rumah tangga;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Layanan Sumber Air Minum	hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.			persen
3157	SDG00092.00.00			Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3158	SDG00094.00.00			Menanti	Suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3159	SP000021.00.00			Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari	Interaksi seseorang dengan orang lain yang dilakukan di luar rumah, yaitu di kantor, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung (lewat telpon, SMS, chatting, video call, dsb) menggunakan bahasa daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3160	SP000022.00.00			Menggunakan bahasa daerah di rumah	Interaksi seseorang dengan keluarga atau famili pada saat berada di rumah, baik secara langsung maupun tidak langsung (lewat telpon, SMS, chatting, video call, dsb) menggunakan bahasa daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3161	SP000023.00.00			Menggunakan hak memilih	mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan surat suara pada saat hari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Kali; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pemungutan suara untuk memilih pemimpin (bupati, gubernur dan presiden) atau anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan/legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).	kebutuhan		
3162	SP00024.00.00			Menggunakan produk tradisional	Rumah tangga yang dalam 3 bulan terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menggunakan setidaknya satu produk tradisional sebagai berikut: kerajinan tradisional, busana daerah/tradisional, metode penyehatan tradisional, atau obat tradisional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3163	SP00025.00.00			Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan adalah partisipasi/keikutsertaan (terlibat aktif) seseorang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggal yang masih dalam lingkup RT/RW/dusun/desa, dimana dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi secara langsung antar anggota masyarakat. Jenis kegiatan sosial kemasyarakatan diantaranya keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, dan kegiatan sosial lainnya.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3164	SP00026.00.00			Mengunjungi museum/situs peninggalan sejarah	Seseorang yang datang/ berkunjung ke situs peninggalan sejarah/warisan budaya dalam rangka penelitian, pendidikan, atau rekreasi.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah	Orang
3165	SP00027.00.00			Mengunjungi perpustakaan	Apabila seseorang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan untuk meminjam, mengembalikan, maupun memperoleh informasi atau mencari literatur/bahan pustaka dari koleksi (buku dan bahan terbitan lainnya) yang dimiliki oleh perpustakaan	1. Pernah 2. Tidak pernah	Jumlah, Persentase	Orang, persen
3166	SP00028.00.00			Mengurus Rumah Tangga	Kegiatan mengelola kebutuhan keluarga dan urusan rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji, termasuk anggota keluarga yang membantu mengurus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					rumah tangga			
3167	SP000029.00.00			Menonton/Menikmati Pertunjukan/Pameran Seni	Apabila seseorang meluangkan waktu (baik berniat maupun tidak) untuk menonton pertunjukan/pameran seni, baik dengan membayar ataupun tidak, baik di tempat khusus pertunjukan ataupun tidak, seperti menonton pertunjukan seni di pusat perbelanjaan atau di tempat resepsi pernikahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3168	SP000030.00.00			Menonton/Menikmati Pertunjukan/Pameran Seni secara langsung	Seseorang yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3169	SP000031.00.00			Menyelenggarakan upacara adat	Jika responden menyelenggarakan/mengadakan suatu upacara/acara (perkawinan, kematian, dll) yang di dalamnya terdapat unsur adat baik sebagian maupun keseluruhan dari prosesi upacara adat dan dihadiri setidaknya oleh tetangga sekitarnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
3170	ST000433.00.00			Menyewa lahan dari orang lain	Lahan yang disewa oleh pemilik usaha dari orang lain, biasanya untuk jangka waktu terbatas.	1. Untuk sejumlah uang dan/atau hasil pertanian yang disetujui 2. Pembagian hasil produksi pertanian 3. Ditukar dengan jasa 4. Perjanjian sewa lainnya	Luas	Hektar
3171	SE000113.01.00			Merek	Merek dari komoditas/kualitas yang menjadi amatan survei harga kemahalan konstruksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Merek
3172	SE000113.02.01			Merek	Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)	1. Mempunyai merek 2. Tidak Mempunyai merek	Jumlah	Merek

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.			
3173	SE00013.02.02			Merek	Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.	1. Terdaftar 2. Tidak Terdaftar	Jumlah	Merek
3174	SP00032.00.00			Mertua	Orang tua dari suami atau istri kepala keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3175	ST00434.00.00			Metode Patok/Lepas Dasar	Metode ini dilakukan dengan mengikatkan benih rumput laut (yang diikat dengan tali rafia) pada rentangan tali nilon atau jaring di atas dasar perairan dengan menggunakan pancang-pancang kayu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Metode; Persen
3176	SP00033.00.00			Metode penyehatan tradisional	cara meningkatkan kesehatan yang diwariskan secara turun-temurun, baik untuk mengobati penyakit atau meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya kerok badan, gurah, ruwat, bekam, akupunktur, dsb	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Metode; Persen
3177	ST00435.00.00			Metode Rakit Bambu Apung	Metode rakit apung merupakan budidaya rumput laut dengan cara mengikat rumput laut pada tali ris (seperti pada metode lepas dasar) yang diikatkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Metode; Persen
3178	ST00436.00.00			Metode Tali rentang/Longline	Metode budidaya ini menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Teknik budidaya rumput laut dengan metode ini adalah menggunakan tali sepanjang 50 – 100 meter yang pada kedua ujungnya diberi jangkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Metode; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan pelampung besar, setiap 25 meter diberi pelampung utama yang terbuat dari drum plastik atau styrofoam.			
3179	SD00111.00.00			Metropolitan Baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
3180	SD00112.02.00			Migran	Penduduk yang tempat tinggalnya pada saat pencacahan berbeda wilayah administratif dengan tempat tinggal sebelumnya.	1. Migran 2. Non Migran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3181	SP00034.00.00			Migran risen	Penduduk yang tempat tinggalnya pada saat pencacahan berbeda wilayah administratif dengan tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu.	1. Migran Risen 2. Nonmigran Risen	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3182	SP00035.00.00			Migran seumur hidup	Penduduk yang tempat tinggalnya pada saat pencacahan berbeda wilayah administratif dengan tempat lahirnya.	1. Migran Seumur Hidup 2. Nonmigran Seumur Hidup	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3183	SP00036.00.00			Migran total	Penduduk yang tempat tinggalnya pada saat pencacahan berbeda wilayah administratif dengan tempat tinggal sebelumnya.	1. Migran Total 2. Nonmigran Total	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3184	SP00037.00.00			Milenial	Penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia saat ini 24-39 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3185	SP00038.00.00			Minimarket/swalayan	Sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m2. Yang dicatat pada Podes adalah minimarket yang masih aktif.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3186	SD00115.00.01			Miskin	Seseorang dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai	1. Miskin 2. Tidak Miskin	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					miskin.			
3187	SD00115.00.02			Miskin	Seseorang dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3188	SD00116.00.00			Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3189	SD00117.00.01		Mitigasi Bencana Alam		Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, meliputi sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3190	SD00117.00.02		Mitigasi Bencana Alam	Mitigasi Bencana Alam	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, meliputi sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi	1. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll 2. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker) 3. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana 4. Sistem peringatan dini bencana alam	Jumlah	desa/kel

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Sistem peringatan dini khusus tsunami		
3191	ST00437.00.00			Mitra konservasi	Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Mitra
3192	SP00039.00.00			Moda transportasi	moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan orang yang menggunakan jenis sarana tertentu, seperti pesawat terbang, kendaraan, kapal atau perangkat lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Moda; Persen
3193	SE00015.00.00			Modal Luar/Pinjaman	Modal yang berasal dari pihak luar dalam bentuk pinjaman.	1.Pinjaman jangka pendek 2.Pinjaman jangka panjang	Nilai	Rupiah
3194	SE00016.00.00			Modal Sendiri/Ekuitas	Modal yang di dapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.	1.Modal disetor 2.Modal cadangan 3.Saham	Nilai	Rupiah
3195	SE00017.00.00			Modal Usaha	Modal/aset merupakan alat penyimpan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakan itu dalam periode tertentu.	1. Milik Sendiri 2. Penyertaan modal/patungan (modal ventura) 3. Pinjaman Bank 4. Pinjaman Koperasi 5. Pinjaman Pegadaian 6. Pinjaman Perorangan 7. Pinjaman Program Pemerintah 8. Pinjaman Lembaga Swasta	Jumlah	Rupiah
3196	SE00018.00.00			Modal Usaha Saat Pendirian	seluruh uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada awal beroperasi baik	1. Modal Milik Sendiri 2. Modal Penyertaan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					berasal dari milik sendiri atau pinjaman pihak luar.	modal 3. Modal Patungan (modal ventura) 4. Modal dari Koperasi 5. Modal dari Bank 6. Modal dari Pegadaian 7. Modal dari Perorangan 8. Modal dari Program Pemerintah 9. Modal dari LSM 10. Modal dari Internasional 11. Modal dari Lembaga lainnya		
3197	ST00438.00.00			Musim gulma	musim banyaknya tumbuhan liar penganggu pada rumput laut (lumut)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3198	ST00439.00.00			Musim ice-ice	musim penyakit yang menjangkiti rumput laut sebagai akibat dari beberapa interaksi faktor alam sehingga kekurangan nutrisi untuk fotosintesa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3199	ST00440.00.00			Musim normal	Musim di mana hasil tangkapan/hasil produksi dalam keadaan rata-rata, banyaknya ikan di laut dalam keadaan sedang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3200	ST00441.00.00			Musim paceklik	Musim di mana hasil tangkapan/hasil produksi minimal, di laut tidak banyak ikan atau ada gangguan alam (cuaca, gelombang).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3201	ST00442.00.00			Musim/iklim	faktor alam yang meliputi kondisi atmosfer yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3202	SE00619.00.00			Mutasi/Dinamika ternak	Pergerakan keluar masuk ternak dalam suatu usaha meliputi stok awal, pembelian, kelahiran, penambahan	1. sapi 2. kerbau	Jumlah, Nilai	Ekor, Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lain, penjualan, pemotongan, kematian, pengurangan lain, dan stok akhir selama setahun	3. kuda 4. kambing 5. domba 6. babi 7. unggas		
3203	SP00040.00.00			Nagari	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Nagari
3204	SE00020.00.00			Nama Komoditas Harga Perdagangan Besar (HPB)	Nama komoditas yang diambil dari deskripsi KBLI/KBKI yang bersesuaian.	Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia	Jumlah	Kode,Komoditas
3205	SE00021.00.00			Nama Komoditas Mesin dan Perlengkapan	Komoditas/barang mesin dalam katalog ICP yang dapat ditemui di Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Komoditas Mesin
3206	SE00022.00.00			Nama Negara Tujuan	Negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.	Klasifikasi Nama Negara Tujuan	Jumlah; Persentase	Negara; Persen
3207	SE00023.00.00			Nama Perusahaan/ Usaha	Identitas perusahaan atau sebutan yang melekat pada suatu usaha	1. Nama Komersial Khusus 2. Tanpa Nama Komersial Khusus (Menggunakan Nama Pengusaha)	Jumlah	Usaha
3208	SE00024.00.00			Negara Asal	Negara asal barang impor (negara produsen)	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Negara

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						analisis atau sesuai kebutuhan		
3209	SD00124.00.00			Negara Berkembang	Sebuah negara dengan sedikit kegiatan industri dan ekonomi dan di mana orang umumnya berpenghasilan rendah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
3210	SD00134.02.00			Nelayan	Orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3211	SD00134.01.00			Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan atau orang yang melakukan usaha penangkapan ikan	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
3212	ST00444.00.00			Nematisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan cacing (nematode). Contoh jenis nematisida: Basamid G, Vydate 100 AS, Vydate 10 G, Sheillede	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	berat	gram, kg
3213	ST00445.00.00			Nener	Benih ikan bandeng ukuran sekitar 1-2 cm untuk dibudidayakan di tambak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Produksi	Ribu ekor
3214	SE00025.00.00			Neraca Perdagangan Antar Wilayah	Selisih nilai (surplus/defisit) dari total nilai penjualan antar wilayah dikurangi total nilai pembelian antar wilayah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3215	SE00026.00.00			Neraca Usaha/Perusahaan	Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang menunjukkan posisi harta, kewajiban dan modal perusahaan pada periode akuntansi (akhir tahun).	1. Persediaan 2. Uang Tunai 3. Piutang Usaha / Pinjaman yang diberikan 4. Simpanan 5. Surat Berharga 6. Tanah 7. Bangunan / Gedung Usaha	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						8. Bangunan / Tempat Tinggal 9. Mesin dan Perlengkapan 10. Alat Transportasi 11. Produk Kekayaan Intelektual 12. Barang modal/peralatan		
3216	SE00027.00.00			Nilai air bersih yang disalurkan	Nilai air bersih yang disalurkan adalah nilai rupiah dari air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih kepada pelanggan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Juta Rupiah
3217	SE00028.00.00			Nilai aset	Aset adalah sesuatu yang menjadi milik usaha/perusahaan dan yang memiliki nilai ekonomi	1. aset lancar 2. aset tetap	Jumlah, Persentase	Nilai
3218	SE00029.00.01			Nilai bahan baku dan penolong	bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk atau barang setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya.	1. Uraian bahan baku pokok (bawang merah, beras, cabai, daging ayam, daging sapi, garam, gula pasir, jagung, kedelai, telur, tepung beras, terigu, ikan). 2. Uraian bahan baku dan penolong selain bahan pokok.	Jumlah	Nilai
3219	SE00029.00.02			Nilai bahan baku dan penolong	bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk atau barang setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya.	1. Dibeli 2. Hasil kebun 3. Lainnya	Jumlah	Nilai
3220	SE00030.00.01			Nilai bahan baku dan penolong	Nilai penggunaan barang yang diolah menjadi bentuk lain dan barang lain yang digunakan dalam proses pemrosesan bahan baku, biasanya berbaur dengan	Kode Komoditi Industri (KKI)	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam negeri	bahan baku dalam proses pengolahan yang di produksi di dalam negeri terlepas apakah produsen tersebut milik asing atau bukan			
3221	SE00030.00.02			Nilai bahan baku dan penolong dalam negeri	Nilai penggunaan barang yang diolah menjadi bentuk lain dan barang lain yang digunakan dalam proses pemrosesan bahan baku, biasanya berbaur dengan bahan baku dalam proses pengolahan yang di produksi di dalam negeri terlepas apakah produsen tersebut milik asing atau bukan	Klasisifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI)	Jumlah, Persentase	Nilai
3222	SE00031.00.01			Nilai bahan baku dan penolong luar negeri	Nilai penggunaan barang yang diolah menjadi bentuk lain dan barang lain yang digunakan dalam proses pemrosesan bahan baku, biasanya berbaur dengan bahan baku yang bersumber dari luar negeri terlepas siapa yang melakukan impor	Kode Komoditi Industri (KKI)	Jumlah, Persentase	Nilai
3223	SE00031.00.02			Nilai bahan baku dan penolong luar negeri	Nilai penggunaan barang yang diolah menjadi bentuk lain dan barang lain yang digunakan dalam proses/pemrosesan bahan baku, biasanya berbaur dengan bahan baku yang bersumber dari luar negeri terlepas siapa yang melakukan impor	Klasisifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI)	Jumlah, Persentase	Nilai
3224	SE00032.00.00			Nilai CIF	Nilai barang tiba di pelabuhan bongkar, merupakan penjumlahan nilai barang di pelabuhan muat (FoB), asuransi (Insurance), dan ongkos angkut (Freight)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
3225	SD00141.00.00			Nilai Indeks METT (Management Effectiveness Tracking Tool)	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (input), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (output) dan dampaknya (outcome).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
3226	SE00033.00.00			Nilai input	Nilai komponen-komponen pengeluaran perusahaan dalam proses kegiatan produksi diluar pengeluaran tenaga kerja selama tahun survei	1. Nilai penggunaan bahan baku dan penolong 2. Penggunaan bahan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						bakar 3. Penggunaan listrik 4. Sewa Gedung 5. tanah dan peralatan 6. Jasa Industri 7. Management fee 8. biaya promosi 9. biaya perjalanan dinas 10. biaya pencegahan pencemaran lingkungan 11. biaya peningkatan kemampuan SDM 12. biaya riset dan pengembangan 13. biaya telpon 14. fax 15. internet 16. surat menyurat		
3227	SE00034.00.00			Nilai input/biaya antara perusahaan gas	Biaya antara merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan bakar & listrik, air, ATK, peralatan dan suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan, sewa bangunan dan mesin, dan lain-lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3228	SE00035.00.00			Nilai Konstruksi	Nilai konstruksi yang diselesaikan pada saat tahun survei. Untuk yang multiyears perhitungkan persentase pada saat tahun survei untuk menentukan nilai konstruksi yang diselesaikan pada saat tahun survei utk masing-masing proyek	Nilai Konstruksi	Nilai	Rupiah
3229	SE00036.00.00			Nilai Konsumsi Dasar Barang	Nilai Konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu	11 Kelompok Pengeluaran:	Nilai	Juta Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan Jasa yang terpilih sebagai Paket Komoditas di 90 Kota IHK	komoditas yang dikonsumsi. Nilai Konsumsi Dasar diperoleh hasil Survei Biaya Hidup yang menunjukkan nilai pengeluaran rumah tangga setahun untuk setiap barang/jasa yang dikonsumsi.	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
3230	SE060037.00.00			Nilai Kontrak	Nilai kontrak yang didapat pada saat pekerjaan akan dimulai untuk masing-masing proyek	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
3231	SE060038.00.01			Nilai output	Nilai komponen-komponen pendapatan perusahaan dalam proses kegiatan produksi	1. Nilai produksi 2. penerimaan lainnya 3. selisih stok barang setengah jadi 4. listrik yang dijual	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3232	SE00038.00.02			Nilai output	Nilai komponen-komponen pendapatan perusahaan dalam proses kegiatan produksi	1. Nilai produksi 2. nilai jasa industri (maklun) 3. nilai pendapatan lainnya	Jumlah, Persentase	Nilai
3233	SE00039.00.00			Nilai output/penjualan gas yang disalurkan	Nilai gas yang disalurkan adalah nilai rupiah dari gas yang disalurkan oleh perusahaan gas kepada pelanggan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3234	SE00040.00.00			Nilai Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas oleh perusahaan gas	Nilai pemakaian bahan bakar yang digunakan oleh perusahaan gas dikelompokkan menurut pemakaian bensin, solar, minyak diesel, minyak tanah, pelumas, dan BBG	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3235	SE00041.00.00			Nilai Pemakaian Listrik Berlangganan	Nilai pemakaian listrik berlangganan adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk berlangganan baik listrik PLN atau swasta per bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Juta Rupiah
3236	SE00042.00.01			Nilai pengembangan riset dan inovasi	Suatu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan/badan usaha dalam rangka pengembangan riset dan inovasi.	1.Riset Dasar (Teori Baru) 2.Riset Terapan (Produksi, Pemasaran, Harga, Promosi, Distribusi, Inventori)	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
3237	SE00042.00.02			Nilai pengembangan riset dan inovasi	Suatu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan/badan usaha dalam rangka pengembangan riset dan inovasi.	1.Inovasi Baru 2.Inovasi Teknis	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
3238	SE00042.00.03			Nilai pengembangan	Suatu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan/badan usaha dalam rangka pengembangan riset dan inovasi.	1. Dilakukan sendiri 2. Dilakukan pihak lain	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				riset dan inovasi				
3239	SE00043.00.00			Nilai Penyusutan barang modal	Pengalokasian harga suatu aktiva tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Jadi, timbulnya biaya penyusutan ini diakibatkan oleh berkurangnya manfaat suatu aktiva dari waktu ke waktu. Penyusutan tidak berlaku terhadap aktiva tanah karena harganya yang terus naik setiap tahun	1. Gedung 2. mesin dan perlengkapan 3. kendaraan 4. software 5. modal tetap lainnya	Jumlah, Persentase	Nilai
3240	SE00044.00.00			Nilai Produksi	Nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi baik yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Satuan standar; Rupiah
3241	SE00045.00.00			Nilai Produksi Geothermal (Panas Bumi)	Nilai hasil produksi geothermal baik yang sudah terjual atau belum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Juta Rupiah
3242	SE00046.00.00			Nilai Produksi Kayu Bulat menurut Pulau dan Jenis Kayu Bulat	Nilai dari produksi kayu bulat menurut Pulau dan Jenis Kayu Bulat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3243	SE00047.00.00			Nilai produksi perusahaan budidaya ikan yang berbadan hukum	Nilai semua hasil budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari dari tempat pemeliharaan yang diusahakan perusahaan budidaya ikan yang berbadan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3244	SE00048.00.00			Nilai produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan	Nilai semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami dilaut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hukum				
3245	SE00049.00.00			Nilai Produksi Perusahaan Penggalian	Biaya/pengeluaran usaha merupakan seluruh pengeluaran biaya baik pengeluaran operasional maupun non operasional di luar balas jasa pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3246	SE00050.00.00			Nilai Produksi Perusahaan Pertambangan Migas	Nilai produksi migas adalah seluruh nilai hasil tambang migas yang diproduksi baik yang sudah terjual atau belum	1. Minyak bumi 2. Kondensat Gas Bumi	Jumlah	Juta Rupiah
3247	SE00051.00.00			Nilai Produksi Usaha Penggalian Rumah Tangga	Biaya/pengeluaran usaha merupakan seluruh pengeluaran biaya baik pengeluaran operasional maupun non operasional di luar balas jasa pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Juta Rupiah
3248	SE00052.01.01			Nilai produksi yang dihasilkan	Nilai semua barang hasil produksi (barang yang di hasilkan) selama tahun survei dengan menggunakan harga produsen (tidak termasuk upah makloon)	Kode Komoditi Industri (KKI),	Jumlah; Nilai; Persentase	Komoditi; Rupiah; Persen
3249	SE00052.02.00			Nilai produksi yang dihasilkan	Nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi baik yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri.	KBLI 5-digit, satuan standar, banyaknya, harga satuan, nilai	Jumlah; Nilai; Persentase	Usaha; Rupiah; Persen
3250	SE00052.01.02			Nilai produksi yang dihasilkan	Nilai semua barang hasil produksi (barang yang di hasilkan) selama tahun survei dengan menggunakan harga prodsen (tidak termasuk upah makloon)	Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI)	Jumlah; Nilai; Persentase	Komoditi; Rupiah; Persen
3251	SD00144.02.00			Nilai tambah	Keuntungan/laba perusahaan hasil pengurangan dari nilai output dengan input	1. Nilai output 2. Nilai input	Jumlah, Persentase	Nilai
3252	SD00144.03.00			Nilai tambah	Pertambahan nilai output barang/jasa akibat adanya proses produksi dengan melibatkan nilai input/antara	1. Nilai output 2. Nilai input	Jumlah, Persentase	Nilai
3253	SD00148.00.00			Nilai tambah perusahaan gas	Nilai tambah adalah besanya nilai output (penjualan gas) dikurangi nilai input (biaya antara)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Juta Rupiah
3254	ST00447.00.00			Nol atau tidak ada olah tanah	Jika tidak ada proses pengolahan tanah apapun di lahan garapan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektare

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3255	ST00448.00.00			Nomaden atau pastoral	Ternak yang dirawat dan dibesarkan pada situasi dimana pemiliki usaha pertanian tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak bercocok tanam dengan cara reguler. Ternak berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan pemilik usaha dan rumah tangganya, tergantung musim dan keberadaan makanan dan air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3256	SE00056.00.00			Nomor Badan Hukum Koperasi	Nomor yang diberikan dalam pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar koperasi yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	BHKOP
3257	SE00052.00.00			Nomor Induk Berusaha (NIB)	Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran	1.Usaha Mikro 2.Usaha Kecil 3.Usaha Menengah	Jumlah	NIB
3258	SP00042.00.00			Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	NIK
3259	SE00053.00.00			Nomor Induk Koperasi (NIK)	Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	NIK
3260	SP00043.00.00			Nomor Kartu Keluarga (KK)	Nomor identitas unik yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Nomor KK
3261	SE00054.00.00			Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.	1.NPWP Perseorangan (Perorangan) 2.NPWP Usaha (Badan)	Jumlah	NPWP
3262	SE00055.00.00			Nomor Telepon Tempat Usaha	Nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi	1. Telepon dengan kabel (PSTN). 2. Telepon Seluler 3. Telepon Satelit	Jumlah	Nomor Telepon
3263	SD00154.00.00			Nota Kesepahaman/	Kesepakatan diantara pihak untuk bersinding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	MoU

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Memorandum of Understanding (MoU)	hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.	kebutuhan		
3264	SP00044.00.00			Obat tradisional	bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turuntemurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, misalnya jamu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen
3265	SP00046.00.00			Olahraga	Kegiatan seseorang dengan sengaja melangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik (gerak badan dengan gerakan gerakan tertentu seperti atletik, voli, sepak bola, dsb). Melakukan kegiatan seperti berjalan kaki ke tempat bekerja, mengayuh sepeda ke pasar dan kegiatan lain yang tidak ditujukan untuk olahraga tidak dikategorikan sebagai melakukan olahraga. Jenis olahraga yang mengandalkan otak, seperti catur dan bridge, tidak dikategorikan sebagai olahraga.	1. Ya 2. Tidak	Jumlah; persentase	Orang; persen
3266	SE00057.01.00			Omset	Nilai penjualan total usaha selama periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3267	SE00058.02.00			Omset	Nilai Volume penjualan dalam periode tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah;
3268	SP00047.00.00			Orang Asing	Orang bukan WNI yang telah bertempat tinggal/menetap dan tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tetapi saat pendataan berada di wilayah Indonesia dan telah menetap/bermiat menetap selama minimal 1 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-Rata; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3269	ST00449.00.00			Orang bukan angkatan kerja	Orang usia kerja yang tidak bekerja dan tidak pula menganggur selama periode referensi.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3270	ST00450.00.00			Orang yang bekerja (persons in employment)	Orang usia kerja yang selama periode referensi pendek (misalnya tujuh hari atau satu minggu) terlibat dalam aktivitas apapun untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa untuk bayaran atau keuntungan tertentu. Mereka meliputi orang yang "sedang kerja/at work", yaitu orang yang mengerjakan suatu pekerjaan setidaknya selama satu jam, serta orang bekerja yang "sedang tidak kerja/not at work" karena absensi sementara dari pekerjaan atau perjanjian waktu kerja (seperti shift kerja, flexitime/sistem kerja dimana jumlah jam kerja serta waktu mulai dan selesai bekerja dalam batasan yang dipilih oleh pekerja, dan cuti pengganti untuk lembur).	1. sedang bekerja 2. sedang tidak bekerja	Jumlah	Orang
3271	ST00451.00.00			Orang yang bekerja secara mandiri (self-employed)	Orang yang bekerja pada suatu pekerjaan dimana pembayaran upah secara langsung tergantung pada keuntungan (atau potensi keuntungan) yang diperoleh melalui transaksi pasar barang dan jasa yang diproduksi.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3272	SD00171.00.00			Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
3273	SP00048.00.00			Organisasi sekitar di tempat kerja/sekolah	Organisasi sekitar di tempat kerja/sekolah adalah organisasi di masyarakat yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau sekolah dari seseorang. Seseorang dicatat sebagai anggota organisasi bila yang bersangkutan harus mendaftar untuk menjadi anggota. Keanggotaan di dalam organisasi seperti	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Organisasi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					KORPRI, OSIS, BEM, dan PGRI tidak dianggap sebagai anggota organisasi karena keanggotaannya otomatis atau tidak mendaftar.			
3274	SE000509.00.00			Output	Nilai Output yang di produksi ditambahkan nilai barang yang belum terjual ditambah stok dalam periode tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah;
3275	ST000827.00.00			Pabrik bibit	Bibit yang dibeli dari produsen atau penyedia bibit melalui perjanjian komersil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah benih	gram, kilogram
3276	ST000828.00.00			Padang rumput umum	Lahan yang tidak dimiliki langsung oleh usaha pertanian, namun hak bersama (common rights) berlaku pada padang rumput tersebut. Secara umum, padang rumput umum adalah area pertanian yang dimiliki oleh otoritas publik (negara, paroki, dll.)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3277	ST000829.00.00			Padi di lahan bukan sawah	Padi yang ditanam di lahan bukan sawah. Yang termasuk padi di lahan bukan sawah ialah padi gogo/ladang/huma.	1. Padi gogo 2. Padi ladang 3. Padi huma	Luas	hektar, m2
3278	ST000830.00.00			Padi di lahan sawah	Padi yang ditanam di lahan sawah. Yang termasuk padi di lahan sawah: padi rendengan, padi gadu, padi gogo rancah, padi pasang surut, padi lebak, padi rembesan dan lain-lain.	1. Padi sawah 2. Padi gadu 3. Padi rendengan 4. Padi lainnya	Luas	hektar, m2
3279	ST000831.00.00			Padi gadu	Padi sawah yang ditanam dalam musim kemarau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	hektar, m2
3280	ST000832.00.00			Padi gogo	Padi yang ditanam di tegal/kebun dan huma/ladang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	hektar, m2
3281	ST000833.00.00			Padi Hibrida	Padi yang merupakan keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inhibrida homozigot. Turunan pertama dan seterusnya dari padi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg, Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida			
3282	ST00454.00.00			Padi Inhibrida	Padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami	1. Varietas Unggul 2. Varietas Lokal	Massa	Kg, Ton
3283	ST00456.00.00			Padi rendengan	Padi sawah yang ditanam dalam musim penghujan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	hektar, m2
3284	ST00457.00.00			Padi sawah	Padi yang ditanam di sawah berpengairan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	hektar, m2
3285	ST00458.00.00			Padi Sawah Hibrida	Varietas padi sawah yang merupakan produk persilangan antara dua tetua padi yang berbeda secara genetik. Apabila tetua-tetua diseleksi secara tepat, maka hibrida turunannya akan memiliki vigor dan daya hasil yang lebih tinggi daripada kedua tetua tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kg, Ton
3286	ST00459.00.00			Padi Sawah Inbrida	Varietas padi sawah selain padi hibrida. Dalam Survei Ubinan, benih padi yang diproduksi dari turunan padi hibrida termasuk padi inbrida.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kg, Ton
3287	SD00175.00.00			Pagu Anggaran	Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2014.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
3288	SD00176.00.00			Pagu Indikatif	Ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
3289	SE00060.00.00			Pajak Daerah	pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	ribu rupiah
3290	SE00061.00.00			Pajak lainnya atas produksi	Pajak lain atas produksi, terdiri dari seluruh pajak, kecuali pajak atas produk yang diperoleh enterprise sebagai hasil keterlibatan-nya di dalam produksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3291	SE000062.00.00			Pajak Penghasilan Badan atau Pajak Final atas omset	Nilai pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan dalam periode tertentu.	1.PPh Badan 2.PPh Final	Nilai	Rupiah
3292	ST000460.00.00			Pakan alami	Bahan pakan dari alam yang secara alami digunakan sebagai makanan ikan. Contoh : pakan ikan segar, artemia, ikan rucah, dedak.	1. Pakan ikan segar 2. Artemia 3. Ikan rucah 4. Dedak.	Volume	Kg
3293	ST000462.00.00			Pakan buatan	Campuran dari berbagai sumber bahan baku yang disusun secara khusus berdasarkan komposisi yang dibutuhkan sebagai pakan ikan. Contoh: pelet.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
3294	ST000463.00.00			Pakan Ikan	Bahan makanan untuk ikan. Pakan terdiri dari pakan alami dan pakan buatan.	1. Pakan alami 2. Pakan buatan	Volume	Kg
3295	ST000464.00.00			Pakan ikan segar	Ikan yang sudah mati tetapi masih dalam kondisi baik dan tidak layu untuk pakan ikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
3296	SP000049.00.00			Paket A	Satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD).	1. Paket A Negeri 2. Paket A Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3297	SP000050.00.00			Paket B	Satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1. Paket B Negeri 2. Paket B Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3298	SP000051.00.00			Paket C	Satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	1. Paket C Negeri 2. Paket C Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3299	ST000465.00.00			Pancingbooks and lines)	Alat penangkap ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pancing
3300	ST000466.00.00			Panen Rumput Laut	kegiatan memetik hasil budidaya yang telah cukup umur sebagai produksi, maupun yang belum cukup umur sebagai bibit	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3301	ST00467.00.00			Pangsa Pengeluaran Pangan	Persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3302	SE00063.00.01			Partisipasi berkoperasi	Keikutsertaan dalam koperasi	1.Anggota koperasi 2.Non Anggota Koperasi	Jumlah, presentase	Orang, persen
3303	SE00063.00.02			Partisipasi Berkoperasi	Keikutsertaan dalam koperasi	1.Pengurus 2.Bukan Pengurus 3.Pengelola	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3304	SD00186.00.00		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Pasangan; persen
3305	SE00064.00.00			Pasar	Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
3306	SP00052.00.00			Pasar dengan bangunan permanen	Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3307	SP00053.00.00			Pasar dengan bangunan semi permanen	Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3308	ST00470.00.00			Pasar lokal	Bibit yang dibeli, baik dengan uang tunai ataupun ditukar dengan barang tertentu, melalui pasar, pedagang keliling, atau jaringan perdagangan lokal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah benih	gram/kilogram
3309	ST00471.00.00			Pasar produk pertanian tetap atau berkala	Pasar dimana petani dapat membawa hasil pertanian mereka untuk dijual. Pasar ini biasanya beroperasi setiap hari atau pada hari-hari tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu perjalanan ke pasar	Menit, Jam

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3310	SP00054.00.00			Pasar tanpa bangunan	Pasar yang tidak berada dalam bangunan. (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3311	ST00472.00.00			Pastoral tetap	Ternak yang dirawat pemiliknya yang memiliki tempat tinggal tetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3312	SP00055.00.00			Pedukuhan	Satuan tugas kewilayahan pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di DI Yogyakarta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pedukuhan
3313	ST00474.01.00			Pekebun	Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rumah Tangga	KK
3314	ST00474.02.00			Pekebun	Petani yang melakukan usaha tani di bidang perkebunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3315	SD00193.02.00			Pekerja	semua orang yang biasanya bekerja di usaha/perusahaan.	1. Pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar 2. Pekerja berdasarkan kelompok umur 3. Pekerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3316	SD00194.00.01			Pekerja (employee)	Orang yang bekerja pada suatu pekerjaan dimana kontrak eksplisit atau implisit menyediakan upah yang tidak secara langsung tergantung pada pendapatan tempat orang tersebut bekerja.	1. Berusaha Sendiri 2. Berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar 3. Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar 4. Buruh/karyawan 5. Pekerja Bebas Pertanian 6. Pekerja Keluarga/Pekerja tidak	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dibayar		
3317	SD00194.00.02			Pekerja (employee)	Orang yang bekerja pada suatu pekerjaan dimana kontrak eksplisit atau implisit menyediakan upah yang tidak secara langsung tergantung pada pendapatan tempat orang tersebut bekerja.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3318	SE00066.00.00			Pekerja Asing	Menanyakan jumlah pekerja asing menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan Kompetensi Profesi : 1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah	Orang
3319	SD00196.00.00			Pekerja Bebas	Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3320	SD00206.00.00			Pekerja bebas di nonpertanian	Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3321	SD00205.00.00			Pekerja bebas di pertanian	Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3322	SD00204.00.00			Pekerja Burub/karyawan/pegawai	seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3323	SP00056.00.00			Pekerja dibayar	Semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3324	SD00199.00.01			Pekerja informal di sektor pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3325	SD00199.00.02			Pekerja informal di sektor pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3326	SE00067.00.00			Pekerja Kantor/Administrasi	Pekerja yang kegiatannya berkaitan erat dengan masalah-masalah ketatalaksanaan/administrasi	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah	Orang
3327	ST00476.00.00			Pekerja kebun/lapangan	Pekerja yang kegiatannya berkaitan langsung dengan kebon/lapangan, seperti pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pemanenan serta perawatan	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah	Orang
3328	ST00477.00.00			Pekerja kehuarga yang berkontribusi (contributing family worker)	Orang yang memiliki pekerjaan mandiri pada usaha berorientasi pasar yang dijalankan oleh kerabat yang tinggal pada rumah tangga yang sama dan tidak bisa dianggap sebagai rekanan kerja (yaitu majikan atau pekerja usaha sendiri) karena tingkat komitmennya terhadap usaha tersebut, dalam hal waktu bekerja atau faktor lain yang ditentukan berdasarkan keadaan nasional, tidak pada tingkat yang sebanding dengan kepala perusahaan.	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah	Orang
3329	SP00057.00.00			Pekerja kehuarga/tak	Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dibayar	tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang	kebutuhan		
3330	SE00068.01.00			Pekerja lainnya	Pekerja selain pekerja produksi, misalnya pimpinan perusahaan, pegawai keuangan, pegawai administrasi, penjaga malam, dsb	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah, persentase	Orang, jiwa; persen
3331	SE00068.02.00			Pekerja lainnya	Pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja penduk ung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah; Persentase	Orang, jiwa; persen
3332	SE00069.00.01			Pekerja Outsorcing	Menanyakan jumlah pekerja outsourcing menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah	Orang
3333	SE00069.00.02			Pekerja Outsorcing	Menanyakan jumlah pekerja outsourcing menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah	Orang
3334	SD002201.00.00			Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, indikator ini dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pekerja pada industri pariwisata, dengan jumlah pekerja semua sektor dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3335	ST00479.00.01			Pekerja pada usaha pertanian	Orang yang bekerja di usaha pertanian pada suatu waktu selama tahun referensi, yang status pekerjaannya adalah "pekerja/employee"	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah, Waktu	Orang, Jam
3336	ST00479.00.02			Pekerja pada usaha pertanian	Orang yang bekerja di usaha pertanian pada suatu waktu selama tahun referensi, yang status pekerjaannya adalah "pekerja/employee"	1. Pekerja tetap 2. Pekerja musiman 3. Pekerja jangka pendek 4. Pekerja lepas	Jumlah, Waktu	Orang, Jam
3337	SE00070.00.00			Pekerja	Pekerja adalah semua orang yang terlibat dalam	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perusahaan gas	kegiatan operasional perusahaan, baik sebagai pekerja teknis maupun non teknis.	analisis atau sesuai kebutuhan		
3338	SE00065.01.00			Pekerja produksi	Pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi atau yang berhubungan dengan itu, yaitu sejak bahan-bahan masuk ke pabrik sampai hasil produksinya keluar dari pabrik	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
3339	SE00071.02.00			Pekerja Produksi	Pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau yang berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, menggerakkan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3340	SD00202.02.01			Pekerja setengah penganggur an	Penduduk bekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu: a. Sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha seminggu yang lalu b. Tidak mencari pekerjaan karena putus asa atau sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja dan masih mau menerima pekerjaan.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3341	SD00202.02.02			Pekerja setengah penganggur an	Penduduk bekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu: a. Sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha seminggu yang lalu b. Tidak mencari pekerjaan karena putus asa atau sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja dan masih mau menerima pekerjaan.	1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma (DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3342	SE00072.00.01			Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak	Menanyakan jumlah pekerja tetap dan kontrak dari sisi pendidikan, jenis kelamin, dan menurut kompetensi profesi pekerja serta jumlah pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. SMP dan sederajat atau lebih rendah 2. SMA dan sederajat 3. Perguruan Tinggi	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3343	SE00072.00.02			Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak	Menanyakan jumlah pekerja tetap dan kontrak dari sisi pendidikan, jenis kelamin, dan menurut kompetensi profesi pekerja serta jumlah pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3344	SE00072.00.03			Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak	Menanyakan jumlah pekerja tetap dan kontrak dari sisi pendidikan, jenis kelamin, dan menurut kompetensi profesi pekerja serta jumlah pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah	Orang
3345	SE00073.00.00			Pekerja tetap usaha	Pekerja yang memperoleh upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada banyaknya hari kerja. Biasanya apabila diberhentikan akan mendapat pesangon.	1. Pekerja Laki-laki 2. Pekerja perempuan	Jumlah	Orang
3346	SP00058.00.00			Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha (baik anggota keluarga atau bukan) dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3347	SD00203.02.01			Pekerja tidak tetap/harian	Menanyakan jumlah pekerja tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3348	SD00203.02.02			Pekerja tidak tetap/harian	Menanyakan jumlah pekerja tidak tetap/harian menurut jenis kelamin dan kompetensi profesi.	1. Tidak memiliki kompetensi 2. Terampil 3. Ahli	Jumlah	Orang
3349	SE00074.01.00			Pekerja tidak tetap/harian	Pekerja yang dibayar secara bulanan dengan tidak memperhitungkan jumlah hari kerja dan apabila diberhentikan tidak diberi pesangon.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3350	ST00480.00.00			Pekerja usaha sendiri (own-accont worker)	Orang yang, bekerja pada usaha miliknya sendiri atau usaha milik bersama dengan satu atau beberapa rekan, yang memiliki usaha mandiri pada usaha berorientasi pasar dan tidak memiliki pekerja/karyawan secara terus menerus selama periode referensi. Namun, selama periode referensi	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					seorang pekerja usaha sendiri mungkin memiliki pekerja/karyawan selama waktu singkat atau secara tidak berkelanjutan.			
3351	SE00075.00.00			Pekerjaan yang disubkontrak	Persentase kumulatif nilai pekerjaan yang disubkontrakkan pada akhir tahun untuk masing-masing proyek	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persentase
3352	SE00076.00.00			Pelabuhan Bongkar	Pelabuhan tempat barang impor dibongkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelabuhan
3353	UL00001.01.01			Pelabuhan Perikanan	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	1. Tipe A 2. Tipe B 3. Tipe C 4. Tipe D	Jumlah	Pelabuhan
3354	UL00001.02.00			Pelabuhan perikanan	Suatu lingkungan kerja meliputi areal perairan, daratan serta sarana-sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan umum dan jasa guna memperlancar aktivitas kapal/perahu perikanan, usaha perikanan dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan.	1. Tipe A 2. Tipe B 3. Tipe C 4. Tipe D	Jumlah	Pelabuhan
3355	UL00001.01.02			Pelabuhan Perikanan	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	1. Pelabuhan Perikanan Samudera 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara 3. Pelabuhan Perikanan Pantai 4. Pangkalan Pendaratan Ikan	Jumlah	Pelabuhan
3356	ST00482.00.00			Pelabuhan	Pelabuhan perikanan yang jangkauan pemanfaatannya	PPS	Jumlah	Pelabuhan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perikanan tipe A	mencakup seluruh kegiata Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan samudra atau yang lazim digolongkan dalam armada perairan jauh.n perikanan Nasional, Zone Ekonomi Eklusif dan Samudra.			
3357	ST00484.00.00			Pelabuhan perikanan tipe B	Pelabuhan perikanan tipe B adalah pPkapal/perahu perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara.	PPN	Jumlah	Pelabuhan
3358	ST00485.00.00			Pelabuhan perikanan tipe C	Pelabuhan perikanan yang jangkauan pemanfaatannya terbatas pada kegiatan perikanan setempat (lokal). Diperuntukkan bagi kapal/perahu perikanan pantai.	PPP	Jumlah	Pelabuhan
3359	ST00486.00.00			Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan)	Fasilitas untuk berlabuh bagi kapal/perahu tradisional, atau kapal perahu yang memiliki fungsi khusus seperti kapal/perahu penelitian dan kapal/perahu latih atau fasilitas untuk berlabuh yang didirikan khusus oleh perusahaan perikanan untuk keperluan sendiri.	PPI	Jumlah	Pelabuhan
3360	ST00487.00.00			Pelaku usaha pertanian	Warga negara Indonesia perorangan/individu yang melakukan/mengelola usaha pertanian, yang mencakup kegiatan di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Individu/perorangan yang melakukan/mengelola usaha perikanan disebut "pelaku usaha perikanan", dan individu/perorangan yang melakukan usaha kehutanan disebut "pelaku usaha kehutanan"	1. Pelaku Usaha Pertanian - Tanaman pangan - Hortikultura - Perkebunan - Peternakan 2. Pelaku Usaha Perikanan 3. Pelaku Usaha Kehutanan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3361	SE00077.00.00			Pelanggan Listrik	Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik baik dari perusahaan listrik negara maupun swasta.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3362	SE00078.00.00			Pelanggan perusahaan	Pelanggan adalah konsumen yang mendapatkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Pelanggan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				gas	pengaliran gas dari perusahaan gas yang dikelompokkan menjadi pelanggan rumah tangga, komersial, industri, pembangkit listrik, dan SPBG	kebutuhan		
3363	ST000488.00.00			Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	Pelatihan Masyarakat adalah proses pembelajaran non formal dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat di bidang LHK	1. Pelatihan perilaku ramah lingkungan bagi anak didik dan pendidik TK, SD, SMP dan SMA/ sederajat 2. Pelatihan pengelolaan LH bagi kader Lingkungan Hidup 3. Pelatihan dan Pengenalan Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti 4. Pelatihan Masyarakat Peduli Api 5. Pelatihan Teknis Kehutanan Bagi Masyarakat	Jumlah	Orang
3364	ST000490.00.00			Pelatihan /pendidikan pertanian pemilik usaha pertanian	Item ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelatihan/pendidikan yang diterima oleh pemilik usaha pertanian pada bidang atau kegiatan pertanian tertentu. Data ini dapat diperoleh dengan menanyakannya pada pemilik usaha pertanian mengenai pelatihan/pendidikan pertanian yang pernah diterima.	1. Pembelajaran pertanian informal – mengacu pada pendidikan/pelatihan pertanian praktis, misalnya pengalaman yang diperoleh memalui praktik kerja (field tour, dan lain-lain) 2. Pendidikan pertanian	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						nonformal – mengacu pada kursus khusus pertanian jangka pendek, disediakan oleh institusi pemerintah, organisasi internasional, atau institusi khusus pertanian lainnya 3. Pendidikan pertanian menengah/secondary – mengacu pada perdidikan pertanian apapun yang diselesaikan pada tingkat perdidikan menengah/secondary 3. Pendidikan pertanian tersier – mengacu pada perdidikan pertanian atas (high level education), diperoleh pada perdidikan tingkat atas		
3365	SP000359.00.00			Pelayanan dilakukan dengan biaya yang jelas	jika pelayanan menyediakan informasi terkait biaya dan dalam pelaksanaanya segala biaya yang timbul sesuai dengan informasi tersebut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
3366	SP000360.00.00			Pelayanan dilakukan secara tanggap meliputi	apabila petugas pelayanan cepat mengetahui dan memperhatikan secara sungguh-sungguh serta cepat bereaksi atas keadaan yang ada	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kehuhan atau permintaan masyarakat				
3367	ST00491.00.00			Pelayanan penyuluhan pertanian	Pembekalan mengenai informasi dan saran pertanian untuk produsen tanaman dan hewan ternak	1. institusi pemerintah 2. organisasi non pemerintah 3. organisasi petani 4. institusi pendidikan 5. organisasi akar rumput informal 6. lainnya	Jumlah	Pelayanan
3368	SP00061.00.00			Pelayanan publik dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele	jika pelayanan dilakukan dalam waktu yang singkat, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, jelas, dan tidak berlarut-larut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
3369	SE00079.00.00			Pelayanan/Bantuan Koperasi	Pemberian pelayanan/bantuan yang dilakukan oleh koperasi, seperti; uang, bahan baku, pemasaran, mesin, barang modal	1. Permodalan 2. Bahan baku 3. Pemasaran 4. Mesin 5. Barang modal/peralatan 6. Lainnya	Jumlah	Pelayanan
3370	ST00493.00.00			Pelet	Salah satu jenis pakan ikan yang terbuat dari sisa makanan atau ikan melalui proses, baik pembuatan dilakukan sendiri maupun pabrik.	1. Buatan sendiri 2. Buatan pabrik	Volume	Kg
3371	SE00080.00.00			Pemakaian Air	Banyaknya air yang digunakan usaha/perusahaan untuk keperluan usahanya baik untuk keperluan produksi maupun keperluan usaha lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	liter; Rupiah
3372	SE00081.00.00			Pemakaian Bahan Bakar	Volume pemakaian bahan bakar yang digunakan oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Liter Mscf

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan Pelumas oleh perusahaan gas	perusahaan gas dikelompokkan menurut pemakaian bensin, solar, minyak diesel, minyak tanah, pelumas, dan BBG	kebutuhan		
3373	SE00082.00.00			Pemakaian bahan bakar dan pelumas pada perusahaan pertambangan non migas	Pemakaian bahan bakar dan pelumas adalah banyaknya bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk operasional perusahaan dan pembangkit listrik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3374	SE00083.00.00			Pemakaian Pelumas dan Bahan Bakar	Biaya bahan bakar dan pelumas merupakan biaya seluruh pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan.	1. Bensin 2. Minyak solar/minyak diesel 3. Minyak tanah 4. Briket batubara 5. Gas kota 6. LPG 7. Lainnya (kayu bakar, arang, sekam, dll) 8. Pelumas	Jumlah	Satuan standar; Rupiah
3375	SD00220.00.00			Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3376	ST00494.00.01			Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	Pemanfaatan TSL adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan.	1. Penangkapan di Alam 2. Pemanfaatan Hasil Budidaya	Jumlah, Massa	Ekor; Kg
3377	ST00494.00.02			Pemanfaatan	Pemanfaatan TSL adalah penggunaan sumber daya	1. Pengkajian,	Jumlah,	Ekor;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan.	penelitian, dan pengembangan 2. Penangkaran 3. Perburuan 4. Perdagangan 5. Peragaan 6. Pertukaran 7. Budidaya tanaman obat-obatan 8. Pemeliharaan untuk kesenangan	Massa	Kg
3378	SE00084.00.00			Pemasaran Media Sosial	Pemasaran Elektronik yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan produk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Media Sosial
3379	ST00495.00.01			Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak	**Kegiatan mendatangkan ternak dan hasil ternak (pembelian dan/atau penambahan lain misalnya bantuan ternak), baik yang berasal dari luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri.**	**1. Ternak Besar 2. Ternak Kecil 3. Ternak Unggas 4. Aneka Ternak**	Jumlah; Massa	Ekor; Ton
3380	ST00495.00.01			Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak	**Kegiatan mendatangkan ternak dan hasil ternak (pembelian dan/atau penambahan lain misalnya bantuan ternak), baik yang berasal dari luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri.**	**1. Daging 2. Telur 3. Susu 4. Kulit**	Jumlah; Massa	Ekor; Ton
3381	SP00062.00.00			Pembantu	Orang yang bekerja sebagai pembantu/sopir yang menginap di keluarga tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau pun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3382	ST00496.00.00			Pembenihan	Kegiatan pemeliharaan ikan berupa induk ikan dengan tujuan untuk menghasilkan benih ikan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pendederan	1. Air tawar 2. Air laut 3. Air payau	Jumlah; Massa	Ekor, Butir; Kg
3383	ST00497.00.00			Pembenihan dan pembesaran	Usaha pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang mencakup usaha pembenihan dan pembesaran	1. Air tawar 2. Air laut 3. Air payau	Jumlah; Massa	Ekor, Butir; Kg
3384	SE00085.00.01			Pemberdayaan	Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan	1. Pemerintah Pusat	Nilai;	Rupiah;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				UMKM oleh Pemerintah	UMKM dalam bentuk bantuan yang diterima oleh pelaku usaha.	2. Pemerintah Daerah		Frekuensi; Orang; Persen
3385	SE00085.00.02			Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah	Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan UMKM dalam bentuk bantuan yang diterima oleh pelaku usaha.	1. Bantuan Sosial 2. Pendampingan 3. Penyuluhan 4. Pelatihan 5. Pemagangan 6. Sertifikasi 7. Studi Banding 8. Permodalan 9. Insentif (Pajak/ Tarif/ Penjaminan) 10. Promosi 11. Ekspor 12. Lainnya	Nilai;	Rupiah; Frekuensi; Orang; Persen
3386	SE00086.00.01			Pemberdayaan UMKM oleh Non-Pemerintah	Upaya yang dilakukan non-pemerintah untuk memajukan UMKM dalam bentuk bantuan yang diterima oleh pelaku usaha.	1.Perorangan 2.Koperasi 3.Perguruan Tinggi 4.Swasta Badan Usaha/Badan Hukum 5.LSM 6.Luar Negeri	Nilai; Jumlah; Persentase	Rupiah; Frekuensi, Orang; Persen
3387	SE00086.00.02			Pemberdayaan UMKM oleh Non-Pemerintah	Upaya yang dilakukan non-pemerintah untuk memajukan UMKM dalam bentuk bantuan yang diterima oleh pelaku usaha.	1. Bantuan Sosial 2. Pendampingan 3. Peningkatan Kapasitas 4. Pemagangan 5. Studi Banding 6. Permodalan 7. Promosi 8. Ekspor	Nilai; Jumlah; Persentase	Rupiah; Frekuensi, Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						9. Lainnya		
3388	SD00230.00.00			Pemberian Insentif	Dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
3389	ST00499.00.00			Pembesaran	Kegiatan pemeliharaan ikan berupa benih ikan/ gelondongan menjadi ikan ukuran besar/ siap konsumsi.	1. Air tawar 2. Air laut 3. Air payau	Jumlah; Massa	Ekor, Butir; Kg
3390	SE00158.00.00			Pembiayaan Sosial (CSR)	Alokasi laba untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3391	SD00231.00.00			Pembiayaan Swasta	Donasi non tunai, swasta non profit, sponsor.	1. Donasi Non Tunai 2. Swasta Non Profit 3. Sponsor	Persentase	Persen
3392	ST00500.00.00			Pembuatan petis	Pengolahan ikan dengan cara mengambil sari ikan, baik dengan perebusan ataupun penguapan dan dikentalkan dengan menambah tepung, gula dan lain-lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3393	ST00501.00.00			Pembuatan terasi	Pengolahan ikan melalui proses fermentasi dan penghancuran baik ditambah tepung dan lain-lain ataupun tidak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3394	SP00063.00.00			Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll	Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
3395	SD00232.02.00			Pembudi Daya Ikan	Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan atau orang yang melakukan	1. Pembesaran 2. Pembenihan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					usaha pembudidayaan ikan	3. Ikan Hias		
3396	ST00503.00.00			Pembudidayaan ikan	Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya	1. Usaha budidaya ikan di air tawar. 2. Usaha budidaya ikan di air payau. 3. Usaha budidaya ikan di air laut.	Jumlah; Massa	Ekor, Butir; Kg
3397	SD00235.00.00			Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian	1. Terpenuhi 2. Tidak Terpenuhi	Nilai	Rupiah
3398	SD00236.00.00			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3399	SE00087.00.00			Pemilik	Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki usaha/perusahaan seluruhnya atau sebagian besar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	orang, persekutuan, badan hukum
3400	ST00505.00.00			Pemindangan/ perebusan ikan	Pengolahan ikan dengan cara direbus dan diberi garam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3401	ST00506.00.00			Pemotongan Ternak Tercatat	Pemotongan ternak yang dilakukan di **Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B),** dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan **hewan selain RPH** yang dilaporkan kepada **dinas atau dicatat oleh** dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					setempat			
3402	ST000507.00.00			Pemotongan Ternak Tidak Teratat	Pemotongan yang dilakukan **oleh orang perorangan** yang tidak dilaporkan kepada **dinas atau tidak dicatat oleh** dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor
3403	SP000064.00.00			Pemuda	warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3404	SD000243.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Permukiman Kumuh	Suatu wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Perkadutk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Wilayah; Km2 ;Persen
3405	ST000508.00.00			Pemungutan hasil hutan/penang kapan satwa liar	Kegiatan mengambil benda-benda hayati hutan,dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, humut, madu, sarang burung, telur dan kotoran burung.	1. Dikonsumsi sendiri 2. Dijual 3. Lainnya	Nilai	Rupiah
3406	SE000088.01.00			Penambahan barang modal	nilai penambahan/pembelian/pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dilakukan pada tahun survei. Perbaikan besar adalah pembaruan yang menjadikan barang modal tersebut bertambah kapasitasnya, mengubah bentuk, atau memperpanjang umur barang modal. Untuk barang modal yang perbaikannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, maka yang dicatat hanya yang benar-benar terjadi pada tahun survei	1. Tanah 2. gedung 3. mesin dan perlengkapan 4. kendaraan 5. software 6. modal tetap lainnya	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3407	SE000088.02.00			Penambahan barang modal	nilai penambahan/pembelian/pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dilakukan pada tahun survei. Perbaikan besar adalah pembaruan yang menjadikan barang modal tersebut bertambah kapasitasnya, mengubah bentuk, atau memperpanjang umur barang modal.	1. Tanah 2. bangunan/gedung usaha 3. bangunan tempat tinggal 4. mesin dan perlengkapan 5. alat transportasi 6. produk kekayaan intelektual 7. barang modal dan peralatan	Jumlah, Persentase	Nilai
3408	SE000089.00.00			Penambahan dan Penguranga n Barang Modal serta Penyusutan	Tuliskan semua nilai pembelian/penambahan barang modal baik melalui pembelian maupun pembuatan/perbaikan besar serta nilai pengurangan maupun nilai penyusutannya.	1. Tanah 2. bangunan 3. alat berat/mesin konstruksi 4. kendaraan 5. software 6. lainnya	Nilai	Rupiah
3409	SE000090.00.00			Penambahan/p elepasan aset tetap berupa rumah tinggal	Aset tetap adalah aset produksi yang digunakan berulang atau terus-menerus di dalam proses produksi untuk lebih dari setahun berupa rumah tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3410	SE000091.00.00			Penambahan/p elepasan aset tetap berupa tanah	Aset tetap adalah aset produksi yang digunakan berulang atau terus-menerus di dalam proses produksi untuk lebih dari setahun berupa tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3411	ST000510.00.00			Penanaman rumput laut	kegiatan dalam budidaya untuk memperbanyak atau memperbesar thallus rumput laut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Ton; Rupiah
3412	ST000512.00.00			Penanganan Pengaduan	Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap orang sebagai	1. Dilakukan audit investigatif	Jumlah	Penanganan, Kasus,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Masyarakat	Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya kepada Inspektorat Jenderal mengenai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada masyarakat dan korupsi.	2. Dilakukan identifikasi khusus/pengumpulan bahan dan keterangan 3. Diusulkan dilakukan audit investigatif 4. Diusulkan dilakukan identifikasi khusus/pengumpulan bahan dan keterangan 5. Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/sudah selesai/sudah sesuai ketentuan 6. Diserahkan kepada Eselon I lain		Laporan
3413	SD00251.01.00			Penanganan Sampah	Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah, penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan (pengelompokkan atau pemisahan jenis sampah), pengumpulan (pengumbilan atau pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R), pengangkutan (membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah), pengolahan (mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah) dan pemrosesan akhir sampah (mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tonase; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3414	SE000092.00.00			Penanggung Jawab	Orang yang bertanggung Jawab menjalankan usaha/perusahaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	orang
3415	ST000513.00.00			Penangkapan	Kegiatan menangkap atau mengumpulkan binatang/tanaman yang hidup di laut/ perairan umum, dan atau hutan secara bebas	1. Penangkapan ikan 2. Penangkapan satwa liar	Massa	Ton
3416	ST000514.00.00			Penangkapan dan penangkaran binatang liar	Suatu kegiatan yang meliputi perburuan/penangkapan binatang liar dengan menggunakan jerat atau perangkap dan penangkaran marga satwa seperti pemeliharaan ular dan buaya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3417	SD000253.02.00			Penangkapan ikan	Kegiatan menangkap/mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.	1. Penangkapan ikan di laut 2. Penangkapan ikan di perairan daratan	Massa	Ton
3418	SD000253.01.00			Penangkapan ikan	Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya	1. Penangkapan ikan di laut 2. Penangkapan ikan di perairan daratan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
3419	SD000254.00.00			Penangkapan ikan di laut	Kegiatan penangkapan ikan di laut, muara sungai, laguna, dan sejenisnya yang dipengaruhi oleh pasang surut. Usaha Penangkapan Ikan di Laut adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh penghasilan/keuntungan dengan menanggung risiko usaha (sebagai pengusaha/bukan sebagai buruh).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3420	SD000255.00.00			Penangkapan ikan di perairan	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa yang bukan milik perseorangan). Ikan yang ditangkap seperti :	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				umum	ikan, udang dan lain-lain. Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, dll) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan / keuntungan dengan menanggung risiko usaha |sebagai pengusaha/bukan sebagai buruh).			
3421	SD00256.01.00			Penangkapan ikan/biota perairan lainnya di laut	Kegiatan penangkapan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna, dan sejenisnya yang dipengaruhi pasang surut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3422	SD00256.02.00			Penangkapan ikan/biota perairan lainnya di perairan umum	Kegiatan penangkapan ikan atau biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk, dan rawa yang bukan milik perorangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3423	SD00259.00.00			Pendampingan Psikososial	Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan terdiri atas sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban bencana.	1. Ada 2. Tidak Ada	Jumlah	Bantuan; Asistensi
3424	SD00260.00.00			Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.	1. Ada 2. Tidak Ada	Jumlah	Bantuan; Asistensi
3425	SE00093.00.00			Pendapatan Bruto	Pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Pendapatan bruto terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional/lainnya dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3426	SE00094.00.00			Pendapatan bunga	Bentuk pendapatan yang diterima oleh pemilik aset finansial, yaitu deposito, sekuritas hutang, pinjaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan (mungkin) akun lain yang diterima untuk menempatkan aset finansial saat pelepasan dari unit institusi lain	kebutuhan		
3427	SE00095.00.00			Pendapatan dari biaya pengiriman dengan invoice terpisah, pada barang yang dijual perusahaan ke pelanggan	Nilai pendapatan dari biaya angkut yang dibebankan/dibayar oleh pembeli.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3428	SE00096.00.00			Pendapatan dari jasa yang dihasilkan perusahaan	Nilai pendapatan dari penyediaan aktivitas jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3429	SE00097.00.00			Pendapatan dari kegiatan lain perusahaan air bersih.	Pendapatan/penerimaan lain merupakan seluruh nilai pendapatan yang diperoleh selain dari hasil produksi perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Juta Rupiah
3430	SE00098.01.00			Pendapatan jasa industri (maklun)	Pendapatan dari jasa industri perusahaan/usaha, apabila perusahaan/usaha ini menerima upah dari jasa industri (makloon), Jasa industri (makloon) di sini pada dasarnya adalah kegiatan pengolahan, tetapi bahan baku berasal dari pihak lain dan hasil olahannya diserahkan kepada pihak pemesan/pemilik bahan baku. Perusahaan hanya menerima upah mengilah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Nilai
3431	SE00098.02.00			Pendapatan jasa industri (maklun)	besarnya nilai jasa yang diterima usaha/perusahaan sebagai upah proses produksi yang diberikan pihak lain (isi nilai jasanya saja).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3432	SE00098.01.00			Pendapatan jasa industri (maklun)	Pendapatan dari jasa industri perusahaan/usaha, apabila perusahaan/usaha ini menerima upah dari jasa industri (makloon), Jasa industri (makloon) di sini pada dasarnya adalah kegiatan pengolahan, tetapi bahan baku berasal dari pihak lain dan hasil olahannya diserahkan kepada pihak pemesan. Perusahaan hanya menerima upah mengolah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Nilai
3433	SE00099.02.00			Pendapatan lain-lain	Pendapatan selain dari penjualan valuta asing dan harga pokok penjualan, misalnya hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan pedagang valuta asing.	1. Pendapatan dari jasa 2. Pendapatan sewa 3. pendapatan lainnya	Nilai	Rupiah;
3434	SE00099.05.00			Pendapatan Lain-lain	Nilai pendapatan dari jasa/produk sampingan	1. Pendapatan dari jasa 2. Pendapatan sewa 3. pendapatan lainnya	Nilai	Rupiah;
3435	SE00099.01.00			Pendapatan lainnya	Pendapatan yang berasal dari penjualan barang yang tidak diproses, jasa-jasa non industri lainnya, atau penjualan limbah/sampah produksi. perusahaan menjual menjual bentuk barang yang sama pada saat dibeli oleh perusahaan. Barang tersebut bisa bahan baku, bahan penolong, pembungkus, dsb. Pendapatan dari menyewakan barang modal, penerimaan jasa angkutan, dan penerimaan jasa-jasa non industri lainnya. Pendapatan dari hasil menjual limbah/sisa produksi yang tidak terpakai	1. Keuntungan penjualan barang yang tidak diproses 2. jasa-jasa non industri lainnya Contoh : Bahan baku dan Penolong, pembungkus dan jasa angkutan	Jumlah, Persentase	Nilai
3436	SE00099.04.00			Pendapatan lainnya	Pendapatan selain dari pendapatan hasil produksinya termasuk jasa industri (maklun)	1. Keuntungan/kerugian dalam bentuk yang sama 2. Bunga atas simpanan/bagi hasil/deviden/dll 3. Hasil imputasi	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4. Sumbangan, hadiah, hibah dan sejenisnya 5. Lainnya		
3437	SE00099.03.00			Pendapatan lainnya	Semua pendapatan lain di luar pendapatan dari nilai konstruksi yang diselesaikan yang diterima oleh perusahaan.	1. Jasa desain gambar 2. konsultan 3. pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan 4. pendapatan dari sewa lahan 5. pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan 6. keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang asing 7. pendapatan dari deviden 8. bunga 9. klaim asuransi 10. hak cipta 11. Lainnya	Nilai	Rupiah
3438	SE00100.00.00			Pendapatan penjualan barang perusahaan	Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang (tidak mencakup biaya angkut yang dibebankan/dibayar oleh pembeli)	1. Penjualan barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan (atau dengan komisi) 2. Penjualan barang yang tidak diproduksi sendiri	Nilai	Rupiah
3439	SE00101.00.00			Pendapatan perusahaan	Pendapatan/penerimaan lain merupakan seluruh nilai pendapatan yang diperoleh selain dari hasil produksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lainnya	perusahaan	kebutuhan		
3440	SE00102.00.00			Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Status Pemilikan Tempat Tinggal	Status Pemilikan Tempat Tinggal Yang Ditempati	1. Milik sendiri 2. Kontrak 3. Sewa 4. Dinas 5. Bebas sewa 6. Lainnya	Persentase	Persen
3441	SE00103.00.00			Pendapatan Rumah Tangga Sebulan Menurut Sumber Pendapatan ART yang Bekerja	Pendapatan dalam rupiah, baik yang berupa uang maupun barang/jasa selama periode survei yang lalu.	1. Upah/gaji 2. Hasil bersih usaha 3. Kepemilikan aset 4. Pendapatan dari pihak lain 5. Pendapatan lainnya	Persentase	Persen
3442	SE00104.00.00			Pendapatan Transfer	penerimaan desa yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku.	1. Dana Desa 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/kota 3. Alokasi Dana Desa 4. Bantuan Keuangan	nilai	ribu rupiah
3443	SE00105.00.00			Pendapatan/Penerimaan lain Usaha/Perusahaan penggalian	Pendapatan/penerimaan lain merupakan seluruh nilai pendapatan/penerimaan yang diperoleh selain dari hasil produksi perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Juta Rupiah
3444	ST00518.00.00			Pendederan/ Penggelondongan	Kegiatan pemeliharaan ikan berupa benih ukuran kecil menjadi benih ukuran lebih besar (tokolan/ gelondongan). Pendederan adalah pemeliharaan burayak sampai mencapai ukuran kira-kira 5 cm. Penggelondongan adalah pemeliharaan dari ukuran	1. air tawar 2. air laut 3. air payau	Massa	Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					benih sampai ukuran gelondongan kira-kira 5-10 cm.			
3445	SD00273.00.00			Pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.	1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal 3. PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu 4. PAUD-TAAM 5. PAUD-PAK 6. PAUD-BIA 7. TKQ 8. PAUD Inklusi 9. Kelompok Bermain 10. Tempat Penitipan Anak (Day Care).	Jumlah; persentase	Unit; persen
3446	SP00065.01.00			Pendidikan dasar	Jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah	1. SD/sederajat 2. SMP/sederajat	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3447	SP00065.02.00			Pendidikan dasar	Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.	1. SD/sederajat 2. SMP/sederajat	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
3448	SD00276.00.00			Pendidikan layanan khusus	Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
3449	SD00282.01.01			Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-Laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3450	SD00282.01.02			Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1	Klasifikasi Berdasarkan Usia: 1. Usia 0-14 tahun	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	2. Usia 15-64 tahun 3. Usia 65 tahun ke atas		
3451	SD00282.01.03			Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi Berdasarkan William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates 1. Post Gen Z (Lahir tahun 2013 dst) 2. Generasi Z (Lahir tahun 1997-2012) 3. Milenial (Lahir tahun 1981-1996) 4. Generasi X (Lahir tahun 1965-1980) 5. Baby Boomer (Lahir tahun 1946-1964) 6. Pre-Boomer (Lahir tahun 1945 dan sebelumnya)	Jumlah; persentase	Orang; persen
3452	SD00282.01.04			Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3453	SD00282.02.00			Penduduk	Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Catatan: pendekatan konsep "de facto"	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3454	SD00282.03.00			Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep "de jure" atau lebih tepatnya konsep "tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal" (usual residence).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3455	SD00282.04.00			Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3456	SP00066.00.00			Penduduk penyandang cacat/ disabilitas	Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3457	SP00067.00.00			Penduduk Tunawisma	Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal (rumah). Penduduk tunawisma antara lain penduduk yang tinggal di kolong jembatan, pasar, terminal, stasiun, emperan toko, taman umum atau berbagai fasilitas umum lainnya, gelandangan di trotoar jalan, dan manus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-Rata; Persentase	Orang; Persen
3458	SP00068.00.00			Penduduk Usia Kerja	Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.	1. Angkatan kerja 2. Bukan Angkatan kerja	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3459	ST00520.00.00			Penebangan hutan	Kegiatan yang meliputi penebangan kayu yang menghasilkan kayu gelondongan (baik dengan ataupun tanpa kulit), potongan kayu yang masih kasar seperti bambu, meranti, pulai, keruing, meramin, kayu besi, dan kayu hitam.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	volume	m3
3460	SD00291.02.00			Penelitian	Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penilitian; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pengetahuan dan teknologi.			
3461	SE00106.00.00			Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan pengembangan (Litbang) adalah kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan untuk merancang penerapan baru.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Nilai
3462	SD00294.00.00	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Penerangan/Listrik	Produksinya adalah produksi kotor, yaitu termasuk konsumsi yang dipakai stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan/tranformer dianggap sebagian dari stasiun. Listrik umum adalah listrik yang dihasilkan untuk tujuan dijual dengan memproduksi, mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik. Ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta, koperasi, pemerintah daerah/desa, dan pemerintah pusat. Listrik yang diproduksi dan digunakan sendiri adalah listrik yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya, rumah tangga atau perusahaan industri yang memproduksi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Penggunaan pada stasiun pembangkit dan yang hilang termasuk konsumsi oleh stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan dianggap sebagai bagian dari pembangkit energi listrik	1. Listrik PLN dengan meteran, 2. Listrik PLN tanpa meteran, 3. Listrik non PLN, 4. Bukan listrik.	Jumlah	Kwh
3463	SE00107.00.00			Penerimaan Daerah	Uang yang masuk ke kas daerah	1. Pendapatan Daerah 2. Penerimaan pembiayaan	nilai	ribu rupiah
3464	SE00109.00.00			Penerimaan Devisa dari Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	Penerimaan negara dari hasil perdagangan TSL ke luar negeri.	1. Tumbuhan atau satwa liar hasil alam 2. Tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia	Jumlah	Rupiah
3465	SE00108.00.00			Penerimaan	Pendapatan yang diterima selain penerimaan bersih	1. penerimaan dari jasa	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Lainnya	dari jasa peternakan dan keuntungan dari barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama yang menghasilkan keuntungan	peternakan 2. penerimaan dari penjualan kotoran ternak 3. keuntungan dari penjualan barang 4. lainnya		
3466	SD00301.00.00			Penerimaan pembiayaan	Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	nilai	ribu rupiah
3467	SD00304.00.00			Penerimaan perusahaan budidaya ikan	Penerimaan perusahaan budidaya ikan adalah seluruh penerimaan yang diterima perusahaan budidaya ikan meliputi penerimaan dari produksi, jasa perikanan, keuntungan penjualan barang dan penerimaan lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	nilai	Rupiah
3468	SD01419.01.00			Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kawasan
3469	SD01481.00.00			Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen
3470	SD01577.00.00			Pengadaan barang/jasa pemerintah	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e procurement) dengan cara e-tendering atau e-purchasing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen
3471	SD01622.00.00			Pengadaan Secara Elektronik/E-Procurement	Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3472	SP00404.00.00			Pengalaman buruk dalam perjalanan	Pengalaman buruk yang dialami sesuai persepsi responden selama menjadi komuter di tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3473	ST00986.00.00			Pengamanan kawasan hutan	Pengertian dari Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dan Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.Upaya pencegahan dan Penanggulangan perusakan hutan,	Klasifikasi bentuk wilayah hutan dalam kegiatan perlindungan hutan: 1. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), 2. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 3. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).	Jumlah	Hektar
3474	SD01370.02.00			Pengangguran	Pengangguran terdiri dari: 1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (Putus asa). 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.	1. Pengangguran Terbuka 2. Pengangguran Terselubung	Jumlah; persentase	Orang; persen
3475	SD01375.00.00			Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak.	1. Pemukulan 2. Penamparan 3. Pengeroyokan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.			
3476	SD01392.00.00			Pengasapan ikan	Pengolahan ikan dengan cara diasapkan, baik secara langsung dekat dengan sumber asap maupun tidak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3477	SE00404.00.00			Pengawas Koperasi	Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus	Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	Pengawas Koperasi
3478	ST01024.00.00			Pengawetan ikan	kegiatan mengawetkan ikan agar dapat tahan lama disimpan, dengan cara penggaraman, pembekuan, dan pengeringan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3479	SE00407.00.00			Pengelola Usaha Koperasi	Pengelola usaha koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional	1. Manajer 2. Asisten Manajer 3. Karyawan	Jumlah	Orang
3480	SD01441.00.00			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dgn tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan	1. RPDAS sudah di internalisasi ke dalam RTRW 2. RPDAS belum di internalisasi ke dalam RTRW	Jumlah	Dokumen
3481	SD01441.00.00			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dgn tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan	1. RPDAS sudah di internalisasi ke dalam RTRW 2. RPDAS belum di internalisasi ke dalam RTRW	Jumlah	Dokumen
3482	SD01450.00.00			Pengelolaan Kualitas Air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualias air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3483	SD01471.00.00			Pengelolaan Sumber Daya Air	Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
3484	SE00414.00.00			Pengeluaran angkutan, pengiriman dan pos	Biaya angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos, dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan jasa angkutan, pengiriman/ekspedisi, biaya pergudangan, serta penggunaan jasa pos dan jasa kurir yang disediakan oleh pihak lain.	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah
3485	SE00415.00.00			Pengeluaran Bahan Baku dan bahan penolong	Pengeluaran usaha/perusahaan untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong	Dijelaskan berdasarkan: Bahan baku yang digunakan; asal perolehan (dibeli; hasil kebun/pekarangan; lainnya); Satuan standar; Banyaknya; Nilai	Jumlah	Satuan standar; Rupiah
3486	SE00418.00.00			Pengeluaran Bahan Material	Nilai penggunaan bahan material/bangunan yang digunakan untuk seluruh proyek baik yang sudah selesai 10 persen maupun yang belum selesai tapi sudah dimulai pekerjaan konstruksinya. Tuliskan 12 jenis dan sisanya dimasukkan dalam bahan material lainnya.	Semen, besi, pasir, batu bata, batu pondasi, baja, seng dan lain-lain	Jumlah	Ribu Rupiah
3487	SD01496.00.00			Pengeluaran daerah	uang yang keluar dari kas daerah	1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak langsung 3. Pengeluaran pembiayaan	Nilai	ribu rupiah
3488	SE00421.00.00			Pengeluaran jasa industri yang	Biaya yang dikeluarkan untuk ongkos produksi/pengolahan yang dilakukan oleh usaha/perusahaan lain atau pihak lain (maklun).	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dikerjakan oleh pihak lain				
3489	SE00422.00.00			Pengeluaran kemasan, bahan pembungkus, pengepakan	Bahan pembungkus dan pengepakan adalah segala bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk pula kayu untuk pengepak.	Pengeluaran usaha/perusahaan yang habis untuk sebulan	Jumlah	Rupiah
3490	SE00423.00.00			Pengeluaran lain-lain	Pengeluaran perusahaan untuk seluruh kegiatan perusahaan selain balas jasa pekerja dan bahan bakar.	listrik, air, telepon, internet, dan komunikasi lainnya, alat tulis kantor (ATK), administrasi bank dan perantara keuangan, angkutan, pengiriman, ekspedisi, penggudangan, pos, dan jasa kurir, pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan kecil barang modal, perjalanan dinas pekerja, penelitian dan pengembangan, sewa bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan alat perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB, bea masuk dan cukai, pajak ekspor/impor,	Jumlah	Ribu Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pajak penjualan, dan pajak lainnya, penyusutan dan amortisasi, pengeluaran jasa intelektual, biaya lainnya (misal retribusi, iuran organisasi, pengeluaran pakaian kerja, makanan, dll).		
3491	SE00425.00.00			Pengeluaran pekerja lainnya	Pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja lainnya, perusahaan yang mempunyai kantor pusat, pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja di sini tidak termasuk pekerja/ karyawan di kantor pusat	Upah/gaji, Upah lembur, tunjangan, premi iuran BPJS ketenagakerjaan, premi iuran BPJS kesehatan, lainnya	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
3492	SE00426.00.00			Pengeluaran pekerja produksi	Pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja produksi, perusahaan yang mempunyai kantor pusat, pengeluaran perusahaan/usaha untuk balas jasa pekerja di sini tidak termasuk pekerja/ karyawan di kantor pusat	Upah/gaji, Upah lembur, tunjangan, premi iuran BPJS ketenagakerjaan, premi iuran BPJS kesehatan, lainnya	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
3493	SE00427.00.00			Pengeluaran pembiayaan	pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
3494	SE00428.00.00			Pengeluaran pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal	Biaya pembelian suku cadang dan biaya untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja (berfungsi) tanpa menambah kapasitas atau umur pakai, dan tidak mengubah bentuk barang modal.	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah
3495	SD01588.00.00			Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran oleh sektor pemerintah termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang berada di bawah judul pembelian pemerintah dan	Classification of the Functions of Government (COFOG)	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					termasuk pengeluaran yang tidak untuk barang dan jasa, yang disebut pembayaran transfer.			
3496	SD01602.00.00			Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian	Meliputi pengeluaran untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup; dan juga pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan kementerian Pekerjaan Umum, serta pengeluaran subsidi untuk pertanian (antara lain pupuk dan benih)	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian	Nilai	Rupiah
3497	SE00435.00.00			Pengeluaran perusahaan air bersih	Pengeluaran perusahaan merupakan seluruh pengeluaran/biaya baik pengeluaran operasional maupun non operasional di luar balas jasa pekerja.	Provinsi	Jumlah	Juta Rupiah
3498	ST01071.00.00			Pengeluaran perusahaan budidaya ikan	Pengeluaran perusahaan budidaya ikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan budidaya ikan yang meliputi pengeluaran untuk pekerja, pengeluaran untuk sarana produksi, pengeluaran untuk bahan bakar, listrik, air dan gas, pengeluaran untuk bahan-bahan, jasa dan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3499	SE00440.00.00			Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Menurut Kegiatan Ekonomi Kepala Rumah Tangga (KRT)	Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/ dianggap/ ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.	1. Tidak bekerja 2. Bekerja Buruh/ Karyawan 3. Bekerja Pengusaha	Persentase	Persen
3500	SE00443.00.00			Pengeluaran sewa gedung, tanah, mesin serta peralatan	Pengeluaran sewa atau kontrak yang keluarkan perusahaan dalam satu survei, jika pembayaran sewa untuk lebih dari satu tahun dituliskan pada tahun survei saja, jika di bayarkan tahun sebelumnya atau	Daya tersambung	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					belum dibayarkan makan nilai di perkirakan di tahun survei			
3501	SE00444.00.00			Pengeluaran sewa kendaraan, mesin, peralatan, dan barang modal lainnya	Biaya sewa kendaraan dan mesin (tanpa operator), peralatan, dan alat perlengkapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa kendaraan dan mesin (tanpa operator), alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan sewa barang modal lainnya.	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah
3502	SE00445.00.00			Pengeluaran sewa tanah/bangunan	Biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanah/bangunan usaha/perusahaan	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah
3503	SE00448.00.00			Pengeluaran telepon, internet dan komunikasi lainnya	Biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa untuk kepentingan perusahaan.	Pengeluaran usaha/perusahaan sebulan	Jumlah	Rupiah
3504	ST01081.00.01			Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak	**Kegiatan mengirimkan ternak dan hasil ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain), baik yang keluar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri**	**1. Ternak Besar** **2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**	Jumlah; Massa	Ekor; Ton
3505	ST01081.00.02			Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak	**Kegiatan mengirimkan ternak dan hasil ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain), baik yang keluar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri**	**1. Daging** **2. Telur** **3. Susu** **4. Kulit**	Jumlah; Massa	Ekor; Ton
3506	ST01082.00.00			Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam	Bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan sesuai dengan potensi desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Rakyat (PUGAR)				
3507	SE00471.01.00			Pengenalan tempat	Tempat kegiatan proses produksi berlangsung di wilayah NKRI	1. Provinsi, 2. Kabupaten/Kota 3. Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah	Unit
3508	SE00471.02.00			Pengenalan tempat	Tempat kegiatan perusahaan berlangsung di wilayah NKRI	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Swasta Nasional dan Asing	Jumlah	Unit
3509	SD01715.00.00			Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan	Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; b. mengurangi penggunaan Air Tanah; c. menggunakan kembali Air Tanah; d. mendaur ulang Air Tanah; e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan; f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Cara
3510	SD01726.00.00			Pengendalian Daya Rusak Air	Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Upaya; Persen
3511	SD01737.00.00			Pengendalian Kebakaran	Merupakan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pantauan hotspot dengan	1. Lahan Tanah Gambut 2. Lahan Tanah Mineral	Jumlah; Luas	Titik Api (Hotspot); Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Hutan dan Lahan (Karhutla)	menggunakan satelit (NOAA)			
3512	ST01083.01.00			Pengeringan ikan	Pengolahan ikan dengan cara dikeringkan dengan sinar matahari atau mesin pengering, baik menggunakan garam atau tidak. Daya awetnya terutama sekali disebabkan oleh proses pengeringan/ penggaraman tanpa menimbulkan penghancuran pada ikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3513	ST01083.02.00			Pengeringan ikan	Cara menurunkan kadar air dengan menggunakan panas matahari, hembusan udara luar/hembusan udara panas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3514	SD01757.00.00			Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3515	SD01768.00.00			Pengetahuan responden mengenai metode kontrasepsi	Diperoleh dengan cara menanyakan semua jenis alat atau cara kontrasepsi yang pernah didengar untuk menunda atau menghindari terjadinya kehamilan dan kelahiran. Bila responden tidak dapat menjawab secara spontan pewawancara membacakan penjelasan dari tiap alat/cara KB dan menanyakan apakah responden mengetahui alat/cara KB tersebut. Metode atau cara kontrasepsi dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kontrasepsi modern dan cara tradisional. Metode kontrasepsi modern meliputi sterilisasi perempuan, sterilisai pria, pil KB, IUD, suntik KB, susuk, kondom pria, intravag, diafragma, kontrasepsi darurat, dan metode amenorrhea laktasi (MAL).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3516	UL00015.00.00			Pengetahuan/produk tradisional	seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.	1. Kerajinan tradisional 2. Busana tradisional 3. Metode Penyebatan Tradisional 4. Obat tradisional	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
3517	ST01084.00.00			Penggaruk (dredgess)	Kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau berganco di bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/ bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3518	SD01811.00.00			Penggunaan Jasa	Setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Penggunaan; Persen
3519	UL00016.00.00			Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas	Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas baik dari energi fosil maupun energi terbarukan.	a. Bensin b. Solar/HSD/ADO c. Batubara d. Briket Batubara e. Gas dari PGN f. Gas bukan dari PGN g. CNG h. LPG i. Pelumas j. Batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergaskan (gasified coal) k. Gas metana batubara (coalbed methane) l. Angin m. Biomassa	Volume; Nilai	Satuan berat; Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						n. Tenaga Surya o. Tenaga Air p. Biofuel q. Refused Derive Fuel (RDF) r. Sludge		
3520	UL00017.00.00			Penggunaan Bahan Baku	Bahan Baku adalah bahan mentah utama yang digunakan untuk membuat barang hasil produksi. Bahan mentah ini kemudian akan diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan ke bentuk lain, baik barang jadi maupun barang setengah jadi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Nilai	Satuan berat; Rupiah
3521	UL00018.00.00			Penggunaan Bahan Penolong	Bahan Penolong adalah bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Nilai	Satuan berat; Rupiah
3522	ST01114.00.00			Penggunaan bibit yang dimodifikasi secara genetis (Genetically Modified/GM) (untuk usaha pertanian)	apakah bibit GM digunakan oleh usaha pertanian. Tanaman Genetically Modified (GM) tumbuh dari bibit GM, yang dipatenkan dan dikembangkan oleh pihak swasta dan memiliki kombinasi baru dari material genetis yang diperoleh melalui penggunaan bioteknologi modern.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah bibit	gram/kilogram
3523	SE00473.00.00			Penggunaan Internet	Penggunaan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.	1. Promosi/iklan 2. Pemasaran/penjualan produk 3. Pembelian bahan baku 4. Pinjaman fintech 5. Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan	Jumlah; Persentase	Penggunaan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3524	SE00474.00.00			Penggunaan listrik Non PLN	Penggunaan tenaga listrik yang dibeli ke selain dari PLN	1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1300 VA 4. 2200 VA 5. 3500 VA 6. 4400 VA 7. 5500 VA 8. 6600 VA 9. 7700 VA 10. 10600 VA 11. 11000 VA 12. 13200 VA 13. 16500 VA 14. 23000 VA 15. 33000 VA 16. 41500 VA 17. 53000 VA 18. 66000 VA 19. 82500 VA 20. 95000 VA 21. 105000 VA 22. 120000 VA 23. 131000 VA 24. 147000 VA 25. 164000 VA 26. 170000 VA 27. 175000 VA	Jumlah	Nilai, Keh
3525	SE00475.00.00			Penggunaan listrik PLN	Penggunaan tenaga listrik yang dibeli ke PLN	1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1300 VA 4. 2200 VA 5. 3500 VA	Jumlah	Nilai, Keh

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. 4400 VA 7. 5500 VA 8. 6600 VA 9. 7700 VA 10. 10600 VA 11. 11000 VA 12. 13200 VA 13. 16500 VA 14. 23000 VA 15. 33000 VA 16. 41500 VA 17. 53000 VA 18. 66000 VA 19. 82500 VA 20. 95000 VA 21. 105000 VA 22. 120000 VA 23. 131000 VA 24. 147000 VA 25. 164000 VA 26. 170000 VA 27. 175000 VA		
3526	SE00476.00.00			Penggunaan teknologi pada proses produksi	Cara, metode, dan proses utama yang digunakan dalam proses produksi.	1. Manual 2. Mekanik 3. Elektronik dan Digital (Robot, Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS, Manufaktur Terintegrasi Komputer (Computer Integrated Manufacturing – CIM))	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						4.Artificial Intelegent (Automated Guided Vehicles - AGV)		
3527	SE.00477.00.00			Penghambat Kinerja	Merupakan permasalahan yang dapat menghambat kinerja bisnis konstruksi. 1. Akses ke kredit 2. Suku bunga pinjaman/kredit 3. Kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya 4. Pemirunan Permintaan Jasa Konstruksi Secara Umum 5. Persaingan yang Sangat Ketat 6. Kesulitan pasokan bahan bangunan/material dan komponen lainnya 7. SDM yang trampil/ahli 8. Birokrasi Administrasi Pemerintahan 9. Politik dan keamanan 10. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	1. Tidak Bermasalah 2. Sedikit Bermasalah 3. Cukup Bermasalah 4. Bermasalah 5. Sangat Bermasalah	Persentase	persen
3528	SE.00478.00.00			Penghambat Kinerja Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19	Merupakan permasalahan yang dapat menghambat kinerja bisnis konstruksi sebelum dan saat pandemi covid 19. 1. Akses ke kredit 2. Suku bunga pinjaman/kredit 3. Kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya 4. Pemirunan Permintaan Jasa Konstruksi Secara Umum 5. Persaingan yang Sangat Ketat 6. Kesulitan pasokan bahan bangunan/material dan komponen lainnya 7. SDM yang trampil/ahli 8. Birokrasi Administrasi Pemerintahan	1. Tidak Bermasalah 2. Cukup Bermasalah 3. Sangat Bermasalah	Persentase	persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					9. Politik dan keamanan 10. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)			
3529	SE00479.00.00			Penghargaan UMKM	Insentif tak benda yang diperoleh oleh UMKM atas pencapaian yang baik (prestasi) dalam berusaha.	1. Pemerintah 2. Non-Pemerintah 3. Internasional	Jumlah	Penghargaan
3530	SD01841.00.00			Penghematan penggunaan air tanah	Bagian dari upaya konservasi Air Tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah. Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan agar Air Tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan. Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan efisien dan rasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3531	SE00480.00.00			Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma	Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat dalam Podes mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3532	ST01115.02.00			Pengolahan hasil hutan	Melakukan perubahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau bahan mentah menjadi barang jadi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3533	ST01116.00.00			Pengolahan ikan	kegiatan mengolah ikan menjadi bahan olahan yang siap digunakan, tetapi belum tentu bahan itu tahan lama. Misalnya digoreng, direbus, atau dimasak dengan bumbu tertentu.	1. Pengeringan ikan 2. Pemindangan/perebusan ikan 3. Pengasapan ikan 4. Pembuatan petis 5. Pembuatan terasi	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Pengolahan ikan lainnya		
3534	ST01117.00.00			Pengolahan ikan lainnya	Pengolahan ikan dengan cara misalnya dibuat abon dan dikalengkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3535	SD00051.01.00			Pengolahan Limbah B3	Proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
3536	SD00051.02.00			Pengolahan Limbah B3	kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
3537	ST01118.00.00			Pengolahan produksi hasil peternakan	Kegiatan mengubah bentuk hasil/produksi utama peternakan dari hasil peternakan sendiri menjadi produk lain yang memiliki nilai produksi yang lebih besar. Misalnya Pembuatan telur asin dan pembuatan dendeng sapi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton, kg
3538	ST01119.00.00			Pengolahan Rumput Laut	rangkaian kegiatan dan atau perlakuan yang diberikan untuk menambah nilai guna dari bahan baku (rumput laut) hingga menjadi produk akhir (ATC/chip, produk makanan, tepung, lainnya) kecuali hasil panen rumput laut basah yang dikeringkan (rumput laut kering)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton, kg
3539	ST01120.00.00			Pengolahan tanah konservasi (rendah)	Melibatkan praktik pengolahan tanah atau praktik yang meninggalkan sisa-sisa dedaunan (setidaknya 30-35 persen) pada permukaan tanah untuk control erosi dan konservasi kelembaban. Tanah seharusnya normalnya tidak diinversi tapi hanya dicabik (ripped).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha
3540	ST01121.00.00			Pengolahan tanah konvensional	melibatkan pembalikan/inversi (turning over) tanah pada seluruh area yang dilakukan proses pengolahan tanah termasuk olah tanah inversi/pembajakan menggunakan perkakas atau peralatan olah tanah, seperti bajak singkal atau bajak piringan atau peralatan olah tanah bertenaga, seperti rotovator.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Dalam kasus lain, bajak tradisional, dengan kayu atau besi, ditarik dengan tenaga hewan mungkin digunakan.			
3541	SE000001.00.00			Penguasaan dan penggunaan lahan	Luas tanah yang dikuasai dan penggunaannya sebagai lahan efektif dan lahan sarana prasarana berdasarkan SK yang berlaku.	1. Penggunaan lahan sbg lahan efektif 2. Penggunaan lahan sbg lahan untuk sarana dan prasarana 3. Penggunaan lahan sbg kawasan lindung	Luas	Ha
3542	ST01122.00.00			Pengujian fisika	Uji ini menggunakan pengukuran terhadap: a) Suhu pusat ikan/udang, metode ini dapat diterapkan pada ikan beku, udang beku untuk mengetahui apakah cara pembekuan telah memenuhi persyaratan suhu pusat standar adalah -10 °C sampai dengan -18 °C. b) Pengecekan fisika ikan kaleng antara lain seaming, kehampaan, bobot tuntas, kepekatan saus, Ph dan lain-lain. Metoda ini dapat diterapkan untuk mengetahui keadaan phisik mutu ikan kaleng tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pengujian
3543	ST01122.00.00			Pengujian kimia	Uji ini menggunakan pengukuran terhadap: a) Kadar air (%), yang dimaksud kadar air adalah persentase kandungan air dan hasil akhir produk perikanan. b) Kadar protein, metoda ini digunakan untuk mengetahui kandungan asam amino yang terdapat pada produk perikanan. c) Angka peroksida, angka peroksida merupakan indikator ketengikan ikan, diterapkan kepada semua lemak dan minyak ikan dan lemak yang diekstraksi dari ikan. d) Penentuan angka VOD, metoda ini dapat diterapkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pengujian

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pada semua lemak/minyak. e) Logam-logam berat, metoda ini dipakai untuk menentukan tingkat kontaminasi logam berat terhadap produk perikanan antara lain Pb, Hg, Sn, dan lain-lain.			
3544	ST011123.00.00			Pengujian mikrobiologi	Cara pengujian ini merupakan cara pengujian yang penting dalam penerapan mutu produk dengan menggunakan peralatan dan media untuk mengetahui perubahan-perubahan mutu dan kontaminasi mikroba yang berbahaya dalam produk perikanan tersebut. Sasaran pengujian mikrobiologi adalah: 1. T.P.C Total Plate Count (jumlah hitung bakteri) yang terdapat dalam satuan berat produk. 2. Bacillus cereus Bakteri aerob membentuk spora dan umum dijumpai dalam produk makanan mentah dan diproses. 3. Clostridium botulinum Bakteri an aerobik, membentuk spora bottulism, racun yang berbahaya; dihasilkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung toxin botulinum yang diproduksi pada saat bakteri tersebut tumbuh dalam makanan dan dapat menyebabkan kematian pada yang memakannya. 4. Escherichia coli Mikroorganisme coliform adalah aerobik sampai fakultatif an aerobik. Coliform digunakan mikroorganisme indikator pada kontrol sanitasi. 5. Salmonella Mikroorganisme ini adalah aerobik digunakan sebagai mikroorganisme indikator pada kontrol sanitasi. 6. Vibrio cholera Adalah species vibrio cholera yang dapat menggumpal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pengujian

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pada Inaba, Ogawa atau Hikojima antserum yang bersifat patogen terhadap manusia. 7. Kapang (jamur), ragi (yeast) Sebagai indikator kurang saniternya peralatan yang digunakan dan kontaminasi udara terhadap produk perikanan yang diolah.			
3545	ST01124.00.00			Pengujian organoleptik	, uji ini merupakan cara pengujian yang penting dalam penerapan mutu produk pertanian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk perikanan tersebut. Sasaran alat indera ini ditujukan terhadap kenampakan, bau, rasa dan konsistensi serta beberapa faktor lain yang diperlukan dari masing-masing spesifikasi produk yang dinilai.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pengujian
3546	ST01125.00.00			Pengumpulan hasil hutan	Kegiatan yang meliputi pengumpulan hasil hutan seperti usaha mencari daban, rotan, karet hutan, kulit kayu, daun-daunan, sarang burung walet, dan akar-akaran serta penangkutannya sampai ke tempat pengumpulan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3547	SE00395.00.00			Penguranagan barang modal	nilai perjualan/pengurangan barang modal	Tanah Bangunan/gedung usaha Bangunan tempat tinggal mesin dan perlengkapan alat transportasi produk kekayaan intelektual Peralatan Barang modal lainnya	Jumlah, Persentase	Nilai
3548	SD01353.00.00			Penguranagan	Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah.	1. Pembatasan	jumlah;	Metrik Ton;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sampah	Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah	timbunan sampah 2. Pendauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah	persentase	Persen
3549	SE00396.00.00			Pengurus Koperasi	Pengurus Koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	Pengurus Koperasi
3550	SE00397.00.00			Pengusaha	Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan	1.Pemilik 2.Penanggung Jawab	Jumlah	orang, persekutuan, badan hukum
3551	SE00398.00.00			Pengusaha / Penanggung Jawab Usaha / Perusahaan	Pemilik/Direktur Utama/ Pimpinan wilayah yang bertanggung jawab atas operasional usaha/perusahaan.	Nama, Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	orang
3552	ST00987.00.00			Pengusahaan hutan	Kegiatan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan baik yang diusahakan oleh perorangan ataupun oleh suatu badan usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3553	ST00988.00.00			Penjualan Hasil Produksi Yang Tidak Dipanen Sendiri	Penjualan Hasil Produksi Yang Tidak Dipanen Sendiri meliputi dijonkan dan ditebaskan.	1. Dijonkan 2. Ditebaskan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
3554	SE00399.00.00			Penjualan valuta asing	Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan valuta asing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	rupiah
3555	SP00363.00.00			Pensiunan	Seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Orang;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					atau atas permintaan sendiri dan berhak atas pesangon atau dana pensiun yang diberikan setiap bulan sampai ia meninggal dunia.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3556	SD01359.01.00			Penutupan Hutan	Penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas ; Persentase	Ha; Persen
3557	SD01359.02.01			Penutupan Lahan	Penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah	Klasifikasi Penutupan lahan menurut Kelas: 1. Kelas Hutan 2. Kelas Non Hutan	Luas	Ha
3558	SD01359.02.02			Penutupan Lahan	Penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah	Klasifikasi kelas tutupan lahan menurut hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI 1. Hutan lahan kering primer 2. Hutan Lahan kering sekunder/bekas tebangan 3. Hutan Rawa Primer 4. Hutan Rawa sekunder/bekas tebangan 5. Hutan Mangove Primer 6. Hutan Mangove Sekunder/Bekas Tebangan 7. Hutan Tanaman 8. Perkebunan/kebun 9. Semak Belukar	Luas	Ha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						10. Semak Belukar Rawa 11. Savanna / Padang rumput 12. Pertanian Lahan Kering 13. Pertanian Lahan Kering Campur Semak/ Kebun campur 14. Sawah 15. Tambak 16. Permukiman/ Lahan Terbangun 17. Transmigrasi 18. Tanah Terbuka 19. Pertambangan 20. Tubuh Air 21. Rawa 22. Awan 23. Bandara/ Pelabuhan		
3559	ST00989.00.00			Penyakit Argulosis (kutu ikan) ikan budidaya air tawar	Disebabkan oleh: Parasit Argulus Tanda-tanda penyakit: - Ikan menjadi kurus disebabkan kehilangan cairan tubuh karena dihisap oleh parasit. - Terdapat tanda-tanda darah di tempat parasit menempel. - Kematian ikan akan terjadi jika jumlah parasit terlalu tinggi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3560	ST00990.00.00			Penyakit bakterial ikan budidaya air	Antara lain penyakit borok pangkal strip ekor dan penyakit mulut merah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				payau				
3561	ST00991.00.00			Penyakit bakterial ikan budidaya air tawar	Penyakit yang disebabkan oleh bakteria disekitar sistem perairan. Tanda-tanda penyakit: - Badan ikan kemerahan-merahan dan jika penyakit berlanjut, tanda kemerahan-merahan akan merebak ke seluruh badan dan menjadi ulser. - Ikan tidak berselera untuk makan. - Kadangkala mata dan perut ikan menjadi bengkak. - Tingkat kematian oleh bakteria tinggi dan serempak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3562	ST00992.00.00			Penyakit bintik putih (white spot) ikan budidaya air tawar	Disebabkan oleh parasit protozoa yang dinamakan Ichthyophthirius multifilis Tanda tanda penyakit: - Ikan berenang tanpa arah yang tertentu untuk melepaskan parasit tersebut. - Lapisan luar kulit menjadi kelabu dan terdapat bintik-bintik putih pada seluruh badan. - Bintik-bintik putih dan pucat pada insang menunjukkan kerusakan insang dan menyebabkan ikan sukar untuk bernafas. Yang menyebabkan ikan timbul kepermukaan untuk bernafas. - Ikan merasa gatal-gatal dan akan mengesekkan badan ditebing kolam atau sangkar. - Ikan tidak makan. - Mata ikan menjadi kelabu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3563	ST00993.00.00			Penyakit Dactylogyrosis (penyakit kutu insang) ikan budidaya air tawar	Disebabkan oleh: Parasit Dactylogyrus Tanda-tanda penyakit: - Insang kelihatan berdarah dan lendir berlebihan - Dalam keadaan serius filamen insang akan rusak dan operkulum ikan tidak boleh tertutup dengan sempurna mengakibatkan kesukaran bernafas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3564	ST00994.00.00			Penyakit	Disebabkan oleh: Parasit Gyrodactylus	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Ekor;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Gyrodactylosis (penyakit kutu insang) ikan budidaya air tawar	Tanda-tanda penyakit: Sama dengan penyakit bintik putih	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3565	ST00995.00.00			Penyakit Ichthyobodo, Trichodina & Chilodonella ikan budidaya air tawar	Tanda-tanda penyakit sama seperti penyakit bintik putih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3566	ST00996.00.01			Penyakit ikan	Sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung	1. Penyakit bakterial 2. Penyakit protozoa	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3567	ST00996.00.02			Penyakit ikan	Sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung	1. Penyakit Bintik Putih (white spot) 2. Ichthyobodo, Trichodina & Chilodonella 3. Myxosporidiosis 4. Dactylogyrosis (penyakit kutu insang) 5. Gyrodactylosis (penyakit kutu insang) 6. Argulosis (kutu ikan) 7. Lernaesis (cacing jarum) 8. Penyakit yang disebabkan oleh bakteria	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3568	ST00996.00.03			Penyakit ikan	Sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung	1. Penyakit pada kulit 2. Penyakit pada insang 3. Penyakit pada organ	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(alat-alat dalam)		
3569	ST00997.00.00			Penyakit Lernaesis (cacing sauh) ikan budidaya air tawar	Disebabkan oleh: parasit Lernaea sp. Tanda-tanda penyakit: - Terdapat tanda-tanda merah pada badan; - Ikan yang kecil selalunya mati dan ikan yang besar akan mengalami kekurangan berat badan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3570	ST00998.00.00			Penyakit Myxosporidiosis ikan budidaya air tawar	Disebabkan oleh parasit Myxobolus dan Henneguya Tanda-tanda penyakit: - Ikan menjadi pucat (serius). Sista berwarna putih dan parasit yang bulat - (ukuran 2-4 mm) akan dapat dilihat pada insang dan kadangkala insang menjadi berkelompok; - Kulit ikan menjadi bengkak-bengkak (parasit Myxobolus) - Dalam keadaan biasa, terjadi kematian secara perlahan-lahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3571	ST00999.00.00			Penyakit pada insang ikan budidaya air laut	Ikan terlihat sulit bernafas. Tutup insang mengembang dan lembaran-lembaran insang pucat. Pada lembaran-lembaran insang terlihat bintik merah yang disebabkan oleh pendarahan kecil (peradangan). Jika terdapat bintik-bintik putih pada insang, hal ini diebabkan oleh parasit kecil yang menempel pada tempat tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3572	ST00999.00.00			Penyakit pada kulit ikan budidaya air laut	Kulit ikan menunjukkan warna pucat dan berlendir. Tanda ini terlihat jelas pada ikan yang berwarna gelap. Penyakit yang disebabkan oleh jamur menimbulkan bercak-bercak warna kelabu, putih atau kehitam-hitaman pada kulit ikan. Ikan yang menderita penyakit kulit kadang-kadang menggosok-gosokkan badannya pada suatu benda di dalam air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3573	ST01000.00.00			Penyakit pada organ dalam ikan budidaya	Perut ikan membengkak dengan sisik-sisik ikan berdiri (penyakit dropsy), dapat juga sebaliknya, perut menjadi sangat kurus. Kotoran ikan berdarah, menandakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				air laut	adanya radang usus. Penyakit pada gelembung renang menyebabkan ikan berenang terjungkir balik karena terganggunya keseimbangan badan.			
3574	ST01001.00.00			Penyakit protozoa ikan budidaya air payau	a) Cryptocaryonosis Tanda klinis ikan yang terserang adalah ikan seperti ada gangguan pernafasan, bercak putih pada kulit, produksi mukus yang berlebihan, kadang disertai dengan hemoragi, kehilangan nafsu makan sehingga ikan menjadi kurus. Erosi (borok) dapat terjadi karena infeksi sekunder dan bakteri. b) Infestasi Trichodina Ikan yang terserang Trichodina biasanya warna tubuhnya terlihat pucat, produksi lendir yang berlebihan dan terlihat kurus. Diagnosis dapat dilakukan dengan cara melakukan pengerokan (scraping) pada kulit, atau mengambil kembaran insang dan melakukan pemeriksaan secara mikroskopis. c) Caligus sp. Parasit golongan Crustacea. Parasit jenis ini sering ditemukan baik pada induk ikan maupun di tambak. Persempelan ktoparasiti ini dapat menimbulkan luka, dan akan lebih parah lagi karena ikan yang terinfeksi dengan parasit sering menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding bak atau substrat kerasi lainnya. Timbulnya luka akan diikuti dengan infeksi bakteri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
3575	SD01365.00.00			Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/Penyandang; Persen
3576	ST01002.00.00			Penyebaran	Kotoran diambil dari kandang dan disebarkan ke lahan	Klasifikasi berdasarkan	Volume	Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				langsung setiap hari	pertanian atau padang rumput dalam kurun waktu 24 jam dari eksresi; tidak diperlukan penyimpanan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
3577	SE00400.00.00			Penyediaan Logistik	Upaya atau Cara untuk mendukung proses produksi yang berkelanjutan dalam hal pengadaan dan persediaan/inventori.	1.Pengadaan 2.Persediaan/ Inventori	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
3578	SD01367.00.00			Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
3579	ST01003.00.00			Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan	Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Jenis : 1. Penyuluh Kehutanan (PNS) 2. Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) 3. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	Jumlah	Orang
3580	ST01003.00.00			Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan	Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Jenis : a. Penyuluh Kehutanan (PNS) b. Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) c. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	Jumlah	Orang
3581	ST01004.00.00			Penyuluh Kehutanan PNS	Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.	Penyuluh Kehutanan PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan : 1. Penyuluh Kehutanan Tingkat Keterampilan 2.	Jumlah	Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Penyuluh Kehutanan Tingkat keahlian		
3582	ST01005.00.00			Penyuluh Kehutanan Swasta	Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3583	ST01006.00.00			Penyuluh Kehutanan Swasta Masyarakat	Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh kehutanan yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3584	ST01007.00.00			Penyuluhan penanganan limbah rumput laut	pemberian pendidikan atau pelatihan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat terkait cara menanguni limbah budidaya rumput laut, meliputi penanganan limbah sarana produksi dan limbah pascapanen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3585	ST01008.00.00			Penyuluhan teknik pengembangan budidaya rumput laut	pemberian pendidikan atau pelatihan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat terkait cara mengembangkan budidaya rumput laut, meliputi cara pembibitan, pemeliharaan, peningkatan hasil panen, dan penanganan pascapanen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3586	ST01009.00.00			Perahu Motor Tempel	Perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai tenaga penggerak dan motornya diletakkan di luar baik di buritan maupun di sisi perahu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	unit
3587	ST01010.00.00			Perahu Tanpa Motor	Perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	unit
3588	ST01011.00.00			Perahu/kapal penangkap ikan	Perahu/kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan binatang/tanaman air baik secara langsung maupun tidak langsung. Kapal pengangkut yang digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan atau hasil ikan olahan dari daerah produsen atau	Kapal Motor, Perahu motor tempel, perahu tanpa motor	jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					daerah penangkapan ke daerah konsumen tidak dimasukkan sebagai perahu/kapal penangkap. Pada umumnya operasi penangkapan dilakukan dengan menggunakan perahu/kapal penangkap. Dalam hal penangkapan dengan bagan, sero, kelong dan lain-lain, maka perahu/kapal yang digunakan untuk menangkut nelayan, alat-alat penangkap ataupun hasil penangkapan dianggap perahu/kapal penangkap.			
3589	SD01376.00.00			Perairan Darat	Perairan yang berada di wilayah daratan, terdiri dari sungai, danau, rawa, mata air dan air tanah.	Klasifikasi berdasarkan pola pembentukan, pola aliran, kehidupan biota, keselurahan ekosistemnya serta peruntukan dan pemanfataannya	Luas; Panjang; Lebar; Volume	Ha, km2; meter, km; m3/dt
3590	SD01377.00.00			Perairan Indonesia	Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
3591	SE00401.00.00			Peralatan Listrik Terpasang	Peralatan listrik terpasang yang dimaksud adalah 1. Air Conditioner (AC) 2. Komputer/ Laptop 3. Dispenser 4. Televisi 5. Kulkas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Unit
3592	ST01012.00.00			Perangkap (trap)	Perangkap ikan yang dipasang dalam jangka waktu tertentu, dibuat dari bahan apa saja (jaring, bambu, metal, dsb)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3593	ST01013.00.00			Perburuan	Segala sesuatu yang berangkut paut dengan kegiatan berburu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3594	SD01390.00.00			Perdagangan	Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Transaksi;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3595	SD01391.00.00			Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.	1. Dalam kab/kota yang sama 2. Antar kab/kota dalam provinsi yang sama 3. Lintas Provinsi	Nilai; Jumlah; Persentase	Rupiah; Transaksi, Satuan Kuantitas; Persen
3596	SD01393.00.00			Perdagangan Luar Negeri	Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara	1.Antar Negara 2.Antar Benua 3.Antar Regional	Nilai; Jumlah; Persentase	USD/Rupiah; Transaksi, Satuan Kuantitas; Persen
3597	SD01394.00.00			Perdagangan Luar Negeri Ekspor	Perdagangan Luar Negeri secara bilateral dalam kerangka ekspor.	Berdasarkan Metode/ Cara : 1. Langsung 2. Tidak Langsung	Nilai; Jumlah; Persentase	USD/Rupiah; Transaksi, Satuan Kuantitas; Persen
3598	SD01398.00.00			Peremajaan/ Replanting	Penggantian suatu macam tanaman perkebunan karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Jumlah	Hektar; Pohon, Tanaman
3599	SD01400.00.00			Perencanaan	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3600	SD01404.00.00			Perhutanan Sosial	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan	Klasifikasi berdasarkan Skema: 1. Hutan Desa (HD) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Jumlah	Skema, Desa, Kelurahan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.	3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 4. Hutan Adat (HA) 5. Kemitraan Kehutanan (KK)		
3601	ST01014.00.00			Perikanan	Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3602	ST01015.00.00			Perikanan besar	Perikanan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3603	ST01016.00.00			Perikanan darat	Kegiatan/usaha penangkapan dan budidaya ikan dan biota perairan lainnya yang dilakukan di air tawar atau air payau.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3604	ST01017.00.00			Perikanan laut	Pegiatan/usaha penangkapan dan budidaya ikan dan biota perairan lainnya yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna, dan sebagainya yang dipengaruhi pasang surut.	1. Penangkapan ikan/biota perairan lainnya di laut 2. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di laut	Jumlah	Usaha
3605	SD01409.00.00			Perilaku Penggunaan Listrik	Perilaku penggunaan listrik meliputi 1. Menggunakan lampu listrik, AC, Televisi,dan Kulkas hemat energi 2. Menggunakan AC dengan suhu udara di bawah 250 C Mematikan penerangan bila ruangan tidak sedang digunakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3606	SD01410.00.00			Peringatan Dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang berwenang.			
3607	SD01410.00.00			Peringatan Dini	Serangkaian kegiatan pemberian secepat mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen
3608	SD01412.00.00			Peringatan Dini Cuaca	Serangkaian kegiatan pemberian informasi secepat mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen
3609	SD01413.00.00			Peringkat Biru Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3610	SD01414.00.00			Peringkat Emas Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3611	SD01415.00.00			Peringkat Hijau Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3612	SD01415.00.00			Peringkat Hitam Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3613	SD01416.00.00			Peringkat Merah Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.	kebutuhan		
3614	SE00402.00.00			Periode Pencatatan	Periode pencatatan laporan keuangan perusahaan	1. Satu tahun (Januari-Desember) 2. Lainnya (sesuai periode pencatatan laporan keuangan perusahaan)	Waktu	Tahun, Semester, Bulan
3615	SE00403.00.00			Periode pinjaman atau kredit	Periode dimana pinjaman atau kredit harus dibayarkan setelah periode tersebut habis, sesuai perjanjian pada saat pinjaman diterima.	1. Kurang dari 12 bulan 2. 12-35 bulan 3. 36 bulan atau lebih	Waktu	Bulan
3616	SD01417.00.00			Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
3617	UL00014.00.00			Perizinan Pertambangan	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, pada tahapan eksplorasi dan tahapan produksi.	1. PKP2B 2. KK 3. IUP 4. IUPK 5. IPR 6. IUJP 7. IUP OP Angkut Jual 8. IUP OPK Pengolahan	Jumlah	Izin
3618	SD01418.00.02			Perkebunan	Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3619	ST01018.00.01			Perkebunan	Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu	1. Perkebunan besar	jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	2. Perkebunan Rakyat (tidak berbadan hukum)		
3620	ST01019.00.00			Perkebunan besar	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.	1. Perkebunan Besar Negara (PTP/PNP) 2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/ Asing	jumlah	unit, perusahaan
3621	ST01020.00.00			Perkebunan Rakyat	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
3622	SE00405.00.00			Perkiraan Jumlah Pedagang	Sebaran Pasar Menurut Perkiraan Jumlah Pedagang yang berjualan di pasar. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang di bawah pengelolaan pasar	Klasifikasi Jumlah Pedagang 1. < 100 2. 100 - 199 3. 200 - 274 4. 275 - 400 5. > 400	Jumlah, Persentase	Nilai, Persen
3623	SD01422.00.00			Perkotaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
3624	SD01422.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Perkotaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
3625	ST01021.00.00			Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Perkumpulan dari petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier, irigasi pedesaan, daerah pompa air dan suatu sistem irigasi lainnya (subak) yang telah dikelola secara tradisional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					oleh petani yang bersifat formal dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.			
3626	ST010222.00.00			Perladangan gilir balik	Praktik pertanian dimana sebidang lahan tertentu ditanami selama beberapa tahun dan kemudian ditinggalkan selama periode tertentu yang cukup untuk mengembalikan kesuburannya melalui pertumbuhan vegetasi alami sebelum ditanami kembali.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3627	ST010223.00.00			Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker)	perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untuk antisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
3628	SD01424.00.00			Perlindungan Anak	segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
3629	SD01425.00.00			Perlindungan Khusus Anak	suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
3630	SD01426.00.00			Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan	1. Lahan garapan 2. Lahan tanaman permanen 3. Lahan penggembalaan	Luas; Persentase	Km2; Persen
3631	SD01430.00.00			Perluasan/Ekstensifikasi	Penanaman pada areal bukaan baru atau pada bekas lahan tanaman lain bukan sub sektor perkebunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Luas	Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan		
3632	SE00406.00.00			Permasalahan Kinerja Perusahaan	Merupakan pertanyaan kualitas terhadap sampel terpilih mengenai permasalahan kinerja perusahaan	Kode 1 : Tidak ada masalah Kode 2 : Sedikit bermasalah Kode 3 : Cukup bermasalah Kode 4 : Bermasalah Kode 5 : Sangat Bermasalah	Jumlah	Masalah
3633	SD01431.00.00			Permukiman Kumuh	Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Permukiman; Persen
3634	SD01431.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Permukiman Kumuh	Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Permukiman; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).			
3635	SD01433.00.00			Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3636	SP00364.00.00		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3637	SP00365.00.00			Pernah mengikuti ekstrakurikuler	Siswa dianggap pernah mengikuti kegiatan ekskul/UKM jika telah mengikuti kegiatan tersebut minimal 3 bulan selama tahun ajaran 2017/2018.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3638	SP00366.00.00			Perpustakaan	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.	1. Perpustakaan Fisik 2. Perpustakaan Digital	Jumlah	Unit
3639	SE00408.00.00			Persediaan	Persediaan: aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
3640	SD01434.00.00			Persediaan air kota	Sumber air yang dapat diakses oleh setidaknya dua usaha. Ini mengacu pada air yang diambil dari jaringan distribusi air publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3641	SD01436.00.00			Persentase	Persentase akses layanan keuangan formal UMKM	Klasifikasi berdasarkan	Persentae	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen.	analisis atau sesuai kebutuhan		
3642	SP00367.00.00			Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	Persentase anak usia 0-17 tahun dan belum kawin yang tidak tinggal bersama kedua orang tua (kedua orang tua bukan ART/meninggal/tidak tahu keberadaannya).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3643	SP00368.00.00			Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah	Persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah (baik aktif maupun tidak aktif)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3644	SP00369.00.00			Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah dan pernah atau sedang mengikuti ekstrakurikuler/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3645	SP00370.00.00			Persentase	Persentase anak usia 5-17 tahun yang selama setahun	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	terakhir pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/pendidikan keterampilan (selain bimbingan belajar)	analisis atau sesuai kebutuhan		
3646	SP00371.00.00			Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	Persentase anak usia 5-17 tahun yang dalam setahun terakhir pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3647	SP00372.00.00			Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan (baik perpustakaan fisik maupun digital) atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3648	SP00373.00.00			Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				seni				
3649	SP00374.00.00			Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah	Anak usia 7-17 tahun yang: 1. Tidak sedang bersekolah dan tidak pula sedang mengikuti pendidikan prasekolah 2. Tidak bersekolah lagi dan ijazah yang dimiliki kurang dari SMA/sederajat Untuk indikator ini, usia yang dimaksud adalah usia saat awal tahun ajaran, bukan usia saat pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3650	SP00375.00.00			Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) (Angka Kesiapan Sekolah)	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3651	SP00376.00.00			Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar terhadap jumlah anak penyandang disabilitas usia sekolah	1. Memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar 2. Tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	Jumlah; persentase	Orang; persen
3652	SD01439.00.00			Persentase anak umur 12-23 bulan yang	Perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menerima imunisasi dasar lengkap	(1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).			
3653	SD01439.00.00		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3654	SD01440.00.00			Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (40% terbawah)	Perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2). Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3655	SD01442.00.00			Persentase	Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	mengikuti setidaknya satu jenis kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, kegiatan sosial lainnya).	analisis atau sesuai kebutuhan		
3656	SD01443.00.00			Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlantar	Persentase anak usia 5-17 tahun yang memenuhi 3 kriteria anak terlantar (minimal 3 dari 8 kriteria)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3657	SE00409.00.00			Persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan	Distribusi penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja menurut tingkat pendidikan	1. Tidak pernah bersekolah 2. Rendah (SMP Ke Bawah 3. Sedang (SMA/SMK/Sederajat) 4. Tinggi (Diploma ke atas)	Persentase	Persen
3658	SE00410.00.00			Persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal	Distribusi penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal	1. Tidak pernah bersekolah 2. Rendah (SMP Ke Bawah 3. Sedang (SMA/SMK/Sederajat) 4. Tinggi (Diploma ke atas) dan 5. Perkotaan 6. Perdesaan	Persentase	Persen
3659	SD01446.00.00			Persentase	Distribusi penduduk usia kerja yang termasuk	1. Tidak pernah	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin	angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin	bersekolah 2. Rendah (SMP Ke Bawah 3. Sedang (SMA/SMK/Sederajat) 4. Tinggi (Diploma ke atas) dan 5. Laki-laki 6. Perempuan		
3660	SD01447.00.00			Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3661	SD01451.00.00			Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Sakernas hanya dapat menyajikan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja dibagi dengan jumlah anak usia 10-17 tahun dikali 100 persen (dibedakan menurut jenis kelamin dan kelompok umur). Tidak bisa menyajikan pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak seperti yang ada pada referensi/rujukan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3662	SD01453.00.01			Persentase desa yang mengalami bencana tiga tahun berturut-turut	Desa yang mengalami bencana selama tiga tahun berturut-turut dibagi dengan jumlah desa di wilayah tersebut dikali 100	Klasifikasi berdasarkan Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	persen desa
3663	SD01453.00.02			Persentase desa yang	Desa yang mengalami bencana selama tiga tahun berturut-turut dibagi dengan jumlah desa di wilayah	1. Angin puyuh/putting beliung/topan	Persentase	persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				mengalami bencana tiga tahun berturut-turut	tersebut dikali 100	2. Banjir 3. Banjir Bandang 4. Gelombang pasang laut 5. Gempa Bumi 6. Gunung meletus 7. Kebakaran hutan dan lahan 8. Tanah longsor 9. Tsunami		
3664	SD01435.00.00			Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target dibagi dengan jumlah indikator global SDGs dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3665	SD01463.00.00			Persentase Jumlah Observasi Harga Gabah di Bawah HPP	Gambaran banyaknya observasi harga gabah di bawah HPP	Persentase Observasi Harga Gabah di Bawah HPP menurut kualitas 1. Tingkat Petani (GKP) 2. Tingkat Penggilingan, GKG)	Persentase	Persen
3666	SD01465.00.00			Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi dibagi dengan total kabupaten 3T dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3667	SD01468.00.00			Persentase Kementerian/Lembaga yang	Jumlah K/L yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau prasata komputer				
3668	SE00411.00.00			Persentase Kepemilikan Asing (PMA)	Persentase Kepemilikan Asing (PMA) merupakan besarnya share PMA terhadap keseluruhan modal usaha/perusahaan untuk usaha/perusahaan dengan status penanaman modal PMA.	1. kurang dari 10 persen 2. 10 sampai dengan 50 persen 3. Lebih dari 50 persen	Persentase	Persen
3669	SE00412.00.00			Persentase Keuntungan	Keuntungan adalah selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3670	SE00413.00.00			Persentase Keuntungan terhadap pengeluaran	Keuntungan dibagi dengan pengeluaran dikali 100%, atau dapat dirumuskan ((Pendapatan/Pengeluaran - 1) X 100 %)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3671	SP00377.00.00			Persentase komuter	Komuter adalah penduduk yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal dan tempat kegiatan yang berbeda wilayah administrasi.	1. Komuter 2. Bukan Komuter	Persentase	Persen
3672	SP00378.00.00			Persentase komuter menurut alasan memilih moda transportasi utama ke tempat kegiatan	Persentase komuter menurut alasan memilih moda transportasi utama ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3673	SP00379.00.00			Persentase komuter menurut alasan memilih moda transportasi utama ke tempat tinggal	Persentase komuter menurut alasan memilih moda transportasi utama ke tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3674	SP00380.00.00			Persentase komuter menurut alasan tidak ingin beralih menggunakan moda transportasi umum	Persentase komuter menurut alasan tidak ingin beralih menggunakan moda transportasi umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3675	SP00381.00.00			Persentase komuter menurut banyaknya moda transportasi untuk sampai ke tempat kegiatan	Persentase komuter menurut banyaknya moda transportasi untuk sampai ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3676	SP00382.00.00			Persentase komuter menurut banyaknya moda transportasi	Persentase komuter menurut banyaknya moda transportasi untuk sampai ke tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk sampai ke tempat tinggal				
3677	SP003383.00.00			Persentase komuter menurut biaya transportasi perjalanan pergi dan pulang dalam sehari	Persentase komuter menurut biaya transportasi perjalanan pergi dan pulang dalam sehari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3678	SP003384.00.00			Persentase Komuter menurut Jarak Tempuh	Persentase komuter menurut Jarak Tempuh dari tempat tinggal ke tempat kegiatan utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3679	SP003385.00.00			Persentase komuter menurut jumlah hari perjalanan	Persentase komuter menurut jumlah hari melakukan perjalanan ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3680	SP003386.00.00			Persentase Komuter menurut Kegiatan Utama komuter	Persentase komuter bedasarkan jenis kegiatan utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3681	SP003387.00.00			Persentase komuter menurut keinginan beralih ke moda	Persentase komuter menurut keinginan beralih ke moda transportasi umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				transportasi umum				
3682	SPO0388.00.00			Persentase komuter menurut Lama perjalanan dari tempat kegiatan ke tempat tinggal	Persentase komuter menurut lama perjalanan dari tempat kegiatan ke tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3683	SPO0389.00.00			Persentase komuter menurut Lama perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kegiatan	Persentase komuter menurut lama perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3684	SPO0390.00.00			Persentase Komuter menurut Moda Transportasi	Persentase komuter berdasarkan moda transportasi yang digunakan dari tempat tinggalnya ke tempat kegiatan utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3685	SPO0391.00.00			Persentase komuter menurut pengalaman buruk dalam perjalanan	Persentase komuter menurut pengalaman buruk dalam perjalanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3686	SPO0392.00.00			Persentase komuter menurut Pukul berangkat	Persentase komuter menurut pukul berangkat dari tempat tinggal menuju tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3687	SPO0393.00.00			Persentase komuter	Persentase komuter menurut pukul tiba di tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurut Pukul tiba		kebutuhan		
3688	SP00394.00.00			Persentase komuter menurut rencana untuk berhenti menjadi komuter	Persentase komuter menurut rencana untuk berhenti menjadi komuter	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3689	SP00395.00.00			Persentase komuter menurut status sebagai pengemudi atau penumpang	Persentase komuter menurut status sebagai pengemudi atau penumpang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3690	SP00396.00.00			Persentase komuter menurut stres akibat perjalanan ke/dari tempat kegiatan	Persentase komuter menurut stres akibat perjalanan ke/dari tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3691	SD01476.00.00			Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi	Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pembangunan nasional				
3692	SD01477.00.00			Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama dibagi dengan jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3693	SD01478.00.00			Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3694	SD01482.00.01			Persentase Lanjut Usia (Lansia)	Persentase penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas	Klasifikasi berdasarkan Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3695	SD01482.00.02			Persentase Lanjut Usia (Lansia)	Persentase penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3696	SD01484.00.00			Persentase luas lahan yang sudah dibangun untuk perumahan/apartemen	Persentase luas lahan yang sudah dibangun (adanya pondasi) untuk perumahan/apartemen terhadap luas tanah keseluruhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3697	SE00416.00.00			Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)	MPP adalah selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang masih mengikutsertakan biaya pengangkutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3698	SE00417.00.00			Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total	MPP yang dihitung berdasarkan MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama dengan suatu pola tertentu. MPP total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai dengan konsumen akhir suatu komoditas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3699	SP00397.00.00			Persentase migran keluar internasional menurut Alasan utama berangkat ke luar negeri	Persentase migran keluar internasional berdasarkan alasan utama pindah/berangkat ke luar negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3700	SP00398.00.00			Persentase migran menurut alasan pindah ke tempat tinggal sekarang	Persentase migran berdasarkan alasan saat melakukan perpindahan dari tempat tinggal sebelumnya ke tempat tinggal sekarang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3701	SE00419.00.00			Persentase Pekerjaan yang diselesaikan	Nilai persentase realisasi pekerjaan yang sudah diselesaikan walaupun belum 100 persen untuk masing-masing proyek	Untuk 2 tahun terakhir	Persentase	Nilai
3702	SD01491.00.00			Persentase pelaku usaha Kelautan	Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha kelautan			
3703	SD01492.00.00			Persentase pelaku usaha Perikanan	Kesesuaian antara peliksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan oleh pelaku usaha perikanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3704	SE00420.00.00			Persentase Pembelian Barang dari UMKM	Persentase nilai pembelian barang dagangan dari UMKM terhadap nilai pembelian total yang dilakukan oleh usaha/perusahaan perdagangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3705	SD01495.00.00			Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir bendabaraj dan memiliki aturan-aturan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3706	SD01497.00.00			Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3707	SD01498.00.00			Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3708	SD01499.00.00			Persentase penduduk 10	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	budaya di Indonesia dalam setahun terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas	kebutuhan		
3709	SD01500.00.00			Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3710	SD01501.00.00			Persentase Penduduk 15+ yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong dalam 3 bulan terakhir	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi/terlibat aktif dalam kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial seperti kerja bakti dan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal yang masih dalam lingkup RT/RW/dusun/desa terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3711	SD01502.00.00			Persentase penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sumber penghasilan				
3712	SD01503.00.00			Persentase Penduduk 18 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang ikut serta dalam organisasi selain di tempat kerja atau sekolah baik secara aktif maupun tidak aktif terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3713	SD01504.00.00			Persentase penduduk 18 tahun ke atas yang mengikuti pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/dusun/desa) selama setahun terakhir terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3714	SD01505.00.00			Persentase penduduk berumur 18 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar rumah tangga dalam tiga bulan terakhir	Persentase penduduk berumur 18 tahun ke atas yang pernah terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar (RT/RW/dusun/desa)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3715	SD01509.00.00			Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	Persentase penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3716	SD01510.00.02			Persentase penduduk terlayani transportasi umum	perbandingan jumlah penduduk yang menggunaan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3717	SD01510.00.01			Persentase penduduk terlayani transportasi umum	perbandingan jumlah penduduk yang menggunaan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut. 11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
3718	SD01512.00.00			Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3719	SD01512.00.00		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3720	SD01513.00.00			Persentase Penduduk usia	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; persentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas	kebutuhan		
3721	SD01514.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3722	SD01515.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir pernah membaca: koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, atau buku lainnya selain kitab suci (baik cetak maupun elektronik), terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3723	SD01516.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat dalam satu tahun terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir				
3724	SD01517.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3725	SD01518.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam tiga bulan terakhir	Banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpartisipasi/terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial di lingkungan tempat tinggal yang masih dalam lingkup RT/RW/dusun/desa dalam tiga bulan terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3726	SD01519.00.00			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/penduk	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu pertunjukan/pameran satu seni sebagai pelaku/pendukung dalam kegiatan sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ung pertunjukkan seni	10 tahun ke atas			
3727	SD01520.00.00			Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang memiliki tabungan/sim panan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang di lembaga keuangan (perbankan, koperasi) ataupun di non lembaga keuangan terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3728	SD01521.00.00			Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang sering menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3729	SD01522.00.00			Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengeluaran 40% terbawah yang bersekolah				
3730	SD01528.00.00			Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam tiga bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
3731	SD01529.00.00			Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum di Perkotaan	banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3732	SD01531.00.00			Persentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas	perbandingan jumlah populasi jenis satwa terancam punah prioritas terhadap jumlah populasinya pada baseline data tahun 2013.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3733	SD01533.00.00			Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya	Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep dan inklusivitas	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3734	SD01535.00.00			Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai P21 dari jumlah kasus yang terjadi	perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3735	SD01536.01.00		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase.	Fasilitas kesehatan seperti 1. Rumah sakit 2. Rumah sakit bersalin 3. Klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter 4. Puskesmas/pustu/polindes.	Persentase	Persen
3736	SD01537.00.00			Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (40% terbawah)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).			
3737	SE00424.00.00			Persentase pemodalan	Persentasi modal perusahaan menurut sumber modal	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Swasta Nasional/Perorangan 4. Pemerintah Asing/Swasta Asing	Jumlah, Persentase	Persen
3738	SD01542.00.00			Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia (penduduk berusia 60 tahun keatas) yang memperoleh bantuan sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3739	SD01544.00.00			Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3740	SD01544.00.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3741	SD01545.00.00			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan bukan PLN	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				PLN				
3742	SD01545.00.00	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3743	SD01546.00.00			Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	Banyaknya rumah tangga yang ada anggota rumah tangga yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
3744	SD01547.00.00			Persentase rumah tangga yang berpersepsi setuju tentang peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/kecil/rumah tangga dan sejenisnya)	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju/sangat setuju terhadap adanya peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/kecil/rumah tangga dan sejenisnya) di wilayah tempat tinggal dalam 6 bulan terakhir terhadap jumlah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				di wilayah tempat tinggal dalam 6 bulan terakhir				
3745	SD01552.00.00			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3746	SD01552.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3747	SD01553.00.00			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (40% terbawah)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3748	SD01554.00.00			Persentase rumah tangga yang memiliki	Perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	(%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).			
3749	SD01555.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3750	SD01556.00.00			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (40% terbawah)	Perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3751	SD01561.00.00			Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	Banyaknya rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya pernah menggunakan produk-produk tradisional seperti kerajinan tradisional, busana daerah/tradisional, metode penyehatan tradisional, dan obat tradisional dalam tiga bulan terakhir	a. kerajinan tradisional b. busana daerah/tradisional c. metode penyehatan tradisional d. obat tradisional	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
3752	SD01562.00.00			Persentase	Persentase rumah tangga yang memasang bendera	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	merah putih yang berukuran sebidaknya 90 cm x 60 cm yang terbuat dari bahan kain pada tiang di rumah pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia terhadap total rumah tangga	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Tanggal; Persen
3753	SD01563.00.00			Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat, tidak bertele-tele, dengan biaya yang jelas dan tanggap melayani kebutuhan atau permintaan masyarakat	Banyaknya rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat, tidak bertele-tele, dengan biaya yang jelas dan tanggap melayani kebutuhan atau permintaan masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3754	SD01564.00.00			Persentase	Banyaknya rumah tangga yang setuju atau sangat	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				rumah tangga yang menyatakan bahwa budaya antre sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di lingkungan sekitar rumah tangga (puskesmas/rumah sakit, kantor desa/kelurahan/kecamatan, dll)	setuju jika budaya antre sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di lingkungan sekitar rumah tangga seperti puskesmas/rumah sakit, kantor desa/kelurahan/kecamatan, dll terhadap total rumah tangga	analisis atau sesuai kebutuhan		
3755	SD01565.00.00			Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa jalan raya dan trotoar di lingkungan sekitar sudah digunakan sebagaimana fungsinya, tidak untuk parkir	Banyaknya rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika jalan raya dan trotoar di lingkungan sekitar sudah digunakan sebagaimana fungsinya, tidak untuk parkir kendaraan, berjualan, dll terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep kendaraan, berjualan, dll	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3756	SD01566.00.00			Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	Banyaknya rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya dilakukan dalam waktu yang singkat, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, jelas, dan tidak berlarut-larut terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3757	SD01567.00.00			Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan	Banyaknya rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika petugas pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya cepat mengetahui dan memperhatikan secara sungguh-sungguh serta cepat beraksi atas keadaan yang ada terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				masyarakat dalam 12 bulan terakhir				
3758	SD01568.00.00			Persentase rumah tangga yang menyelenggara kan upacara adat	Persentase rumah tangga yang dalam setahun terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menyelenggarakan setidaknya satu upacara adat sebagai berikut: kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, keagamaan, panen, atau lainnya, terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3759	SD01569.00.00			Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3760	SD01569.00.00			Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sekitar tempat tinggal				
3761	SD01570.00.00			Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama terhadap jumlah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3762	SD01571.00.00			Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku terhadap jumlah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3763	SD01572.00.00			Persentase Rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku atau agama terhadap total rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				atau agama				
3764	SD01575.00.00			Persentase sampah perkotaan yang tertangani	capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah, diangkut ke tempat TPA atau pengolahan sampah baik menjadi bahan baku dan /atau sumber energi, dialah menjadi bahan baku, dimanfaatkan menjadi sumber energi serta diproses di TPA.	Klasifikasi Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase	persen
3765	SD01576.00.00			Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3766	SD01580.00.02			Persentase SMA/MA Berakreditasi Minimal B	Perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/MA.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3767	SD01580.00.01			Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Perbandingan antara jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMP/MTs	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3768	SD01582.00.00			Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal di sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3769	SD01583.00.00			Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer	Jumlah K/L yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kementerian/Lembaga				
3770	SD01592.01.02			Pertanian	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3771	ST01025.01.01			Pertanian	Kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan	Jumlah	Kegiatan
3772	ST01025.02.01			Pertanian	Penerapan karya manusia kepada alam dalam budi daya tumbuhan dan binatang dan penangkapan/perburuan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia.	Klasifikasi berdasarkan sektor pertanian: 1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3773	ST01025.02.02			Pertanian	Penerapan karya manusia kepada alam dalam budi daya tumbuhan dan binatang dan penangkapan/perburuan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia	1. Pertanian monokultur 2. Pertanian multikultur	Jumlah	Kegiatan
3774	ST01026.00.00			Pertanian Berkelanjutan	Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan berkelanjutan kebutuhan manusia untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan semacam itu jdi bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dll.) Melestarikan sumber daya tanah, air, tanaman dan gen hewan; tidak merusak lingkungan, layak secara teknis, layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial.			
3775	ST01027.00.00			Pertanian besar	Pertanian yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Sektor
3776	ST01028.00.00			Pertanian ekstraktif	Pertanian yang pengusahaannya dengan mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha menyuburkan kembali tanah dan sebagainya untuk keperluan pengambilan pada kemudian hari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3777	ST01029.00.00			Pertanian generatif	Pertanian yang memerlukan usaha pembibitan, pengolahan, pemeliharaan, dan sebagainya (pada tanaman dan hewan).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3778	ST01030.00.00			Pertanian kering	pertanian tanpa irigasi di daerah yang curah hujannya terbatas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3779	ST01031.00.00			Pertanian komersial	Pertanian yang bertujuan memenuhi keperluan perdagangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3780	ST01032.00.00			Pertanian ladang/huma	Corak usaha tani primitif dengan menebang pohon-pohonan untuk dibakar sehingga tanah dapat ditanami	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
3781	ST01033.00.00			Pertanian menetap	pertanian yang diusahakan secara menetap dengan menggarap bidang tanah yang sama dari tahun ke tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3782	ST01034.00.00			Pertanian monokultur	Usaha pertanian untuk satu jenis tanaman pada sebidang lahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3783	ST01035.00.00			Pertanian multikultur	Usaha pertanian untuk beberapa jenis tanaman pada sebidang lahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3784	ST01036.00.00			Pertanian organik	Sistem manajemen produksi menyeluruh yang mendorong dan meningkatkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologis dan aktivitas biologis tanah. Pertanian organik menekankan penggunakan praktik manajemen daripada input off-farm, dengan mempertimbangkan kondisi regional perlu sistem yang dapat diadopsi secara lokal (locally adapted system). Ini dicapai dengan menggunakan, jika memungkinkan, metode agronomik, biologis, dan mekanis, daripada menggunakan material sintetis, untuk memenuhi fungsi spesifik apapun dalam sistem. (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999).	1. Organik yang tersertifikasi 2. Dalam proses konversi ke organik yang tersertifikasi	Persentase	Persen
3785	ST01037.00.00			Pertanian subsisten	Pertanian yang seluruh hasilnya digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh produsennya, tidak ada maksud untuk dijual ke pasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Petani; Persen
3786	ST01038.00.00			Pertanian tanaman pangan besar	Pertanian tanaman pangan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Unit
3787	ST01039.00.00			Pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/Dusun/Desa)	Pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/Dusun/Desa) yang dimaksud adalah berkumpulnya sekelompok orang yang tinggal di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa atau berkumpulnya warga di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa. Kegiatan atau rapat yang dimaksud dapat diselenggarakan secara rutin atau pada saat diselenggarakannya kegiatan sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kemasyarakatan di lingkungan responden tersebut.			
3788	ST01040.00.00			Pertukaran dalam masyarakat	Bibit yang diperoleh sebagai pinjaman, hadiah, atau bentuk bantuan timbal-balik lainnya, termasuk pertukaran bibit dengan bibit antar petani.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3789	SD01595.01.00			Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3790	SP00399.00.00			Pertunjukan/Pameran Seni	Pertunjukan/Pameran Seni adalah karya seni yang dipertontonkan maupun dipamerkan pada suatu pertunjukan atau event tertentu sehingga dapat dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat luas.	1. Film 2. Seni Musik/Suara 3. Seni Rupa 4. Seni Sastra (Puisi, Dongeng) 5. Seni Tari Budaya Indonesia 6. Seni Teater/Pewayangan 7. Lainnya, seperti Barongsai, Kuda Lumping, Reog, dan pertunjukan lainnya.	Jumlah; persentase	Persen
3791	SE00429.00.00			Perubahan Anggaran dasar (PAD) Koperasi	Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.	1. Perubahan Bidang Usaha 2. Penggabungan 3. Pelebaran 4. Pembagian	Jumlah	PAD
3792	SE00430.00.00			Perusahaan Garam	Perusahaan yang melakukan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran garam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3793	ST01041.00.00			Perusahaan	Usaha berbadan hukum yang mendapatkan izin Hak	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan pengusahaan hutan dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
3794	ST01042.00.00			Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	Usaha berbadan hukum yang memegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah (Menteri Kehutanan dan Perkebunan) untuk membangun dan membudi dayakan hutan tanaman di luar Pulau Jawa. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dengan menerapkan sistem silvikultur intensif dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3795	ST01043.00.00			Perusahaan hortikultura	Suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budi daya/pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, atau tanaman obat-obatan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman hortikultura	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3796	SE00431.00.00			Perusahaan HPHT/PERUM PERHUTANI/HTI (IUPHHK_HT)	Perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.	produksi kayu bulat yang berasal dari perusahaan HTI	volume dan nilai	m3 dan 000 Rp
3797	SE00432.00.00			Perusahaan Hutan Tanaman (HT)	Perusahaan milik pemerintah maupun swasta, yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perusahaan Hutan Tanaman (HT) meliputi Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), PT. Perhutani dan Perusahaan lainnya yang membudi dayakan tanaman kehutanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3798	SE00433.00.00			Perusahaan Industri Pengolahan	Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/ setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifat lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling)	International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, 2015, 2020	Jumlah, Persentase	Unit, Perusahaan
3799	ST01044.00.00			Perusahaan Kehutanan	Suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan penebangan dan budi daya tanaman kehutanan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha kehutanan tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3800	SE00434.00.00			Perusahaan Konstruksi	Sektor konstruksi digerakkan oleh badan usaha jasa pelaksana pekerjaan konstruksi nasional maupun asing yang selanjutnya disebut perusahaan konstruksi termasuk yang bukan bentuk badan usaha seperti usaha pelaksana konstruksi perseorangan.	International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009	Jumlah, Persentase	Unit, Perusahaan
3801	ST01045.00.00			Perusahaan mitra petani	Perusahaan yang melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, persentase	Perusahaan, persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3802	ST01046.00.00			Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan	Usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan.	1. HTI 2. Perum Perhutani 3. Perusahaan Lainnya (Perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan lainnyaj	Jumlah	Unit, Perusahaan
3803	ST01047.00.00			Perusahaan Penangkapan dan Pengolahan	Perusahaan yang kegiatannya menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan, kemudian dilakukan sendiri proses untuk mengubah rasa atau bentuk sehingga dapat mempunyai nilai tambah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3804	ST01048.00.00			Perusahaan Penangkapan Ikan	perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan baik di laut maupun di perairan umum	1.Penangkapan Ikan 2. Penangkapan 3. Pengolahan	Jumlah	Unit
3805	ST01049.00.00			Perusahaan perikanan	Suatu perusahaan yang di jalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Perusahaan perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai kegiatan penangkapan/budi daya ikan/biota lain.	Perusahaan budidaya perikanan, Perusahaan Penangkapan ikan	Jumlah; Nilai	Perusahaan; Rupiah, Orang
3806	ST01050.00.00			Perusahaan Perikanan Budidaya	perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di laut maupun di darat (tambak, kolam, perairan umum).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3807	ST01051.00.00			Perusahaan Perikanan Budidaya Ikan	perusahaan yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	1. Perusahaan Perikanan Budidaya Penanaman Modal Asing 2. Perusahaan Perikanan Budidaya Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Perusahaan Perikanan Budidaya Swasta Nasional Tanpa Fasilitas PMA/PMDN 4. Koperasi Perikanan		
3808	ST01052.00.00			Perusahaan Perikanan Tangkap	perusahaan yang melakukan usaha di bidang penangkapan ikan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	1. Perusahaan Perikanan Budidaya Penanaman Modal Asing 2. Perusahaan Perikanan Budidaya Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Perusahaan Perikanan Budidaya Swasta Nasional Tanpa Fasilitas PMA/PMDN 4. Koperasi Perikanan	Jumlah	Unit
3809	ST01053.00.00			Perusahaan Perkebunan	Suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budi daya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Usaha budi daya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha, seperti yang disahakan perorangan tanpa izin usaha atau disahakan oleh rumahtangga tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut perkebunan rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Unit
3810	ST01054.00.03			Perusahaan Pertanian	Perusahaan yang mempunyai kegiatan menghasilkan produksi pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan menanggung resiko. Termasuk di sini usaha di bidang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					jasa pertanian.			
3811	ST01054.00.01			Perusahaan Pertanian	Perusahaan yang mempunyai kegiatan menghasilkan produksi pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan menanggung resiko. Termasuk di sini usaha di bidang jasa pertanian.	Perusahaan kegiatan utamanya bergerak menurut Subsektor : 1. Usaha rumah tangga tanaman pangan 2. Usaha rumah tangga hortikultura 3. Usaha rumah tangga perkebunan 4. Usaha rumah tangga peternakan 5. Usaha rumah tangga perikanan 6. Usaha rumah tangga kehutanan 7. Jasa Pertanian	Jumlah, persentase	Perusahaan, persen
3812	ST01055.00.01			Perusahaan pertanian berbadan hukum	Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.	Jenis Badan Hukum 1. Perusahaan Negara (PN) 2. Perusahaan Daerah (PD) 3. Persero 4. Perum 5. Perseroan Terbatas (PT) 6. Naamloze Vennootschap (NV) 7. Commanditaire Venootschap (CV) 8. Firma 9. Koperasi/KUD	jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						10. Yayasan		
3813	ST01055.00.02			Perusahaan pertanian berbadan hukum	Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.	Perusahaan kegiatan utamanya bergerak menurut Subsektor : 1. Usaha rumah tangga tanaman pangan 2. Usaha rumah tangga hortikultura 3. Usaha rumah tangga perkebunan 4. Usaha rumah tangga peternakan 5. Usaha rumah tangga perikanan 6. Usaha rumah tangga kehutanan	Jumlah, persentase	Perusahaan, persen
3814	ST01056.00.00			Perusahaan peternakan	**Orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya dibidang peternakan**	1. Perusahaan peternakan **ternak** besar/kecil 2. perusahaan peternakan sapi perah 3.perusahaan peternakan unggas	Jumlah; Persentase	Perusahaan; Persen
3815	ST01057.00.00			Perusahaan tanaman pangan	Perusahaan tanaman pangan adalah perusahaan berbadan hukum/usaha yang melakukan budidaya tanaman padi/palawija dan atau perbenihan untuk tujuan komersial/memperoleh keuntungan. Perusahaan tanaman pangan yang dicakup meliputi perusahaan tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, gandum dan umbi-umbian palawija.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit, Perusahaan
3816	SD01606.00.00			Peserta KB aktif	Peserta KB Aktif : Akseptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh kontrasepsi.	kebutuhan		
3817	SD01607.00.00			Peserta KB baru	Peserta KB Baru: Peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran dan sesudah melahirkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3818	SD01608.00.00			Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru	Peserta Proper rangking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper rangking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
3819	ST01058.00.02			Pestisida	Bahan yang ditujukan untuk mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan hama pada tanaman atau hewan; atau untuk mengontrol perilaku atau fisiologi hama atau tanaman selama produksi atau penyimpanan.	1. Pestisida elemen (Elemental pesticide) 2. Pestisida organik (Organic pesticide) 3. Pestisida yang berasal dari campuran bahan-bahan kimia	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3820	ST01058.00.01			Pestisida	Bahan yang ditujukan untuk mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan hama pada tanaman atau hewan; atau untuk mengontrol perilaku atau fisiologi hama atau tanaman selama produksi atau penyimpanan.	1. Insektisida 2. Herbisida 3. Fungisida 4. Rodentisida 5. Lainnya	Persentase	Persen
3821	ST01059.00.00			Pestisida elemen (Elemental pesticide)	Pestisida yang bahan aktifnya berasal dari alam seperti: sulfur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3822	ST01060.00.00			Pestisida kimia/sintetis (Syntetic pesticide)	Pestisida yang berasal dari campuran bahan-bahan kimia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3823	ST01061.00.00			Pestisida kontak langsung	Pestisida yang reaksinya akan bekerja bila bersentuhan langsung dengan hama, baik ketika makan ataupun sedang berjalan. Contoh : Sebagian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(Contact pesticide)	besar pestisida kimia.			volume
3824	ST01062.00.00			Pestisida lainnya	pestisida yang tidak termasuk golongan insektisida, akarisida, rodentisida, nematisida, fungisida, bakterisida, herbisida, dan zat pengatur tumbuh.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3825	ST01063.00.00			Pestisida organik (Organic pesticide)	pestisida yang bahan aktifnya adalah bahan organik yang berasal dari bagian tanaman atau binatang, misal : neem oil yang berasal dari pohon mimba (neem).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3826	ST01064.00.00			Pestisida sistemik (Systemic Pesticide)	pestisida yang diserap dan dialirkan keseluruh bagian tanaman sehingga akan menjadi racun bagi hama yang memakannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3827	ST01065.00.00			Petak lahan	bagian dari bidang lahan yang dibatasi oleh saluran dan atau galengan, jenis tanaman maupun batas-batas lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Buah; m2, Hektar (Ha)
3828	ST01066.00.00			Petani	Warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3829	ST01067.00.00			Petani Hutan	Orang yang mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3830	ST01126.00.00			Petani Milenial	Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3831	ST01068.00.00			Peternak	Orang yang melakukan usaha ternak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rumah Tangga, Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3832	ST01069.00.00			Peternakan	Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, **ternak ruminansia, indukan,** pakan, alat dan mesin peternakan, **budidaya** ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, **pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana**	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
3833	ST01070.00.00			Peternakan besar (Perusahaan peternakan)	Peternakan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum/badan usaha. Catatan: 1. Termasuk semua usaha peternakan yang memproduksi bibit ternak. Perusahaan pembibitan ternak adalah suatu perusahaan peternakan (PP66/67) yang mengadakan spesialisasi kegiatan pembiakan ternak yang khusus menghasilkan bibit ternak dengan berpegang kepada syarat dan ketentuan teknis tersendiri. 2. Termasuk usaha peternakan yang dikelola secara komersil oleh perseorangan dengan syarat sebagai berikut: a) Peternakan ayam ras petelor yang mempunyai produksi minimal 1500 butir telor per hari atau minimal mempunyai 2500 ekor induk ayam. b) Peternakan ayam ras pedaging yang mempunyai produksi minimal 375 ekor ayam potong per minggu atau 19500 ekor per tahun. c) Peternakan babi yang mengusahakan minimal 25 ekor induk babi atau minimal 125 ekor babi. d) Peternakan sapi potong yang mengusahakan minimal 100 ekor sapi induk atau minimal 250 ekor sapi. e) Peternakan sapi perah yang mengusahakan minimal	Jenis kegiatan utama : 1. Pembibitan 2. Budidaya	Jumlah, persentase	Perusahaan, persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					10 ekor sapi perah dewasa/laktasi atau minimal 20 ekor sapi perah. f) Peternakan kerbau yang mengusahakan minimal 100 ekor kerbau induk atau 250 ekor kerbau dan atau 20 ekor kerbau perah laktasi atau 40 ekor kerbau perah. g) Peternakan kuda yang mengusahakan minimal 100 ekor kuda induk atau minimal 250 ekor kuda. h) Peternakan kambing/domba yang mengusaha-kan minimal 80 ekor induk kambing/domba. i) Peternakan burung puyuh yang mengusaha-kan minimal 500 ekor. j) Peternakan itik yang mengusahakan minimal 2500 ekor induk itik. k) Peternakan kelinci yang mengusahakan minimal 1000 ekor campuran. Adapun dasar yang digunakan untuk penentuan kriteria butir a s.d. e tersebut adalah peraturan pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan dan Surat Keputusan Menteri No. 406/KPTS/ORG/6/80 Tanggal 10 Juni 1980 tentang syarat-syarat tata cara permohonan dan pemberian izin usaha peternakan. Selangkan penentuan kriteria butir f s.d. k adalah sesuai dengan usaha yang dijalan sebagai SK Menteri Pertanian, di luar dari kriteria yang telah ditetapkan dipolongkan sebagai usaha peternakan rakyat.			
3834	ST01072.00.00			Pintu air moriki	Pintu air permanen yang digunakan untuk pemasukan atau pembuangan air, sehingga debit air dapat diatur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3835	ST01073.00.00			Pintu air tradisional	Pintu air yang sederhana yang digunakan untuk pemasukan atau pembuangan air. Pada umumnya terbuat dari bambu, kayu, dan sejenisnya biasanya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					debit air tidak dapat diatur.			
3836	SD01614.00.00			Piutang lain-lain	piutang yang timbul selain dari kegiatan utama perusahaan. Contoh: piutang pemegang saham, piutang karyawan/pegawai, piutang pendapatan bunga, dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3837	SE00436.00.00			Piutang usaha	piutang yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Khusus bank, piutang usaha meliputi kredit yang diberikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
3838	SE00437.00.01			PNBP Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP Pemanfaatan TSL adalah pungutan yang dilakukan atas pemanfaatan TSL.	1. Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil / Mengangkut Satwa Liar 2. Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Satwa Liar 4. Tumbuhan Alam	Nilai	Rupiah
3839	SE00437.00.02			PNBP Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP Pemanfaatan TSL adalah pungutan yang dilakukan atas pemanfaatan TSL.	a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (IIUPTSL) b. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi	Jumlah	Rupiah
3840	SE00438.00.00			PNBP Wisata Alam	PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh	1. Pungutan Masuk 2. Pungutan Kegiatan 3. Iuran Izin 4. Iuran Hasil Usaha	Jumlah	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP Wisata Alam adalah pungutan yang dilakukan atas pelaksanaan kegiatan wisata alam di dalam kawasan konservasi.			
3841	ST01074.00.00			Podusen pangan dan pertanian skala kecil (FAO)	a. petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare); b. peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU); c. rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$.	1.Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)	Persentase	Persen
3842	SE00439.00.00			Pola Kemitraan	Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung. Kemitraan tidak terbatas hubungan bapak dengan anak angkat.	1. Inti plasma 2. Subkontrak 3. Perdagangan umum/konsinyasi 4. Bagi hasil 5. Kerjasama operasional 6. usaha patungan 7. lainnya	Jumlah	Kemitraa

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3843	SE00441.00.00			Pola Utama Distribusi Komoditas	Jalur penjualan dengan persentase volume terbesar dari produsen hingga ke konsumen akhir melalui pelaku perdagangan. Akan tetapi, beberapa wilayah tidak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi suatu komoditas sehingga harus mengimpor dari wilayah lain. Oleh karena itu, pola utama distribusi dapat berawal dari luar provinsi. Jalur utama distribusi ini merepresentasikan pola distribusi perdagangan komoditas pada suatu wilayah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rantai
3844	SD01617.00.00			Poliklinik/balai pengobatan	Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3845	SD01618.00.00			Polindes (pondok bersalin desa)	Bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus empat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3846	SD01619.00.00			Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
3847	ST01075.00.00			Populasi ayam ras pedaging (Broiler)	Populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Ayam	Ekor
3848	ST01076.00.00			Populasi hewan	Jumlah hewan yang dirawat usaha pertanian pada tanggal referensi, terlepas dari kepemilikannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor
3849	ST01077.00.00			Populasi Ternak	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	1. Ruminansia besar 2. Ruminansia Kecil	Jumlah Ternak	Ekor

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Unggas		
3850	SD01624.00.00			Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	Tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Fasilitas
3851	SE00442.00.00			Posisi Distribusi	posisi pedagang besar/grosir pada rantai distribusi barang	1. Pedagang Grosir pertama 2. Pedagang grosir selain pedagang grosir pertama 3. pedagang campuran (grosir dan eceran)	Jumlah	Distributor
3852	SD01626.00.00			Poskesdes (pos kesehatan desa)	Sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. oskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
3853	SD01629.00.00			Pranata Komputer	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.	1. Pranata komputer tingkat terampil 2. Pranata komputer tingkat ahli	Jumlah; presentase	Orang; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3854	SD01633.00.00			Presentase rumah tangga dengan akses yang lebih baik terhadap air minum dan sanitasi layak	Perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
3855	SD01644.00.00			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3856	SD01647.00.00		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3857	SD01647.00.00		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin				
3858	SD01648.00.00			Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (40% terbawah)	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%). Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern maupun tradisional ditanyakan pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3859	SE00446.00.00			Produk	Barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan lapangan usaha	Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (5 Buku)	Jumlah	Produk
3860	SE00447.00.00			Produk hasil litbang dan invoasi yang Implementatif	produk barang atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dengan baik	1. Diadopsi PENUH oleh masyarakat, standar, paten & HKI 2. diadopsi di level ILMIAH 3. implementasikan oleh PUBLIK/MASYARAKAT 4. menjadi STANDAR NASIONAL	Jumlah	paket

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3861	ST01078.00.00			Produk hortikultura	Semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah	1. Produk segar 2. Benih	Jumlah; Massa	rumpun, batang, pohon; kg
3862	ST01079.00.00			Produk makanan rumput laut industri rumah tangga	produk olahan berbahan dasar rumput laut kering yang diolah langsung oleh industri rumah tangga untuk dijadikan produk makanan siap konsumsi. Contoh produk makanan rumput laut yang dihasilkan industry rumah tangga adalah: manisan jelly rumput laut, dodol rumput laut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	kg, Kuintal
3863	ST01080.00.00			Produk sampingan agro industri/komponen konsentrat (termasuk tanaman)	mencakup gandumgandum/grain (jagung, gandum, jelai, oat, gandum hitam, sorgum dan lain-lain); kacangkacangan (termasuk kedelai); tepung dan pakan gluten jagung; biji minyak (oilseed); bungkil biji kapas dan biji minyak; dedak dan middling (pakan ternak berukuran sedang); produk sampingan dari pembuatan dan penyulingan gandum-gandum/grain; gula tetes (molasses); tepung ikan (fishmeal); ubi kayu; pisang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	kg, Kuintal
3864	SE00449.00.00			Produksi Aktual Per Tahun	Total Produksi yang dihasilkan selama satu tahun.	1.Produk Utama 2.Produk Sampingan	Jumlah, Nilai, Persentase	Unit, Rupiah, Persen
3865	SE00450.00.00			Produksi bahan tambang	Produksi bahan tambang adalah seluruh produksi beberapa jenis bahan tambang	Jenis barang tambang	Massa, Jumlah	Kg;Ton,Tonmetrik
3866	SE00451.00.00			Produksi Belum Habis	Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kilogram, Kuintal
3867	SE00452.00.00			Produksi Daging	Karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan **bagian yang dapat dimakan (edible portion)** selama waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton
3868	SE00453.00.00			Produksi	Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-	Klasifikasi berdasarkan	Massa	Kilogram,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Diponen Habis/ Dibongkar	buahan semusim, tanaman hidup atau tanaman hias yang dipanen habis /dibongkar pada periode pelaporan	analisis atau sesuai kebutuhan		Kuintal
3869	SE.00454.00.00			Produksi Hasil Hutan Non/Bukan Kayu	Hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan , atau segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan -tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.	Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Jenis HHBK: 1. Rotan 2. Bambu 3. Getah 4. Resin 5. Kulit 6. Buah 7. Biji 8. Lainnya	Jumlah; Massa	Jenis ; Ton
3870	SE.00455.00.00			Produksi kayu bulat berdasarkan sumber produksi dan jenis kayu bulat	Jumlah kayu bulat yang dihasilkan/dipanen dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan dari kegiatan hutan rakyat. Sumber produksi terdiri dari: Rencana Kerja Tahunan/RKT, Carry Over dan lainnya. Jenis kayu bulat misalnya: meranti, sengon, jati, dan yang lainnya.	produksi kayu bulat dilihat dari sumbernya: 1. HPH 2. IPK 3. Hutan Hak/Hutan Rakyat 4. Hutan Tanaman Rakyat 5. HTI 6. Perhutani 7. Lainnya	volume; nilai	m3; Ribu Rupiah
3871	SE.00456.00.00			Produksi kayu bulat menurut jenis kayu dan bukan produksi	Volume produksi kayu bulat yang dipungut/dihasilkan menurut jenis kayu bulat dan bukan produksi	Jenis kayu dan bukan produksi	Volume	m3
3872	SE.00457.00.00			Produksi kayu bulat menurut pulau dan jenis kayu	Volume produksi kayu bulat yang dipungut/dihasilkan menurut pulau dan jenis kayu bulat	pulau dan jenis kayu	Volume	m3

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3873	SE00458.00.00			produksi kayu bulat perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan	Produksi kayu bulat yang berasal dari perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	1.Produksi perusahaan HTI 2.Produksi Perum Perhutani 3.Produksi perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan lainnya	Volume	m3
3874	SE00459.01.00			Produksi komoditas	produksi yang dihasilkan oleh tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman hias dan biofarmaka	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg (Kilogram),kuintal
3875	SE00459.02.00			Produksi komoditas	Produksi yang dihasilkan oleh tanaman perkebunan dalam bulan laporan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg (Kilogram),kuintal
3876	SE00460.00.01			Produksi perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya	Produksi kayu bulat yang berasal dari perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	1. Akasia 2. Jati 3. Sengon 4. Lainnya	Volume;massa	m3; kg
3877	SE00460.00.02			Produksi perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya	Produksi kayu bulat yang berasal dari perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	1. Ranting/kayu bakar 2. Getah 3. Daun 4. Lainnya	Volume;massa	m3; kg
3878	SE00461.00.01			Produksi Perusahaan Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya	Produksi kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	1. Akasia 2. Jati 3. Sengon 4. Lainnya	Volume;massa	m3; kg
3879	SE00461.00.02			Produksi	Produksi kayu bulat yang berasal dari Perum	1. Ranting/kayu bakar	Volume;ma	m3; kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Perusahaan Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya	Perhutani dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya)	2. Getah 3. Daun 4. Lainnya	ssa	
3880	SE00462.00.00			Produksi sendiri	Bibit yang diperoleh dengan menyisihkan sebagian tertentu dari panen tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai bibit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3881	SE00463.00.00			Produksi Susu	Jumlah air susu yang keluar **dari** sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton, Kilogram
3882	SE00464.00.00			Produksi Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kilogram, Kuintal, Ton
3883	SE00465.00.00			Produksi Telur	Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton, Kilogram
3884	SE00466.00.00			Produktivitas Jagung	Produksi jagung yang dihitung per satuan lahan. Produktivitas yang disajikan berdasarkan jumlah produksi jagung dalam satuan tongkol kering tanpa kulit dan tangkai (jagung pipilan) per satuan lahan, yaitu kuintal per hektar (ku/ha).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Kuintal per hektar (ku/ha)
3885	SE00467.00.00			Produktivitas Kedelai	Produksi kedelai yang dihitung per satuan lahan. Produktivitas yang disajikan berdasarkan jumah produksi kedelai dalam satuan polong kering per satuan lahan, yaitu kuintal per hektar (ku/ha).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Kuintal per hektar (ku/ha)
3886	SE00468.00.00			Produktivitas padi	Produksi padi (padi sawah dan padi ladang) yang dihitung per satuan lahan. Produktivitas yang disajikan dalam laporan ini dihitung berdasarkan jumlah produksi padi dalam satuan Gabah Kering	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Kuintal per hektar (ku/ha)

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Giling (GKG) per satuan lahan, yaitu kuintal per hektar (ku/ha).			
3887	SE00469.00.00			Produktivitas tenaga kerja	Kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rupiah per orang
3888	SE00470.00.00			Produsen Benih	Perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Produsen
3889	SD01662.00.00			Produsen pangan skala kecil berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO)	(1) Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas penguasaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare) (2) Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU) (3) Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$.	1.Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)	Persentase	Persen
3890	SD01668.00.02		Program Kampung Iklim (Proklim)	Program Kampung Iklim (Proklim)	Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang	a. ProKlim Pratama (<=50%), b. ProKlim Madya (51 - 80%), c. Nominasi ProKlim Utama (>81%), d. Nominasi ProKlim Lestari (mendapat	Jumlah; Persentase	Program; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.	penghargaan)		
3891	SD01668.00.01			Program Kampung Iklim (Proklim)	Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.	1. Kampung Iklim 2. Lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3892	SD01669.01.00			Program Keluarga Harapan (PKH)	Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/Keluarga
3893	SD01669.02.00			Program Keluarga Harapan (PKH)	Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/Keluarga
3894	SD01672.00.00			Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan	Program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta pemanfaatan wirausaha kelautan dan perikanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wirausaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(PNPM Mandiri KP)				
3895	SD01674.00.00			Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	1. Peringat Hitam 2. Peringkat Merah 3. Peringkat Biru 4. Peringkat Hijau 5. Peringat Emas	Jumlah; Persentase	Program; Persen
3896	SD01679.00.00			Program-Program dan Kelompok Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) 2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 3. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) 4. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
3897	SD01711.00.00			Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3898	SD01713.00.00			Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3899	SD01719.01.00			Proporsi lapangan kerja informal sektor	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas, dan	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	pekerja keluarga.			
3900	SD01722.00.00			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Perbandingan antara luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3901	SD01723.00.00			Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Luas lahan dan sedangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen.	11. ACEH 12. SUMATERA UTARA 13. SUMATERA BARAT 14. RIAU 15. JAMBI 16. SUMATERA SELATAN 17. BENGKULU 18. LAMPUNG 19. KEP. BANGKA BELITUNG 21. KEP. RIAU 31. DKI JAKARTA 32. JAWA BARAT 33. JAWA TENGAH 34. DI YOGYAKARTA 35. JAWA TIMUR 36. BANTEN 51. BALI 52. NUSA TENGGARA BARAT 53. NUSA TENGGARA	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						TIMUR 61. KALIMANTAN BARAT 62. KALIMANTAN TENGAH 63. KALIMANTAN SELATAN 64. KALIMANTAN TIMUR 65. KALIMANTAN UTARA 71. SULAWESI UTARA 72. SULAWESI TENGAH 73. SULAWESI SELATAN 74. SULAWESI TENGGARA 75. GORONTALO 76. SULAWESI BARAT 81. MALUKU 82. MALUKU UTARA 91. PAPUA BARAT 94. PAPUA		
3902	SD01734.00.00			Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi penguranganrisiko bencana	Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3903	SD01739.00.00			Proporsi	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak tanah	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	atas pertanian diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	analisis atau sesuai kebutuhan		
3904	SD01760.00.00			Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	Proporsi jumlah perempuan penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah dengan jumlah penduduk pertanian yang mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3905	SD01775.00.00			Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3906	SD01782.00.00			Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani	Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik dalam sistem terjadwal (regular desludging) maupun peningkatan kualitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	sistem panggilan (on call basis).			
3907	SD01794.00.00			Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3908	SP00400.00.00			Proses bisnis	Tahapan-tahapan yang disusun dalam sebuah kegiatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Proses
3909	SD01804.00.00			Proses Melahirkan/Kelahiran	Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.	1. Lahir hidup 2. Lahir mati	Jumlah; persentase	Kelahiran; persen
3910	SD01804.00.00		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proses Melahirkan/Kelahiran	Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.	1. Lahir hidup 2. Lahir mati	Jumlah; persentase	Kelahiran; persen
3911	SP00401.00.00			Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah	11. Nanggroe Aceh Darussalam	Jumlah	Provinsi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.	12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta 35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		
3912	SPX0401.00.00			Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.	11. Nanggroe Aceh Darussalam; 12. Sumatera Utara; 13. Sumatera Barat; 14. Riau 15. Jambi; 16. Sumatera Selatan; 17. Bengkulu; 18. Lampung; 19. Kepulauan Bangka Belitung; 21. Kepulauan Riau; 31. Dki Jakarta; 32. Jawa Barat; 33. Jawa Tengah; 34. Di Yogyakarta; 35. Jawa Timur; 36. Banten; 51. Bali; 52. Nusa Tenggara Barat; 53. Nusa Tenggara Timur; 61. Kalimantan Barat; 62. Kalimantan Tengah; 63. Kalimantan Selatan; 64. Kalimantan Timur; 65. Kalimantan Utara; 71. Sulawesi Utara; 72. Sulawesi Tengah;	Jumlah	Provinsi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						73. Sulawesi Selatan; 74. Sulawesi Tenggara; 75. Gorontalo; 76. Sulawesi Barat; 81. Maluku; 82. Maluku Utara; 91. Papua Barat; 94. Papua;		
3913	SD01805.00.00			Proyeksi Populasi	Perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
3914	SD01806.00.00			Psikososial	Masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa	Klasifikasi berdasarkan penyebab	Jumlah	Kasus
3915	ST01085.00.00			Pukat Hela(trawls)	Kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dibela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
3916	ST01086.00.00			Pukat Tarik	Jaring yang memiliki kantong dan 2 buah sayap, pukat jenis ini dioperasikan dengan cara menarik jaring tersebut ke arah kapal yang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayapnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3917	SP00402.00.00			Pukul berangkat	Jam dan menit (dalam format 24 jam) ketika responden berangkat dari tempat tinggal menuju tempat kegiatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Jam dan menit
3918	SP00403.00.00			Pukul tiba	Jam dan menit (dalam format 24 jam) ketika responden tiba/sampai di tempat tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Jam dan menit
3919	SD01808.00.00			Pulau Kecil	Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
3920	SD01809.00.00			Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
3921	SD01810.00.00			Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
3922	ST01087.00.00			Puncak musim	Musim di mana hasil tangkapan/hasil produksi maksimal karena di laut sedang banyak ikan, di mana tidak ada gangguan alam (cuaca, gelombang).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Triwulan
3923	ST01088.01.00			Pupuk	Substansi mineral atau atau organik, baik alami ataupun buatan, yang diaplikasikan ke tanah, air irigasi, atau media hidroponik, untuk memberi tanaman nutrisi atau untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.	1. Pupuk mineral 2. Pupuk organik-mineral 3. Pupuk organik 4. Pupuk hayati (Biofertilizers) 5. Pupuk kandang	Persentase	Persen
3924	ST01088.02.01			Pupuk	Bahan material yang diberikan pada tanah, air atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah/melengkapi ketersediaan unsur hara.	1. Pupuk alam (organik) 2. Pupuk buatan (anorganik);	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3925	ST01088.02.02			Pupuk	Bahan material yang diberikan pada tanah, air atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah/melengkapi ketersediaan unsur hara.	1. Pupuk akar 2. Pupuk daun	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3926	ST01089.00.00			Pupuk akar	Diserap tanaman lewat akar dengan cara penebaran di tanah. Contoh pupuk akar adalah urea, NPK, dan Dolomit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3927	ST01090.00.00			Pupuk alam (organik)	Pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup (tumbuhan atau kotoran hewan/ternak) yang dikembalikan ke tanah dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan fisik, kimia, dan biologi tanah secara alami (diolah melalui proses pembusukan /dekomposisi oleh bakteri pengurai).	1. Pupuk kandang 2. Pupuk hijau 3. Pupuk kompos 4. Pupuk alam lainnya	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3928	ST01091.00.00			Pupuk alam lainnya	Pupuk alam (selain pupuk kandang, pupuk hijau, kompos) seperti tinja dan guano (tahi burung yang sudah kering).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3929	ST01092.00.00			Pupuk buatan tunggal	Mengandung satu unsur makro walaupun masih ada sedikit unsur lain biasanya berupa unsur hara makro primer.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3930	ST01093.00.00			Pupuk buatan/pabrik (anorganik)	Pupuk yang dibuat dengan cara meramu bahan kimia, mengandung satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.	1. Pupuk sumber fosfor 2. Pupuk sumber kalium 3. Pupuk sumber nitrogen 4. Pupuk NP 5. Pupuk NPK 6. Pupuk PK	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3931	ST01094.00.00			Pupuk daun	Diberikan lewat penyemprotan pada daun tanaman.	Klasifikasi berdasarkan	Massa;	Satuan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Contoh pupuk daun adalah Gandasil B dan D, Grow More, dan Vitabloom.	analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	massa; Satuan volume
3932	ST01095.00.00			Pupuk hayati	Produk yang mengandung mikroorganisme hidup atau dorman, seperti bakteri dan jamur, yang menyediakan nutrisi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3933	ST01096.00.00			Pupuk hijau	Pupuk alam dari tanaman atau bagian tanaman yang masih segar yang dibenamkan ke dalam tanah untuk menambah bahan-bahan organik dan unsur hara nitrogen.	1. Calopogonium mucunoides 2. Centrosema pubuscens 3. Crotalaria anagyroides 4. Crotalaria juncea 5. Crotalaria usaramuluasis 6. Glycine soya 7. Mimosa invisa 8. Phaseolus tunatus 9. Pueraria thumbergiana 10. Serbania aculatsa 11. Serbania sesban 12. Tephorisia candida 13. Topheraaia vogelli 14 Vigna sinensin	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3934	ST01097.00.00			Pupuk hijau/tanaman pelindung (Green manure/cover crop)	Tanaman yang sengaja ditanam untuk menyediakan perlindungan bagi tanah dan meningkatkan karakteristik fisik, kimia, dan biologis tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3935	ST01098.00.00			Pupuk kandang	Pupuk yang dibuat dari material organik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3936	ST01098.00.00			Pupuk kandang	Pupuk alam yang terbentuk dari campuran kotoran hewan/ternak, urine, dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dihabiskan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3937	ST01099.00.00			Pupuk kandang cair	Urin hewan peliharaan, mungkin juga mengandung sedikit ekskremen dan/atau air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3938	ST01100.00.00			Pupuk kandang padat	Ekskremen hewan peliharaan (dengan atau tanpa hadh), mungkin mengandung sedikit urin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3939	ST01101.00.00			Pupuk kandang semi cair/slurry	Pupuk kandang dalam bentuk cairan, berupa campuran dari ekskremen dan urin hewan peliharaan, mungkin mengandung air dan/atau sedikit hadh.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3940	ST01102.00.00			Pupuk kompos	Pupuk alam yang terbentuk karena perubahan dan penguraian tumpukan sampah dan sisa-sisa tanaman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3941	ST01103.00.00			Pupuk mikro	Mikroba penyubur tanah (rhizobium, lactobacillus, streptomyces, iconiza, dan aspergillus)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3942	ST01104.00.00			Pupuk mineral	Pupuk yang dibuat dari material anorganik yang diproduksi melalui proses industri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3943	ST01105.00.00			Pupuk NP	- Ammo-Phos-Monoammoniumphosphate - Diammonium Phosfat-Amonium Sulfat (Lenaphos) - Diammonium Phosphate (DAP) - Superstikfos (SS atau SSF) - Urea Amonium Phosfat (UAP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3944	ST01106.00.00			Pupuk NPK	- Compound Fertilizer - NPK (12-12-17-2) - NPK (15-15-6-4) - NPK (15-15-15)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3945	ST01107.00.00			Pupuk organik	Pupuk yang dibuat dari materi tanaman atau hewan yang telah diproses dan/atau materi mineral mentah (seperti kapur, batu, atau fosfat) yang mengandung setidaknya 5 persen dari kombinasi nutrisi tanaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3946	ST01108.00.00			Pupuk organik-mineral	Pupuk yang diperoleh dari pencampuran atau pemrosesan material organik dengan pupuk mineral untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan nilai kesuburan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3947	ST01109.00.00			Pupuk PK	- Kalium Metaphosphate - Monokaliumphosphate	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3948	ST01110.00.00			Pupuk sumber fosfor	- SP36 - Amonium Phospat - Agrophos - Double Sicerphosphate (DSP) - Enkel Superphosphate (ESP) - Fertipos (Dikalsium fosfat) - Fusek Magnesium Phosphate (FMP) - Rock Phosphate (RP) - Triple Superphosphate (TSP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3949	ST01111.00.00			Pupuk sumber kalium	- Kainite - Kalium Chlorida (KCl)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Massa; Volume	Satuan massa;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					- Kalium Chlorida (KCL 80) - Kalium Chlorida (KCL 90) - Kalium Sulfat - Kalium Sulfat (ZK 90) - Kalium Sulfat (ZK 96) - Kalium Nitrat	kebutuhan		Satuan volume
3950	ST01112.00.00			Pupuk sumber nitrogen	- Amonium Chlorida - Amonium Nitrat - Amonium Sulfat (ZA) - Amonium Sulfanitrat (ASN) - Chilisalpeter - Kalsium Amonium Nitrat - Kalsium Cyanamida - Kalsium Nitrat - Urea	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Volume	Satuan massa; Satuan volume
3951	SD01812.00.00			Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan; Persen
3952	SD01813.00.00			Pusat Perbelanjaan	Suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
3953	SD01814.01.00			Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)	Sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
3954	SD01815.00.00			Puskesmas dengan rawat inap	Puskesmas yang dicakup adalah puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3955	SD01816.00.00			Puskesmas pembantu	Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
3956	SD01817.00.00			Puskesmas tanpa rawat inap	Puskesmas yang dimaksud disini adalah puskesmas yang tidak menyediakan pelayanan rawat inap.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Unit; Persen
3957	SD01819.00.00			Ragam Data	Pengkompakan jenis data menurut kedeputian yang ada di BPS pusat meliputi bidang statistik sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, dan metodologi dan informasi statistik.	1. Statistik sosial 2. Statistik produksi 3. Statistik distribusi & jasa 4. Neraca & analisis statistik 5. Metodologi & informasi statistik	Persentase	Persen
3958	SD01820.00.00			Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.			
3959	ST01113.00.00			Ranching	Aktivitas ternak berskala besar yang dilakukan di area lahan luas yang dikhususkan untuk merumput.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Aktivitas
3960	SE00472.00.00			Rapat Anggota Koperasi	Rapat Anggota Koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi	1. Rapat Anggota Biasa 2. Rapat Anggota Luar Biasa	Jumlah	Rapat
3961	SD01821.00.00			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya (Pendidikan Tinggi)	Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk pada 20 persen termiskin yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (PT) dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk pada 20 persen terkaya yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (PT).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
3962	SD01821.00.00			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya (SMA/SMK/MA/Sederajat)	a) Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk pada 20 persen termiskin yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk pada 20 persen terkaya yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
3963	SD01826.00.00			Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/no	Perbandingan angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas usia 7-17 tahun dengan angka partisipasi sekolah anak bukan penyandang disabilitas usia 7-17 tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				n disabilitas)				
3964	SD.018.32.00.00			Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR)	Proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Rasio
3965	SD.018.33.00.00			Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR) Menurut Daerah Tempat Tinggal	Proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja berdasarkan daerah tempat tinggal	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Rasio	Rasio
3966	SD.018.34.00.00			Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment	Proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Rasio	Rasio

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				to Population Ratio-EPR) Menurut Jenis Kelamin				
3967	SD01835.00.00			Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR) Menurut Kelompok Umur	Proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur	1. 15-19; 2. 20-24; 3. 25-29; 4. 30-34; 5. 35-39; 6. 40-44; 7. 45-49; 8. 50-54, 9. 55-59; 10. 60-64; 11. 65-69; 12. 70-74; 13. 75-79; 14. 80-84; 15. 85-89; 16. 90 tahun keatas	Rasio	Rasio
3968	SD01836.00.00			Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	Perbandingan persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat terhadap persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
3969	ST00833.00.00			Rata rata harga per Kg	rata rata nilai setiap satu kilogram rumput laut basah dalam satuan rupiah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Volume	Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				rumput laut basah		kebutuhan		
3970	ST00857.00.00			Rata rata harga per Kg rumput laut kering	rata rata nilai setiap satu kilogram rumput laut kering dalam satuan rupiah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
3971	ST00868.00.00			Rata rata panen rumput laut basah per tali bentang	rata rata berat rumput laut basah per tali bentang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
3972	SE00348.00.00			Rata-rata Broken per Jenis Beras	Rata-rata kadar butir beras patah	Rata-rata broken menurut kualitas (Premium, Medium, Luar Kualitas)	Rata-rata	Persen
3973	SE00360.00.00			Rata-Rata Harga Beras Penggilingan	Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan	Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan menurut kualitas (Premium, Medium, Luar Kualitas)	Rata-rata	Rupiah/kg
3974	SE00370.00.00			Rata-rata Harga Gabah	Rata-rata harga gabah di tingkat petani dan di penggilingan menurut kualitas	Rata-rata harga gabah menurut kualitas (GKG, GKP, dan Luar Kualitas)	Rata-rata	Rupiah/kg
3975	SD01324.00.00			Rata-Rata Institusi	Banyaknya institusi swasta, ormas, dan/atau organisasi profesi yang berperan secara aktif dalam FDPPKB guna memberikan masukan dalam penyusunan RKPD pada setiap kota yang dilakukan pengukuran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Institusi
3976	SD01334.00.00			Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum	Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi per kota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Institusi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan				
3977	SE00391.00.00			Rata-Rata Jam Kerja	Jam Kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk istirahat resmi), dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai (tutup). Rata-rata jam kerja adalah jumlah jam kerja kegiatan usaha/perusahaan selama sebulan dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.	Rata-rata jam kerja per hari mulai bulan Nov 2019 s.d. Okt 2020	rata-rata	jam
3978	SD01034.00.00			Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor desa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Km
3979	SE00291.00.00			Rata-Rata Konsumsi Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Rumah Tangga 2. Per Kapita	Persentase	Persen
3980	ST00839.00.00			Rata-rata lama berproduksi per ekor selama setahun	Rata-rata lamanya betina produktif (jumlah hari) saat berproduksi selama setahun per ekor	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari
3981	SD01056.00.00			Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Tahun
3982	SD01059.00.00			Rata-rata lama	Jumlah tahun belajar penduduk umur ≥15 tahun yang	Klasifikasi berdasarkan	Waktu	Tahun

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	analisis atau sesuai kebutuhan		
3983	SP00260.00.00			Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	tahun
3984	SP00264.00.00			Rata-rata pekerja disabilitas per hari kerja	Banyaknya tenaga kerja disabilitas baik yang dibayar maupun tidak dibayar per hari kerja	Berdasarkan status: 1. Pekerja dibayar 2. Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah ; Persentase	Orang; Persen
3985	SP00271.00.00			Rata-rata pekerja per hari kerja	Banyaknya tenaga kerja baik yang dibayar maupun tidak dibayar per hari kerja	Berdasarkan status: 1. Pekerja dibayar 2. Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah ; Persentase	Orang; Persen
3986	SP00277.00.00			Rata-rata Pendapatan bersih sebulan	Pendapatan Bersih Sebulan yang Lalu adalah imbalan/balas jasa selama sebulan yang lalu, baik berupa uang maupun barang yang diperoleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di nonpertanian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3987	SD01088.00.00			Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	Rata-rata pendapatan produsen pangan skala kecil suma dengan skala kecil dibagi jumlah produsen pangan skala kecil.	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan (tangkap dan budidaya) 6. Produk hasil kehutanan	Jumlah	Rupiah
3988	SD01088.00.00			Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	Rata-rata pendapatan produsen pangan skala kecil suma dengan skala kecil dibagi jumlah produsen pangan skala kecil.	1.Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) 2. Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) 3. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
3989	SE00297.00.00			Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Sebulan Menurut Sumber Pendapatan ART yang Bekerja	Pendapatan dalam rupiah, baik yang berupa uang maupun barang/jasa selama periode survei yang lalu.	1. Upah/gaji 2. Hasil bersih usaha 3. Kepemilikan aset 4. Pendapatan dari pihak lain 5. Pendapatan lainnya	Rata-Rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3990	SE00299.00.00			Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Selama Sebulan Menurut Sumber Pendapatan	Pendapatan dalam rupiah, baik yang berupa uang maupun barang/jasa selama periode survei yang lalu.	1. Upah/gaji 2. Hasil bersih usaha 3. Kepemilikan aset 4. Pendapatan dari pihak lain 5. Pendapatan lainnya	Rata-Rata	Rupiah
3991	SE00302.00.00			Rata-Rata Pendapatan Selama Sebulan	Pendapatan dalam rupiah, baik yang berupa uang maupun barang/jasa selama periode survei yang lalu.	1. Rumah Tangga 2. Per Kapita	Rata-rata	Rupiah
3992	SE00303.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi dan Non Konsumsi Per Kapita Menurut Kelompok Barang dan Jasa	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi. Beberapa pengeluaran yang termasuk pengeluaran bukan konsumsi rumah tangga antara lain: a. Pengeluaran untuk usaha. b. Pengeluaran untuk investasi, pembelian tanah, bangunan, surat-surat berharga, menabung dan pembelian barang lainnya untuk investasi. c. Pengeluaran untuk pesta, denda, judi dan sejenisnya. d. Pemberian kepada pihak lain, sumbangan dan hilang. e. Pembayaran premi asuransi, kontribusi dana pension dan asuransi kerugian.	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan	Rata-Rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
3993	SE00308.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi dan Non Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Barang dan Jasa	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi. Beberapa pengeluaran yang termasuk pengeluaran bukan konsumsi rumah tangga antara lain: a. Pengeluaran untuk usaha. b. Pengeluaran untuk investasi, pembelian tanah, bangunan, surat-surat berharga, menabung dan pembelian barang lainnya untuk investasi. c. Pengeluaran untuk pesta, denda, judi dan sejenisnya. d. Pemberian kepada pihak lain, sumbangan dan hilang. e. Pembayaran premi asuransi, kontribusi dana pensiun dan asuransi kerugian.	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Rata-Rata	Rupiah
3994	SE00311.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki	Rata-Rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
3995	SE00314.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Barang dan Jasa	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 2. Pakaian dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan	Rata-Rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
3996	SE00318.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Makanan, Minuman Dan Tembakau 2. Pakaian Dan Alas Kaki 3. Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga 4. Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan 8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 9. Pendidikan 10. Penyediaan	Rata-rata; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Makanan Dan Minuman/Restoran 11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya		
3997	SE003324.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Informasi, Komunikasi Dan Jasa Keuangan Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Peralatan Informasi dan Komunikasi 2. Layanan Informasi dan Komunikasi 3. Asuransi 4. Jasa Keuangan	Rata-rata	Rupiah
3998	SE003325.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Kesehatan Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Obat-Obatan dan Produk Kesehatan 2. Jasa Rawat Jalan 3. Jasa Rawat Inap 4. Jasa Kesehatan Lainnya	Rata-rata	Rupiah
3999	SE003328.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan, Minuman Dan Tembakau Selama	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Makanan 2. Minuman Tidak Beralkohol 3. Minuman Beralkohol 4. Tembakau	Rata-rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Sebulan				
4000	SE00328.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Pakaian Dan Alas Kaki Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Pakaian 2. Alas Kaki	Rata-rata	Rupiah
4001	SE00331.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Pendidikan Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Tinggi 4. Pendidikan Lainnya	Rata-rata	Rupiah
4002	SE00332.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	Rata-rata	Rupiah
4003	SE00333.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk	1. Perawatan Pribadi 2. Perawatan Pribadi Lainnya 3. Perlindungan Sosial	Rata-rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Untuk Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya Selama Sebulan	keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	4. Jasa Lainnya		
4004	SE00336.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Perlengkapan, Peralatan Dan Perelliharaan Rutin Rumah Tangga Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Furnitur, Perlengkapan dan Karpet 2. Tekstil Rumah Tangga 3. Peralatan Rumah Tangga 4. Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum 5. Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun 6. Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	Rata-rata	Rupiah
4005	SE00337.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Sewa dan Kontrak Rumah 2.Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat 3. Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya 4. Listrik, Gas, dan	Rata-rata	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Lainnya Selama Sebulan		Bahan Bakar Lainnya		
4006	SE003338.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Rekreasi, Olahraga Dan Budaya Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Barang Rekreasi Tahan Lama 2. Barang Rekreasi Lainnya 3. Layanan Rekreasi 4. Perlengkapan Kebudayaan 5. Layanan Kebudayaan 6. Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	Rata-rata	Rupiah
4007	SE003342.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Transportasi Selama Sebulan	Pengeluaran konsumsi yang dimaksud pada blok VI adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, yaitu semua barang/jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga, tetapi tidak untuk keperluan usaha dan tidak untuk investasi.	1. Pembelian Kendaraan 2. Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi 3. Jasa Angkutan Penumpang 4. Jasa Pengiriman Barang	Rata-rata	Rupiah
4008	SE003346.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Selama Sebulan	Pengeluaran rumah tangga yang dicatat dalam SBH 2018 terdiri dari dua bagian, yaitu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran bukan konsumsi.	1. Konsumsi 2. Non konsumsi	Rata-rata	Rupiah
4009	SP003320.00.00			Rata-rata pengeluaran perkapita dalam rupiah	Pengeluaran per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rupiah
4010	SP003324.00.00			Rata-rata	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dalam rupiah	Klasifikasi berdasarkan	Rata-rata	US$PPP

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengeluaran perkapita sebulan dalam (US$ PPP)	yang dikonversi ke dalam satuan US$ PPP	analisis atau sesuai kebutuhan		
4011	SP003320.00.01			Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dalam rupiah dan US$ PPP	Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rupiah
4012	SP003326.00.00			Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Selama Sebulan	Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.	1. Konsumsi 2. Non konsumsi	Rata-rata	Rupiah
4013	SP003328.00.00			Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan dalam rupiah dan (US$ PPP)	Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan dalam rupiah yang dikonversi ke dalam satuan US$ PPP	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	US$PPP
4014	SP003330.00.01			Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan dalam rupiah	Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rupiah
4015	SP003320.00.02			Rata-rata	Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi	1. Perkotaan	Rata-rata	Rupiah, US$

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengeluaran rumah tangga sebulan dalam rupiah dan US$ PPP	semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memerhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.	2. Perdesaan	nilai	PPP
4016	SP00337.00.02			Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan dalam rupiah dan US$ PPP	Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memerhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.	1. Makanan 2. Bukan Makanan	Rata-rata nilai	Rupiah, US$ PPP
4017	SD01227.00.00			Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara)	Indikator yang menyediakan nilai custom duties levied oleh 6 negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4018	SD01251.00.00			Rata-rata Upah/Gaji bersih sebulan	Upah/Gaji Bersih adalah imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama, yang terdiri dari komponen upah/gaji pokok dan tunjangan, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perusahaan/kantor/majikan.			
4019	SD01257.00.00			Rata-rata upah/gaji/pendapatan per jam kerja	Rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rupiah/jam
4020	SD01263.00.00			Rata-rata upah/gaji/pendapatan per jam pekerja	1. Rata-rata upah/gaji/pendapatan per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah/gaji/pendapatan baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat). (Khusus untuk hasil Sakernas Agustus 2020). Rumus: (Jumlah upah/gaji/pendapatan yang diterima dalam sebulan)/(Jumlah jam kerja seminggu yang lalu x 4) 2. Rata-rata upah/gaji/pendapatan per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah/gaji/pendapatan baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan penjumlahan jam kerja aktual seminggu yang lalu dengan jam kerja seminggu biasanya dikalikan dengan 3 (tiga). Rumus: (Jumlah upah/gaji/pendapatan yang diterima dalam sebulan)/((Jumlah jam kerja aktual seminggu yang lalu x 1) + (Jumlah jam kerja biasanya dalam seminggu x 3))	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rupiah/jam
4021	ST00976.00.03			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.	1. Rehabilitasi secara vegetatif 2. Rehabilitasi secara sipil teknis	luas	Hektar, unit
4022	SD01295.00.00			Rehabilitasi	Usaha-usaha memelihara, mempertahankan dan	1. Rehabilitasi secara	luas	Hektar, unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lahan	memperbaiki keadaan lahan dengan penanaman maupun teknik-teknik pengawetan air dan tanah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.	vegetatif 2. Rehabilitasi secara sipil teknis		
4023	SD01321.00.00			Rehabilitasi Tanaman	Usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman kearah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tanaman;Persen
4024	SD01322.00.00			Rekening	Pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau penilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; akun (account).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rekening-Persen
4025	SD01323.00.00			Reklamasi	Kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya	1. Rencana 2. Realisasi	Jumlah	Hektar
4026	ST000985.00.00			Rekomendasi Audit	Rekomendasi audit adalah saran yang diberikan oleh auditor kepada auditi setelah membuat simpulan berdasarkan fakta yang ada untuk meningkatkan kinerja dan atau proses tata kelola sektor publik yang harus mendapat perhatian lebih dari auditi dan akan ditindaklanjutinya	1. Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat 2. Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat 3. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan 4. Penghapusan barang	Jumlah	Rekomendasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						milik negara/daerah 5. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian 6. Perbaikan laporan dan penerbitan administrasi/ kelengkapan administrasi 7. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian 9. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan 10. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi 11. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang 12. Pelaksanaan penelitian oleh tim		

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern 13. Pelaksanaan sosialisasi 14. Lain-lain		
4027	SD01339.00.00			Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan srategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
4028	SD01340.00.00			Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
4029	SD01341.00.00			Rencana untuk berhenti menjadi komuter	Apabila responden dalam jangka waktu setahun ke depan memutuskan berhenti menjadi komuter, misalnya pindah pekerjaan ke kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggal, pindah tempat tinggal ke kabupaten/kota yang sama dengan tempat kegiatan, berhenti melakukan kegiatan ulang alik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4030	SE00390.00.00			Renovasi	memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian atau seluruhnya agar berfungsi sesuai fungsinya, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Renovasi
4031	SP00361.00.00			Restoran/rumah makan	Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.			
4032	SD01345.00.00			Restorasi Ekosistem	Upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	1. Dilakukan oleh Pemerintah 2. Dilakukan oleh swasta	Jumlah; Persentase	Restorasi; Persen
4033	SE00392.00.00			Retribusi Daerah	pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	ribu rupiah
4034	SD01348.00.00			Revitalisasi	Upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
4035	SP00362.00.00			Revolusi Mental	perubahan cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai strategis instrumental berdasarkan Pancasila, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat.	1. Integritas 2. Etos Kerja 3. gotong royong	Persentase	Persen
4036	SE00393.00.00			Ringkasan Nilai	Nilai komponen-komponen pendapatan perusahaan dari proyek yang dikerjakan dan pendapatan lainnya	Nilai konstruksi yang diselesaikan dan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pendapatan		pendapatan lainnya		
4037	SE003394.00.00			Rangkaian Nilai Pengeluaran	Nilai komponen-komponen pengeluaran perusahaan selama proyek dikerjakan	Balas jasa dan upah pekerja, nilai bahan/material yang digunakan, biaya/pengeluaran lainnya	Nilai	Rupiah
4038	SD010136.00.00			Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; Persentase	Kerugian;Persen
4039	ST008334.01.00			Rodentisida	Substansi yang membunuh, mengusir, atau mengontrol hewan pengerat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4040	ST008334.02.00			Rodentisida	Bahan yang digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat (rodent) seperti tikus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	sesuai jawaban responden (tidak ada standar satuan)
4041	ST008335.00.00			Rotasi tanaman	Penanaman spesies atau kelompok tanaman secara bergantian pada petak (field) tertentu dengan pola atau urutan tersendiri untuk membunuh gulma, hama dan siklus penyakit dan mempertahankan atau meningkatkan kesuburan tanah dan kandungan zat-zat organik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4042	SE002857.00.00			Ruang dagang	bangunan/tempat berjualan pedagang yang dibedakan menjadi beberapa jenis seperti kios/toko, los, kaki lima/selasar/emperan.	Klasifikasi pasar	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
4043	SD010400.00.00			Ruang Terbuka Hijau	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Area; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	kebutuhan		
4044	SE00288.00.00			Rugi/Laba Bersih (Setelah Pajak)	kerugian/keuntungan yang diperoleh dari Rugi/Laba sebelum Pajak setelah dikurangi Pajak Badan dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4045	SE00289.00.00			Rugi/Laba Kotor	Nilai kerugian/keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha perusahaan dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4046	SE00290.00.00			Rugi/Laba Sebelum Pajak	kerugian/keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha perusahaan setelah dikurangi deviden, CSR, dan Dana R&D dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4047	SD01045.00.00			Rujukan Utama	Menggunakan data BPS sebagai data utama untuk kegiatan yang dilakukan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4048	SP00250.00.00			Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilainilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RW; RT
4049	SP00251.00.00			Rumah bersalin	Sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4050	SD01047.02.02			Rumah layak huni	Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space) 2) memiliki akses terhadap air minum layak 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak	1. Layak Huni 2. Tidak Layak Huni	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					4. ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat/ kayu/papan/ batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.			
4051	ST00836.00.00			Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	Suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan **(ruminansia, babi, atau unggas)** bagi konsumsi masyarakat umum, **baik milik pemerintah maupun swasta.**	1. RPH Pemerintah 2. RPH Swasta	Jumlah	Unit, Bangunan
4052	ST01127.00.00			Rumah Pemotongan **Hewan** Unggas **(RPH-U)**	suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong **hewan** unggas bagi konsumsi masyarakat umum, **baik milik pemerintah maupun swasta.**	1. **RPH-U** Pemerintah 2. **RPH-U** Swasta	Jumlah	Unit, Bangunan
4053	SP00252.00.00			Rumah sakit	Sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4054	SP00253.00.00			Rumah sakit bersalin	Rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4055	SD010350.02.00			Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang menempati sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4056	SP00254.02.00			Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang menempati sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; persentase	Rumah Tangga; Persen
4057	SP00254.02.00			Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang menempati sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4058	SP00254.02.00			Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang menempati sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2 . Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4059	SP00254.02.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang menempati sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4060	ST003837.01.00			Rumah Tangga	Satu atau sekumpulan orang [biasanya suatu	1. Rumah Tangga Biasa	Jumlah;	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kehargai yang tinggal bersama dan dalam 1 (satu) pengelolaan makan/minum dan penerimaan kebutuhan sehari-hari.	2. Rumah Tangga Khusus	Persentase	Tangga; Persen
4061	ST008837.01.00			Rumah Tangga	Satu atau sekumpulan orang (biasanya suatu keharga) yang tinggal Bersama dan dalam 1 (satu) pengelolaan makan/minum dan penerimaan kebutuhan sehari-hari.	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4062	SD001052.00.00			Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4063	ST008838.00.00			Rumah Tangga Budidaya Rumput Laut	kegiatan rumah tangga meliputi memelihara, membesarkan dan atau membiakkan tanaman (bibit) rumput laut dalam suatu wadah tertentu dengan menggunakan media air laut/payau serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya dijual/ditukar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4064	SD001053.00.00			Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4065	SD001054.01.00			Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), sufficient living area, dan durability of housing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4066	SD001054.02.00			Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4067	SD01054.01.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), sufficient living area, dan durability of housing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4068	SD01054.02.00		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4069	ST00840.00.00			Rumah Tangga Perikanan Budidaya	rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha).	RTP berdasarkan wilayah administrasi	Jumlah	Rumah Tangga
4070	ST00840.00.00			Rumah Tangga Perikanan Tangkap	rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP	1. RTP berdasarkan wilayah administrasi 2. RTP berdasarkan WPP	Jumlah	Rumah Tangga
4071	ST00841.01.01			Rumah Tangga Pertanian	Satu atau sekumpulan orang (biasanya suatu kehiarga) yang tinggal bersama dan dalam 1 (satu) pengelolaan makan/minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. di mana satu atau beberapa anggotanya terlibat dalam kegiatan pertanian; Keterlibatan berkaitan dengan penggunaan akhir sendiri atau untuk dijual/dibarter, juga keterlibatan	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah; persentase	Rumah Tangga; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kegiatan pertanian di rumah tangga lain, perusahaan pertanian atau unit ekonomi lainnya; secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah (kuasa usaha), dalam hal ini termasuk usaha jasa penunjang pertanian.			
4072	ST00841.02.02			Rumah Tangga Pertanian	Rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu orang anggota rumah tangga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Kegiatan dimaksud meliputi bertani/berkebun, beternak ikan dikolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, dan mengusahakan ternak/unggas	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Rumah Tangga; Persen
4073	ST00841.03.01			Rumah Tangga Pertanian	Rumah tangga di mana satu atau beberapa anggotanya terlibat dalam kegiatan pertanian; Keterlibatan berkaitan dengan penggunaan akhir sendiri atau untuk dijual/dibarter, juga keterlibatan kegiatan pertanian di rumah tangga lain, perusahaan pertanian atau unit ekonomi lainnya.	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Rumah Tangga
4074	ST00841.03.01			Rumah Tangga Pertanian	Rumah tangga di mana satu atau beberapa anggotanya terlibat dalam kegiatan pertanian; Keterlibatan berkaitan dengan penggunaan akhir sendiri atau untuk dijual/dibarter, juga keterlibatan kegiatan pertanian di rumah tangga lain, perusahaan pertanian atau unit ekonomi lainnya.	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Rumah Tangga
4075	ST00841.04.01			Rumah Tangga Pertanian	Rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian baik usaha milik sendiri, bersama maupun milik pihak lain	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Rumah Tangga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4076	ST00841.02.01			Rumah Tangga Pertanian	Rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu orang anggota rumah tangga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Kegiatan dimaksud meliputi bertani/berkebun, beternak ikan dikolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, dan mengusahakan ternak/unggas	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Rumah Tangga
4077	ST00841.04.03			Rumah tangga pertanian	Rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian baik usaha milik sendiri, bersama maupun milik pihak lain	1. mengelola usaha pertanian milik sendiri 2. mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil 3. mengelola usaha pertanian dengan menerima upah 4. memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah	jumlah	Orang
4078	ST00842.00.00			Rumah tangga pertanian tanaman kehutanan	Apabila rumah tangga tersebut mengusai tanaman kehutanan yang, sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/diniaga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rumah Tangga
4079	ST00843.00.00			Rumah tangga pertanian tanaman pangan	Suatu rumahtangga yang sekurang-kurangnya ada seorang anggota rumahtangga yang melakukan usaha kecil pertanian tanaman pangan/usaha rumahtangga pertanian tanaman pangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	jumlah	Orang
4080	ST00844.00.00			Rumah Tangga Usaha Pertanian	Rumah Tangga yang memelihara/mengusai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan Sebagian atau seluruh hasilnya untuk	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan	Jumlah	Rumah Tangga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(RTUP)	dijual/ditukar	4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan		
4081	ST090845.00.00			Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan	Rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha komoditas padi dan palawija, baik milik sendiri maupun secara bagi hasil, atau mengelola milik orang lain dengan menerima upah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rumah Tangga
4082	SD010555.00.00			Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga/Rumah Tangga; Persen
4083	ST090846.00.00			Rumah tangga yang mengelola usaha pertanian	Rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggungjawab dalam kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan, dll	Jenis rumah tangga menurut Subsektor : 1. Usaha rumah tangga tanaman pangan 2. Usaha rumah tangga hortikultura 3. Usaha rumah tangga perkebunan 4. Usaha rumah tangga peternakan 5. Usaha rumah tangga perikanan 6. Usaha rumah tangga kehutanan 7. Jasa Pertanian	Jumlah, Persentase	Rumah tangga, persen
4084	ST090847.00.00			Rumah Tangga	Rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota	1.Tanaman Pangan	Jumlah	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang mengelola usaha pertanian	rumah tangganya melakukan dan bertanggungjawab dalam kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan, dll.	2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan		Tangga
4085	SP00255.00.00			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik non PLN	Rumah yang ditempati menggunakan listrik non PLN, misalnya perusahaan listrik daerah, genset berbahan bakar solar, atau pembangkit listrik tenaga matahari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4086	SP00256.00.00			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN dengan daya 450 watt atau 900 watt	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang 450 watt atau 900 watt.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4087	SP00256.00.00			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN dengan daya lebih dari 900 watt	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang lebih dari 900 watt.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4088	SP00257.00.00			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN tanpa meteran	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN tanpa meteran, misalnya dengan menyalurkan listrik dari tetangga atau mengambil dari saluran listrik utama.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4089	SP00258.00.00			Rumah yang ditempati tidak menggunakan listrik	Rumah yang ditempati tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menggunakan listrik		kebutuhan		Persen
4090	ST00848.00.00			Rumahtangga perikanan darat	Suatu rumahtangga yang sekurang-kurangnya ada seorang anggota rumahtangga yang melakukan usaha kecil perikanan darat/usaha rumahtangga perikanan darat.	Tidak ada	Jumlah	Rumah tangga
4091	ST00849.00.00			Rumahtangga perikanan laut	Suatu rumahtangga yang sekurang-kurangnya ada seorang anggota rumahtangga yang melakukan usaha kecil perikanan laut/usaha rumahtangga perikanan laut.	Tidak ada	Jumlah	Rumah tangga
4092	ST00850.00.00			Rumahtangga perkebunan	Suatu rumahtangga yang sekurang-kurangnya ada seorang anggota rumahtangga yang melakukan usaha kecil tanaman perkebunan rakyat/usaha rumahtangga perkebunan rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
4093	ST00851.00.00			Rumahtangga peternakan	Suatu rumahtangga yang sekurang-kurangnya ada seorang anggota rumahtangga yang melakukan usaha kecil peternakan rakyat/usaha rumahtangga peternakan rakyat.	Jenis Ternak : 1.Kerbau 2. Kuda 3. Sapi Potong 4. Sapi Perah 5. Kambing 6. Domba 7. Babi 8. Kelinci 9. Ayam Ras Pedaging 10. Ayam Ras Petelur 11. Ayam Buras /Kampung/ Lokal 12. Itik 13. Itik Manila 14. Ternak Lain	Jumlah, Persentase	Rumah tangga, persen
4094	ST00852.00.00			Rumput Laut	tumbuhan tingkat rendah yang masih belum mempunyai akar, batang, dan daun yang	1. Eucheuma Cottoni 2. Eucheuma Spinosum	Jumlah	Ke

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sesungguhnya, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan nama "tumbuhan thallus"	3. Caulerpa Sp		
4095	SD01061.00.00			Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kebijakan
4096	SP00259.00.00			Sakit	Keadaan seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
4097	SD01063.00.00			Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
4098	SD01066.00.00			Sampah Rumah Tangga	Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik	Klasifikasi Sampah Rumah Tangga	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
4099	SD01067.00.00			Sanitasi	Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.	1. Layak 2. Tidak Layak	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
4100	SD01068.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sanitasi	Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.	1. Layak 2. Tidak Layak	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
4101	SD01070.00.00			Sanitasi Layak dan	Sanitasi yang meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Berkelanjutan	sabun; (3) pengeklaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.	kebutuhan		
4102	SD01070.00.00		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Sanitasi yang meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengeklaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
4103	ST00853.00.00			Sarana budidaya	Sarana budidaya yang digunakan perusahaan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan	1. Pompa Air 2. Kincir Air 3. Aerator 4. Waterkit 5. Nukleus 6. Genset 7. Mesin Pelet Mini 8. Rumah Jaga	Jumlah	Sarana
4104	SE00292.00.00			Sarana dan Fasilitas Perumahan/Apartemen	Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kehidupan sehari-hari di dalam kawasan perumahan/apartemen	a) Saluran air bersih; b) Saluran telepon; c) Tempat ibadah; d) Tempat bermain anak; e) Sarana olahraga; f) Sarana kebersihan; semua kategori tersebut menggunakan klasifikasi 1.Ya 2.Tidak	Jumlah	Sarana
4105	SE00293.00.01			Sarana dan Prasarana Ekonomi	Sarana dan prasarana ekonomi di suatu wilayah	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4106	SE00293.00.02			Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana ekonomi di suatu wilayah	Jenis Sarana Ekonomi: 1. Kelompok pertokoan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Ekonomi		2. Pasar dengan bangunan permanen 3. Pasar dengan bangunan semi permanen 4. Pasar tanpa bangunan 5. Minimarket/swalayan 6. Restoran/rumah makan 7. Warung/kedai makanan minuman 8. Hotel 9. Penginapan 10. Toko/warung kelontong		
4107	SP00261.00.01			Sarana Kesehatan	Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana tersebut masih berfungsi (memberikan pelayanan kesehatan) dan berada di dalam wilayah desa/kelurahan ini. Sarana yang dicakup adalah sarana yang dapat diakses oleh masyarakat.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4108	SP00261.00.02			Sarana Kesehatan	Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana tersebut masih berfungsi (memberikan pelayanan kesehatan) dan berada di dalam wilayah desa/kelurahan ini. Sarana yang dicakup adalah sarana yang dapat diakses oleh masyarakat.	1. Rumah sakit 2. Rumah sakit bersalin 3. Puskesmas dengan rawat inap 4. Puskesmas tanpa rawat inap 5. Puskesmas Pembantu 6.Poliklinik/balai pengobatan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. Tempat Praktik dokter 8. Rumah bersalin 9. Tempat praktik bidan 10. Puskesdes 11. Polindes 12.Apotek		
4109	SP00262.00.01			Sarana Lembaga Keuangan yang Beroperasi	Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan. Sarana tersebut dapat diakses setiap orang.	1. Perdatuan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4110	SP00262.00.02			Sarana Lembaga Keuangan yang Beroperasi	Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan. Sarana tersebut dapat diakses setiap orang.	1. Bank Umum Pemerintah 2. Bank Umum Swasta 3. BPR	Jumlah	Unit
4111	SP00263.00.01			Sarana Pendidikan	Lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Tidak termasuk dalam hal ini lembaga pendidikan yang baru terdaftar secara definitif dan belum melakukan aktivitas belajar-mengajar.	1. Perdatuan 2. Perdesaan	Jumlah	Sekolah
4112	SP00263.00.02			Sarana Pendidikan	Lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Tidak termasuk dalam hal ini lembaga pendidikan yang baru terdaftar secara definitif dan belum melakukan aktivitas belajar-mengajar.	1. Pos PAUD 2. TK/RA/BA 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Akademi/PT	Jumlah	Sekolah
4113	ST00854.00.00			Sarana	Sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan	1. Milik sendiri	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Produksi Perikanan	perikanan baik budidaya maupun penangkapan	2. Milik kelompok/bersama 3. Sewa 4. Bagi hasil 5. Bebas sewa 6. Gadai 7. Lainnya		
4114	SD01073.00.00			Sasaran Dari Pendidikan Layanan Khusus	Daerah yang memiliki Indeks Risiko Bencana tinggi dan sedang dan daerah yang terpapar bencana yang mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan terhadap anak (siswa/siswi).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
4115	SP00265.00.00			Satu minggu terakhir	Jangka waktu seminggu yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	waktu	minggu
4116	SP00266.00.00			Satuan Lingkungan Setempat	Satuan wilayah di bawah desa/kelurahan. Satuan wilayah ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan tingkatan dan banyaknya satuan wilayah di bawah desa beserta batas-batasnya.	1. Rukun Tetangga (RT) 2. Rukun Warga (RW) 3. Jorong 4. Dusun 5. Lingkungan	Jumlah	SLS
4117	SP00267.00.00			Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)/ Pendidikan Diniyah Formal(PDF) Ula	Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD/Sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4118	SP00268.00.00			Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)/ Pendidikan Diniyah Formal(PDF)	Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah setingkat SM/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Ulya				
4119	SP00269.00.00			Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)/Pendidikan Diniyah Formal(PDF) Wustha	Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP/Sederajat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4120	SP00270.00.00			Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT)	Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan pemukiman potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	SPT
4121	SE00294.00.00			Satuan Setempat	Satuan dari komoditas/kualitas bahan bangunan/konstruksi sesuai dengan kondisi daerah setempat (kabupaten/kota). Satuan setempat hanya digunakan untuk mengumpulkan data pada komoditas material natural dan produk lanjutannya yang memiliki satuan penjualan berbeda dengan satuan standarnya	truk, coli, batang, gerobak, buah, dll	Tidak Ada	Tidak Ada
4122	SE00295.00.00			Satuan Standar	Satuan dari komoditas/kualitas bahan bangunan/konstruksi sesuai standarnya (ditentukan oleh pusat)	meter, meter persegi, meter kubik, buah, lembar, kg, ton, zak, batang, drum, 1 bulan sewa (200 jam), orang hari (OH), per titik	Standar	Satuan
4123	ST00855.00.00			Satwa/tanaman/hasil hutan lainnya	Satwa/tanaman/hasil hutan lainnya yang mempunyai nilai produksi kotor terbesar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Satwa
4124	SD01076.00.00			Sedimentasi	Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Ton/m3

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4125	SP00272.00.00			Segmen	Wilayah yang dibatasi batas alam atau buatan seperti jalan, sungai, dan kebun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Segmen
4126	SP00273.00.00			Sekelompok orang dari agama lain	Sekelompok orang yang berbeda agama dengan responden. Misalnya: responden beragama Islam, maka agama lainnya yaitu Kristen, Hindu, Budha, dsb.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
4127	SD01078.00.00			Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4128	SP00274.00.00			Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	1. SD Negeri 2. SD Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4129	SP00274.00.00		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4130	SP00275.00.00			Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, dan/atau sekolah dasar pamong). Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD).	1. Sekolah Dasar (SD) 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 3. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4131	SP00276.00.00			Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah	Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, dan/atau	1. Sekolah Dasar (SD) 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	sekolah dasar pamong). Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD).	3. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)		
4132	SP00278.00.01			Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Satuan pendidikan /sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	1. SDLB Negeri 2. SDLB Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4133	SD01080.00.02			Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4134	SP00279.00.01			Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	1. SMA Negeri 2. SMA Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4135	SD01080.00.02			Sekolah Menengah Awal (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4136	SP00279.00.02		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Sekolah Menengah Awal (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					MTs.			
4137	SP00280.00.00			Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Sekolah, Orang
4138	SD01082.00.02			Sekolah Menengah Lanjutan (SMK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4139	SP00281.00.01			Sekolah Menengah Lanjutan (SMK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	1. SMK Negeri 2. SMK Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4140	SD01084.00.02			Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4141	SP00282.00.01			Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil	1. SMP Negeri 2. SMP Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.			
4142	SP00282.00.02		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umim, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4143	SP00283.00.01			Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	1. SMPLB Negeri 2. SMPLB Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
4144	SD01086.00.00			Sektor Pariwisata	Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.	KBLI	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
4145	ST00856.00.01			Sektor Pertanian	Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian.	KBLI	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
4146	ST00856.00.02			Sektor Pertanian	Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian.	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian		
4147	SE00296.00.00			Selisih barang produksi setengah jadi	barang yang masih dikerjakan/diproses oleh perusahaan. Nilai barang setengah jadi diperkirakan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang dipakai, ditambah dengan ongkos pengerjaan yang sudah dilakukan	1. Nilai Stok awal 2. Nilai stok akhir	Jumlah, Persentase	Nilai
4148	ST00858.00.00			Seminomaden, semipastoral atau transhumant	Ternak yang dirawat dan dibesarkan oleh pemilik usaha yang hidup secara seminomadic. Biasanya pemilik usaha memiliki tempat tinggal tetap dimana ia pulang selama beberapa bulan dalam setahun tergantung musim. Untuk sistem seminomaden dan semipastoral, pemilik biasanya membangun rumah semipermanen untuk beberapa bulan atau tahun dan mungkin bercocok tanam sebagai sumber makanan tambahan. Ternak berpindah secara transhumance (perpindahan ternak sesuai dengan musim bersama pemilik atau penggembalanya) untuk memastikan adanya makanan dan air.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ternak
4149	SD01090.00.00			Sengketa Lingkungan Hidup (LH)	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa; Persen
4150	SP00284.00.00			Seni	Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	1. Film 2. Seni Musik/Suara 3. Seni Rupa 4. Seni Sastra (Puisi, Dongeng) 5. Seni Tari Budaya Indonesia 6. Seni Teater/Pewayangan	Jumlah; persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						7. Lainnya, seperti Barongsai, Kuda Lumping, Reog, dan perunjukan lainnya.		
4151	SD01093.00.00			Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen
4152	ST00859.00.00			Sensus pertanian	Kegiatan statistik untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendiseminasi data struktur pertanian, yang mencakup seluruh atau bagian penting suatu negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4153	SP00285.00.00			Septic Tank atau Tangki Septik	Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu/beton di semua sisinya.	1. Tangki dengan dasar semen 2. Tangki tanpa dasar semen	Jumlah	Septic Tank
4154	SE00298.00.00			Sertifikasi Merek Dagang dan Produk	Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.	1. SNI 2. Sertifikasi nasional lainnya (halal MUI, LPJK) 3. Sertifikasi internasional	Jumlah	Sertifikasi
4155	ST00860.00.00			Sertifikasi Benih	Serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan benih bina	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sertifikat; Persen
4156	ST00861.00.00			Sewa lahan	Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan lahan milik pihak lain. Sewa lahan ini tidak termasuk dalam biaya antara, tetapi digolongkan dalam biaya primer.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
4157	ST00862.00.00			Sewa lahan untuk pertanian	Biaya yang dibayarkan untuk penggunaan lahan pertanian dalam waktu tertentu dari pihak lain, dimana besarnya sewa lahan sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4158	ST00863.00.00			Sewa lainnya	Sewa selain yang tersebut dalam butir 14.24a dan 14.24b seperti kontrak kebun dan nilai kontrak kepada pemegang HPH, bagi hasil dalam hal pemilik lahan menanggung resiko.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
4159	SD01099.00.00			Sewa/royalti sumber daya alam	Perjanjian di mana pemilik syah sumber daya alam, yang SNA memperlakukannya sebagai pemilik dengan masa hidup tak terbatas membuatnya tersedia untuk lessee, dengan imbalan pembayaran berkala, dicatat sebagai pendapatan properti dan dijelaskan sebagai sewa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4160	SE00300.00.00			Sifat Usaha	Usaha Musiman adalah usaha yang melakukan/mengusahakan kegiatan produksi bergantung pada bahan baku yang dipengaruhi oleh musim (hujan/kemarau/panen)	Usaha musiman dan usaha bukan musiman	Jumlah	unit
4161	SE00301.00.00			Sisa Hasil Usaha Koperasi	Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.	1. Sudah dibagi 2. Belum dibagi	Jumlah ; Persentase	Rupiah; Persen
4162	SD01102.00.00			Sistem Angkutan Rel yang Dikembangkan di Kota Besar	Sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk melayani perpindahan orang di kota besar	1.Commuter Line 2.LRT 3.MRT	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
4163	SD01103.00.00			Sistem Ekologis	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas .	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
4164	SD01105.00.00			Sistem Informasi Sumber Daya Air	Jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4165	SP00286.00.00			Sistem peringatan dini bencana alam	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan loud speaker, dan lainnya	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
4166	SD01109.00.00			Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	Sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
4167	SP00287.00.00			Sistem peringatan dini khusus tsunami	fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/keluraban. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
4168	ST00864.00.00			Sistem ternak	Karakteristik umum dan praktik merawat ternak pada usaha pertanian	Nomaden Seminomaden Pastoral tetap	Jumlah	Sistem
4169	SP00288.00.00			Situs	Bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Lokasi

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				peninggalan sejarah	menunjukkan peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau. Contoh: candi, istana, kerajaan, prasasti, lesung, dsb	analisis atau sesuai kebutuhan		
4170	SE00304.01.01			Skala usaha	skala usaha dibedakan menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok industri kecil, kelompok industri menengah, dan kelompok industri besar	1. Industri Besar : Perusahaan Industri dengan tenaga kerja 100 atau lebih 2. Industri Sedang : Perusahaan Industri dengan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 3. Industri Kecil : Perusahaan Industri yang mempunyai tenaga kerja antara sampai 5 sampai dengan 19 orang 4. Industri Kerajinan Rumah Tangga : Usaha rumah tangga dibidang perindustrian dengan tenaga kerja 1 sampai 4 Orang	Jumlah tenaga kerja dan nilai investasi	Unit
4171	SE00304.02.02			Skala usaha	skala usaha dibedakan menjadi 2 kelompok. Yaitu kelompok industri mikro dan kelompok industri kecil	1. 1-4 orang Industri mikro 2. 5-19 orang industri kecil	Jumlah tenaga kerja dan nilai investasi	unit
4172	SE00304.03.03			Skala usaha	Skala usaha dibedakan menjadi 3 kelompok. Yaitu strata perusahaan skala kecil, strata perusahaan skala menengah, dan strata perusahaan skala besar	1. Strata perusahaan skala kecil (skala usaha dengan kode 2) yaitu perusahaan dengan	Badan usaha Perusahaan	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kualifikasi K1, K2, dan K3. 2. Strata perusahaan skala menengah (skala usaha dengan kode 3) yaitu perusahaan dengan kualifikasi M1 dan M2. 3. Strata perusahaan skala besar (skala usaha dengan kode 4) yaitu perusahaan dengan kualifikasi kode B1 dan B2. 4. Untuk perusahaan Non Kualifikasi (NK) maka strata perusahaan skalanya akan mengikuti status badan usahanya, misal PT dengan kualifikasi NK maka skalanya akan menengah atau besar sesuai dengan kualifikasinya.	Konstruksi	
4173	SE003004.04.04			Skala usaha	Ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan usaha berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.	1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah 4. Besar	Jumlah; Persentase	Usaha/Perusahaan; Persen
4174	SE003005.00.00			Smelter	Sebuah Fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga	1. Rencana penambahan 2. Eksisting terbangun	Jumlah; Persentase	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.			
4175	ST00865.00.00			Spat (baca : sped)	Benih tiram mutiara atau kerang-kerangan lainnya.	1. Air laut 2. Air payau	Jumlah; Massa	Butir, Ekor; Gram
4176	SE00306.00.00			Spesifikasi/Kualitas Harga Perdagangan Besar (HPB)	nama kualitas dengan lengkap yang mencakup spesifikasi, merk, kemasan, isi per kemasan, dan keterangan lainnya yang dianggap penting	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Spesifikasi
4177	SE00307.00.00			Spesifikasi/Kualitas Mesin dan Perlengkapan	Merk/Model Komoditas/barang mesin dan perlengkapan yang sudah ditentukan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Spesifikasi
4178	SD01120.00.00			Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)	Pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. Prinsip SPP meliputi: 1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum; 2. keterpaduan pelayanan perkotaan; 3. keberlanjutan. SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas: a. tempat permukiman perkotaan; b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan; c. pelayanan sosial; dan d. kegiatan ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
4179	SE00309.00.00			Standard International Trade Classification (SITC)	Pengelompokan barang impor	SITC	Jumlah	Kelompok
4180	SE00310.00.00			Standardisasi produk	Penentuan batas-batas dasar dalam bentuk spesifikasi barang-barang dari manufaktur dan jasa yang ditentukan oleh regulator, antara lain dibidang kesehatan (risiko rendah, menengah, tinggi), kehalalan,	Berdasarkan Produk Makanan dan Minuman: 1.PIRT (Produksi	Jumlah	Sertifikat

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					keamanan, manajemen mutu.	Industri Rumah Tangga) 2.Makanan Dalam dan Luar Negeri (MD/ML) 3.Hieginies (Izin Depkes / Dinkes) 4.Kehalalan Produk 5.NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 6.HACCP Berdasarkan Produk Non Makanan/Minuman : 1.SNI 2.ISO dan sejenisnya 3.SLK (Sertifikat Legalitas Kayu) Berdasarkan Produk Jasa : 1. ISO dan sejenisnya Berdasarkan Manajeman Mutu : 1.ISO dan sejenisnya		
4181	SD01122.00.00			Stasiun Hidrologi	Suatu tempat/lokasi penalatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
4182	SD01123.00.00			Stasiun Hidrologi dan Klimatologi	Stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang Dilakukan Updating dan Revitalisasi	prasarananya.			
4183	SD01124.00.00			Stasiun Klimatologi	Suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
4184	SD01125.00.00			Statistik Dasar	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
4185	SD01126.00.00			Statistik Khusus	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Meskipun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan terkait, dalm praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
4186	SD01127.00.00			Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yag merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
4187	ST00866.00.00			Status Air	Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi	1. memenuhi baku	Jumlah;	Status, Poin;

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Sungai	cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan	mutu (kondisi baik) (0 ≤ Pij ≤ 1,0) 2. Cemar Ringan (1,0 < Pij ≤ 5,0) 3. Cemar Sedang (5,0 < Pij ≤ 10) 4. Cemar Berat (Pij > 10)	Persentase	Persen
4188	SE00312.01.00			Status Badan Usaha	Bentuk pengesahan suatu unit usaha/perusahaan pada saat didirikan atau dibentuk, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.	1. PT 2. Yayasan 3. CV 4. NV 5. Firma 6. IUMKM 7. Perseorangan	Jumlah	unit
4189	SE00312.02.00			Status Badan Usaha	Status usaha perusahaan yang perdirinannya berdasarkan badan hukum atau non badan hukum.	1. PT 2. Yayasan 3. CV 4. NV 5. Firma 6. IUMKM 7. Perseorangan	Persentase	Persen
4190	SE00313.00.00			Status Badan Usaha/Badan Hukum	Bentuk pengesahan suatu unit usaha/perusahaan pada saat didirikan atau dibentuk, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang	1. Persero an (PT, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Yayasan 4. Perkumpulan/Partai Politik 5. Persekutuan Komanditer (CV)	Jumlah; Persentase	Status; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Persekutuan Firma 7. Persekutuan Perdata (maatschap) 8. Koperasi 9. Dana Pensiun 10. Perseorangan 11. Naamloze Vennootschap (NV) 12. Badan Hukum/Badan Usaha Lainnya 13. Tidak Berbadan Hukum/Badan Usaha		
4191	SP00289.00.00			Status desa berbatasan dengan laut	Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut adalah wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
4192	SP00290.00.00			Status ekonomi rumah tangga	Status Ekonomi Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah, Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.	1. Kuintil 1 (20 persen termiskin) 2. Kuintil 2 3. Kuintil 3 4. Kuintil 4 5. Kuintil 5 (20 persen terkaya)	Persentase	Persen
4193	SE00315.00.00			Status Izin Usaha	Jenis izin usaha yang dimiliki oleh suatu usaha/perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Status
4194	SD01131.00.00			Status Kawin	Status keterikatan seseorang dalam perkawinan. Status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.			
4195	SE00316.00.00			Status keberadaan	Status keberadaan usaha di lapangan saat pendataan	1. Ditemukan dan masih aktif 2. Ditemukan tetapi kategori atau kegiatan usaha sudah berbeda. 3. Pindah dan dapat dieleusuri 4. Pindah dan tidak dapat dieleusuri 5. Tutup 6. Tutup Sementara/Belum berproduksi 7. Tidak Ditemukan 8. Ganda (Duplikat) 9. Tidak bersedia dicacah 10. Ditemukan tetapi bukan cakupan survei	Jumlah; Persentase	Usaha/Perusahaan; Persen
4196	SP00291.00.00			Status kepemilikan rumah yang ditempati (Kontrak/Sewa)	Rumah disewa oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya bulanan atau tahunan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4197	SP00292.00.00			Status kepemilikan rumah yang ditempati (Milik Sendiri)	Rumah yang ditempati merupakan milik kepala keluarga atau milik salah satu anggota keluarga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4198	SP00293.00.00			Status	Rumah yang ditempati tersebut diperoleh dari pihak	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah;	Rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kepemilikan rumah yang ditempati: Bebas Sewa (menumpang)	lain bukan anggota keluarga (baik famili maupun bukan famili yang tinggal di tempat lain) dan ditempati tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.	analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Tangga; Persen
4199	SP00294.00.00			Status kepemilikan rumah yang ditempati: Dinas	Rumah yang ditempati tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi/perusahaan tempat bekerja kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4200	SP00295.00.00			Status kepemilikan rumah yang ditempati: Lainnya	Rumah yang ditempati tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama dan rumah adat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
4201	SE00317.00.00			Status Koperasi	Status Koperasi adalah konsep administrasi yang digunakan untuk mengkategorikan berdasarkan kinerjanya yang dapat diukur dari pelaksanaan rapat anggota	1. Aktif 2. Tidak Aktif	Jumlah	Status
4202	SD01133.00.00			Status Pekerjaan	Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama.	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai 5. Pekerja Keluarga atau tidak dibayar	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Pekerja Bebas		
4203	SE00319.00.00			Status Pemodalan	Status pemodalan yang dimiliki perusahaan	1. PMA 2. PMDN	Jumlah, persentase	Perusahaan
4204	SE00320.00.00			Status Penanaman Modal	Status penanaman modal perusahaan/ usaha	1.PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) 2.PMA (Penanaman Modal Asing) 3.Non PMDN/PMA	Nilai;Persentase	Rupiah;Persen
4205	SE00321.00.00			Status Perkawinan	Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1)belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati.	1. belum kawin 2. kawin 3. cerai hidup 4. cerai mati	Persentase	Persen
4206	SE00322.00.00			Status ruang dagang	status kepemilikan tempat berdagangnya apakah sewa atau milik sendiri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Status
4207	SP00296.00.00			Status sebagai pengemudi atau penumpang	Status responden sebagai pengemudi atau penumpang pada moda transportasi utama	1. Pengemudi 2. Penumpang	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4208	SE00323.00.00			Status Tempat Tinggal Rumah Tangga	Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.	1. Milik Sendiri 2. Kontrak 3. Sewa 4. Dinas 5. Bebas sewa 6. Lainnya	Persentase	Persen
4209	SP00297.00.00			Stok migran internasional	Stok migran internasional adalah banyaknya penduduk Indonesia pada saat pencacahan yang dilahirkan di luar negeri atau berkewarganegaraan asing.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4210	SP00298.00.00			Stres akibat perjalanan	Stres (ketegangan atau gangguan emosional yang disebabkan oleh faktor luar) akibat perjalanan ke/dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ke/dari tempat kegiatan	tempat kegiatan	kebutuhan		
4211	ST00867.00.00			Suaka marga satwa	Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan alam dan kebanggaan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hutan
4212	SP00299.00.00			Suami	Suami dari kepala keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
4213	SP00300.00.00			Suku	Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Suku; Orang; Persen
4214	SP00301.00.00			Suku bangsa	Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
4215	SP00302.00.00			Suku bangsa lain	Sekelompok orang yang mempunyai suku berbeda dengan responden. Misalnya responden adalah Suku Sasak (Suku di Lombok), maka suku bangsa lainnya adalah Suku Jawa, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Badui, dsb.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang, Persen
4216	SD01144.00.00			Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4217	SD01145.00.01			Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Terlindung 8. Mata Air Terlindung 9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya		
4218	SD01145.00.01			Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	1. Air kemasan bermerk 2. Air isi ulang 3. Leding meteran 4. Leding eceran 5. Sumur bor/pompa 6. Sumur terlindung 7. Sumur tak terlindung 8. Mata air terlindung 9. Mata air tak terlindung 10. Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) 11. Air hujan 12. Lainnya	Persentase	Persen
4219	SP00303.00.01		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak Terlindung 8. Mata Air Terlindung	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya		
4220	SD01146.01.02			Sumber Air Minum Layak	Air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja >= 10 m.	1. Air Leding (keran) Meteran 2. Air Leding Eceran 3. Keran Umum 4. Hydrant Umum 5. Terminal Air 6. Penampungan Air Hujan (PAH) atau Mata Air 7. Sumur Terlindung 8. Sumur Bor atau Sumur Pompa	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4221	SP003.04.03.02		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sumber Air Minum Layak	Air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja >= 10 m.	1. Air Leding (keran) Meteran 2. Air Leding Eceran 3. Keran Umum 4. Hydrant Umum 5. Terminal Air 6. Penampungan Air Hujan (PAH) atau Mata Air 7. Sumur Terlindung 8. Sumur Bor atau Sumur Pompa	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4222	SP003.05.00.00			Sumber Air Minum Utama Air Hujan	Jika keluarga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4223	SP003306.00.00			Sumber Air Minum Utama Lainnya	Jika keluarga menggunakan sumber air minum yang tidak disebutkan di atas, misalnya air laut yang disuling.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4224	SE003326.00.00			Sumber Bahan baku	Sebagian besar sumber bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dalam rangka rantai pasok input	Skala Usaha : 1. Usaha Mikro 2. Usaha Kecil 3. Usaha Menengah 4. Usaha Besar Perdagangan 1. Domestik 2. Impor Luas Wilayah 1. Dalam Desa 2. Dalam Kecamatan 3. Dalam Kabupaten/ Kota 4. Dalam Provinsi 5. Lintas Provinsi	Jumlah; Persentase	Sumber bahan baku; Persen
4225	SE003327.00.00			Sumber dana proyek yang dikerjakan	Sumber dana dimana proyek didapatkan untuk masing-masing proyek	Terdiri dari : 1. APBN 2. APBD Prov 3. APBD Kabupaten / Kota 4. BUMn /BUMD 5. Swasta 6 Luar Negeri 7. Lainnya	Jumlah	Sumber Dana
4226	SD001147.00.00			Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4227	SE003329.00.00			Sumber Daya Batubara	Sumber daya adalah bagian dari endapan bahan galian dalam bentuk dan kualitas tertentu serta mempunyai prospek yang beralasan yang memungkinkan untuk	1. Nasional 2. Badan Usaha	Jumlah	Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4228	SE003330.00.00			Sumber Daya Mineral	ditambang secara ekonomis . Lokasi, kualitas, dan kuantitas karakteristik geologi dan kemenerusan dari lapisan endapan telah diketahui . Klasifikasi sumber daya berdasarkan tingkat penyelidikannya, terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tereka, terunjuk, dan terukur. Laporan Sumber daya ini berasal dari laporan Badan Usaha yang disampaikan dalam RKAB yang diajukan oleh PKP2B, dan IUP	1. Nasional 2. Badan Usaha	Jumlah	Ton/m3
4229	SD011510.00.00			Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4230	ST000869.00.00			Sumber input bibit untuk	Bagaimana benih diperoleh	1. Produksi sendiri 2. Pertukaran dalam	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tiap jenis tanaman utama (untuk usaha pertanian)		masyarakat (Exchange within community) 3. Pasar lokal 4. Pabrik bibit 5. Donasi		
4231	SD01153.00.00			Sumber Listrik Bukan PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari AKI, generator, PLT surya (solar cell).	1. Tenaga surya 2. BBM	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4232	SD01153.00.00	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Sumber Listrik Bukan PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari AKI, generator, PLT surya (solar cell).	1. Tenaga surya 2. BBM	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
4233	ST00870.00.00			Sumber Pendapatan Diluar Sektor Pertanian	mengacu pada sumber pembiayaan rumah tangga, berasal dari penghasilan salah satu ART pada rumah tangga tersebut yang bekerja diluar sektor pertanian, meliputi industri pengolahan rumput laut atau lainnya, perdagangan,dll.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Sumber
4234	ST00871.00.00			Sumber Pendapatan Sektor Pertanian	mengacu pada sumber pembiayaan rumah tangga, berasal dari penghasilan salah satu ART pada rumah tangga tersebut yang bekerja pada sektor perikanan, meliputi budidaya rumput laut, budidaya ikan, penangkapan ikan atau sektor pertanian lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Sumber
4235	SP00307.00.00			Sumber penghasilan	upah/imbalan dari keterlibatan dalam pertunjukan/pameran seni oleh responden dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan rumah tangga.	1. Utama 2. Tambahan	Jumlah	Sumber
4236	ST00872.00.00			Sumber-sumber informasi	Dari mana pemilik usaha pertanian menerima informasi untuk mengelola usaha pertanian. Ini termasuk pula informasi mengenai cuaca, pemilihan	1. Pelayanan penyuluhan (Extension service)	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pertanian	varietas tanaman, praktik pertanian baru, mesin-mesin pertanian, fasilitas kredit, penyakit dan hama tanaman, pemasaran, dan komoditas atau varietas tanaman yang dipromosikan oleh pemerintah.	2. Radio 3. Televisi 4. Surat kabar 5. Surat kabar pertanian 6. Agensi input 7. Internet 8. Petani lainnya 9. Lainnya		
4237	SD01154.00.00			Sumur Resapan	Sumur yang dirancang untuk menyerap air hujan, biasanya berkedalaman 1½ - 2 m dan secara kasat mata tidak dapat dilihat karena permukaannya tertutup. Manfaat sumur resapan diantaranya adalah untuk meresapkan air hujan ke tanah, sebagai cadangan air tanah, dan untuk mencegah banjir. Bagian dalam sumur biasanya diisi oleh batu pecah, bata merah, ijuk serta arang dimana batu disusun berongga. Untuk rumah yang memiliki talang air, air hujan dari talang air akan dialirkan ke sumur melalui pipa. Sementara untuk rumah yang tidak memiliki talang air, maka sumur berada di bawah taman/parit. Jadi, sumur resapan yang dimaksud bukan untuk menyerap air limbah dari septic tank. Sumur resapan biasanya berjarak minimal 5 meter dari septic tank.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumur; Persen
4238	SD01155.00.01			Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Panjang; Lebar	Sungai; Km
4239	SP00308.00.02			Sungai	Sungai yang dicakup adalah sungai yang melintas/berada desa/kelurahan ini.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa/kel
4240	SP00308.00.02			Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu)	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	sungai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan.			
4241	ST090873.00.00			Suplemen/zat tambahan	mengacu pada vitamin, asam amino, dan mineral.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4242	SP003109.00.00			Surat kematian	Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/dokter/bidan maupun perawat di fasilitas kesehatan atau yang dikeluarkan oleh kepolisian/ pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk pelaporan kematian dan sebagai syarat penerbitan akta kematian oleh pejabat pencatatan sipil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat
4243	SP003110.00.00			Surat/Akta Perceraian	Suatu bukti otentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat
4244	SP003111.00.00			Surat/Akta Pernikahan	Suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat
4245	SD911.59.00.00			Sustainable Development Goals (SDGs)	Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB dilaksakan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Goals; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4246	ST00874.00.00			Susut Panen	Susut yang terjadi pada proses pemanenan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Persentase	kg; Persen
4247	ST00875.00.00			Susut Pasca Panen	Susut yang dapat terjadi karena pengangkutan ke tempat penyimpanan, susut dalam proses pengeringan, susut karena pengangkutan ke tempat pengolahan, susut di tempat pengolahan, dan susut dalam penyimpanan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Persentase	kg; Persen
4248	ST00876.00.00			Swill/sampah rumah tangga	mengacu pada sisa sampah organic rumah tangga yang digunakan sebagai pakai ternak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
4249	SP00312.00.00			Tabungan/simpanan	bagian dari pendapatan anggota rumah tangga atau pemberian dari pihak lain yang tidak dibelanjakan, tetapi disimpan di tempat-tempat tertentu, misalnya bank, koperasi, lembaga keuangan, rumah, dsb. Untuk dipergunakan bagi keperluan masa yang akan datang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tabungan; Persen
4250	SP00313.00.00			Tabungan/simpanan berupa uang	simpanan/tabungan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga dalam bentuk uang yang bisa digunakan membeli barang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tabungan; Persen
4251	SE00334.00.00			Tahun perusahaan (developer) mulai beroperasi	Tahun perusahaan memulai kegiatan usaha di bidang pengembangan perumahan/apartemen. Bukan tahun mulai pengerjaan proyek perumahan/apartemen tersebut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Masehi	Tahun
4252	SE00335.00.00			Taksiran modal	Nilai taksiran untuk tiap-tiap barang modal tetap menurut harga yang berlaku pada akhir tahun survei	1. Tanah 2. Gedung 3. Mesin dan perlengkapan 4. Kendaraan 5. Software 6. modal tetap lainnya	Jumlah, Persentase	Nilai

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4253	SP00314.00.00			Taman bacaan masyarakat	Tempat atau ruang yang disediakan untuk menyimpan, memelihara, menggunakan koleksi buku, majalah, koran, dan bahan multi media lain untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara perseorangan, kelompok atau kelembagaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
4254	ST00877.00.00			Taman buru	Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi. Taman Buru ig didefinisikan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata perburuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Taman
4255	ST00878.00.00			Taman hutan raya (THR)	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Taman
4256	ST00879.00.00			Taman laut	Kawasan lepas pantai atau laut yang masih dalam batas laut Indonesia, yang di dalamnya mengandung batu-batuan kosong dan biota di mana terdapat ekosistem dan atau keindahan khusus yang keadaan alamnya secara fisik tidak mengalami perubahan oleh manusia dengan tujuan pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Taman
4257	ST00880.00.00			Taman nasional (TN)	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Taman
4258	ST00881.00.00			Taman wisata alam (TWA)	Hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Taman

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4259	SP00100.00.00			Tanah Longsor	salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
4260	SP00315.00.00			Tanah Longsor	Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian, Orang
4261	ST00882.00.00			Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah **berbunga** atau belum cukup umur untuk berproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Pohon, Tanaman; Hektar (Ha)
4262	ST00883.00.00			Tanaman biofarmaka (obat-obatan)	Tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbi (rimpang) atau akar. Produksi Tanaman obat yang dicakup disini adalah yang mempunyai tujuan komersial /sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual). Jenis biofarmaka rimpang antara lain jahe, laos /lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temukunci, temuireng dan dringo / dringo, dll. Jenis biofarmaka non rimpang antara lain kapulaga, mengkudu/pace, mahkota dewa, kejibeling, sambiloto dan lidahbuaya, dll.	1. Rimpang 2. Non rimpang	Massa	kg
4263	ST00884.00.00			Tanaman Buah-buahan Semusim	Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, dapat berbentuk rumpun, menjalar dan berbatang lunak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar (Ha)
4264	ST00885.00.00			Tanaman Buah-buahan Tahunan	Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah, dan merupakan tanaman tahunan, umumnya dapat dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu	1. Tanaman buah-buahan yang tidak berumpun dan dipanen sekaligus	Jumlah	Pohon, Rumpun

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(Konsumsi segar)	2. Tanaman buah-buahan yang tidak berumpun dan dipanen berulang kali/lebih dari satu kali dalam satu musim/tahun 3. Tanaman buah-buahan yang berumpun dan dipanen terus menerus		
4265	ST008486.00.00			Tanaman Hias	Tanaman yang mempunyai nilai keindahan dan estetika baik karena bentuk tanaman dan bentuk daun, tajuk maupun bentuk pohon/batang, warna dan kebauman bunganya, sering digunakan sebagai penghias pekarangan, taman atau ruangan di rumah-rumah, gedung perkantoran, hotel, restaurant maupun untuk kelengkapan upacara adat dan keagamaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar (Ha)
4266	ST008487.00.00			Tanaman Hortikultura	Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, humat, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika	1. Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 2. Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan 3. Tanaman Biofarmaka 4. Tanaman Hias	Massa; Jumlah	kg; Rumpun, Batang, Pohon
4267	ST008488.00.00			Tanaman Hortikultura	Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, humat, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika	1. Produk segar 2. Benih	Massa; Jumlah	kg; Rumpun, Batang, Pohon
4268	ST008489.00.00			Tanaman kehutanan	Tanaman tahunan yang berumur panjang, berbatang keras, dan biasanya bagian yang diambil atau dipanen adalah kayunya (kecuali rotan, bambu, dan kayu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Jumlah	kg; Rumpun, Batang, Pohon

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					putih). Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan meliputi tanaman sengon, mahoni, akasia, suren, sungkai, dsb.			
4269	ST00890.00.00			Tanaman kehutanan yang belum siap tebang/panen	Tanaman kehutanan yang belum mencapai umur yang cukup dan yang secara ekonomis belum dapat dipanen/ditebang (belum bisa dimanfaatkan). Tanaman kehutanan siap tebang/panen adalah tanaman kehutanan yang sudah mencapai umur yang cukup dan yang secara ekonomis sudah dapat ditebang/dipanen atau digunakan kayunya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa; Jumlah	kg; Rumpun, Batang, Pohon
4270	ST00891.00.00			Tanaman Menghasilkan	Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar (Ha)
4271	ST00892.00.00			Tanaman muda	tanaman yang belum cukup umur untuk dipanen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tanaman
4272	ST00893.00.00			Tanaman Perkebunan	Jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor **591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian tanggal 15 September 2020**	1. Tanaman Tahunan 2. Tanaman Semusim	Jumlah; Luas	Tanaman, Pohon; Hektar
4273	ST00894.00.00			Tanaman perkebunan semusim	Tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan sekali panen langsung dibongkar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar
4274	ST00895.00.00			Tanaman perkebunan tahunan	Tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Pohon; Hektar
4275	ST00896.00.00			Tanaman Rusak/ Tanaman Tidak Menghasilkan	Tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (produksi kurang dari 15% produksi normal)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4276	ST00897.00.00			Tanaman Sayuran Semusim	Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun	1. Tanaman sayuran yang dipanen sekaligus 2. Tanaman sayuran yang dipanen berulangkali/lebih dari satu kali	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar
4277	ST00898.00.00			Tanaman Sayuran Tahunan	Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun dan atau buah, berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tanaman, Pohon, Rumpun
4278	ST00899.00.00			Tanaman sayuran yang dipanen lebih dari sekali	Tanaman yang pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panenan terakhir sudah tidak memadai lagi, seperti: bayam, buncis, cabe, kacang panjang, kacang merah, kangkung, ketimun, labu siam, tomat, dan terung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	kg, ton
4279	ST00900.00.00			Tanaman sayuran yang dipanen sekaligus	Tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar / dicabut, seperti: bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, sawi/petsai, wortel, dan lobak. Termasuk disini jenis bayam dan kangkung yang dipanen sekaligus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	kg, ton
4280	ST00901.00.00			Tanaman Sedang Menghasilkan (TSM)	Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan dari masing-masing nama kebun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Pohon; Hektar (Ha)
4281	ST00901.00.00			Tanaman Sedang Menghasilkan (TSM)	Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan dari masingmasing nama kebun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Pohon; Hektar (Ha)
4282	ST00902.00.00			Tanaman Sedang Tidak Menghasilkan (TSTM)	Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan dan pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman, Pohon; Hektar (Ha)

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4283	ST00903.00.00			Tanaman semenlara	Tanaman dengan siklus pertumbuhan kurang dari satu tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Luas	Persen; Hektar
4284	ST00904.00.00			Tanaman Semusim	Tanaman perkebunan yang umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan satu kali atau beberapa kali masa panen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar
4285	ST00904.00.00			Tanaman Tahunan	Tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Tanaman; Hektar
4286	ST00905.00.00			Tanaman tetap	Tanaman dengan siklus pertumbuhan lebih dari satu tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Pohon
4287	ST00906.00.00			Tanaman tetap usia produktif	Tanaman tetap yang telah menghasilkan buah atau produktivitas lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Pohon
4288	ST00907.00.00			Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)	Tanaman yang sudah tua, rusak, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha (Hektare)
4289	ST00907.00.00			Tanaman yang Dibongkar/ Ditebang	Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dibongkar/ditebang dan dapat berasal dari tanaman triwulan yang lalu atau penanaman baru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah Pohon/Rumpun	Pohon/Rumpun
4290	SE00339.00.00			Tanggal Berdiri	Waktu berdirinya perusahaan	1. Triwulan 1 2. Triwulan 2 3. Triwulan 3 4. Triwulan 4	Waktu	Tanggal
4291	SE00340.00.00			Tanggal Beroperasi	Waktu mulai beroperasinya perusahaan	1. Triwulan 1 2. Triwulan 2 3. Triwulan 3 4. Triwulan 4	Waktu	Tanggal
4292	SE00341.00.00			Tanggal Lahir	Tanggal dimana pelaku usaha dilahirkan.	Klasifikasi berdasarkan	Waktu	Tanggal,

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						analisis atau sesuai kebutuhan		Bulan, Tahun
4293	SE00343.00.00			Tanggal Terbit Nomor Induk Berusaha (NIB)	Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana NIB terbit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Tanggal, Bulan, Tahun
4294	ST00908.00.00			Tangki semi cair	Tangki, biasanya terbuat dari bahan kedap air, digunakan untuk penyimpanan pupuk kandang semi cair. Lubang kedap air atau gudang bawah / terintegrasi di rumah ternak juga termasuk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tangki
4295	SE00344.00.00			Target Perusahaan IUPHHK-HA	Target Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) menurut Pulau	Pulau	Jumlah	Perusahaan
4296	SD01163.00.00			Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. $ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
4297	SD01164.00.00			Tarif Terbobot	Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
4298	SP00316.00.00			Tegel	Ubin yang terbuat dari semen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
4299	SE00345.00.00			Teknik Pemasaran	Cara atau langkah-langkah dalam pemasaran produk utama.	1.Penjualan langsung (Konvensional / Offline) 2.Penjualan tidak	Jumlah, Persentase	Teknik, Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						langsung/Online (Sosial Media, Website E-commerce, Marketplace)		
4300	SD01166.02.00			Teknologi	Metode untuk menggunakan penemuan ilmiah untuk tujuan praktis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
4301	ST00909.00.00			Teknologi budidaya	Penerapan teknologi budidaya yang digunakan (hanya untuk budidaya udang windu dan bandeng), kategori penerapan tergantung jumlah Benih yang ditebar (ekor/ha/MT)	1. Sederhana 2. Semi intensif 3. Intensif	Jumlah	Teknologi
4302	ST00910.00.00			Teknologi Budidaya Ikan	Metode tertentu yang digunakan untuk membudidayakan ikan yang terdiri dari intensif, semi intensif dan sederhana.	1. Teknologi Intensif 2. Teknologi Semi Intensif 3. Teknologi Sederhana	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
4303	ST00911.00.00			Teknologi Penggaraman	Teknologi yang digunakan untuk pembuatan garam.	1. Tradisional 2. Integrasi Lahan 3. Tunnel 4. Perebusan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
4304	SD01168.00.00	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan.	Teknologi Ramah Lingkungan	Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi Ramah Lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi - Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, pengunaan bahan kimia)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen
4305	ST00912.00.00			Teknologi Ramah Lingkungan	Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi Ramah Lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi - Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, pengunaan bahan kimia)			
4306	SD01169.00.00			Telekomunikasi	Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Telekomunikasi; Persen
4307	SD01169.00.00			Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teekomunikasi; Persen
4308	SP00317.00.01			Tempat Ibadah	Tempat ibadah yang dicakup adalah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	unit
4309	SP00317.00.02			Tempat Ibadah	Tempat ibadah yang dicakup adalah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum.	1. Masjid 2. Musala/Surau/Langgar 3. Gereja Kristen 4. Gereja Katolik 5. Kapel 6. Pura 7. Wihara 8. Kelenteng	Jumlah	unit
4310	SP00318.00.00			Tempat kegiatan utama	Wilayah administratif seseorang tempat melakukan kegiatan utama. Lokasi/tempat kegiatan utama seseorang dapat berupa tempat kerja (kantor, perusahaan, pasar,dll) ,sekolah (bagi yang masih bersekolah), dan tempat kursus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Wilayah	Kabupaten/Kota

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4311	SE00347.00.00			Tempat Lahir	Tempat lahir adalah provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu responden pada saat melahirkan responden atau provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat kelahiran responden. Batas wilayah administrasi yang digunakan dalam sensus ini adalah batas wilayah administrasi yang terbaru saat pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Wilayah	Kabupaten/ Kota
4312	SP00319.00.00			Tempat lahir	Tempat lahir adalah provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu responden pada saat melahirkan responden atau provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat kelahiran responden. Batas wilayah administrasi yang digunakan dalam sensus ini adalah batas wilayah administrasi yang terbaru saat pencacahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Wilayah	Kabupaten/K ota
4313	ST00913.00.00			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan perdaratan ikan, dimana terjadi transaksi penjualan ikan, baik secara lelang maupun tidak. Kriteria Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah : a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah). b. Bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan. c. Izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	TPI
4314	ST00914.00.00			Tempat Pelelangan Ikan; PPS, PPN, PPP, PPI, dan PPS/PPN/PPP/ PPI/TPI	Pasar yang biasa terletak di dalam pelabuhan/pangkalan perdaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk PPS/PPN/PPP/PPI/TPI yang menjual/melelang ikan darat). PPS/PPN/PPP/PPI/TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat. PPS/PPN/PPP/PPI/TPI mempunyai persyaratan sebagai berikut :	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	TPI

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					- tempat tetap (tidak berpindah-pindah) - ada bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan - ada koordinator dalam prosedur lelang/penjualan ikan - ada ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).			
4315	ST000915.00.00			Tempat Pendaratan Ikan Tradisional	suatu tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mendaratkan perahu/kapal hasil tangkapan ikan yang biasanya belum memiliki fasilitas pendaratan yang memadai (masih tradisional) dan umumnya belum dikelola oleh pemerintah setempat dan belum masuk ke dalam salah satu kategori pelabuhan perikanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tempat
4316	SP003321.00.00			Tempat praktik bidan	Sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4317	SP003322.00.00			Tempat praktik dokter	Sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas *rawat inap* dan apotek.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4318	SP003323.00.00			Tempat tinggal 5 tahun yang lalu	Wilayah administrasi tempat tinggal 5 tahun yang lalu (dan periode pencacahan).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Wilayah	Kabupaten/Kota
4319	SE003349.01.01			Tempat Usaha	Merupakan tempat keberadaan operasional atau kegiatan administrasi perusahaan dapat berupa: -Kantor adalah bangunan yang digunakan peruntukkannya khusus untuk operasional perusahaan	1. Kantor 2. Rumah Tinggal 3. Rukan 4. Lainnya	Jumlah	Perusahaan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					-Rumah Tinggal adalah bangunan yang digunakan selain sebagai kegiatan usaha konstruksi juga merupakan tempat tinggal pengusaha yang batas-batasnya belum jelas -Rukan adalah bangunan yang umumnya terdiri dari lebih satu lantai satu lantai bangunan untuk usaha konstruksi lantai lainnya sebagai tempat tinggal.			
4320	SE00349.02.02			Tempat Usaha	Tempat beroperasi secara de facto atau lokasi dimana usaha tersebut dilakukan	1. Bangunan Usaha 2. Bangunan Campuran 3. Kaki Lima 4. Keliling 5. Lainnya	Jumlah	Tempat usaha
4321	ST00916.00.00			Temuan Audit	Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan.	1. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 2. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern 3. Temuan 3E	Jumlah	Temuan
4322	SD01171.04.02			Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4323	ST00917.01.01			Tenaga Kerja	Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak	1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.			
4324	ST009117.02.01			Tenaga Kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, sesorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.	1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4325	SD01171.05.00			Tenaga Kerja (penduduk bekerja)	Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir	1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4326	SE00350.00.00			Tenaga kerja pendidikan kejuruan (vokasi)	Tenaga kerja dengan latar pendidikan kejuruan dari program diploma I-IV atau setara dengan program pendidikan strata 1	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang
4327	ST009118.01.00			Tenaga kerja pengolahan lahan	Tenaga kerja yang mengerjakan pengolahan lahan untuk pertanian dengan mencangkul, membajak atau traktor. Apabila pekerjaan dilakukan secara borongan dimasukkan pada pengeluaran lainnya (jasa pertanian).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
4328	ST009118.02.00			Tenaga kerja pengolahan lahan	Tenaga kerja yang mengerjakan pengolahan lahan biodaya, meliputi kegiatan menyiapkan lahan biodaya misalnya menggali, membuat galengan dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen
4329	SD01175.00.00			Tenaga Kesehatan Terlatih	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.	1. Dokter kandungan 2. Dokter umum 3. Bidan 4. Perawat	Persentase	Persen
4330	SE00351.00.00			Tenaga listrik yang dijual	Perpaduan oleh penasahaan dari tenaga listrik yang dibangkitkan dan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari yang dibangkitkan	1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1300 VA 4. 2200 VA	Jumlah	Nilai, Rwh

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. 3500 VA 6. 4400 VA 7. 5500 VA 8. 6600 VA 9. 7700 VA 10. 10600 VA 11. 11000 VA 12. 13200 VA 13. 16500 VA 14. 23000 VA 15. 33000 VA 16. 41500 VA 17. 53000 VA 18. 66000 VA 19. 82500 VA 20. 95000 VA 21. 105000 VA 22. 120000 VA 23. 131000 VA 24. 147000 VA 25. 164000 VA 26. 170000 VA 27. 175000 VA		
4331	ST060919.00.00			Tepung Rumput Laut (SRC)	sebuah produk Karaginan semi murni dari hasil proses ekstraksi rumput laut yang berbentuk tepung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Produk
4332	SP003325.00.00			Teraso	Jenis lantai yang terbuat dari batu alam kecil-kecil, diduduk dengan kapur pasir, dan dituang di atas dasar batu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m2
4333	SP003327.00.00			Terlibat dalam pertunjukan/pameran seni	Seseorang dikatakan terlibat dalam pertunjukan/pameran seni apabila dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan	1. Pelaku 2. Pendukung	Jumlah; persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pertunjukan/pameran kesenian atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton (berperan dalam pertunjukan/pameran seni). Peran yang dilakukan dapat sebagai pelaku (pemain, penari, dan penulis naskah/pencipta karya seni) ataupun pendukung (jasa penyelenggaraan pertunjukan/pameran atau tim kreatif). Pertunjukan/ pameran kesenian dapat berupa pertunjukan, baik komersil maupun non komersil di atas panggung, pagelaran seni maupun pameran yang dapat ditonton oleh umum (di tempat khusus yang dipersiapkan untuk pertunjukan).			
4334	ST00920.01.00			Ternak	Semua hewan, burung dan serangga yang dipelihara atau dikurung untuk tujuan pertanian	**1. Ternak Besar** **2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**	Jumlah	Ternak, Ekor
4335	ST00920.02.00			Ternak	Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, **termasuk ternak hobi**	**1. Ternak Besar** **2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**	Jumlah	Ternak, Ekor
4336	ST00921.00.00			Ternak Lokal	Ternak **asli Indonesia termasuk** hasil persilangan **antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia,** yang telah dikembangkan di Indonesia **dan telah beradaptasi** pada lingkungan dan/atau manajemen setempat	**1. Ternak Besar** **2. Ternak Kecil** **3. Ternak Unggas** **4. Aneka Ternak**	Jumlah	Ternak, Ekor
4337	SD01182.00.00			Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut	Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang laut nasional yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				nasional				
4338	SD01183.00.00			Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
4339	SP00329.00.00			Tidak bersekolah lagi	Jika ART berumur 5 tahun ke atas pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4340	SD01188.00.00			Timbulan sampah yang didaur ulang	Timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
4341	SD01189.02.00			Timbunan Sampah	jumlah sampah yang berasal dari sumber sampah itu sendiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
4342	SD01190.00.00			Tindak	Perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Kasus

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kejahatan	berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4343	SD01191.00.00			Tindak Pidana Lingkungan	Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
4344	SD01193.00.00			Tindakan Karantina Hewan	Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke-, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
4345	SP00331.00.00			Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Tingkat kemiskinan ekstrim pada metadata ini mengukur 2 hal, yaitu: 1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan) 2. Persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4346	SP00332.00.00			Tingkat Ketidakaktifan	Jumlah dan proporsi penduduk umur kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja) terhadap penduduk usia kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
4347	SP00333.00.00			Tingkat Ketidakaktifan Menurut Daerah Tempat Tinggal	Jumlah dan proporsi penduduk umur kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja) terhadap penduduk usia kerja berdasarkan daerah tempat tinggal	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
4348	SP00334.00.00			Tingkat Ketidakaktifan Menurut Jenis	Jumlah dan proporsi penduduk umur kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja)	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kelamin	terhadap penduduk usia kerja berdasarkan jenis kelamin			
4349	SP00335.00.00			Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur	Jumlah dan proporsi penduduk umur kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja) terhadap penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur	1. 15-19 2. 20-24 3. 25-29 4. 30-34 5. 35-39 6. 40-44 7. 45-49 8. 50-54 9. 55-59 10. 60-64 11. 65-69 12. 70-74 13. 75-79 14. 80-84 15. 85-89 16. 90 tahun keatas	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
4350	SP00336.00.00			Tingkat migrasi internasional per 1.000 penduduk	Migran keluar internasional adalah penduduk yang pernah tinggal di Indonesia dan pada saat pencacahan tinggal di luar negeri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Per seribu penduduk	Per seribu
4351	SP00338.00.00			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4352	SP00339.00.00			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja berdasarkan daerah tempat tinggal	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
4353	SP00340.00.00			Tingkat	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah	1. Laki-laki	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penduduk usia kerja berdasarkan jenis kelamin	2. Perempuan		
4354	SP00341.00.00			Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin				
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur	1. 15-19 2. 20-24 3. 25-29 4. 30-34 5. 35-39 6. 40-44 7. 45-49 8. 50-54 9. 55-59 10. 60-64 11. 65-69 12. 70-74 13. 75-79 14. 80-84 15. 85-89 16. 90 tahun keatas	Persentase	Persen
4355	SP00342.00.00			Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu merupakan persentase pekerja paruh waktu terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen
4356	SP00342.00.00			Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu merupakan persentase pekerja paruh waktu terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah, Persentase	Orang; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4357	SE00352.00.00			Tingkat Pendidikan Pekerja/ Karyawan	Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh pekerja/karyawan.	0. Tidak sekolah 1. SD 2. SMP 3. SMA/SMK 4. Diploma 5. S1/D-IV 6. S2 7. S3	Jumlah	Orang
4358	SP00343.00.00			Tingkat/kelas tertinggi	Tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tingkat/kelas
4359	SE00353.00.00			Tipe Pasar Tradisional	Pembagian pasar berdasarkan beberapa kriteria menurut aturan terkait sarana perdagangan mencakup jumlah hari operasional, jumlah pedagang dan luas lahan	1. Tipe A 2. Tipe B 3. Tipe C 4. Tipe D	Tipe	Kategorik
4360	SE00354.00.00			Tipe rumah	Tipe rumah yang dibangun oleh pengembang. Misalnya tipe rumah 45/90, mawar, dan lain sebagainya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tipe
4361	SP00344.00.00			Tipologi desa	Lereng/puncak adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	desa

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					memberitang.			
4362	SE00355.00.00			Toko Swalayan	Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun ginsir yang berbentuk perkulakan	Klasifikasi pasar	Jumlah, Persentase	Unit, Persen
4363	SP00345.00.00			Toko/warung kelontong	Bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit
4364	ST00922.00.00			Tokolan	Udang muda berumur 1-2 bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg
4365	ST00923.00.01			Total area usaha	Area dari seluruh lahan usaha pertanian. Ia mencakup seluruh lahan yang dikelola oleh oleh usaha pertanian terlepas dari legalitasnya. Sehingga, lahan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga namun disewakan ke orang lain tidak dimasukkan dalam area usaha pertanian. Sebaliknya, lahan yang tidak dimiliki oleh anggota rumah tangga namun disewa dari orang lain untuk produksi pertanian harus dimasukkan sebagai area usaha pertanian.	1. Kepemilikan legal (legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik legal (legal owner-like possession) 2. Kepemilikan tak legal (non-legal ownership) atau kepunyaan seperti pemilik tak legal (non-legal owner-like possession) 3. Menyewa dari orang lain 4. Jenis kepemilikan lahan lainnya	Luas	Ha
4366	ST00923.00.02			Total area usaha	Area dari seluruh lahan usaha pertanian. Ia mencakup seluruh lahan yang dikelola oleh oleh usaha pertanian terlepas dari legalitasnya. Sehingga, lahan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga namun disewakan ke orang lain tidak dimasukkan dalam area usaha pertanian.	1. Lahan tanaman tanaman semusim (temporary crops) 2. Lahan padang rumput atau padang	Persentase; Luas	Persen; Hektar

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Sebaliknya, lahan yang tidak dimiliki oleh anggota rumah tangga namun disewa dari orang lain untuk produksi pertanian harus dimasukkan sebagai area usaha pertanian.	meruput ternak (meadows dan pastures) sementara 3. Lahan kosong sementara 4. Lahan tanaman tanaman tahunan (permanent crops) 5. Lahan padang rumput atau padang meruput ternak (meadows dan pastures) tetap 6. Lahan bangunan pertanian dan pekarangan pertanian 7. Hutan dan lahan berpohon lainnya (other wooded land) 8. Area yang digunakan untuk akuakultur (termasuk perairan darat dan pesisir jika merupakan bagian dari usaha pertanian) 9. Area lainnya yang tidak termasuk klasifikasi manapun		
4367	SE003356.00.00		Total Aset/ Assets		Seluruh kekayaan yang dimiliki usaha/perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh usaha/perusahaan untuk kegiatan produksi barang	1.Aset lancar 2.Aset Investasi 3.Aset tak berwujud 4.Aset tetap	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4368	SE00357.00.00			Total Biaya	Seluruh nilai pengeluaran operasional dan non operasional yang digunakan dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4369	SE00358.00.00			Total Pengeluaran Usaha	Seluruh nilai pengeluaran operasional dan non operasional yang digunakan dalam periode tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4370	SE00359.00.00			Total Volume Ekspor UMKM	Total volume perdagangan ke luar negeri/ekspor oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke negara tetangga yang berbatasan langsung. Penghitungan berdasarkan Free On Board (FOB). Dalam pendataan menggunakan pendekatan yang diterima UMKM.	1. Ekspor Langsung 2. Ekspor Tidak Langsung	Nilai; Jumlah; Volume; Persentase	USD/Rupiah; Transaksi; m3; Persen
4371	ST00924.00.00			Traktor pertanian	Suatu mesin yang digunakan untuk kegiatan pertanian antara lain mengolah tanah, menarik gerobak (transportasi) dan sumber tenaga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; Persen
4372	SD01242.00.00			Transfer/Alih Teknologi	Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transfer; Persen
4373	SD01243.00.01			Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen
4374	SD01243.00.01			Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4375	SD01244.00.01			Transportasi Publik/Umum	moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4376	UL00013.00.01			Transportasi Publik/Umum	Moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					aman, dan bertarif jelas	kebutuhan		
4377	ST00925.00.00			Trip Penangkapan	Kegiatan operasi penangkapan ikan yang dihitung sejak perahu/kapal meninggalkan pelabuhan/tempat pendaratan menuju daerah operasi, mencari tempat penangkapan, menangkap ikan, hingga kembali ke pelabuhan/tempat asal. Biasanya satu trip dilakukan satu kali dalam satu hari, yaitu berangkat pagi kembali sore hari, atau berangkat sore hari dan kembali pagi/siang berikutnya. Tetapi dapat pula terjadi bahwa satu trip dilakukan selama lebih dari satu hari, bahkan kadang-kadang lebih dari satu bulan. Penangkapan dengan menggunakan alat-alat seperti pukat pantai, sero, serok, jermal, alat pengumpul kerang-kerangan dan rumput laut, dalam satu hari dapat melakukan beberapa kali trip penangkapan. Untuk unit-unit penangkapan demikian satu hari penangkapan (hari penangkapan dilakukan) dihitung sebagai satu trip.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Trip
4378	ST00926.00.00			Trip Penangkapan Ikan	kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit penangkapan ikan meninggalkan pangkalan menuju daerah operasi, mencari daerah penangkapan ikan. melakukan penangkapan ikan, sampai kembali lagi ke tempat pangkalan asal atau ke tempat pendaratan lain	1. One day fishing 2. Mingguan 3. Bulanan	Jumlah	Trip
4379	SP00346.00.00			Trotoar	jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Trotoar; Persen
4380	SP00101.00.00			Tsunami	sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang iakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian; Orang

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan gerangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.			
4381	SP00347.00.00			Tsunami	sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang takbiasa oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menjebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan gerangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Kejadian; Orang
4382	ST00927.00.01			Tujuan utama produksi usaha pertanian	Untuk melihat pemanfaatan hasil produksi pertanian serta melihat skala pertanian per unit nya yang ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan Petani.	1. Produksi hanya untuk penjualan 2. Produksi utamanya untuk penjualan dan sebagian konsumsi 3. Produksi utamanya	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						untuk konsumsi dan sebagian dijual 4. Produksi hanya untuk konsumsi		
4383	ST00927.00.02			Tujuan utama produksi usaha pertanian	Untuk mendapatkan indikator umum mengenai seberapa jauh usaha pertanian berpartisipasi di ekonomi pasar. Data tentang tujuan produksi biasanya dikumpulkan untuk usaha pertanian di sektor rumah tangga	1. Produksi utamanya untuk konsumsi sendiri 2. Produksi utamanya untuk dijual atau 3. Produksi hanya untuk dijual 4. Produksi utamanya untuk dijual dengan sedikit untuk konsumsi sendiri 5. Produksi utamanya untuk konsumsi sendiri dengan sedikit untuk dijual 6. Produksi hanya untuk konsumsi sendiri	Persentase	Persen
4384	SP00348.00.00			Uji Kompetensi SDM LHK	Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu	1. Aparatur 2. Non Aparatur	Jumlah	Orang
4385	SE00361.00.00			Ukuran Satuan Setempat	Merupakan ukuran yang merinci dimensi (panjang, luas, volume, dan berat) komoditas/kualitas	panjang, lebar, tinggi, berat	Ukuran Standar	meter, kilogram
4386	SD01253.00.01			UMKM	Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
4387	ST00928.00.00			Umur tanaman saat panen	umur dihitung sejak awal tanaman ditanam hingga dipanen dalam satuan hari.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Rata-rata	Umur

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebutuhan		
4388	SD01254.02.02			Umur/Usia	Selisih antara tanggal lahir dengan tanggal wawancara. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
4389	SP00349.01.01			Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
4390	SP00349.03.01			Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
4391	SP00349.02.01			Umur/Usia	Selisih antara tanggal lahir dengan tanggal wawancara. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
4392	ST00929.00.00			Unggas Afkir	Jumlah unggas yang sudah tidak berproduksi lagi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor
4393	SE00362.00.00			Unit Institusi	Entitas ekonomi yang mampu memiliki hak, memiliki aset, memiliki kewajiban, dan terlibat dalam suatu kegatan ekonomi dalam transaksi dengan entitas lain	1. Korporasi 2. Rumah tangga 3. Pemerintah 4. LNPRT	Jumlah	unit
4394	ST00930.00.00			Unit	Kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan,	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Penangkapan

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Penangkapan	yang biasanya terdiri dari perahu/kapal penangkap, alat penangkap sejenis, dan nelayan. Penjelasan: a. Jika dalam operasi penangkapan menggunakan beberapa buah alat penangkap sejenis dengan dua atau lebih perahu/kapal penangkap, maka jumlah unit penangkapan dihitung satu. b. Pada alat penangkap yang menetap seperti bagan, sero dan keleng, mungkin hanya seorang nelayan yang melakukan penangkapan pada dua buah alat atau lebih dengan menggunakan satu perahu/kapal penangkap, maka setiap alat dihitung sebagai satu unit penangkapan. c. Jika ada nelayan yang melakukan operasi penangkapan dengan satu alat penangkap, tetapi tidak menggunakan perahu/kapal, maka setiap nelayan dihitung sebagai satu unit penangkapan. d. Jika ada dua atau lebih nelayan melakukan operasi penangkapan bersama-sama dengan menggunakan sebuah alat penangkap saja, tetapi tidak menggunakan perahu/kapal maka kelompok dari beberapa nelayan dengan satu alat penangkap dihitung sebagai satu unit penangkapan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4395	ST060931.00.00			Unit Pengolahan Ikan	tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha	1. UPI Mikro 2. UPI Kecil 3. UPI Menengah 4. UPI Besar	Jumlah	Unit
4396	ST060932.00.00			Unit pengolahan produksi	Unit yang melakukan kegiatan mengubah produksi primer menjadi hasil olahan dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.	1. Mempunyai 2. Tidak Mempunyai	Jumlah	Unit
4397	SP003S0.00.00			Unit	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan	1. Perkotaan	Jumlah	UPT

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Permukiman Transmigrasi (UPT)	permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun	2. Perdesaan		
4398	SP00351.00.00			Unit produksi/ Establishment	Suatu enterprise atau bagian dari enterprise yang terletak di satu lokasi dan hanya melakukan satu aktivitas produksi atau kegiatan produksi utama yang menghasilkan sebagian besar nilai tambah (value added). Dalam praktek, establishmen umumnya diidentifikasi sebagai tempat kerja individu, di mana jenis aktivitas produktif tertentu dilakukan: peternakan, pertambangan, pabrik, toko, lokasi konstruksi, depot transportasi, bandara, bank, kantor, klinik, dll.	1. Unit Jenis Kegiatan 2. Unit Lokal (Local Unit)	Jumlah	unit
4399	SP00352.00.00			Unit Statistik	Sebuah entitas yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan penyusunan statistik	Klasifikasi berdasarkan Sektor institusi: 1. korporasi 2. rumah tangga 3. pemerintah 4. LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) Klasifikasi berdasarkan aktivitas usaha : 1. Grup Perusahaan / Kelompok Usaha /	Jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Enterprise Group (EG) 2. Perusahaan / Usaha / Enterprise (EN) 3. Unit Produksi / Establishmen / Establishment (ES) 4. Unit Penunjang / Ancillary unit (AU) 5. EG sekaligus EN (EG/EN) 6. EN sekaligus ES (EN/ES) 7. EG sekaligus EN&ES (EG/EN/ES)		
4400	SD012262.02.00			Unmet need pelayanan kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4401	SP003353.00.00			Upacara adat	Suatu upacara yang bersifat tradisional (ritus)/tuntunan yang berhubungan dengan adat/kebiasaan/tradisi/budaya suatu masyarakat setempat, seperti upacara perkawinan, upacara kabuhan (sedekah laut D.I. Yogyakarta, upacara ngaben di Bali, dan sebagainya).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
4402	SD012268.00.00			Upah/Gaji/Pendapatan Bersih	Upah/Gaji Bersih adalah imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama, yang terdiri dari komponen upah/gaji pokok dan tunjangan, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perusahaan/kantor/majikan. Pendapatan Bersih Sebulan yang Lalu adalah imbalan/balas jasa selama sebulan yang lalu, baik berupa uang maupun barang yang diperoleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di nonpertanian.			
4403	ST00933.00.00			Urban Farming atau pertanian perkotaan	Kegiatan usaha pertanian di perkotaan yang dikirikan dengan metode budidaya sebagai berikut: - pemanfaatan permukaan tanah (cara konvensional); - vertikultur dengan memanfaatkan ruang vertikal sebagai tempat bercocok tanam, baik dalam bentuk digantung maupun rambat atau terpasang di dinding; - penanaman dalam pot/polybag sebagai media tanam sehingga mudah dipindahkan pada lahan sempit, dalam ruangan atau di atap rumah; - hidroponik dengan menggunakan air atau unsur hara. Biasanya dengan menggunakan wadah berbentuk pipa yang disusun berlingkat maupun berjejer dengan sistem pengaturan air dan hara. Instalasi hidroponik dapat ditempatkan di luar ruangan, dalam ruangan maupun di atap rumah; - microgreen, yakni budidaya tanaman sayuran berukuran kecil pada fase setelah kecambah atau sebelum dewasa berumur 7-21 hari. Biasanya menggunakan wadah berukuran kecil seperti tray atau nampan.	1. Konvensional 2. Vertikultur 3. Pot/Polybag 4. Hidroponik 5. Microgreen	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4404	SD01271.00.00			Urbanisasi	Pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4405	ST00934.00.00			Usaha Budidaya Ikan	Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukarkan atas risiko usaha.	kebutuhan		
4406	ST009935.00.00			Usaha di bidang pembudidayaan ikan	Kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penangaran, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4407	ST009936.00.00			Usaha Jasa budidaya perikanan	Kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang budidaya perikanan Jasa budidaya perikanan meliputi: jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad penggangu, uji mutu, dan sebagnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4408	ST009937.00.00			Usaha jasa kehutanan	Kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang kehutanan, Jasa kehutanan meliputi: jasa pengolahan lahan, penanaman, jasa pemeliharaan dan atau penanaman pohon.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4409	ST009938.00.00			Usaha Jasa penangkapan ikan	Kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti menyewakan sarana penangkapan beserta operatornya, dsb.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4410	ST009939.00.00			Usaha jasa pertanian	Kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, penyebaran bibit/benih, pengendalian organisme penggangga tanaman, pemangkasan, pemanenan, penanganan pasca panen, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, penggembalaan ternak, pelayanan kesehatan ternak,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit usaha, rumah tangga

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pencukuran buhu ternak, penyewaan pejantan, penetasan telur dan pemeliharaan/perawatan alat pertanian.			
4411	SD01273.00.00			Usaha Kecil	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	1. Modal Usaha: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
4412	SE00363.00.00			Usaha Kecil	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	1. Modal Usaha: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
4413	ST00940.00.00			Usaha kecil	Usaha perikanan yang diselenggarakan atau dikelola	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perikanan rakyat	secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4414	ST00941.00.00			Usaha kecil pertanian tanaman pangan	Usaha tanaman pangan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris dan memenuhi kriteria tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4415	ST00942.00.00			Usaha kecil peternakan rakyat	Usaha peternakan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersil oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris dan memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: a) Peternakan ayam ras petelor yang mengusahakan 12 s.d. 2499 ekor induk ayam petelor. b) Peternakan ayam ras pedaging yang mempunyai produksi 50 s.d. 374 ekor ayam potong per minggu. c) Peternakan babi yang mengusahakan 3 s.d. 24 ekor induk babi atau 3 s.d. 124 ekor babi. d) Peternakan sapi potong yang mengusahakan 2 s.d. 99 ekor sapi induk atau 2 s.d. 249 ekor sapi. e) Peternakan sapi perah yang mengusahakan 1 s.d 9 ekor sapi perah dewasa/laktasi atau 1 s.d. 19 ekor sapi perah. f) Peternakan kerbau yang mengusahakan 2 s.d. 99 ekor kerbau induk atau 2 s.d 249 ekor kerbau dan atau 1 s.d. 19 ekor kerbau perah dewasa/laktasi atau 1 s.d. 40 ekor kerbau perah. g) Peternakan kuda yang mengusahakan 2 s.d. 99 ekor kuda induk atau 2 s.d. 249 ekor kuda. h) Peternakan kambing/domba yang mengusaha-kan 6 s.d. 79 ekor induk kambing/domba. i) Peternakan itik yang mengusahakan 15 s.d. 2499 ekor induk itik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4416	ST00943.00.00			Usaha kecil	Usaha tanaman perkebunan yang diselenggarakan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tanaman perkebunan rakyat	atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakte notaris dan memenuhi kriteria tertentu.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4417	ST00944.00.00			Usaha Kehutanan	Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya. Usaha tanaman kehutanan adalah kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun,getah,dsb) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4418	SE00365.00.00			Usaha Mikro	Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1. Modal Usaha: paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
4419	ST00945.00.00			Usaha pemanfaatan wisata alam di kawasan hutan	Suatu usaha yang berkaitan dengan wisata alam di kawasan hutan, seperti: penjualan cendera mata, jasa persewaan sarana wisata, jasa pemandu wisata, jasa akomodasi/restoran/rumah makan, dan jasa lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4420	ST00946.00.00			Usaha pemungutan hasil hutan	Kegiatan untuk memungut/mengambil kayu dan hasil hutan lainnya , dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha. Jenis hasil hutan yang dipungut seperti getah, kulit kayu, buah-buahan, tumbuhan obat, gaharu, kayu bakar, kayu perkakangan, bambu, rotan, rumput, damar, jeluang, jamur, lumut, madu, dan atau mengambil bagian-bagian dari habitat hutan seperti sarang burung walet, telur burung dan sebagainya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4421	ST00947.00.00			Usaha	Kegiatan penangkapan satwa liar dan atau mengambil	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penangkapan satwa liar	bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha, misalnya penangkapan ular, penangkapan buaya, penangkapan ayam hutan.	analisis atau sesuai kebutuhan		
4422	ST00948.00.00			Usaha pengolahan hasil perikanan	Kegiatan usaha dengan melakukan proses merubah bentuk produk ikan primer menjadi bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, misalnya dengan melakukan proses penggaraman (menjadi ikan asin), pemindangan, pengasapan, pembekuan, pengalengan, dan proses pengolahan lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4423	ST00949.02.02			Usaha Perikanan	Semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	Jumlah	Usaha
4424	ST00950.00.00			Usaha Perikanan Tangkap	Usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan	1. usaha penangkapan ikan 2. usaha pengangkutan ikan 3. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan 4. usaha penangkapan ikan terpadu	Jumlah	Usaha
4425	ST00951.01.00			Usaha Pertanian	Unit ekonomi dari produksi pertanian di bawah manajemen tunggal yang terdiri dari semua ternak peliharaan dan semua tanah yang gunakan seluruhnya atau sebagian untuk tujuan produksi pertanian, tanpa memperhatikan hak milik (title), bentuk hukum atau ukuran. Manajemen tunggal dapat dilakukan oleh individu atau rumah tangga, bersama dua atau lebih individu atau rumah tangga, oleh klan atau suku, atau oleh orang yuridis seperti korporasi, koperasi atau	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lembaga pemerintah. Tanah usaha pertanian dapat terdiri dari satu atau lebih ladang, yang terletak di satu atau lebih banyak area yang terpisah atau dalam satu atau lebih divisi teritorial atau administratif, asalkan ladang berbagi sarana produksi yang sama, seperti tenaga kerja, bangunan pertanian, mesin atau hewan pekerja (draught animals).			
4426	ST00951.01.00			Usaha Pertanian	Unit ekonomi dari produksi pertanian di bawah manajemen tunggal yang terdiri dari semua ternak peliharaan dan semua tanah yang gunakan seluruhnya atau sebagian untuk tujuan produksi pertanian, tanpa memperhatikan hak milik (title), bentuk hukum atau ukuran. Manajemen tunggal dapat dilakukan oleh individu atau rumah tangga, bersama dua atau lebih individu atau rumah tangga, oleh klan atau suku, atau oleh orang yuridis seperti korporasi, koperasi atau lembaga pemerintah. Tanah usaha pertanian dapat terdiri dari satu atau lebih ladang, yang terletak di satu atau lebih banyak area yang terpisah atau dalam satu atau lebih divisi teritorial atau administratif, asalkan ladang berbagi sarana produksi yang sama, seperti tenaga kerja, bangunan pertanian, mesin atau hewan pekerja (draught animals).	1. Sektor Rumah Tangga 2. Sektor Non Rumah tangga	Jumlah	Usaha
4427	ST00951.02.00			Usaha Pertanian	Kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilproduksi dijual/ditukar atas risiko usaha(bukan buruh tani atau pekerja keharga)	1. Rumah Tangga 2. Kelompok (KRT) 3. Perusahan	Jumlah	Usaha
4428	ST00951.01.00			Usaha pertanian	Unit ekonomi dari produksi pertanian di bawah manajemen tunggal yang terdiri dari semua ternak peliharaan dan semua tanah yang gunakan seluruhnya atau sebagian untuk tujuan produksi pertanian, tanpa memperhatikan hak milik (title), bentuk hukum atau	1. Sektor rumah tangga 2. sektor nonrumah tangga	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ukuran. Manajemen tunggal dapat dilakukan oleh individu atau rumah tangga, bersama dua atau lebih individu atau rumah tangga, oleh klan atau suku, atau oleh orang yuridis seperti korporasi, koperasi atau lembaga pemerintah. Tanah usaha pertanian dapat terdiri dari satu atau lebih ladang, yang terletak di satu atau lebih banyak area yang terpisah atau dalam satu atau lebih divisi teritorial atau administratif, asalkan ladang berbagi sarana produksi yang sama, seperti tenaga kerja, bangunan pertanian, mesin atau hewan pekerja (draught animals).			
4429	ST009S1.02.00			Usaha pertanian	Kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha(bukan buruh tani atau pekerja keharga)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4430	ST009S2.00.00			Usaha pertanian akuakultur	unit ekonomi dari produksi akuakultur di bawah manajemen tunggal, terdiri dari semua fasilitas akuakultur tanpa memperhatikan titel, bentuk hukum, atau ukuran. Manajemen tunggal dapat dilakukan oleh individu atau rumah tangga, bersama oleh dua atau lebih individu atau rumah tangga, oleh klan atau suku, atau oleh orang yuridis seperti perusahaan, koperasi atau lembaga pemerintah. Fasilitas usaha pertanian akuakultur terletak di satu atau lebih daerah yang terpisah atau di satu atau lebih divisi teritorial atau administratif, menyediakan pembagian fasilitas sarana produksi yang sama, seperti tenaga kerja, bangunan dan mesin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4431	ST009S3.00.00			Usaha pertanian di sektor non-rumah tangga	Usaha pertanian yang berada di sektor selain sektor rumah tangga, seperti perusahaan dan koperasi (paragraf 8.1.8).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Usaha pertanian non-rumah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								tangga
4432	ST00954.00.00			Usaha pertanian di sektor rumah tangga	Usaha pertanian yang dioperasikan oleh anggota rumah tangga (paragraf 8.1.7).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Usaha pertanian rumah tangga
4433	ST00955.00.00			Usaha pertanian pada sektor rumah tangga	Usaha usaha yang dioperasikan oleh anggota rumah tangga. Biasanya hanya ada satu usaha pada satu rumah tangga (rumah tangga dengan satu usaha) tetapi terdapat pula rumah tangga yang memiliki dua atau lebih usaha (rumah tangga dengan banyak usaha). Sebuah usaha juga dapat berupa rekanan kerja yang terdiri dari dua atau lebih rumah tangga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Usaha pertanian rumah tangga
4434	ST00957.00.00			Usaha Pertanian Perorangan	Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Usaha
4435	ST00958.00.00			Usaha pertanian rakyat	Usaha pertanian yang dieleng garakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perorangan yang tidak berakte notaris (lihat di masing-masing subsektor)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4436	ST00959.00.00			Usaha pertanian Rakyat	Usaha pertanian yang dieleng garakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perorangan yang tidak berakte notaris (lihat di masing-masing subsektor)	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Kehutanan		
4437	ST00959.00.00			Usaha pertanian sektor nonrumah tangga	Usaha pertanian selain yang termasuk dalam sektor rumah tangga. Perusahaan dan korporasi dan koperasi dijelaskan dalam konteks hukum dan cukai nasional. Koperasi melingkupi beberapa jenis organisasi dimana prinsip-prinsip kepemilikan individual, kepemilikan gabungan, atau penyewaan dikombinasikan dalam berbagai taraf yang berbeda. Sektor nonrumah tangga lainnya termasuk pula suku, marga, sekolah swasta, dan institusi agama. Usaha pertanian pemerintah adalah entitas produksi pertanian yang dioperasikan oleh pemerintah daerah atau pusat baik secara langsung ataupun melalui badan khusus.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Usaha pertanian non-rumah tangga
4438	ST00960.00.00			Usaha peternakan/perunggasan	Kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha yang meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan.	Jenis Ternak : 1.Kerbau 2. Kuda 3. Sapi Potong 4. Sapi Perah 5. Kambing 6. Domba 7. Babi 8. Kelinci 9. Ayam Ras Pedaging 10. Ayam Ras Petelur 11. Ayam Buras/Kampung/Lokal 12. Itik 13. Itik Manila 14. Ternak Lain	Jumlah	Unit Usaha
4439	SE00366.00.00			Usaha rumah tangga	unit usaha yang dimiliki dan dikuasai maupun yang hanya dikuasai oleh kepala dan atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					anggota rumah tangga, dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum (unincorporated enterprise) dan tidak mempunyai catatan keuangan yang telah dipisahkan dari keuangan rumah tangga (non-quasi corporation), unit usaha rumah tangga mencakup unit usaha yang terletak: a. di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal atau usaha rumahan, seperti warung kelontong, industri kerajinan, tukang jahit, dan bengkel sepeda. b. di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tak tetap/sementara (usaha kaki lima), seperti pedagang pecel lele, tukang cukur, dan tukang tempa/pandai besi. c. di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan tidak menggunakan bangunan (usaha keliling), seperti tukang gali pasir/kapur/batu, tukang giling padi keliling, tukang borong bangunan pemangan, pedagang asongan, dan tukang sol sepatu keliling.	kebutuhan		
4440	ST009961.00.00			Usaha rumah tangga pertanian	Usaha pertanian yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga pertanian	Jenis usaha menurut Subsektor : 1. Usaha rumah tangga tanaman pangan 2. Usaha rumah tangga hortikultura 3. Usaha rumah tangga perkebunan 4. Usaha rumah tangga peternakan 5. Usaha rumah tangga perikanan	Jumlah	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						6. Usaha rumah tangga kehutanan		
4441	ST00962.00.00			Usaha rumah tangga pertanian tanaman pangan	Usaha tanaman pangan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga pertanian tanaman pangan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil pertanian tanaman pangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4442	ST00963.00.00			Usaha rumahtangga perikanan	Usaha perikanan tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga perikanan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil perikanan rakyat.	Rumah tangga usaha budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar, Rumah tangga usaha penangkapan ikan di alut dan perairan umum daratan	Jumlah	Rumah tangga
4443	ST00964.00.00			Usaha rumahtangga perkebunan rakyat	Usaha tanaman perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga perkebunan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil tanaman perkebunan rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4444	ST00965.00.00			Usaha rumahtangga peternakan rakyat	Usaha peternakan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumah tangga peternakan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil peternakan rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit usaha
4445	ST00966.00.00			Usaha tanaman hortikultura	Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit; Persen
4446	ST00967.00.00			Usaha tanaman kehutanan	Kegiatan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dan sebagainya) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4447	ST00968.00.00			Usaha	Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Unit; Persen

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tanaman pangan	tanaman pangan (padi dan palawija) dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, ganyong	analisis atau sesuai kebutuhan		
4448	ST00969.00.00			Usaha tanaman perkebunan	Kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4449	SP00354.00.00			Usaha Tanaman Tanaman Pangan	Kegiatan yang menghasilkan produk pertanian berupa komoditas padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija, baik hasil produksi tersebut dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga) maupun untuk konsumsi sendiri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
4450	ST00970.00.00			Usaha Tanaman Tanaman Pangan	Kegiatan yang menghasilkan produk pertanian berupa komoditas padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija, baik hasil produksi tersebut dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga) maupun untuk konsumsi sendiri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Usaha
4451	ST00971.00.00			Usaha Tani	Keluarga yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk	1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Jumlah	Usaha

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.			
4452	SE00367.00.00			Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan	Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/ setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifat lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/maklun dan pekerjaan perakitan (assembling)	International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC), yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015	Jumlah	Unit, Usaha/Perusahaan
4453	SE00368.00.00			Usaha/perusahaan (Enterprise)	Unit institusi yang melakukan aktivitas produksi atau mengbasilkan barang dan/atau jasa. Enterprise memiliki tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan terutama berkenaan dengan alokasi sumber daya. Lihat SDS untuk Unit Institusi.	Klasifikasi berdasarkan Sektor institusi: 1. korporasi 2. rumah tangga 3. pemerintah 4. LNPRT Klasifikasi menurut status globalisasi [1] Semua residen (domestik/ non-MNE) [2] multinasional (MNE) Klasifikasi menurut Kepemilikan/ kontrol 1. Publik/ pemerintah 2. Swasta nasional (domestik) 3. Swasta asing	Jumlah	unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4454	SD01282.00.00			Usia Kawin Pertama	Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun
4455	SP00355.00.01			Usia sekolah	Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar	1. 7-12 2. 13-15 3. 16-18	Usia	Tahun
4456	SP00355.00.02			Usia sekolah	Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Tahun
4457	SD01283.00.01			Usia Subur	Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4458	SD01283.00.02			Usia Subur	Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4459	SP00356.00.01		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Usia Subur	Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4460	SE00369.00.00			Utang Bank	hutang perusahaan pada bank yang jatuh temponya lebih dari satu tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4461	SE00371.00.00			Utang bank jangka panjang	pinjaman yang diperoleh pihak perusahaan dari bank berdasarkan permohonan perusahaan tersebut. Pinjaman bank dalam kategori ini biasanya mempunyai jangka lebih dari satu tahun dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					digunakan untuk kredit investasiperusahaan. Rincian ini terdiri darinilai hutang jangka panjang setelahdikurangi pokok cicilan hutang yang sudah dibayar atau jatuh tempodalam waktu satu tahun pada periode yang sama.			
4462	SE00372.00.00			Utang jangka panjang lainnya	kewajiban jangka panjang selain yang telah disebutkan sebelumnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4463	SE00373.00.00			Utang lain-lain	saldo rekening kewajiban jangka pendek lainnya lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke kelompok rincian utang yang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4464	SE00374.00.00			Utang obligasi	pinjaman yang timbul sehubungan dengan dana yang telah didapatkan perusahaan melalui pengeluaran surat-surat obligasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4465	SE00375.00.00			Utang Pajak	Pajak yang harus dibayar perusahaan termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4466	SE00376.00.00			Utang Usaha	Utang yang timbul karena kegiatan utama perusahaan, seperti hutang dagang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
4467	SE00377.00.00			Utilisasi	Mengukur sejauh mana perusahaan industri memanfaatkan kapasitas produksi (output potensial yang dapat diproduksi), membagi output aktual dengan output potensial kita dapatkan pemanfaatan kapasitas	1. Output Produksi 2. Kapasitas Produksi	Persentase	Nilai
4468	ST00972.00.00			Varietas (untuk perikanan)	Bagian dari suatu spesies yang ditandai oleh bentuk pertumbuhan dan sifat lainnya yang dapat dibedakan dari golongan lainnya dalam spesies yang sama, mempunyai bahan keturunan untuk kelangsungan varietas yang bersangkutan, disertai penjelasan mengenai silsilah dari bahan asal, cara mendapatkan dan metode pemuliaannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Varietas

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4469	ST00973.00.00			Varietas modern	Produk pembiakan tanaman dengan sistem formal oleh pembiak tanaman profesional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4470	ST00974.00.00			Varietas petani, dikenal juga sebagai varietas lokal (landraces) atau tradisional	produk pembiakan atau seleksi yang dilakukan oleh petani, baik dengan sengaja atau tidak, secara berkelanjutan selama beberapa generasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4471	ST00975.00.00			Varietas unggul	Varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Varietas
4472	SE00378.00.00			Volume Ekspor Lintas Batas	Volume perdagangan/ekspor oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke negara tetangga yang berbatasan langsung	1. Ekspor Langsung 2. Ekspor Tidak Langsung	Nilai; Jumlah; Volume; Persentase	USD/Rupiah, Sesuai Curency yang digunakan; Transaksi; m3; Persen
4473	SE00379.00.00			Volume Ekspor Per Tahun	Kompilasi volume penjualan oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke negara tetangga/negara lain per tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Total Volume	USD
4474	SE00380.00.00			Volume Pekerjaan	Besaran volume yang dikerjakan berdasarkan proyek yang dikerjakan untuk masing-masing proyek	M2, M3, Meter, Kilometer, Unit dll	Jumlah	Nilai
4475	SE00381.00.00			Volume Pembelian Barang Antar Wilayah	Total volume setiap komoditas yang dibeli dari provinsi lain dengan detail informasi wilayah asal pembelian, kode komoditas, satuan, jumlah dan harga per unit	Master Komoditas PDN	Berat	Kg, Ton
4476	SE00382.00.00			Volume Penjualan Barang Antar	Total volume setiap komoditas yang dijual ke provinsi lain dengan detail informasi wilayah tujuan penjualan, kode komoditas, satuan, jumlah dan harga per unit	Master Komoditas PDN	Berat	Kg, Ton

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Wilayah				
4477	SE00383.00.00			Volume Penjualan Barang Dagangan/Hasil Produksi	Banyaknya barang dagangan atau hasil produksi (khusus ditanyakan untuk produsen) yang dijual selama satu tahun dalam satuan berat tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Berat	Kg
4478	SE00384.00.00			Volume penjualan gas	Volume gas yang disalurkan adalah seluruh volume gas yang disalurkan oleh perusahaan gas kepada pelanggan.	Jenis pelanggan	Jumlah	MMSCF
4479	SE00385.00.00			Volume produksi air bersih	Volume produksi air bersih adalah seluruh volume air bersih yang diproduksi oleh perusahaan air bersih baik yang sudah terjual atau belum terjual.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Ribu m3
4480	SD01293.00.00			Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	Rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan adalah per musim tanam (MT). Volume produksi pertanian dari produsen pangan skala kecil yang mengusahakan tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Kehutanan	Persentase	Persen
4481	SD01294.00.00			Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	Rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi pertanian dari produsen pangan skala kecil yang mengusahakan tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	1. Tanaman 2. Peternakan 3. Perikanan 4. Kehutanan	Persentase	Persen
4482	ST00977.00.00			Volume produksi	Volume produksi perusahaan budidaya ikan yang berbadan hukum mencakup semua hasil budidaya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Volume	Kg

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perusahaan budidaya ikan yang berbadan hukum	Ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan perusahaan budidaya ikan berbadan hukum.	kebutuhan		
4483	ST00978.00.00			Volume produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum	Semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami dilaut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
4484	SE00386.00.00			Volume/berat barang	Berat bersih barang (HS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Kg
4485	ST00979.00.00			Wadah budidaya	Tempat atau bangunan atau bejana yang berupa laban/perairan/kurungan/jaring/rakit/terpal yang digunakan untuk membudidayakan ikan	1.Tambak 2.Kolam Tanah/Bak 3.Karamba 4.Karamba jaring apung 5.Tali Rentang	Jumlah	Bangunan
4486	ST00980.00.00			Wadah Budidaya Ikan	Tempat atau bangunan atau bejana yang berupa laban/perairan/kurungan/jaring/rakit yang digunakan untuk membudidayakan ikan.	1.Tambak 2.Kolam Tanah/Bak 3.Karamba 4.Karamba jaring apung 5.Tali Rentang	Jumlah	Bangunan
4487	ST00981.00.01			Wadak	Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai	1. Wadak eka guna/tujuan tunggal 2. Wadak multiguna/ serba guna;	Jumlah	Wadak
4488	ST00981.00.02			Wadak	Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai	1. Wadak penampung air (storage) 2. Wadak pembelok (diversion)	Jumlah	Wadak

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						3. Waduk penahan (detention);		
4489	ST009981.00.03			Waduk	Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai	1. Waduk untuk dilewati air (overflow) 2. Waduk untuk menahan air (non overflow)	Jumlah	Waduk
4490	ST009982.00.00			Wanawiyata Widyakarya	Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
4491	SD012297.00.00			Wanita Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4492	SD012298.00.00			Warga Negara Asing (WNA)	Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika asalnya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
4493	SP003357.00.00			Warga Negara Indonesia (WNI)	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
4494	SP003358.02.00			Warisan budaya	Warisan budaya yang diklasifikasikan adalah warisan budaya tangible (bended) diantaranya : cagar budaya, museum, dan tempat bersejarah lainnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lokasi
4495	SP003359.00.00			Warung/kedai makanan minuman	Usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Unit

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.			
4496	ST00983.00.00			Wetland and inland valley bottoms	Area dataran lembah yang terkena banjir musiman yang digunakan untuk bercocok tanam ketika ditutupi air. Fasilitas pengendali air, seperti kanal, mungkin dibangun untuk membantu pertumbuhan tanaman, kasus ini termasuk dalam kategori irigasi terkendali sebagian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4497	SE00387.00.00			Wilayah Keanggotaan Koperasi	Wilayah keanggotaan yaitu wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota, wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota (provinsi), wilayah keanggotaan lintas provinsi (nasional).	1. Dalam Kabupaten/Kota 2. Dalam Provinsi 3. Nasional	Jumlah	Wilayah Keanggotaan
4498	SE00388.00.00			Wilayah perdagangan	tempat dimana pembelian dan penjualan barang dagangan itu dilakukan apakah dalam satu kabupaten/kota, kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah
4499	SD01308.00.00			Wilayah Pesisir	Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas	Hektar (Ha)
4500	SD01310.00.00			Wilayah Sungai	Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
4501	SD01311.00.00			Wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	Wilayah Sungai yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah

www.peraturan.go.id

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tangkapan sungai dan danau				
1502	SP00360.00.00			Wilayah tempat tinggal	satuan wilayah yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang pernah dikunjungi oleh responden untuk memperoleh pelayanan publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	wilayah	wilayah
1503	ST00984.00.00			Wujud Produksi Peternakan	Wujud produksi peternakan: ternak potong, bibit ternak, telur, air susu segar, bulu, tanduk, tenaga ternak dan pupuk.	Klasifikasi produk peternakan berdasarkan jenis ternaknya	jumlah	ekor, butir, kg, liter
1504	SD01317.00.00			Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
1505	SE00389.00.00			Zonasi	pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas area secara ekonomi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

MARGO YUWONO

www.peraturan.go.id